

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial
Volume 13 No 1 Maret 2014
ISSN 1412 - 6451

Daftar Isi

Editorial

1. Upaya Mengurangi Kerawanan Pangan Petani Kecil Melalui Lumbung Pangan Rumah Tangga dan Kelompok
An Effort to Reduce Small Farmers Food Insecurity through Family and Group Granary
(Akhmat Yamin, Sunarru Samsi Hariadi dan Partini) 1 - 11
2. Pelestarian Tradisi dan Budaya *Pela Gandong* bagi Pencegahan Konflik Sosial di Kota Ambon
Preservation of Pela Gandong Tradition and Culture for Social Conflict Prevention in Ambon City
(C. Elly Kumari Tjahya Putri) 12 - 28
3. Konflik Sosial sebagai Implikasi Kerenggangan Hubungan Sosial dalam Masyarakat
Social Conflict as Social Relation Gap Implication in Community
(Soetji Andari) 29 - 39
4. Efektivitas Dimensi Individu, Kelembagaan, dan Lingkungan dalam Pemberdayaan Masyarakat Petambak melalui Implementasi Inovasi Teknologi
The Effectivity of Individual, Institutional, and Environmental Demensions on Community through Implementation of Technological Inovation
(Mira) 40 - 52
5. Konstruksi Maskulinitas Global pada Majalah Pria di Indonesia dalam Persepsi Pria Metroseksual (Studi Kasus di Kota Medan)
Global Masculinity Construction on Men's Magazine In Indonesia in the Perception of Metrosexual Men (A Case Study in the City of Medan)
(Harmona Daulay) 53 - 68
6. Kemiskinan dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
Poverty and Children who Need Special Protection
(Anwar Sitepu) 69 - 82
7. Pengaruh Dukungan Sosial terhadap Kondisi Kecemasan dalam Menghadapi Pensiun (*Post Power Syndrom*)
The Enfluence of Social Support on Anxiety Condition of Having Retirement (Post Power Syndrome)
(Ikawati dan Tri Gutomo) 83 - 98

8. Kualitas Sumber Daya Nelayan Tradisional di Desa Tunggulsari Kabupaten Rembang 99 - 107
Fishermen Human Quality in Tunggulsari Village Rembang Regency
(Andayani Listyawati)

Editorial

Petani, merupakan entitas profesi yang tidak habis-habisnya dibahas dalam diskursus peningkatan taraf kehidupan, Akhmat Yamin, dkk. mengungkap tentang upaya petani di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul dalam mengantisipasi kerawanan pangan melalui pembentukan lumbung pangan keluarga dan kelompok. C. Elly Kumari Tjahya Putri, dari aspek lain mengupas tentang pelestarian tradisi dan budaya *Pela Gandong* dalam mencegah konflik sosial di Kota Ambon, sementara Soetji Andari memandang bahwa konflik sosial merupakan komplikasi dari kesejangan relasi sosial di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Efektivitas Dimensi Individu, Kelembagaan, dan Lingkungan dalam Pemberdayaan Masyarakat Petambak melalui Implementasi Inovasi Teknologi di tiga Desa Randusanga, Kaliwlingi, dan Grinting Kabupaten Brebes. Gender, menjadi perhatian tersendiri Mira. Sementara jauh di Ibukota Sumatera Utara, Harmona Daulay membahas tentang Konstruksi Maskulinitas Global pada Majalah Pria di Indonesia dalam Persepsi Pria Metroseksual (Studi Kasus di Kota Medan). Dari aspek yang berbeda, Kemiskinan dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, mendapat sorotan tersendiri melalui tulisan Anwar Sitepu, yang mengupas kondisi sosial anak di lima rumah perlindungan sosial anak (RSPA) di Indonesia. Ikawati dan Tri Gutomo, mengungkap kehidupan lanjut usia dalam tulisan berjudul Pengaruh Dukungan Sosial terhadap Kondisi Kecemasan dalam Menghadapi Pensiun (*Post Power Syndrom*). Beralih ke kawasan kehidupan pantai dan laut, Andayani Listyawati, mengupas Kualitas Sumber Daya Nelayan Tradisional di Desa Tunggulsari Kabupaten Rembang.

dari Redaksi

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial

ISSN 1412 - 6451

Vol 13 No 1 Maret 2014

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh digandakan tanpa ijin dan biaya
Keywords are extracted from articles. Abstract may be reproduced without permission and cost

Akhmat Yamin, Sunarru Samsi Hariadi dan Partini (Badan Diklat Provinsi Sulawesi Tengah)

Upaya Mengurangi Kerawanan Pangan Petani Kecil Melalui Lumbung Pangan Rumah Tangga dan Kelompok

An Effort to Reduce Small Farmers Food Insecurity through Family and Group Granary

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 13 No 1 Maret 2014, hal 1 - 11

Bantul is one of the regency that has sufficient food availability. However, the government has been prioritizing the handling of food insecurity, because not all rural areas have food surplus. There are at least 10 villages in chronic food insecurity and 5 villages in transient food insecurity. Handling food insecurity practically is not only done by the government, but the public is also able to play a role in terms of food insecurity. Small farmer groups are only harvest once a year with a narrow land turned out to have the attention in terms of food insecurity. Since 2007, small farmers in Tangkulan Sub Village, Sumbermulyo Village, Bambanglipuro District, Bantul Regency, on their own initiation, form a group of granary named Ngudi Rahayu. This study aims to determine an efforts to reduce food insecurity, through food reserves at household level and a group of small farmers, and know the benefits adaptation and barns. This research uses a qualitative approach with observation and interviews with granary group, Ngudi Rahayu, as data method gathering. The result shows that the effort made in reducing food insecurity is increasing the stock of food in the granary in sub-village level, develop socialization of membership and rice seed production. Small farmers have sufficient food availability with food reserves in group, and able to adapt in the group, group benefit, and increase revenue by storing grain in group food reserve, and feel more satisfied (quiet).

Keywords: Food insecurity-Small Farmer-Granary

Bantul adalah salah satu Kabupaten yang mempunyai ketersediaan pangan yang cukup. Akan tetapi pemerintah masih memprioritaskan penanganan kerawanan pangan, karena tidak semua wilayah di perdesaan memiliki surplus pangan. Sedikitnya terdapat 10 desa yang termasuk dalam desa rawan pangan kronis dan 5 desa rawan pangan transien. Penanganan rawan pangan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi masyarakat juga mampu berperan dalam hal kerawanan pangan. Kelompok tani kecil yang hanya panen satu kali dalam setahun dengan lahan yang sempit ternyata mempunyai atensi dalam hal kerawanan pangan. Sejak tahun 2007 petani kecil dusun Tangkulan Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul dengan inisiatif sendiri

bisa membentuk kelompok lumbung pangan yang diberi nama kelompok lumbung Ngudi Rahayu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya mengurangi kerawanan pangan, mengidentifikasi cadangan pangan di tingkat rumah tangga dan kelompok petani kecil, mengetahui adaptasi dan manfaat lumbung kelompok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi dan wawancara terhadap anggota kelompok lumbung Ngudi Rahayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam mengurangi kerawanan pangan adalah meningkatkan stok gabah di lumbung untuk mengatasi rawan pangan di tingkat dusun, sosialisasi pengembangan anggota dan merencanakan produksi benih padi, petani kecil memiliki cukup ketersediaan pangan dengan adanya cadangan pangan di kelompok, mampu beradaptasi dalam kelompok, merasakan manfaat berkelompok, meningkatkan pendapatan dengan menyimpan gabah di kelompok, dan merasa lebih *marem* (tenang) mempunyai cadangan pangan di kelompok.

Kata Kunci: Kerawanan Pangan - Petani Kecil - Lumbung Pangan

C. Elly Kumari Tjahya Putri (B2P3KS Yogyakarta)

Upaya Pelestarian Tradisi dan Budaya *Pela Gandong* bagi Pencegahan Konflik Sosial di Kota Ambon

Preservation of Pela Gandong Tradition and Culture for Social Conflict Prevention in Ambon City

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 13 No 1 Maret 2014, hal 12 - 28

Social conflicts and collective violence interethnic rife in various regions in Indonesia, including Ambon city. Considering the existence of local wisdom called pela gandong (norms or values of a tradition that upholds the values of social solidarity), it was such an irony that Ambon city residents involved in violence ang amok. This situation call for an examination of the causes of such a social conflict. Social conflict caused many casualties. In order to uncover the role of pela gandong in fostering social soldarity attitudes among Ambon city residents post conflict, a research on "Preservation of Pela Gandong Tradition and Culture for Social Conflict Prevention in Ambon City" had been conducted applying survey and case methods. This study led to the founding that the cause of social conflict in Ambon city is due to increasing migration flows which impacting the increasing number of unemployment in the city of Ambon. Migrant or immigrants can not readily adjust to the culture of the natives which in turn cultivate an attitude of mutual suspicion between them. Along with modernization, decreasing authority of social institutions accompanied by increasing waning of traditional values (pela gandong) primarily among young people make people easily negatively provoked by various parties. But post-conflict there occurs associative, acculturation, accomodation, assimilation processes in public life as can be seen from the high attitude of social solidarity posed. For the prevention of social conflicts in the future it is recomended to develop social capital and to strengthen social insitutions to preserve traditional institutions and also to held dialogues in both horizontal and vertical dimension.

Keywords: Preservation- Tradition and Culture-Social Conflict-Prevention

Konflik sosial antar etnis dan kekerasan kolektif di berbagai daerah di Indonesia. Terbiasanya masyarakat dengan perilaku kekerasan dan amuk massa, memudarnya nilai-nilai sosial dan melemahnya pranata sosial. memicu disintegrasi Hal ini menuntut suatu kajian penyebab terjadinya konflik sosial di berbagai daerah, seperti halnya di Kota Ambon. Konflik sosial menimbulkan banyak korban sangatlah ironis terjadi di kalangan masyarakat Kota Ambon yang memiliki nilai kearifan lokal *pela gandong*, suatu norma atau tradisi dan budaya yang menjunjung tinggi nilai kesetiakawanan sosial. Agar mendapatkan informasi mengenai seberapa besar peran nilai kearifan lokal dalam menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial warga Kota Ambon pasca konflik sosial, dilakukan penelitian mengenai "Pelestarian tradisi dan budaya *pela gandong* bagi pencegahan konflik sosial di Kota Ambon". Kajian menggunakan metode survey dan kasus. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan penyebab terjadinya konflik sosial di Kota Ambon, karena makin meningkatnya arus migrasi, berdampak jumlah pengangguran meningkat di Kota Ambon, juga lambannya para migran atau pendatang menyesuaikan dengan budaya penduduk asli, sehingga menumbuhkan sikap saling curiga antara penduduk asli dan para migran Seiring dengan modernisasi, makin menurunnya kewibawaan pranata sosial. serta makin memudarnya nilai-nilai tradisional "*pela gandong*" utamanya dikalangan generasi muda, nilai tradisi tersebut menjunjung tinggi, perilaku dan sikap kerukunan kesetiakawanan sosial kehidupan bermasyarakat sehingga masyarakat mudah terprovokasi oleh berbagai pihak. Tetapi pasca konflik, terjadi proses asosiatif, akulturasi, akomodasi, asimilasi, dalam kehidupan masyarakat, tampak dari masih tingginya sikap kesetiakawanan sosial. Rekomendasi yang diajukan guna pencegahan konflik sosial mengembangkan modal sosial (*social capital*) dan memperkuat pranata sosial, untuk itu perlu dilestarikan lembaga adat, juga dilaksanakan dialog baik secara horisontal maupun vertikal.

Kata Kunci: Pelestarian- Tradisi dan Budaya-Pencegahan-Konflik Sosial

Soetji Andari (B2P3KS Yogyakarta)

Upaya Konflik Sosial sebagai Implikasi Kerenggangan Hubungan Sosial dalam Masyarakat

Social Conflict as Social Relation Gap Implication in Community

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 13 No 1 Maret 2014, hal 29 - 39

Conflict is a situation of row or disharmony between the parties that will and are entering into a relationship or partnership. Various vulnerabilty and social conflict that occurred in Palu, Central Sulawesi, have a lot of social issues, such as Tiaka case, a conflict that happens between two groups of residents. Conflict in Palu district located at Tawanjuka District, which seen by many people as a conflict among intergroups in Nunu Village, West Palu Underdistrict, Palu Municipality, who had been in conflict with the residents in Tawanjuka Village, South Palu district. The conflict is triggered by several old cases, such as violence from other group and their close relative house had been outraged by other group. The probelm is that the next generation revenge what other group did to them respectively and had never been overcome. To know the causal factors, the research is done through qualitative-descriptive approach, and data gathering through in-depth interview wtih informants commited in the conflict. Still, data gathering are enriched through observation and documentary analysis.

Keywords: Conflict-Implications-Gap-Social Relationship

Konflik adalah situasi adanya pertentangan atau ketidakserasian antara pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan atau kerjasama. Berbagai kerawanan dan konflik sosial yang terjadi di Kota Palu Sulawesi Tengah memiliki banyak persoalan sosial seperti kasus Tiaka, konflik antarwarga. Konflik yang terjadi di Palu terjadi di kecamatan Tawanjuka yang di sinyalir oleh banyak kalangan merupakan konflik bernuansa antarkelompok warga di Kelurahan Nunu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, yang selama ini terlibat konflik dengan warga di Kelurahan Tawanjuka, Kecamatan Palu Selatan. Pemicu konflik berasal dari berbagai kasus lama yang tidak pernah ada penyelesaiannya, seperti kerabat pernah mengalami kekerasan dari kelompok lain, atau rumah kerabat di rusak, dan pemuda ingin melakukan balas dendam kejadian lampau yang belum terselesaikan. Untuk mengetahui berbagai faktor penyebab dan cara penyelesaian konflik sosial yang terjadi di Kota Palu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif-kualitatif, pengumpulan data utama melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan terkait konflik sosial, pengayaan data melalui observasi dan penelusuran data dokumen.

Kata kunci: Konflik–Implikasi–Kerenggangan–Hubungan Masyarakat

Mira (Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan)
Efektivitas Dimensi Individu, Kelembagaan, dan Lingkungan dalam Pemberdayaan Masyarakat Petambak melalui Implementasi Inovasi Teknologi
The Effectivity of Individual, Institutional, and Environmental Demensions on Community through Implementation of Technological Inovation
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 13 No 1 Maret 2014, hal 40 - 52

The purpose of this study is to analys the factors that influence effectiveness of community empowerment program. The study was conducted in 2012-2013, in three villages of Brebes Regency (Randusanga, Grinting, and Kaliwlingi). The study uses principal component analysis. Screen plot analysis indicates tenth elements used are the most decisive factor in the effectiveness of community empowerment. It is indicated on the graph that decreases sharply on the element 1 to element 2, and very sharply decreases on element 2 to element 3, and slightly sloping from the element 3 to element 10. The ten elements when sorted by priority are the ability of individual farmers, economic conditions, ponds physical condition, Klinik Mina Bisnis institutional leadership, technology used in farming, the role of farmers, relationships with target groups, systems and institutional structures, motivation, social and cultural. Communalities value analysis indicates all factors to assess the effectiveness of community empowerment has a strong relationship with the model is formed, because the value of all the communalities elements is above 50persen. The greatest communalities value is the ability of individual farmers (0.868), indicating 86.8 persen variance of the ability of individual variables can be explained by factors formed. Individual ability of marine and coastal community in Brebes Regency in accepting innovation from the Ministry of Marine and Fisheries is very high, this indicates target group easily adopt any technological innovation introduced by The Ministry of Marine and Fisheries. The smallest communalities value is sociocultural (0.622), it means social and cultural element is less supportive for community empowerment. Farmers in the study area are individualistic, every problem is solved individually.

Keywords: Effectiveness, individual, environement, farmers

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis. Penelitian ini dilakukan di tiga desa (Kabupaten Brebes), yaitu Randusanga, Kaliwlingi, dan Grinting, pada tahun 2012 sampai tahun 2013. Data dikumpulkan secara *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah komponen utama (merupakan salah satu teknik statistika untuk aplikasi dalam ilmu sosial). Hasil analisis gambar screen plot mengindikasikan kesepuluh unsur yang dimasukkan memang paling menentukan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemberdayaan masyarakat petambak. Hal itu ditunjukkan dengan adanya grafik yang menurun agak tajam dari unsur 1 ke unsur 2, dan grafik yang menurun sangat tajam dari unsur 2 ke unsur 3, dan agak landai dari unsur 3 ke unsur 10. Kesepuluh unsur tersebut jika diurut berdasarkan kepentingannya adalah kemampuan individu petambak, kondisi ekonomi, kondisi fisik tambak, kepemimpinan kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis, teknologi yang digunakan dalam budidaya, peran serta petambak, hubungan petambak dengan kelembagaan klinik Iptek Mina Bisnis, dan sistem dan struktur kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis, motivasi kerja, dan unsur sosial budaya masyarakat petambak. Hasil analisis nilai *communalities* mengindikasikan semua faktor yang dimasukkan untuk menilai efektivitas pemberdayaan masyarakat memiliki hubungan yang kuat dengan model yang terbentuk, karena nilai *communalities* semua unsur di atas 50 persen. Nilai *communalities* unsur yang terbesar adalah unsur kemampuan individu petambak (0,868), hal ini mengindikasikan 86,8 persen varians dari variabel kemampuan individu petambak dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Kemampuan individu dari masyarakat kelautan dan perikanan di Brebes dalam menerima inovasi dari Kementrian Kelautan dan Perikanan cukup besar, terbukti kelompok sasaran dengan mudah mengadopsi setiap inovasi teknologi kelautan dan perikanan yang diintroduksi. Nilai *communalities* unsur yang terkecil adalah unsur sosial budaya (0,622), hal ini mengindikasikan unsur sosial dan budaya kurang mendukung dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat Brebes sudah bersifat individualis, setiap permasalahan diatasi secara sendiri, apalagi mengingat peran kelompok yang hanya sebagai wahana pencairan bantuan.

Kata Kunci: efektivitas, individu, lingkungan, petambak

Harmona Daulay (Departemen Sosiologi, Fisip, Universitas Sumatera Utara, Medan)
Konstruksi Maskulinitas Global pada Majalah Pria di Indonesia dalam Persepsi Pria Metroseksual (Studi Kasus di Kota Medan)
Global Masculinity Construction on Men's Magazine In Indonesia in the Perception of Metrosexual Men (A Case Study in the City of Medan)
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 13 No 1 Maret 2014, hal 53 - 68

This research sees problems of global masculinity construction that appears in men's magazine in Indonesia. Be conscious or not globalization era gives a strong effect upon Indonesian social order. This research started from researcher's concern toward masculinity studies from masculine perspective itself in Indonesia which haven't been critical detailed. The models of masculinity from masculine construction haven't been found conceptually in Indonesia. The image that appears in mass media such as printed and electronic media are still about the image of men, which attach to the values of masculinity in western world. This research is conducted on 10 metrosexual men (informants) in the

city of Medan, it uses interview technique and case study analyzes. The result of research shows the fact that metrosexual men in Medan come from upper middle class and have a lot money, so that it could support their needs of lifestyle. Metrosexual men often follow the latest fashion through global men's magazine in Indonesia or from the western world. The result of research expresses the talks on global masculinity construction, which appear in men's magazine show a very strong influence from western values. For example, from the fashion used by men to the lifestyle in western world. Most of the informants admitted the influence of global masculinity happens to Indonesian people especially to the informants in Medan. Even they don't mind with masculinity construction in many facets such as in fashion, the informants admitted that they liked suits, which are formal attire in the western world. Most of the informants don't agree to Asian style phenomenon masculinity, which appears from Korean Boy Band, according to them, Korean Boy Bands are very feminine and reduce the concept of existing Indonesia local masculinity.

Keywords: Global Masculinity-Metrosexual-Men's Magazine

Penelitian ini melihat permasalahan konstruksi maskulinitas global yang muncul di majalah pria di Indonesia. Disadari atau tidak, era globalisasi memberi pengaruh yang kuat pada tatanan sosial masyarakat Indonesia. Penelitian ini dimulai dari keprihatinan peneliti terhadap belum kritisnya kajian maskulinitas dari perspektif maskulin itu sendiri dan belum ditemukannya model maskulinitas rinci dari konstruksi maskulinitas secara konseptual di Indonesia. Gambaran yang muncul di media massa, seperti media cetak dan elektronik masih seputar gambaran pria yang lekat dengan nilai maskulinitas dari barat. Penelitian ini dilakukan terhadap 10 informan pria metroseksual di Kota Medan, menggunakan teknik wawancara dan analisis studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fakta pria metroseksual di Kota Medan, berasal dari kalangan menengah ke atas dan memiliki banyak uang, sehingga dapat menunjang kebutuhan akan gaya hidup yang mereka jalani. Pria metroseksual sering mengikuti fashion yang sedang berkembang secara global di Indonesia maupun dari Barat melalui majalah pria dewasa. Pembicaraan konstruksi maskulinitas global yang muncul di majalah pria memperlihatkan pengaruh nilai barat sangat kental. Misalnya, fashion yang digunakan oleh pria sampai pada gaya hidup yang berlaku di barat. Sebagian besar informan mengakui pengaruh maskulinitas global terjadi pada masyarakat Indonesia khususnya informan yang berada di Kota Medan. Mereka pun tidak keberatan dengan konstruksi maskulinitas pada banyak sisi, seperti contoh dalam fashion. Informan mengaku menyukai pakaian jas yang menjadi pakaian formal di barat. Sebagian besar informan tidak menyetujui maskulinitas fenomenal ala Asia yang muncul pada Boy Band ala Korea, menurut mereka maskulinitas tersebut sangat feminim dan mengurangi konsep nilai maskulin lokal Indonesia yang selama ini sudah ada.

Kata Kunci: Maskulinitas Global, Metroseksual dan Majalah Pria

Anwar Sitepu (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)

Kemiskinan dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Poverty and Children who Need Special Protection

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 13 No 1 Maret 2014, hal 69 - 82

This paper is written to analyze whether poverty is contributing to the problem of children who need special protection and how the poverty makes children suffer until the extent to require special protection. The analyzed data are cases of 25 children who have received special protection from five Children Protection House (RPSA) in Indonesia. These cases are the result of research that is conducted by Central of Research and Development of Social Welfare, Puslitbang Kesos, in 2011 to evaluate the Children's Social Protection Program through the Children Protection House (RSPA). An analysis of the poverty factor in the case of children who need special protection is very important, considering that in previous research the poverty factor have not been explored yet. While in every case of the research on those children, it indicates that poverty is the root of the problem faced by almost all children. From the case of 25 children turn out that 24 children (96%) are coming from poor family. Poverty makes children suffer-need special protection-through two patterns. First, poverty undermines the family unity, to transfer children's nurture from biological family to other party. Second, poverty makes families fail to meet the needs of children. First or second pattern leads to suffer children. Children become victims, neglected or being neglected, exploited sexually and or economically, physical violence and emotional pressure until they leave for and live in the street.

Keywords: Children-Poverty-Special Protection

Tulisan ini disusun untuk menganalisis apakah kemiskinan turut berperan dalam masalah anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bagaimana kemiskinan membuat anak menderita hingga memerlukan perlindungan khusus. Data yang dianalisis adalah kasus sebanyak 25 anak yang sudah memperoleh perlindungan khusus dari lima rumah perlindungan sosial anak (RPSA) di Indonesia. Kasus-kasus tersebut merupakan hasil penelitian Puslitbang Kesos yang dilakukan tahun 2011, dalam rangka evaluasi program perlindungan sosial anak melalui rumah perlindungan sosial anak. Analisis faktor kemiskinan pada kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus sangat penting dilakukan mengingat bahwa dalam penelitian tersebut faktor kemiskinan belum didalami, sementara apabila masing-masing kasus ditelaah tampak indikasi bahwa kemiskinan merupakan akar dari masalah yang menimpa anak. Hasil analisis menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan akar masalah yang dihadapi oleh hampir semua anak, dari kasus 25 anak ternyata 24 anak (96 persen) merupakan anak miskin. Kemiskinan membuat anak menderita-sehingga memerlukan perlindungan khusus-melalui dua pola. Pertama, kemiskinan merusak keutuhan keluarga, hingga pengasuhan anak harus beralih dari keluarga kandung ke pihak lain. Kedua, kemiskinan membuat keluarga gagal memenuhi kebutuhan anak. Baik pola pertama maupun kedua berujung pada penderitaan anak. Anak menjadi korban, terlantar atau diterlantarkan, dieksploitasi secara seksual atau secara ekonomi, kekerasan fisik/tekan emosional hingga pergi dan hidup di jalanan.

Kata kunci: Anak-kemiskinan-Perlindungan Khusus

Ikawati dan Tri Gutomo (B2P3KS Yogyakarta)

Pengaruh Dukungan Sosial terhadap Kondisi Kecemasan dalam Menghadapi Pensiun (*Post Power Syndrom*)

The Enfluence of Social Support on Anxiety Condition Of Having Retirement (Post Power Syndrome)

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 13 No 1 Maret 2014, hal 83 - 98

This research is done to know the influence of social support on anxiety condition having retirement (Post Power Syndrome). This research is a correlational study. The research location is choosen purposively as the area with highest aged prevalention (BPS, 2010). Based on that consideration, Yogyakarta Special Teritory, is choosen as research location. Research subjects are also choosen purposifely, with category that research subject are already retired from work, more than 60 years of age, men or women, still have living partner and family, and highschool educated, with retirement grant two to three million a month. Based on the consideration to the research subject, choosen 30 respondents. The objects of this research are social support and the anxiety of having retirement (Post Power Syndrome). Data gathered through guided interview and observation techniques, and analysed with regression technique. The result shows that there is enfluence of social support on anxiety condition, having retirement. The enfluence can be seen from the degree of effective contribution towards anxiety condition having retirement (Post Power Syndrome), as 72 per cent high. That means there are other variables or factors enfluence the anxiety condition, as big as 28 per cent. Other enfluencial factors can be seen from the degree of related contribution of each variable, they are an emotional support (8,881 per cent), information suppror (17,297 per cent), instrumental support (8,358 per cent), and evaluation support (73, 297 per cent). Refer to the result, it is recommended to The Ministry of Social Affairs, especially the Diractory of Aged Service, that for the sake of enhancing aged social welfare, especially for those having retired or is retired, it needs programs that can commit and empower aged through their thought, idea, and advice to prevent aged from being anxieted of having retired (Post Pwer Syndrome), or through creating new cariers to develop beneficial desire and hobby.

Keywords: Social Support-Retired-Post Power Syndrome

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dukungan sosial terhadap kondisi kecemasan dalam menghadapi pensiun (*Post Power syndrom*). Tipe penelitian bersifat korelasional studies. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive dengan alasan merupakan daerah yang jumlah lansia cukup banyak (BPS, 2010). Atas dasar tersebut ditentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Subyek penelitian juga ditentukan secara purposif, dengan pertimbangan subyek sudah pensiun, usia lebih dari 60 th, laki-laki atau perempuan, masih mempunyai pasangan hidup dan keluarga dan mempunyai pendidikan lebih dari SMA dan mempunyai tunjangan pensiun dua juta sampai dengan tiga juta rupiah perbulan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipilih 30 responden. Obyek penelitian ini adalah dukungan sosial dan kecemasan menghadapi pensiun (*Post Power Syndrom*). Teknik pengumpulan data dipergunakan pedoman wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan teknik regresi. Hasil penelitian menunjukkan, ada pengaruh dukungan sosial terhadap kondisi kecemasan, dalam menghadapi pensiun (*Post Power Syndrom*). Pengaruh tersebut dapat dilihat dalam besarnya sumbangan efektif

yaitu variabel dukungan sosial terhadap variabel kondisi kecemasan dalam menghadapi pensiun (*Post Power Syndrom*) yaitu sebesar 72 persen, artinya masih ada variabel lain atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi ada sebesar 28 persen. Pengaruh lainnya dapat dilihat dari besarnya sumbangan relatif untuk masing-masing variabel yaitu variabel dukungan emosi (8,881 persen), variabel dukungan informasi (17,464 persen), variabel dukungan instrumental (8,358 persen) dan variabel dukungan penilaian (73,297 persen). Berdasarkan hasil temuan tersebut, direkomendasikan kepada Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Pelayanan Lanjut Usia, dalam rangka kebijakan meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia terutama bagi orang yang akan atau sedang menghadapi pensiun, perlu program-program agar para lanjut usia dilibatkan atau diberdayakan melalui ide, pemikiran, nasehatnya dan program yang dapat mencegah terjadinya kecemasan dalam menghadapi pensiun (*Post Power Syndrom*) melalui pembinaan karir baru melalui pengembangan minat dan hobi yang bermanfaat.

Kata kunci: Dukungan Sosial-Pensiun-Post Power Syndrom

Andayani Listyawati (B2P3KS Yogyakarta)

Kualitas Sumber Daya Nelayan Tradisional di Desa Tunggulsari Kabupaten Rembang
Fishermen Human Quality in Tunggulsari Village Rembang Regency
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 13 No 1 Maret 2014, hal 99 - 107

Traditional fishermen are part of a society with low level of welfare. Generally, traditional fishermen exploit sea treasury with simple instruments, low capital and depending on season. The fishes they get are still oriented for daily consumption (subsistence), rather than to sell or reinvest for a bigger fishery business. The research on traditional fishermen in Tanjungsari Village is meant to describe human resources enhancement to access education and skill on oceanic and fishery resources. The approach used in this research is qualitative descriptive, data gathering are implemented through interview and documentary analysis technique, and data analysed through qualitative-descriptive technique. The result shows that human resources of traditional fishermen relatively are low. The indication can be seen from their education and skill related to fishery, that have an impact on the ability to solve their poverty and enhance their welfare. To increase their lives level, it is recommended that traditional fishermen should be given access to education, especially their skill to manage sea and fishery resources based on social value and culture of traditional fishermen community.

Keywords: Human Resources Quality-Traditional Fishermen

Nelayan tradisional merupakan bagian dari anggota masyarakat yang mempunyai tingkat kesejahteraan paling rendah. Pada umumnya nelayan tradisional memanfaatkan sumber daya kelautan dengan peralatan tangkap sederhana, modal usaha kecil, dan sangat dipengaruhi musim. Hasil tangkapan ikan masih berorientasi pada pemenuhan konsumsi sehari-hari (*subsistence*) daripada dijual dan diinvestasikan untuk pengembangan usaha. Penelitian Kualitas Sumber Daya Nelayan Tradisional di Desa Tunggulsari, Kabupaten Rembang merupakan penelitian deskriptif dengan tujuan mendeskripsikan berbagai upaya peningkatan sumber daya nelayan tradisional melalui kesempatan mengakses pendidikan

dan keterampilan mengelola sumber hayati kelautan dan perikanan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan telaah dokumen. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa sumber daya nelayan tradisional relatif rendah. Indikasi ini tampak pada rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang terkait dengan kenelayanan, sehingga berdampak pada kemampuan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kemiskinan. Dalam rangka memperbaiki taraf hidup, direkomendasikan program pemberdayaan berupa peningkatan kualitas sumber daya nelayan tradisional melalui upaya kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih layak, khususnya keterampilan mengelola sumber daya perikanan dan kelautan yang bertumpu pada keberadaan pranata sosial budaya masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional.

Kata Kunci: Kualitas Sumber Daya–Nelayan Tradisional

Upaya Mengurangi Kerawanan Pangan Petani Kecil Melalui Lumbung Pangan Rumah Tangga dan Kelompok

An Effort to Reduce Small Farmers Food Insecurity through Family and Group Granary

Akhmat Yamin, Sunarru Samsi Hariadi dan Partini

Akhmat Yamin: Badan Diklat Provinsi Sulawesi Tengah. E-mail: <yaminakhmat@yahoo.com> HP. 085292852658.

Sunarru Samsi Hariadi: Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. E-mail: <sunarru_sh@yahoo.com>.

HP. 08164895150. Partini: Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. E-mail: <partinislg@yahoo.co.id>.

HP. 08179419449. Diterima 16 Desember 2013, direvisi 16 Januari, disetujui 3 Februari 2014.

Abstract

Bantul is one of the regency that has sufficient food availability. However, the government has been prioritizing the handling of food insecurity, because not all rural areas have food surplus. There are at least 10 villages in chronic food insecurity and 5 villages in transient food insecurity. Handling food insecurity practically is not only done by the government, but the public is also able to play a role in terms of food insecurity. Small farmer groups are only harvest once a year with a narrow land turned out to have the attention in terms of food insecurity. Since 2007, small farmers in Tangkulan Sub Village, Sumbermulyo Village, Bambanglipuro District, Bantul Regency, on their own initiation, form a group of granary named Ngudi Rahayu. This study aims to determine an efforts to reduce food insecurity, through food reserves at household level and a group of small farmers, and know the benefits adaptation and barns. This research uses a qualitative approach with observation and interviews with granary group, Ngudi Rahayu, as data method gathering. The result shows that the effort made in reducing food insecurity is increasing the stock of food in the granary in sub-village level, develop socialization of membership and rice seed production. Small farmers have sufficient food availability with food reserves in group, and able to adapt in the group, group benefit, and increase revenue by storing grain in group food reserve, and feel more satisfied (quiet).

Keywords:

Food insecurity-Small Farmer-Granary

Abstrak

Bantul adalah salah satu Kabupaten yang mempunyai ketersediaan pangan yang cukup. Akan tetapi pemerintah masih memprioritaskan penanganan kerawanan pangan, karena tidak semua wilayah di perdesaan memiliki surplus pangan. Sedikitnya terdapat 10 desa yang termasuk dalam desa rawan pangan kronis dan 5 desa rawan pangan transien. Penanganan rawan pangan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi masyarakat juga mampu berperan dalam hal kerawanan pangan. Kelompok tani kecil yang hanya panen satu kali dalam setahun dengan lahan yang sempit ternyata mempunyai atensi dalam hal kerawanan pangan. Sejak tahun 2007 petani kecil dusun Tangkulan Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul dengan inisiatif sendiri bisa membentuk kelompok lumbung pangan yang diberi nama kelompok lumbung Ngudi Rahayu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya mengurangi kerawanan pangan, mengidentifikasi cadangan pangan di tingkat rumah tangga dan kelompok petani kecil, mengetahui adaptasi dan manfaat lumbung kelompok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi dan wawancara terhadap anggota kelompok lumbung Ngudi Rahayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam mengurangi kerawanan pangan adalah meningkatkan stok gabah di lumbung untuk mengatasi rawan pangan di tingkat dusun, sosialisasi pengembangan anggota dan merencanakan produksi benih padi, petani kecil memiliki cukup ketersediaan pangan dengan adanya cadangan pangan di kelompok, mampu beradaptasi dalam kelompok, merasakan manfaat berkelompok, meningkatkan pendapatan dengan menyimpan gabah di kelompok, dan merasa lebih *marem* (tenang) mempunyai cadangan pangan di kelompok.

Kata Kunci:

Kerawanan Pangan - Petani Kecil - Lumbung Pangan

A. Pendahuluan

Kerawanan pangan masih menjadi permasalahan di Indonesia, kerawanan pangan sangat berkaitan dengan kemiskinan. Perhatian untuk mengatasi kerawanan pangan juga berarti akan mengatasi kemiskinan, demikian pula sebaliknya. Sejalan dengan itu, penanganan kerawanan pangan harus menjadi fokus perhatian dalam pembangunan pertanian, karena di samping akan mengatasi kemiskinan juga sekaligus akan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Pengetahuan secara mendalam tentang karakteristik dan penyebab daerah rawan pangan serta potensi yang bisa dimanfaatkan dalam mengatasi kerawanan pangan sangat membantu dalam penyelesaian penanganan kerawanan pangan masyarakat dan rumah tangga.

Kabupaten Bantul adalah daerah yang mempunyai ketersediaan pangan yang cukup. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengungkapkan bahwa hingga akhir 2012 Bantul mengalami surplus beras. Jika dibagi dengan jumlah penduduk sesuai tingkat konsumsi masih surplus sekitar 40.000 ton (23/1/2013). Tiap tahun Bantul terus mengalami surplus beras, sisa persediaan pangan disimpan di lumbung-lumbung milik kelompok tani, sebagai cadangan pangan masyarakat setempat juga untuk suplai pangan desa lain. Melihat angka surplus beras per tahun dan mulai beralihnya pangan non-beras, pemerintah daerah menjamin bahwa persediaan pangan di Bantul akan aman hingga 10-20 tahun ke depan (Bisnis Indonesia, 2013).

Walaupun secara keseluruhan Kabupaten Bantul mengalami surplus beras dari tahun 2007 hingga tahun 2012 (BPS Bantul, 2012), pemerintah masih memprioritaskan penanganan kerawanan pangan, karena tidak semua wilayah di perdesaan memiliki surplus pangan. Tercatat terdapat 10 desa dari total sebanyak 75 desa di daerah Bantul masuk dalam kategori rawan pangan kronis. Desa rawan pangan berdasarkan pantauan dan koordinasi dari tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) selama satu tahun (Berita Satu Com, 2014). Sepuluh desa rawan pangan tersebut adalah desa Tri-

widadi dan Guwosari (Kecamatan Pajangan), Desa Trimurti (Srandakan), Desa Banguntapan, Singosaren dan Jagalan (Kecamatan Banguntapan), kemudian desa Bangunjiwo, Tirtonirmolo, Tamantirto dan Ngestiharjo (Kasihan). Selain kategori rawan pangan kronis, di Bantul juga terdapat sejumlah desa masuk dalam kategori rawan pangan transien yang disebabkan karena bencana alam, banjir, gempa bumi, kekeringan atau kejadian di luar kekuasaan manusia. Pada tahun 2011 daerah rawan pangan karena kekeringan terjadi di kelompok Tapen dan Klangon di Desa Argosari, sedangkan daerah rawan pangan akibat erupsi Gunung Merapi yakni kelompok Sukowaten, Banguntapan dan kelompok Ngudi Makmur Bangunharjo, Sewon.

Untuk menentukan desa rawan pangan didasarkan pada sejumlah aspek, yaitu aspek ketersediaan pangan yang kurang mencukupi kebutuhan, aspek pemanfaatan pangan dan aspek aksesibilitas pangan yang kurang memadai. Salah satu aspek dalam membangun ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup dan adanya sistem kelembagaan pangan di masyarakat dalam pengelolaan pangan. Cadangan pangan dapat dikelola oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Cadangan pangan yang dikelola oleh rumah tangga dan masyarakat sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan dan mengatasi kerawanan pangan di tingkat rumah tangga.

Sejalan dengan program tersebut di atas, ternyata terdapat kelompok tani kecil yang hanya panen satu kali dalam setahun dengan lahan yang sempit, tetapi mempunyai atensi dalam hal kerawanan pangan. Sejak tahun 2007, petani kecil Dusun Tangkilan, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, dengan inisiatif sendiri membentuk kelompok lumbung pangan yang diberi nama kelompok lumbung Ngudi Rahayu. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan ingin mengetahui upaya yang dilakukan petani kecil dalam mengurangi kerawanan pangan, mengidentifikasi cadangan pangan di tingkat rumah tangga dan kelompok, serta mengetahui adaptasi dan manfaat lumbung kelompok.

B. Kajian Teori

1. Kerawanan Pangan

Ketahanan Pangan Rumah Tangga sebagaimana hasil rumusan *International Congress of Nutrition* (ICN) yang diselenggarakan di Roma tahun 1992 mendefinisikan bahwa: "Ketahanan pangan rumah tangga (*household food security*) adalah kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kecukupan pangan anggotanya dari waktu ke waktu agar dapat hidup sehat dan mampu melakukan kegiatan sehari-hari". Dalam sidang *Committee on World Food Security* 1995 definisi tersebut diperluas dengan menambah persyaratan "Harus diterima oleh budaya setempat (*acceptable with given culture*)" (Rachmad, dkk., 2010).

Hal lain dinyatakan Hasan (1995) bahwa ketahanan pangan sampai pada tingkat rumah tangga antara lain tercermin oleh tersedianya pangan yang cukup dan merata pada setiap waktu dan terjangkau oleh masyarakat baik fisik maupun ekonomi serta tercapainya konsumsi pangan yang beraneka ragam, yang memenuhi syarat-syarat gizi yang diterima budaya setempat. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dinyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata, dan terjangkau. Hal itu diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2006 tentang pembentukan Dewan Ketahanan Pangan.

Masalah kerawanan pangan lebih banyak terjadi di perdesaan, sehingga perhatian terhadap lumbung pangan pedesaan dinilai strategis dalam menanggulangi kerawanan pangan. Salah satu indikator terbangunnya ketahanan pangan adalah tidak adanya indikasi kerawanan dan kasus rawan pangan. Salah satu aspek dalam pencapaian tersebut adalah ketersediaan cadangan masyarakat dan kemampuannya dalam mendayagunakan sumber pangan yang ada. Kerawanan pangan sangat lekat berkaitan dengan kemiskinan dan umumnya menjadi potret umum di sektor pertanian. Kondisi ini tentunya berkaitan dengan banyak aspek, mulai dari hulu seperti sarana dan prasarana produksi sampai hilir dalam pemasaran dan dukungan

penunjang (Rachmad, dkk., 2010).

Secara teoritis, dikenal dua bentuk ketidak-tahanan pangan (*food insecurity*) tingkat rumahtangga sebagai jenis pertama, ketidak-tahanan pangan kronis yaitu terjadi dan berlangsung secara terus menerus yang biasa disebabkan oleh rendahnya daya beli dan rendahnya kualitas sumberdaya dan sering terjadi di daerah terisolir dan gersang. Jenis kedua, ketidak-tahanan pangan akut (*transitori*) terjadi secara mendadak yang disebabkan oleh bencana alam, kegagalan produksi, dan kenaikan harga gabah yang mengakibatkan masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menjangkau pangan yang memadai (Atmojo, 1995).

2. Petani Kecil

Petani di Indonesia menurut Mahekan dalam Wahyuningsih (2003) dapat dibagi dalam tiga kelompok berdasarkan luas lahan usaha pertaniannya: Pertama, petani maju, yang memiliki luas lahan 0.5 ha atau lebih. Kedua, petani kecil/marginal dengan luas lahan rata-rata di bawah 0.5 ha. Ketiga, petani tunaluhur, yang hanya memiliki sedikit pekarangan di sekitar rumahnya yang sederhana dan kurang sehat. Tohir (1953), membagi petani Indonesia dalam empat kelompok usaha tani : 1) Buruh tani, yaitu orang yang memiliki tanah 0.1 ha, 2) Petani miskin, yaitu petani yang memiliki luas tanah 0.1–0.5 ha, 3) Petani cukupan, yaitu petani yang memiliki luas tanah 0.5–1.0 ha, (3) Petani mampu, yaitu petani yang memiliki lahan lebih dari 1.0 ha. Berdasar pendapat di atas, petani kecil atau petani miskin mempunyai lahan di bawah 0.5 ha.

Dilema ekonomi sentral yang dihadapi oleh kebanyakan rumah tangga petani adalah mereka hidup begitu dekat dengan subsistensi. Satu hal yang khas yang dilakukan oleh petani adalah berusaha menghindari kegagalan yang akan menghancurkan kehidupannya dan bukan berusaha memperoleh keuntungan besar dengan mengambil resiko. Petani itu mendahulukan selamat (*Safety-first*), enggan berisiko (*risk-averse*), dan apabila dengan memperlakukan petani sebagai bakal wiraswasta menurut pengertian Schumpeter kita mengelakkan diri dari dilemma ekstensialnya sebagai satu soal kunci (Scott, 1976).

Bagaimana perilaku dan institusi dipengaruhi oleh hubungan sosial adalah suatu pertanyaan klasik dari teori sosial. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Granovetter (1985) mengajukan konsep keterlekatan. Konsep ini digunakan untuk menjelaskan fenomena perilaku ekonomi dalam hubungan sosial. Konsep keterlekatan, menurut Granovetter, merupakan tindakan ekonomi yang disituasikan secara sosial dan melekat dalam jaringan sosial personal yang sedang berlangsung di antara para aktor. Ini tidak hanya terbatas terhadap tindakan aktor individual sendiri tetapi juga mencakup perilaku ekonomi yang lebih luas seperti penetapan harga, dan institusi-institusi ekonomi, yang semuanya terpendam dalam suatu jaringan hubungan sosial (Damsar, 1997 dan Guillen et al, 2003)

Gambaran di atas memperlihatkan bahwa persoalan ekonomi tidak hanya menyangkut ekonomi an sich tetapi berkaitan dan melekat pada institusi-institusi lain dari masyarakat seperti agama, politik dan pemerintahan, budaya dan lingkungan. Demikian pula kelompok lumbung Ngudi Rahayu tumbuh bukan hanya atas dasar pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan, tetapi di dalamnya melekat suatu kepercayaan, kekerabatan, saling menghargai, solidaritas dan kebersamaan (tanggung renteng). Hal yang mendasar dan paling penting menurut Guillen et al (2003), bahwa dalam persoalan ekonomi melekat di dalamnya terkandung pemahaman tentang kepercayaan, solidaritas, kooperasi, kekuatan, kekuasaan, kerelaan, norma dan identitas.

3. Lumbung Pangan

Secara tradisional, masyarakat telah membangun sistem cadangan pangan desa dan rumah tangga, salah satunya dalam bentuk kelembagaan lumbung pangan. Lumbung pangan telah dikenal sebagai salah satu institusi cadangan pangan di perdesaan dan membantu mengatasi kerawanan pangan masyarakat di masa *paceklik* dan saat bencana. Dengan mengecilnya bulog dalam pembentukan cadangan pangan nasional maka revitalisasi lumbung pangan masyarakat desa (LPMD) kembali dibicarakan karena dinilai merupakan suatu hal yang strategis. Pengetahuan mendalam tentang sistem kelembagaan cadangan pangan masyarakat

terutama faktor yang mempengaruhinya akan sangat berguna dalam membangun sistem kelembagaan pangan masyarakat, terutama di daerah rawan pangan dan hal ini sangat berarti dalam merumuskan kebijakan penurunan rawan pangan masyarakat (Rachmad dkk., 2010).

Kelembagaan lumbung pangan masyarakat saat ini, yang masih pada tingkatan sederhana dan berorientasi sosial, mempunyai potensi untuk dikembangkan dan direvitalisasi melalui proses pemberdayaan secara sistematis, utuh, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh unsur terkait. Upaya ini diharapkan akan mampu memberi kontribusi yang signifikan terhadap perwujudan ketahanan pangan, dan lembaga sosial ekonomi masyarakat yang mampu menjadi lembaga penggerak ekonomi perdesaan (Jayawinata, 2013).

Pemberdayaan lumbung pangan masyarakat akan berhasil apabila: Dari sisi manajemen, dana penguatan modal tersalurkan langsung kepada kelompok tani sesuai kriteria, sehingga terjadi akumulasi modal usaha kelompok (tabungan kelompok); Dari sisi teknis, terjadi peningkatan produksi dan produktivitas usaha tani dan peningkatan pendapatan anggota kelompok tani penerima bantuan; Dari sisi perubahan perilaku, yaitu dari kebiasaan bekerja sendiri menjadi bekerja berkelompok atau secara bersama menumbuhkan kelompok tani yang maju dan mandiri. Beberapa faktor lain yang diduga ikut berperan dalam eksistensi dan kesinambungan suatu lembaga adalah sumberdaya manusia, struktur dan organisasi sosial, manajemen sosial (seperti pengambilan keputusan dan akuntabilitas) gotong royong di antara anggota kelompok, kepemimpinan, keterbukaan antaranggota dalam satu lembaga serta pendampingan (Rahmad. dkk., 2010).

C. Penggunaan Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif, ditempuh dengan metode pengumpulan data secara observasi, wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, wawancara mendalam, dan menginterpretasi data yang diperoleh di lapangan (Miles dan Huberman, 1984 dan Moleong, 2007). Kegiatan penelitian yang dilaksanakan mencakup studi pustaka dan penelitian lapangan. Pertimbangan

dalam pemilihan lokasi didasarkan pada: (1) Sebagian besar anggota kelompok lumbung berlahan sempit (petani kecil). (2) Berdirinya kelompok lumbung atas inisiatif sendiri (bukan bentukan dari pemerintah).

Agar hasil penelitian bisa mewakili karakteristik populasi, pemilihan sampel berdasar *purposive sampling*. Sampel terpilih adalah ketua kelompok lumbung 2 pengurus, 1 anggota kelompok berlahan luas, 2 anggota kelompok berlahan sempit, 1 tokoh masyarakat, 1 aparat desa, 2 petani penggarap, dan 1 anggota tidak aktif. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi upaya yang dilakukan kelompok lumbung Ngudi Rahayu dalam mengurangi kerawanan pangan. Kedua, pengukuran tingkat kerawanan pangan, dilakukan berdasarkan indikator konsumsi normatif per kapita terhadap rasio ketersediaan pangan. Pada tingkat mikro rumah tangga, kerawanan pangan dapat dilihat dari kemampuannya dalam menyediakan pangan dalam jumlah yang cukup, setiap saat sesuai dengan kelayakan kebutuhan pangan dan gizi. Ketiga, penilaian adaptasi dan manfaat kelompok meliputi bentuk adaptasi anggota kelompok terhadap tujuan kelembagaan lumbung pangan dan manfaat kelompok meliputi manfaat ekonomi (peningkatan pendapatan anggota kelompok lumbung), sosial dan budaya. Indikator bentuk adaptasi berdasar pada teori Robert K. Merton meliputi konformitas, inovasi, ritualisme, retreatisme, dan rebellion, ditambah Durheim satu bentuk adaptasi, yaitu sukarela.

Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu dengan mengadakan pemeriksaan data yang diperoleh dari subjek penelitian dengan cara membandingkan data hasil wawancara dengan hasil pengamatan (metode triangulasi) sehingga dapat mempermudah penulis memperoleh kesimpulan data yang lebih konkrit dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan metode triangulasi dalam menguji keabsahan data juga dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai sumber data dengan cara *cross check* dari sumber yang satu dengan sumber yang lain, apabila dari proses tersebut ternyata datanya kurang meyakinkan, data tersebut dikeluarkan atau tidak digunakan.

D. Hasil Penelitian: Lumbung Padi Ngudi Rahayu

Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Badan Ketahanan Pangan mengembangkan lumbung pangan. Pengembangan lumbung pangan bertujuan untuk menyerap hasil panen petani pada saat musim panen sehingga akan menstabilkan harga di tingkat petani. Melalui institusi lumbung pangan akan terdapat cadangan pangan masyarakat sehingga akan dapat mengantisipasi ancaman gagal panen akibat bencana alam seperti serangan hama dan penyakit, banjir, dan kekeringan. Tujuan lainnya adalah meningkatkan pendapatan anggota kelompok lumbung pangan, serta mengembangkan fungsi lumbung yaitu mendorong dan meningkatkan usaha produktif pengolahan hasil dan sarana pengolahan hasil.

Petani kecil di dusun Tangkulan, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, yang mempunyai lahan garapan seluas 200 m² hingga 900 m² mempunyai produksi rata-rata 140-630 kg GKP (Gabah Kering Panen) atau setara dengan 95.2-428 kg beras. Kebutuhan akan konsumsi beras sebanyak 30 kg per kapita per musim. Apabila dalam satu keluarga berjumlah empat orang, kebutuhan akan beras sebanyak 120 kg per musim tanam. Hal ini berarti bahwa untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, petani harus menanam padi dengan luas garapan minimal 300 m² per musim. Padahal, petani tidak selalu menanam padi sebanyak tiga kali dalam setahun, tergantung letak geografisnya, belum lagi sebagian produksinya dijual untuk modal usaha tani pada musim berikutnya. Petani yang mempunyai sedikit kelebihan produksi gabah (luas garapan 300 m² sampai 900 m²) biasanya digunakan untuk sosialisasi (menyumbang) pada sanak saudara dan tetangga yang kedu-kaaan dan punya hajat. Dalam kondisi tersebut kecil kemungkinan petani menyimpan gabahnya di rumah atau di lumbung kelompok.

Bagi petani yang mempunyai luas garapan di atas 900 m² sampai 5000 m², sudah cenderung beroientasi agribisnis tetapi masih mempunyai ikatan moral petani. Kelebihan produksi disimpan di gudang rumah dan dijual dalam bentuk beras ketika ada kebutuhan untuk modal usaha tani berikutnya, sosialisasi di masyarakat dan

keperluan pendidikan. Penjualan gabah untuk modal usaha biasanya dijual pada awal panen, sehingga tingkat harga masih tergolong rendah. Kadang-kadang kelompok lumbung pangan juga menjual gabahnya dengan sistem tebasan setelah melalui pertimbangan dan perhitungan yang matang. Anggota kelompok tani Dusun Tangkilan yang mempunyai lahan seluas kurang lebih 5000 m² hanya 3 dari 63 orang petani.

1. Upaya Mengurangi Kerawanan Pangan melalui Lumbung Pangan Rumah Tangga.

Secara nominal ada peningkatan sekitar 14,29 persen (tabel 10, 11 dan 12) harga jual dari harga rendah pada bulan Maret dengan harga jual gabah dengan harga tertinggi pada bulan Desember. Mereka yang sanggup menyimpan atau menunda jual sebagian gabah keringnya hingga bulan Desember akan mendapatkan perolehan uang tunai lebih banyak dari pada mereka yang tidak sanggup melakukannya. Dengan demikian penguatan kapasitas menyimpan atau tunda jual tingkat rumah tangga cukup berarti dalam menambah kekuatan daya tawar dan perolehan harga yang adil bagi petani, serta dapat meningkatkan ketahanan pangan.

Keseluruhan jumlah gabah kering yang harus dikeluarkan untuk ongkos produksi sekitar 55 persen dari hasil produksi MT1. Selebihnya, sekitar 45 persen gabah kering bisa ditunda jual untuk simpanan pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang berangsur-angsur dikeluarkan (Mulyono, 2010). Satu kekuatan yang dimiliki oleh petani kecil adalah petani merasa aman (Bahasa Jawa: *Mareme*) kalau punya gabah di rumah karena fleksibel penggunaannya. Menurut Scott (1976), petani menanam padi untuk memenuhi kebutuhan subsistensi mereka, menyelamatkan periuk mereka, bukan untuk kepentingan bisnis.

Persoalannya, tidak semua rumah tangga sanggup menyimpan atau menunda jual hingga puncak *paceklik*. Hanya sebagian kecil rumah-tangga petani yang bisa mendapat keuntungan dari puncak *paceklik*, yaitu mereka yang mempunyai sumber pendapatan uang tunai di luar penjualan gabah. Mereka yang mengandalkan pemenuhan ongkos produksi dan kebutuhan

hidup hanya dari menjual gabah, menunda jual hingga puncak *paceklik* sulit dilakukan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membangun kekuatan pangan melalui lumbung kelompok.

2. Upaya yang Dilakukan Kelompok Lumbung Ngudi Rahayu

Bertitik tolak pada petani yang mengalami rawan pangan di Kabupaten Bantul, kemudian dibentuk Kelompok Lumbung Ngudi Rahayu, di Dusun Tangkilan, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, pada tahun 2007 yang diketuai oleh Bapak Sigid Purnomo, beranggotakan 27 orang. Terbentuknya lumbung didasarkan pada inisiatif sendiri, keadaan wilayah yang 65 persen lahan pertaniannya hanya bisa ditanami padi satu tahun sekali, dan 35 persen bisa ditanami padi dua kali dan selebihnya ditanami palawija (jagung dan kacang), dan luas lahan yang dimiliki petani berkisar antara 250 m² sampai 5000 m² dengan rata-rata kepemilikan 1400 m². Status kepemilikan tanah 81 persen pemilik dan 19 persen penggarap.

Persyaratan awal menjadi anggota lumbung harus menyetor gabah kering simpan (GKS) ke kelompok sebanyak 25 kg GKS dan pada tahap berikutnya menyetor 10 kg GKS sebanyak satu kali dalam setahun. Cadangan gabah pada tahun 2012-2013 mencapai 5,44 ton. Peminjaman gabah pada musim *paceklik* dan kebutuhan sarana produksi sudah diakomodir oleh kelompok lumbung. Pengguna jasa lumbung hanya diperuntukkan bagi anggota kelompok. Cadangan gabah yang tersisa dijual ke tengkulak ketika menjelang musim panen berikut tiba. Jumlah anggota kelompok tani Ngudi Rahayu sebanyak 63 orang dan yang masuk ke dalam kelompok lumbung 27 orang, hanya 42,9 persen yang bergabung dengan kelompok lumbung. Upaya-upaya yang dilakukan kelompok lumbung meliputi:

- a. Pengembangan anggota. Pengurus Lumbung melakukan sosialisasi saat pertemuan rutin RT Dusun Tangkilan, tujuannya untuk memberi pemahaman kepada anggota kelompok tani tentang manfaat lumbung bagi petani dalam meningkatkan ketahanan pangan.

- b. Menambah stok gabah agar dapat melayani anggota kelompok tani Dusun Tangkilan.
- c. Pemberdayaan SDM melalui pelatihan teknis dan pemberdayaan sosial dengan membangun solidaritas.
- d. Memproduksi benih padi tetapi kendalanya lahan belum tersedia.
- e. Keberadaan lumbung kelompok ditekankan pada kepentingan subsistensi, tidak mendapat untung dari menyimpan gabah secara kolektif. Kapasitas menyimpan dalam lumbung kelompok lebih didorong oleh *sense of crisis* ketimbang perhitungan keuntungan ekonomi dalam mendapatkan harga yang lebih baik.

Faktor pendukung kelompok lumbung adalah kemauan dan keyakinan dari anggota secara sukarela walaupun sebetulnya untuk makan saja tidak cukup, tetapi karena semangat kebersamaan mendorong meningkatkan kelembagaan lumbung. Pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012 memberikan bantuan Rp 20.000.000,- untuk menambah cadangan gabah sehingga stok lebih memadai. Faktor penghambatnya adalah lahan yang sempit, sehingga untuk pengembangan produksi benih padi belum terealisasi karena anggota lumbung tidak bersedia memberikan lahannya untuk keperluan produksi benih.

Tabel 1.
Ketersediaan Gabah/Beras pada Tingkat Rumah Tangga dan Kelompok

No	Luas Lahan (m ²)	Produksi (kg)	Gabah yang dijual (kg)	Disimpan di Rumah (kg)	Disimpan di Kelompok (kg)	Ketersediaan gabah (kg)	Konversi Beras (kg)
1	1500	600	400	190	10	200	131
2	3000	1200	1000	190	10	200	131
3	1600	640	-	630	10	640	419
4	6000	2500	1800	690	10	700	457
5	250	150	-	140	10	150	98
6	1150	500	-	480	20	500	327
7	5500	2500	1500	990	10	1000	650
8	600	300	-	290	10	300	201
9	0	-	-	-	10	10	7
10	4500	2000	1000	990	10	1000	650
11	2000	500	200	290	10	300	196
Total	26100	10.890	5900	4890	110	5000	983
Rerata	2372	990	536	444.5	10	454.5	89.39

Sumber: Jawaban Responden (2013)

Tabel 2.
Ketersediaan Pangan pada Tingkat Rumah Tangga dan Kelompok

No	Ketersediaan Beras Keluarga (kg)	Jumlah Anggota Keluarga	Ketersediaan beras per orang (kg)	Konsumsi beras/orang/tahun	Keterangan
1	131	5	26.2	89	Tidak Cukup
2	131	2	65.4	89	Tidak Cukup
3	419	3	140.0	89	Cukup
4	457	5	91.6	89	Cukup
5	98	2	49.0	89	Tidak Cukup
6	327	6	54.5	89	Tidak Cukup
7	650	4	162.5	89	Cukup
8	201	1	201	89	Tidak Cukup
9	7/4	4	1.75	89	Tidak Cukup
10	650	2	325.0	89	Cukup
11	196	4	39.0	89	Tidak Cukup
Rata-rata		3.6	89.39	89	Cukup

Sumber: Jawaban Responden (2013)

3. Ketersediaan Pangan Dusun Tangkulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dari 11 responden, ketersediaan pangan khususnya gabah/beras di tingkat rumah tangga dapat disajikan pada Tabel 1.

Dari Tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa berdasarkan angka rata-rata produksi beras 89.39 kg, cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi 89 kg per orang per tahun. Akan tetapi dari perhitungan per orang didapatkan angka 36 persen petani tidak bisa mencukupi pangan dan 64 persen petani dapat mencukupi pangan. Angka pada tabel di atas adalah sebuah informasi dari petani dalam kondisi produksi normal, apabila kondisi lapangan terjadi serangan hama dan penyakit, angin, banjir dan bencana, produksi akan lebih rendah dari data di atas.

Hal ini berarti kondisi wilayah di Dusun Tangkulan semakin rawan pangan. Berdasarkan stok yang ada di lumbung sebanyak 5.44 ton, lumbung Ngudi Rahayu dapat menanggulangi rawan pangan sebesar 41.2 persen (5.44 ton dibagi 27 anggota, dibagi 3.6 jumlah anggota keluarga, dibagi 89 konsumsi per orang = 36.7kg = 41.2 persen).

4. Adaptasi dan Manfaat Kelembagaan Lumbung Pangan Ngudi Rahayu

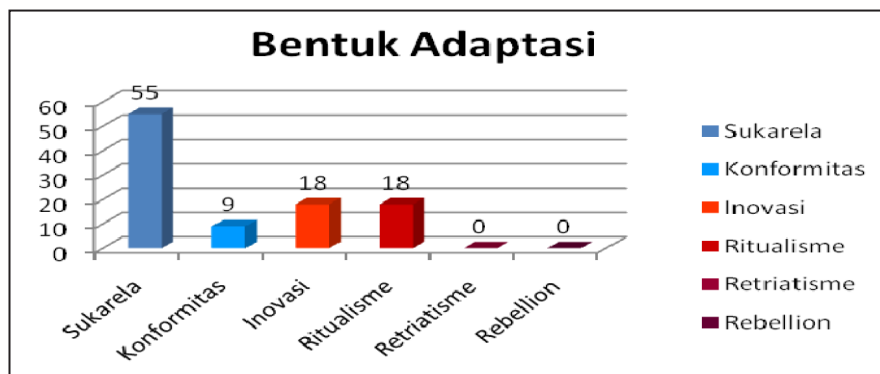
Adaptasi dalam konteks adaptasi, Robert K. Merton mengemukakan 5 (lima) bentuk kemungkinan adaptasi yang dilakukan setiap anggota kelompok masyarakat berkaitan dengan tujuan (*goals*) dan tata cara yang telah membudaya

(*means*), yaitu konformitas, inovasi, ritualisme, retreatisme, dan rebellion. Serta Durheim menambahkan satu bentuk adaptasi yaitu sukarela (Soekanto, S. 1999). Data hasil wawancara dari 11 informan tentang bentuk adaptasi anggota kelompok dalam kelompok lumbung dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 menunjukkan bahwa anggota kelompok lumbung yang tetap menerima tujuan dan sarana lumbung yang terdapat dalam kelompok karena adanya tekanan moral yang melingkupinya ada 9 persen (konformitas), inovasi 18 persen, berarti tujuan lumbung yang terdapat dalam masyarakat diakui dan dipertahankan tetapi dilakukan perubahan sarana yang dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Data ritualisme (*ritualism*) 18 persen menggambarkan suatu keadaan anggota kelompok menolak tujuan lumbung yang ditetapkan tetapi tetap memilih sarana atau tata cara yang telah ditentukan. Bentuk suka rela 55 persen, yang berarti bahwa individu bertindak karena adanya proses keputusan subjektif yang dilakukan secara sukarela. Proses pengambilan keputusan ini dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tertentu, yaitu normatif dan situasional. Faktor-faktor normatif dan situasional ini melekat dalam benak individu, sehingga dalam melakukan aksinya, tidak ada faktor pemaksaan, karena seorang aktor akan melakukannya, sedangkan anggota kelompok retreatisme dan rebellion tidak ditemukan. Konformitas dan sukarela inilah yang menguatkan kelembagaan kelompok lumbung.

Gambar 1.

Data bentuk Adaptasi Keanggotaan Kelompok dalam Kelompok Lumbung



Sumber: Jawaban Responden (2013)

Keterangan : 0–20 persen = sangat rendah; 2–40 persen = rendah; 4–60 persen = sedang; 61–80 persen = tinggi; 81–100 persen = sangat tinggi (sumber Uchrowi, 2006)

Fungsi adaptasi dapat dilihat dari kelembagaan lumbung Ngudi Rahayu yang mempunyai struktur kelompok mulai dari ketua, sekretaris, bendahara dan seksi simpan pinjam, usaha, humas keamanan, dan seluruh anggota kelompok. Secara fungsional, kelompok lumbung ini mampu melayani kebutuhan seluruh anggota.

5. Manfaat Menjadi Anggota Kelompok Lumbung

Manfaat Ekonomi: Secara ekonomi, lumbung kelompok berpengaruh terhadap peningkatan hasil. Hal ini dapat dilihat pada saat menyimpan gabah maupun meminjam gabah di musim *paceklik*. Untuk lebih jelasnya dapat diperlihatkan sebuah perhitungan matematik pada Tabel 3.

Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa petani yang bergabung dalam kelompok lumbung dan meminjam gabah di lumbung kelompok mendapat keuntungan Rp. 96.000,-. Bahkan bisa lebih dari itu apabila sebagian gabah yang ada di lumbung dimanfaatkan untuk pengembangan usaha kelompok. Pada Tabel 4 di bawah ini disajikan perhitungan ekonomi apabila petani kecil tidak menjadi anggota kelompok lumbung.

Pada Tabel 4, petani yang tidak bergabung dalam kelompok meminjam uang di pedagang/

tengkulak mengalami kerugian sebesar Rp 194.000,-. Dari data tersebut menunjukkan bahwa kegiatan lumbung kelompok dapat meningkatkan pendapatan petani kecil.

6. Manfaat Sosial dan Budaya

Secara sosiologis, kehidupan yang rukun dan guyub di Lumbung Ngudi Rahayu sudah barang tentu terjadi dalam proses sosial dan interaksi yang dibangun bersama seluruh anggota kelompok lumbung. Proses sosial dan interaksi ini berlangsung dalam kebersamaan hidup sehari-hari, baik secara formal maupun informal, melalui berbagai institusi, media sosialisasi, akses interaksi dan sarana pergaulan. Dalam prakteknya hubungan sosial ini melibatkan seluruh individu dan masyarakat, sehingga secara langsung maupun tidak langsung mereka bisa memahami masing-masing hak dan kewajiban serta bersikap apresiatif terhadap perbedaan untuk menempatkan diri sesuai dengan kapasitas dan kedudukannya.

Terbentuknya kelompok lumbung meningkatkan terjalannya solidaritas dan kerjasama di antara anggota. Partisipasi anggota kelompok lumbung dapat dibuktikan dengan kehadiran mereka pada setiap pertemuan yang diselenggarakan setiap selapanan (36 hari), maupun pembagian tugas kegiatan seperti mengumpul-

Tabel 3.
Keuntungan Menjadi Anggota Kelompok Lumbung

No	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	Anggota Kelompok meminjam gabah pada musim paceklik sebanyak 100 kg @ Rp 4.900,-	-	490.000	-
2	Pada musim panen mengembalikan gabah pokok beserta bunga sebanyak 110 kg @ Rp 4.100,-	451.000	-	39.000
3	Menyimpan Gabah pada saat panen 10 kg @ Rp 4.100,-	41.000	-	80.000
4	Keuntungan menjual gabah di musim paceklik 20 kg @ Rp 8.000,-	16.000	-	96.000

Sumber: Jawaban Responden (2013)

Tabel 4.
Kerugian Petani Kecil tidak menjadi Anggota Kelompok Lumbung

No	Uraian	Debet (kg)	Kredit (kg)	Saldo (kg)
1.	Anggota Kelompok meminjam uang kepada pedagang/ tengkulak pada musim paceklik	-	490.000	-
2.	Pada musim panen mengembalikan gabah beserta bunga sebanyak rp. 490.000/rp. 4.100,-(per kg) = 120 kg	490.000	-	0.000
3.	Gabah di musim paceklik 20 kg @ 4.900,-	-	98.000	-98.000

Sumber: Jawaban Responden (2013)

kan gabah ke kelompok lumbung, menyimpan di gudang sederhana, pelayanan peminjaman gabah, dan penjualan stok gabah yang masih tersisa di gudang. Penjualan stok gabah ini bertujuan untuk menyelamatkan gabah karena masa simpan sudah habis. Apabila tidak dijual mutu gabah akan turun. Rumah tangga yang dianggap cukup mampu, sehingga tidak perlu meminjam gabah, keuntungan yang diperoleh dari keikutsertaan dalam tradisi lumbung kelompok bukan keuntungan ekonomis, melainkan sosial. Ada semacam tuntutan sosial dari lingkungan pertetanggaan setempat bahwa mereka yang mampu secara ekonomi mestinya ikut membantu tetangga yang kesulitan.

Kegiatan yang dikelola kelompok lumbung didasarkan pada asas atau nilai kerjasama, saling menolong, menghormati, dan mendukung. Nilai tersebut relevan dengan nilai budaya setempat yang mengedepankan keselarasan, keharmonisan dan keseimbangan hidup, dengan demikian kegiatan kelompok merupakan kegiatan yang relevan dengan nilai yang ada di tempat. Dengan bergabung di kelompok lumbung, petani merasa *marem* karena di samping ada cadangan di rumah juga ada cadangan gabah di kelompok. Apalagi cadangan gabah di lumbung dikembangkan menjadi usaha, secara tidak langsung anggota kelompok lumbung merasa ada asset yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menopang kesejahteraan. Anggota kelompok juga merasa lebih optimis dan percaya diri bahwa apabila mereka bersungguh-sungguh dalam mengelola usaha lumbung, akan mampu untuk mengubah kehidupan diri dan keluarganya ke arah yang lebih baik dan sejahtera.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi kerawanan pangan adalah dengan menunda jual gabah untuk disimpan di rumah, sedangkan yang dilakukan oleh kelompok lumbung adalah sosialisasi lumbung untuk pengembangan anggota, meningkatkan stok beras untuk memenuhi kebutuhan beras di tingkat dusun, memberdayakan SDM melalui pelatihan teknis dan pemberdayaan sosial untuk membangun

solidaritas, serta merencanakan untuk memproduksi benih padi. Lumbung kelompok Ngudi Rahayu mampu menanggulangi kerawanan pangan sebesar 41,2 persen. Lumbung Ngudi Rahayu bermanfaat secara ekonomi (meningkatkan pendapatan anggota), sosial (solidaritas, kebersamaan, kepercayaan), dan budaya (mempunyai nilai *kemareman* hati dan norma yang telah disepakati bersama. Kapasitas menyimpan dalam lembaga lumbung kelompok ini lebih didorong oleh *sense of crisis* ketimbang oleh perhitungan keuntungan ekonomi dalam mendapatkan harga yang lebih baik.

2. Rekomendasi

Aparat desa diharapkan memotivasi petani kecil yang belum bergabung menjadi anggota lumbung agar lebih banyak petani kecil yang bisa merasakan manfaatnya dan berpartisipasi dalam mengembangkan kelembagaan lumbung. Modal yang kecil mempengaruhi kecepatan pengembangan usaha, sehingga perlu adanya perhatian pemerintah (dinas pertanian dan dinas kesejahteraan sosial) menstimuli kelembagaan lumbung petani kecil sesuai dengan kebutuhannya.

Pustaka Acuan

- Atmojo, S.M., Syarif Hidayat, D. Sukandar., M. Latifah. (1995). *Laporan Studi Identifikasi Daerah rawan Pangan*. Proyek Pengembangan Diversifikasi Pangan dan Gizi, Bogor: Departemen Pertanian–Jurusan GMSK, Fakultas Pertanian – IPB.
- Damsar, (1997). *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Grafindo.
- Guillen, M.F., Randall Collins, Paula England, and Marshall Meyer, (2003). *The Economic Sociology*. Development in an emerging field. New York: Russel Sage Foundation.
- Hasan, I. (1995). *Aku Cinta Makanan Indonesia dalam Rangka mewujudkan Ketahanan Pangan*. Pengarahan Kursus Penyegar Ilmu Gizi dan Kongres Nasional PERSAGI X, 21-23 November. Bandung.
- Holstein, J. dan Gubrium, J.. (1984). *Strategies of inquiry*. Handbook of Qualitatif Research.

- Denzin, N.K. dan Lincoln, Y.S. ed. New Delhi: Sage.
- Jayawinata, A., (2010). *Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat*. Penyuluh Pertanian Jatinangor. Kepala Bidang Pola Pemberdayaan, Pusat Pemberdayaan Ketahanan Pangan Masyarakat, Badan Bimas Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian.
- Miles, M.B. dan Huberman, A.M., (1984). *Analisis Data Kualitatif*. Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Penerjemah, Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Moleong, (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyono, (2010). *Kapasitas Tunda Jual Petani Padi*. Studi kasus di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Bogor: Koalisi Rakyat untuk Keadaulatan Pangan Sindangbarang Grande No. 16. Sindangbarang. 16617
- Rachmad Muchidin, dkk., (2010). *Kajian Sistem Cadangan Pangan Masyarakat Perdesaan Untuk Mengurangi 25 persen Resiko Kerawanan Pangan*. Sinergi penelitian dan Pengembangan Bidang Pertanian (SINTA). Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian.
- Scott, J.C., (1981). *Moral ekonomi Petani*. Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara. Jakarta: LP3ES. .
- Soekanto, Soerjono. (1999). *Sosiologi*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Tohir, A., Kaslan, (1953). *Sekitar Masalah Pertanian Rakyat*. Djakarta
- Wahyuningsih, I., (2003). *Partisipasi Petani Pada Program Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan kecil (P4K) di Kabupaten Boyolali*. Yogyakarta: Tesis Ekonomi Pertanian Universitas Gadjah Mada.
- Biro Pusat Statistik, (2012). *Bantul dalam Angka*. Bantul: BPS.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2006 tentang pembentukan Dewan Ketahanan Pangan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Pelestarian Tradisi dan Budaya *Pela Gandong* bagi Pencegahan Konflik Sosial di Kota Ambon

Preservation of Pela Gandong Tradition and Culture for Social Conflict Prevention in Ambon City

C. Elly Kumari Tjahya Putri

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta
Jl. Kesejahteraan Sosial No 1 Nitipuran Yogyakarta. <email: ellyktp@gmail. Com>
Diterima 13 November 2013, direvisi 15 Januari, Disetujui 24 Februari 2014.

Abstract

Social conflicts and collective violence interethnic rife in various regions in Indonesia, including Ambon city. Considering the existence of local wisdom called pela gandong (norms or values of a tradition that upholds the values of social solidarity), it was such an irony that Ambon city residents involved in violence ang amok. This situation call for an examination of the causes of such a social conflict. Social conflict caused many casualties. In order to uncover the role of pela gandong in fostering social soldarity attitudes among Ambon city residents post conflict, a research on "Preservation of Pela Gandong Tradition and Culture for Social Conflict Prevention in Ambon City" had been conducted applying survey and case methods. This study led to the founding that the cause of social conflict in Ambon city is due to increasing migration flows which impacting the increasing number of unemployment in the city of Ambon. Migrant or immigrants can not readily adjust to the culture of the natives which in turn cultivate an attitude of mutual suspicion between them. Along with modernization, decreasing authority of social institutions accompanied by increasing waning of traditional values (pela gandong) primarily among young people make people easily negatively provoked by various parties. But post-conflict there occurs associative, acculturation, accomodation, assimilation processes in public life as can be seen from the high attitude of social solidarity posed. For the prevention of social conflicts in the future it is recomended to develop social capital and to strengthen social insitutions to preserve traditional institutions and also to held dialogues in both horizontal and vertical dimension.

Keywords:

Preservation- Tradition and Culture-Social Conflict-Prevention

Abstrak

Konflik sosial antar etnis dan kekerasan kolektif di berbagai daerah di Indonesia. Terbiasanya masyarakat dengan perilaku kekerasan dan amuk massa, memudarnya nilai-nilai sosial dan melemahnya pranata sosial. memicu disintegrasi Hal ini menuntut suatu kajian penyebab terjadinya konflik sosial di berbagai daerah, seperti halnya di Kota Ambon. Konflik sosial menimbulkan banyak korban sangatlah ironis terjadi di kalangan masyarakat Kota Ambon yang memiliki nilai kearifan lokal *pela gandong*, suatu norma atau tradisi dan budaya yang menjunjung tinggi nilai kesetiakawanan sosial. Agar mendapatkan informasi mengenai seberapa besar peran nilai kearifan lokal dalam menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial warga Kota Ambon pasca konflik sosial, dilakukan penelitian mengenai "Pelestarian tradisi dan budaya *pela gandong* bagi pencegahan konflik sosial di Kota Ambon". Kajian menggunakan metode survey dan kasus. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan penyebab terjadinya konflik sosial di Kota Ambon, karena makin meningkatnya arus migrasi, berdampak jumlah penggangguran meningkat di Kota Ambon, juga lambannya para migran atau pendatang menyesuaikan dengan budaya penduduk asli, sehingga menumbuhkan sikap saling curiga antara penduduk asli dan para migran Seiring dengan modernisasi, makin menurunnya kewibawaan pranata sosial. serta makin memudarnya nilai-nilai tradisional "*pela gandong*" utamanya dikalangan generasi muda, nilai tradisi tersebut menjunjung tinggi, perilaku dan sikap kerukunan kesetiakawanan sosial kehidupan bermasyarakat sehingga masyarakat mudah terprovokasi oleh berbagai pihak. Tetapi pasca konflik, terjadi proses asosiatif, akulturasi, akomodasi, asimilasi, dalam kehidupan masyarakat, tampak dari masih tingginya sikap kesetiakawanan sosial. Rekomendasi yang diajukan guna pencegahan konflik sosial mengembangkan modal sosial (*social capital*) dan memperkuat pranata sosial, untuk itu perlu dilestarikan lembaga adat, juga dilaksanakan dialog baik secara horisontal maupun vertikal.

Kata Kunci:

Pelestarian- Tradisi dan Budaya-Pencegahan-Konflik Sosial

A. Pendahuluan

Nasib tragis dialami bangsa Indonesia saat ini karena pada saat menghadapi banyak masalah, masyarakat cenderung melakukan tindakan kekerasan yang kadang-kadang dipicu oleh masalah yang sangat sederhana. Masyarakat menjadi terbiasa dengan perilaku kekerasan dan amuk masa, karena macetnya saluran hukum, juga mudurnya nilai tradisi dan budaya, merupakan kearifan lokal yang menjunjung tinggi sikap kesetiakawanan sosial, menjadi modal sosial bagi integrasi sosial bangsa Indonesia yang multikultural. Integrasi sosial akan lebih mudah dicapai bila harkat dan martabat manusia dihormati serta hak-hak asasi manusia secara universal diakui. Oleh sebab itu, diperlukan upaya agar lembaga pemerintahan dan institusi masyarakat (pranata sosial) menjadi lebih tanggap kepada kebutuhan masyarakat. Sehingga diharapkan masyarakat mampu berperan secara penuh dalam kegiatan pembangunan. Dewasa ini musuh utama bangsa Indonesia adalah berbagai bentuk kesenjangan, baik kesenjangan ekonomi, sosial maupun budaya, juga terjadinya disintegrasi sosial. Permasalahan sosial tersebut di atas menyebabkan sederetan protes sosial dengan beragam dinamikanya. Hal ini mengejutkan banyak pihak tidak hanya di pihak pemerintah maupun pakar politik sosial dan budaya, bahkan yang terkait dengan bidang pendidikan. Protes sosial masyarakat yang berkembang merupakan akumulasi akibat kesenjangan ekonomi, politik serta hukum dan sosial maupun budaya.

Apabila ditinjau dari dinamika konflik di Kota Ambon bisa dibagi dalam empat kasus kejadian atau tiga episode kejadian, dimulai pada episode pertama bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1419, yaitu tanggal 19 Januari 1999 konflik diawali dari terjadinya perkelahian antara warga pemuda kampung Batumerah dengan pemuda kampung Mardika. Konflik yang terjadi antara massa putih dari kampung Batumerah (disebut kelompok yang berpakaian serba putih dari kelompok muslim dan kelompok merah kelam yang berasal dari kelompok Kristen). Dari kedua kubu tersebut, menyatakan bahwa kebanyakan mereka tidak mengetahui siapa saja yang terlibat konflik, sebab tidak ada kejelasan dalam

konflik sosial siapa melawan siapa, apa alasannya. Konflik episode kedua terjadi sekitar dua bulan memasuki akhir bulan Juli 1999 konflik kembali pecah di Ambon, dimulai di perumahan Poka tanggal 24 Juli 1999. Konflik di perumahan Poka Kota Ambon merembet ke Kota-Kota lainnya. Selanjutnya episode ketiga muncul pada tanggal 26 April 2000, ketegangan di Ambon, makin meningkat karena isu datangnya kaum jihad dari Yogyakarta menyebabkan makin tingginya semangat konflik dari pihak kelompok Kristen. Pada tahun 2009 kemelut konflik sudah dapat diredam, namun sejauh mana kadar sikap kesetiakawanan sosial warga masyarakat Kota Ambon yang bertikai tersebut, menjadi dasar berperilaku dan bertindak di kalangan masyarakat. Setelah satu dasa warsa, terjadinya konflik tersebut, ternyata menimbulkan dampak keresahan yang hebat, di komunitas masyarakat Maluku. Konflik episode ketiga terjadi pada tanggal 30 April 2000, merupakan aksi balas membalas berlanjut menjadi konflik yang beruntun di perbatasan Batumerah dan Mardika. Dalam konflik tersebut banyak yang menjadi korban, sedikitnya 13 orang meninggal dan sekitar 50 orang luka-luka. Konflik episode ketiga ini tidak lagi bersifat sporadis tetapi telah menjadi "perang Kota". Dampak dari konflik pada saat itu, ditandai dengan perginya seluruh lembaga bantuan kemanusiaan dari luar, khususnya warga internasional dari Ambon. Sebanyak 16 orang warga asing yang bekerja di Kota Ambon dalam misi kemanusiaan dievakuasi keluar Kota Ambon, sebab tiada jaminan keamanan dari pemerintah daerah maupun pihak keamanan di Kota tersebut. (Lambang Triyono, 2001: 35-68). Seperti halnya kejadian di Batumerah kurang lebih pada bulan Juni tahun 2010. Warga Batumerah mengancam akan terjadi konflik dalam kaitannya dengan rencana eksekusi ratusan bangunan milik warga di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman oleh pemerintah Kota Ambon menuai protes warga maupun elemen kepemudaan. Aksi ini dimotori oleh warga dan melibatkan komponen mahasiswa. Para demonstran tersebut mengancam akan terjadi konflik seperti halnya di Kota Jakarta apabila pemerintah Kota mengusir warga Batumerah yang berjumlah 100 kepala keluarga (Ambon Ekspres, 8 Juni 2010).

Dari kenyataan di atas menunjukkan bahwa bahaya laten akan terjadinya konflik masih mengancam warga Kota Ambon, terbukti pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2010 terjadi perkelahan warga kampung Batumerah Dalam dan Batumerah Kampung Kecamatan Sirimau Kota Ambon, konflik tersebut menyebabkan seorang warga meninggal dan tujuh rumah terbakar. Bentrokan pada jumat malam tersebut merupakan bentrokan ketiga dalam sebulan terakhir. Sebelumnya bentrokan kedua terjadi pada 14 Juni 2010 dan 3 Juli 2010 (Kompas, 11 Juli 2010).

Berdasarkan kondisi tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang Pelestarian tradisi dan budaya *Pela Gandong* bagi pencegahan konflik sosial di Kota Ambon. Penelitian ini berusaha menelaah faktor-faktor yang memicu terjadinya kekerasan kolektif, yang terjadi di Kota Ambon. Berdasarkan latar belakang di atas, maka timbul pertanyaan sejauh mana budaya dan nilai tradisional *Pela Gandong* mampu menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial masyarakat Kota Ambon yang multikultural. Maka pertanyaan penelitian yang diajukan guna mengkaji informasi tentang kadar sikap kesetiakawanan sosial di daerah yang rentan terjadinya konflik sosial adalah sebagai berikut: Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya konflik sosial pada masyarakat Kota Ambon yang multikultural. Selain itu juga seberapa besar kadar kesetiakawanan sosial warga Kota Ambon pasca konflik, serta sejauh mana peranan *pela gandong* yang merupakan nilai tradisi dan budaya, menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial, guna mencegah konflik sosial. Diharapkan tradisi dan budaya tersebut, mampu meredam terjadinya konflik sosial, dengan demikian akan tercapai perdamaian di Kota Ambon. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan masukan tentang kebijakan publik bagi Kementerian Sosial, guna membenahi berbagai kondisi, demi mencegah terulangnya konflik sosial yang terjadi di Provinsi Maluku, khususnya di Kota Ambon. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait guna mengetahui peran budaya dan nilai tradisi *Pela Gandong* yang mampu menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial, disamping itu juga mendeskripsikan faktor yang menjadi penyebab, terjadinya kekerasan kolektif di Kota Ambon.

Tulisan ini juga dapat digunakan sebagai masukan kepada berbagai pihak yang peduli pada masalah konflik sosial di Kota Ambon.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Ambon, Propinsi Maluku, dan dalam penelitian ini analisisnya adalah individu dan masyarakat. Penelitian ini merupakan studi kasus deskriptif, yang merupakan strategi paling cocok untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa dalam penelitian ini dipergunakan dua strategi yaitu studi kasus dalam suatu survei. Pertanyaan "bagaimana" atau "mengapa" akan diarahkan pada serangkaian peristiwa kontemporer, yang mana peneliti hanya memiliki peluang kecil, atau bahkan tidak mempunyai peluang sama sekali untuk melakukan kontrol pada peristiwa tersebut. (Yin, 2002, 13), dipilih sampel lokasi secara *purposive sampling*, yaitu daerah yang sering terjadi konflik antarwarga dalam penelitian ini difokuskan pada Kota Ambon, Jumlah responden adalah 30 Orang, Pengumpulan data para pelaku dan korban konflik, dengan cara *accidental* penentuan subyek penelitian tokoh masyarakat, petugas dari dinas sosial *purposive sampling* mereka adalah pelaku, korban maupun petugas yang berwenang serta berbagai pengurus organisasi sosial, yang terlibat dalam penanganan masalah konflik di Kota Ambon. Teknik pengumpulan data dipergunakan *interview*, observasi, serta penggunaan data sekunder yang dianggap relevan, berkaitan dengan konflik sosial di Ambon.

B. Kajian Teori

Pada dasarnya terjadinya kekerasan kolektif antara lain disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Pertama, kebijakan pemerintah pusat terhadap pembangunan di daerah selama 32 tahun terakhir tidak berbasis kerakyatan dan tidak berpihak kepada upaya pemberdayaan masyarakat. Kedua lemah dan kurang berwibawanya aparat penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum. Ketiga, kekerasan kolektif horisontal itu disebabkan memudarnya nilai tradisi dan budaya lokal "*pela gandong*" dikalangan generasi muda, sebagai dampak dari modernisasi. Disamping itu juga perilaku sebagian masyarakat pendatang yang tidak dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan adat istiadat setempat berdasarkan prinsip "Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung", serta kekerasan dan unjuk

kekuatan oleh kelompok-kelompok masyarakat dengan memakai simbol-simbol agama atau -slogan berbau agama.

Menurut pendapat Hannah Arendt, Kekerasan terjadi karena adanya beberapa aspek antara lain: Kekuasaan (*power*) merupakan kemampuan pribadi manusia, untuk bertindak maupun bertindak secara bersama-sama. Kekuasaan tidak pernah merupakan hak milik seseorang, ia adalah milik kelompok, tetap ada sepanjang kelompok itu bersama. Ketika seseorang mengatakan tentang seseorang bahwa ia sedang berkuasa (*in power*), maka kita dapat menyebut seseorang yang berkuasa tersebut tengah diberdayakan oleh sejumlah orang untuk bertindak atas nama mereka. Saat kelompok tersebut, dari mana kekuasaan mula-mula berasal (*potestas in populo*), maka dapat dikatakan tanpa sebuah rakyat atau sebuah kelompok tidak akan ada kekuasaan, berarti menghilang kekuasaannya. Dalam pemakaian kata "kekuasaan" saat ini, ketika kita berbicara mengenai seorang manusia yang kuat (*powerful personality*). Kita telah menggunakan kata "kekuasaan" (*power*) secara metamorfosis, apa yang kita rujuk tanpa metafora adalah "kekuatan" (*strength*). Arti dari kekuatan (*strength*) adalah sesuatu dalam sebuah entitas tunggal atau individual; kekuatan adalah hak milik yang inheren dalam sebuah obyek atau seseorang dan menjadi karakternya, dalam hubungannya dengan benda atau orang lain. Daya paksaan (*force*) seringkali digunakan dalam perkataan sehari-hari, sebagai sinonim dengan kekerasan, terutama jika kekerasan berfungsi sebagai suatu bentuk alat paksa. Otoritas (*authority*), yang berkaitan dengan fenomena yang paling sukar dipahami dan karenanya, sebagai sebuah istilah, paling sering diselewengkan. Pada akhirnya berdasarkan karakter instrumentalnya, maka secara fenomenologis, kekerasan sangat dekat dengan kekuatan, karena kekerasan merupakan alat untuk melipatgandakan kekuatan alamiahnya. (Hannah Arendt, 2003: 40-42) Selanjutnya menurut Konrad Lorenz dalam Erich Fromm, keagresifan manusia merupakan insting yang digerakan oleh sumber energi yang selalu mengalir dan tidak selalu merupakan akibat dari reaksi terhadap rangsangan luar. Selanjutnya Lorenz berpendapat bahwa energi khusus untuk tindakan insting

mengumpul secara kontinyu di pusat syaraf yang ada kaitannya dengan pola tindakan tersebut, dan akan terjadi ledakan jika energi sudah terkumpul, sekalipun tidak ada rangsangan dari luar. Intensitas kedestruktifan dari dorongan agresif, merupakan konsekuensi dari proses seleksi intra spesifik (yang terjadi pada kehidupan manusia, karena agresif diantara anggota *species* yang sama) adapun fungsinya adalah untuk mempertinggi daya tahan hidup (Erich Fromm, 2008: 9-11).

Sosiolog Horton mengemukakan beberapa dalil yang menjelaskan terjadinya kekerasan kolektif, disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut: *Self group atau in group* (dimana orang menjadi anggota kelompok) dan *other group atau out group* (kelompok lain yang berhadapan dengan *self group*) yang tidak berbeda banyak kekuatannya cenderung berhubungan secara saingan apabila tujuan hidupnya sama. Apalagi jika tujuan antar kelompok tersebut berbeda. Kedua kelompok (*self group dan out group*) tersebut dapat hidup bersama atas dasar *co-existence*. *Self group* dan *other group* yang merasakan di dalam diri kelompoknya terdapat satu sifat kelemahan terhadap group lawannya. Hal ini cenderung meningkatkan dan memaksimalkan sifat-sifat yang dirasa lebih unggul untuk memperkuat rasa superiornya kepada group yang dianggap lebih lemah dengan kekerasan atau cara lain dan tidak menghiraukan nilai moral. Dalam hubungan antara *self group* dan *other group* cenderung munculnya prasangka (*prejudice*) yaitu anggapan tentang adanya sifat-sifat positif atau negatif pada group (kelompok) lawan. Pada *self-group* yang merasa dirinya inferior terhadap *other-group* dan tidak mampu mengangkat dirinya cenderung tumbuh rasa tidak puas terhadap status inferial kadang kala meledak dalam bentuk protes atau memberontak (Horton, 1990: 233).

Kerusakan pertalian sosial merupakan penyebab terjadinya konflik. Kesamaan keanggotaan kelompok dan saling ketergantungan menjadi pengikat diantara beberapa kelompok untuk menjaga stabilitas hubungan yang tinggi. Namun sebaliknya pertalian sosial justru memberikan sumbangan terhadap eskalasi konflik, apabila pihak yang berfungsi sebagai tempat bergantung tidak dapat dipercaya, karena tidak

mampu melaksanakan fungsinya. Terdapat hubungan yang bersifat kurva linier antara luasnya ketergantungan dengan eskalasi potensi. Selanjutnya komponen potensi eskalasi tersebut menghilang, akhirnya suatu pihak menjadi semakin dependen, dengan pihak lain. Sampai pada suatu titik dimana, pihak lain tidak dapat memenuhi kebutuhan pihak yang bersangkutan, secara memadai. Pada titik ini dan seterusnya kemungkinan eskalasi justru meningkat (Dean G. Pruitt dan Jefree Z. Rubin, 2004: 163-164)

Pertentangan antar etnis, ras, suku, agama tersebut, merupakan kelompok mayoritas yang melakukan penekanan kelompok minoritas, apabila tidak segera diatasi akan membawa peluang disintegrasi sosial bangsa. Para sosiolog pada umumnya membedakan tiga jenis utama kelompok minoritas, yaitu: a) Minoritas rasial, yaitu mereka yang dapat dibedakan sebagian besar atau semata-mata, dalam hubungan dengan ciri biologisnya. b) Minoritas etnik, yaitu mereka yang dapat dibedakan menurut warisan kebudayaannya, bukan menurut ciri biologisnya. c) Minoritas religius, yaitu mereka yang terutama dapat dibedakan menurut tradisi keagamaan mereka. (Sanderson, 1993: 380) Indonesia memiliki ras, etnik, dan religi yang majemuk, sehingga kelompok minoritas tersebut sangat mewarnai tata kehidupan sosial dan akibatnya sangat mudah menimbulkan konflik.

Berdasarkan teori konflik kelompok menurut ahli antropologi sosial Sears, konflik akan terjadi secara kolektif dalam masyarakat karena adanya kekurangan relatif (*relative deprivation*). Teori ini berkaitan adanya ketidakpuasan dalam kelompok yang tidak hanya timbul dari kekurangan secara obyektif, tetapi juga perasaan kurang secara subyektif yang relatif lebih besar dibandingkan kelompok atau orang lain. Bila seseorang merasa kurang dibandingkan dengan kelompok lain, maka mereka akan mengungkapkan kejengkelannya melalui anorganisme kelompok. Selanjutnya di samping itu juga karena dua kelompok yang bersaing untuk saling memperebutkan sumber yang langka. Teori ini disebut teori konflik kelompok. misalnya permusuhan antar etnis Bugis dan Maluku yang memperebutkan lahan tempat berdagang (Sears, dkk, 1974: 157). Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah rendahnya kepedulian masyarakat,

terhadap permasalahan sosial, bergesernya budaya dan nilai masyarakat tradisional menuju budaya masyarakat modern ditandai dengan melunturnya sikap kesetiakawanan sosial dan kegotongroyongan,

Kesetiakawanan Sosial atau rasa solidaritas sosial adalah merupakan potensi spritual, komitmen bersama sekaligus jati diri bangsa, oleh karena itu kesetiakawanan sosial merupakan nurani bangsa yang teraplikasi dari sikap, serta perilaku yang dilandasi oleh pengertian, kesadaran, keyakinan tanggung jawab dan partisipasi sosial warga masyarakat, dijiwai semangat kebersamaan, kerelaan untuk berkorban demi sesama. Oleh karena itu kesetiakawanan sosial merupakan nilai tradisi dan budaya, perlu dilestarikan sebagai modal sosial (*Social Capital*) yang ada dalam masyarakat, terus digali dan dikembangkan Menurut Arief dalam info Societa ada beberapa aspek dari kesetiakawanan sosial meliputi: Kepedulian Sosial, Gotong royong, Ikhlas berkorban kebersamaan, musyawarah (MF. Arief, 2008, 6) Mengacu pada pemikiran Emile Durkheim dalam James M. Henslin, dalam masyarakat terdapat solidaritas mekanik, merupakan solidaritas yang terbentuk karena adanya pandangan dan perasaan yang sama, selain itu juga adanya solidaritas organik, yaitu solidaritas antara individu dalam masyarakat karena adanya ketergantungan dalam melakukan pekerjaannya atau berkaitan dengan mata pencaharian dalam hidupnya. Ciri nilai kesetiakawanan sosial merupakan konstruksi masyarakat yang tercipta melalui interaksi antar para anggotanya dan diturunkan dari generasi ke generasi (James. M. Henslin, 2002: 116-154).

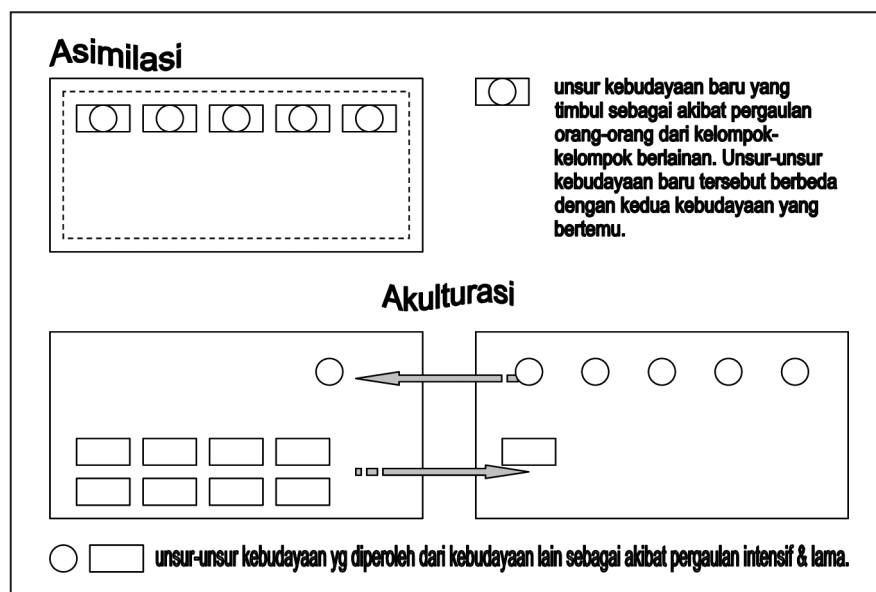
Melalui konflik berbagai pendapat dan norma yang sifatnya prural akan memperluas integrasi antar etnis yang sangat jamak. Sebab pada dasarnya konflik merupakan hasil dari interaksi sosial menuju pembentukan sistem sosial yang terjadi karena adanya proses sosial. Menurut Gillin dan Gillin terdapat 2 macam proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial, yaitu: a) Proses yang asosiatif (*process of association*) yang terbagi ke dalam tiga bentuk khusus: akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. b) Proses yang disosiatif (*process of dissocation*) yang mencakup persaingan.

Melalui proses akomodasi seseorang akan mencari suatu keseimbangan untuk meredakan konflik. Dalam cara disasosiatif, cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan lawan serta mengusahakan terjadi peleburan (asimilasi) dan akulturasi dalam anggota kelompok-kelompok sosial yang berbeda kebudayaannya, kemudian menyesuaikan diri.

Gillin menyebutkan faktor-faktor yang mempermudah terjadinya asimilasi dan akulturasi, yaitu toleransi (kesetiakawanan dan keserasian sosial). Kesempatan di bidang ekonomi secara seimbang, sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya. Sikap keterbukaan terhadap golongan yang berkuasa dalam masyarakat, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. d) Perkawinan campuran (*amalgamation*), dan adanya ancaman musuh dari luar. Asimilasi menyebabkan perubahan hubungan sosial dan perubahan pola adat-istiadat serta interaksi sosial yang disebut akulturasi (Gillin & Gillin, 1954: 487-488). Perbedaan asimilasi dan akulturasi dilukiskan dalam Gambar 1. Asimilasi bukan merupakan proses yang searah melainkan proses dwiarah (*two-way process*) karena menyangkut hubungan pihak yang diintegrasikan dan kelompok anggota-anggota lain yang mengintegrasikan diri.

Proses integrasi sosial bukan suatu proses yang berjalan cepat karena merupakan suatu proses mental. Integrasi merupakan suatu ikatan berdasarkan norma yaitu melalui norma kelompok akan membentuk suatu unsur yang mengatur perilaku dengan mengadakan tuntutan tentang bagaimana orang harus bertindak. Integrasi tersebut akan dapat berhasil apabila, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil mengisi kebutuhan satu sama lain, sehingga tercapai semacam konsensus mengenai norma dan nilai sosial, normayang cukup lama konsisten dan tidak berubah-ubah. Apabila anggota masyarakat merasa, bahwa mereka tidak dirugikan dalam kehidupan kelompok, atau merasa bahwa keuntungan yang diperoleh dari kelompok masih lebih besar dari pada ruginya maka dengan sendirinya anggota masih merasa aman dalam kelompoknya (Ogburn, 1964: 102).

Pemahaman tentang kesetiakawanan sosial sangat berkaitan dengan kehidupan manusia yang damai, menurut Johan Galtung adalah adanya perdamaian diartikan tidak adanya atau berkurangnya jenis kekerasan, perdamaian adalah transformasi konflik kreatif non kekerasan. Menurut pendapatnya pada definisi pertama, memiliki konsekuensi pada kerja perdamaian, yaitu kerja untuk mengurangi kekerasan de-



Gambar 1.
Asimilasi dan Akulturasi

ngan cara-cara yang damai. Sedangkan definisi kedua konsekuensi studi tentang kondisi kerja perdamaian, sehingga diagnosis, prognosis, terapi dapat diterapkan. Sebagai pembawa perdamaian adalah setiap orang (Galtung, 2003: 21). Faktor-faktor yang mempengaruhi perdamaian antara lain struktur, budaya, identitas dsbnya. Sedangkan aktornya adalah semua masyarakat. Sikap kesetiakawanan sosial merupakan modal sosial untuk mengatasi terjadinya konflik, menuju perdamaian. Menurut Pierre Bourdieu dalam Ari Dwipayana, mendefinisikan modal sosial sebagai sumber daya dan potensial yang dimiliki oleh seseorang, berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk Pengakuan dan pengenalan timbal balik (atau dengan kata lain: keanggotaan dalam kelompok sosial), yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif. Sedangkan menurut James Coleman modal sosial sebagai sesuatu yang mempunyai dua ciri yaitu pertama aspek dari struktur sosial tersebut. Dalam pengertian ini, bentuk modal sosial adalah berupa kewajiban dan harapan, potensi informasi, norma dan sanksi yang efektif, kedua hubungan otoritas serta organisasi sosial yang bisa digunakan secara tepat. Potensi untuk memperoleh keuntungan dan perlakuan khusus yang berasal dari mereka yang memiliki rasa simpati dan kewajiban adalah esensi utama dari modal sosial. Adapun bentuk modal sosial, meliputi tiga level yaitu nilai, institusi dan mekanisme. Bentuk-bentuk modal sosial adalah berupa kewajiban dan harapan serta potensi informasi, norma dan sanksi yang efektif, hubungan otoritas juga organisasi sosial yang bisa digunakan secara tepat. Adapun fungsi dari modal sosial tersebut adalah untuk mengatasi berbagai hambatan kolektif guna menciptakan kerja sama dalam komunitas. Pada masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia. Modal sosial bisa berfungsi untuk memelihara integrasi sosial atau mengatasi konflik di masyarakat.

Pada hakekatnya modal sosial menjadi sangat penting artinya untuk mencegah disintegrasi sosial dan membangun integrasi sosial, dalam masyarakat yang rawan konflik. Upaya menciptakan fasilitasi proses rekonsiliasi dalam masyarakat pasca konflik. Modal sosial

mewujudkan komunitas sipil yang humanistik dan beradab. Komunitas yang melembaga dan dilandasi oleh sikap kesetiakawananan sosial, merupakan salah satu wujud modal sosial, karena adanya beberapa aspek potensi sosial antara lain kesepakatan, konsensus berdasarkan kesetaraan politik, solidaritas sosial, toleransi, dan kerjasama dan kepercayaan satu sama lain (*mutual trust*) diantara warga masyarakat (AA. Dwipayana, 2001: 31).

C. Hasil Penelitian: Pelestarian Tradisi *Pela Gandong*

1. Tradisi, Nilai Sosial dan Budaya Kota Ambon Pascakonflik Sosial

Letak dan batas wilayah Kota Ambon sebagian besar berada dalam wilayah pulau Ambon dan secara geografis terletak pada posisi 3°-4° lintang selatan dan 128°-129° Bujur Timur, dimana secara keseluruhan Kota Ambon berbatasan dengan kabupaten Maluku Tengah. Batas sebelah selatan adalah Laut Banda, kemudian batas sebelah Barat adalah Petuanan Desa Hatea, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. Menurut sejarahnya Kota Ambon dimulai pada tahun 1575, saat dibangunnya benteng Portugis di Pantai Honipopu sering disebut Benteng Kota Laha atau Ferangi. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut kemudian mendiami sekitar benteng. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut dikenal dengan nama Soa Ema, Soa Kelang, Soa Silale, Hative Urimessing dan sebagainya. Kelompok-kelompok masyarakat inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal terbentuknya Kota Ambon. Sejak awal kepulauan Maluku didiami oleh dua suku asli yaitu suku Alune dan suku Wemale. Dari kedua suku tersebut berkembang sejumlah suku seperti halnya suku Akifuru, Togitil, Faru, Ternate, Seram, Buru, Takabu, Tobelo, Banda, Rana serta Moa. Dari keberagaman suku – suku itulah muncul nama Maluku. Sedikitnya terdapat 41 sub etnis yang mendiami kepulauan Maluku. Pada abad ke 13 para saudagar Arab tertarik dengan rempah-rempah yang dihasilkan dari kepulauan tersebut. Akhirnya mereka beramai-ramai singgah di kepulauan tersebut. Memberikan nama sebagai Jazirah Al-Muluk, yang berarti banyak raja. Dalam perjalanan sejarahnya banyak raja di kawasan Maluku yang terpikat dengan ajaran

Islam. Kemudian memunculkan kerajaan Islam antara lain Bacan, Jailolo, Ternate dan Tidore. Letak dan posisi Maluku secara geografis memang cukup strategis, diapit oleh dua samudera yaitu pasifik oleh sebab itu tidak heran apabila sampai saat ini banyak pendatang yang ingin bermukim di kepulauan Maluku ini. Pada sekitar tahun 1512 orang portugis mulai masuk ke Hitu di Pulau Ambon, sepuluh tahun kemudian orang portugis bersekutu dengan Ternate, mereka mulai membangun pangkalan dan beteng di sekitar Ternate, secara perlahan pertahanan Portugis di kembangkan. Portugis selain berdagang juga berusaha mengembangkan agama kristen. Oleh sebab itu wajar jika kepulauan Maluku sebagian besar menganut Agama Kristen.

Seperti layaknya Kota-Kota lainnya di Nusantara di bawah pemerintahan resmi Belanda, secara vertikal penduduk Ambon dibagi kedalam tiga kelompok yang mengacu kepada ras tubuh yaitu masyarakat Eropa dan orang-orang etnik dan kaum sipil urban (Burgerij). Kategori pertama adalah orang Portugis yang masih menetap meski Belanda telah menguasai seluruh Kota. Mereka juga disebut kaum *Mardijker*, sehingga mereka menempati sebuah wilayah yang disebut *Mardika*. Kaum *Mardijker* kemudian menjadi media diserapnya kebudayaan lokal Kota Ambon. Mulai dari busana, nama keluarga. Pada umumnya orang *Mardika* memiliki solidaritas vertikal yang kuat terhadap Portugis. Selanjutnya ada pula sebuah *Inlandsche Burgerij* merupakan warga Kota yang bukan orang Ambon. (Hatib Abdul Kadir, 2009: 58).

Konstruksi terhadap etnis tertentu sangat tajam, meski orang tersebut lahir dan dibesarkan di wilayah Kota Ambon, sepertihalnya warga etnis Buton, asal usul mereka adalah migran muslim, yang kebanyakan tinggal di wilayah pesisir seperti di daerah Kampung Silale yang sangat padat dan kumuh. Penduduk Kota Ambon memiliki latar belakang kedekatan dengan birokrasi kolonial, sementara itu orang Buton tidak mempunyai tempat khusus dimata kolonial Belanda dan bahkan dalam birokrasi modern setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Penghasilan orang Buton sangat rendah dan mata pencaharian lebih banyak berada di sektor informal, mereka tidak terdidik. Sehingga dalam penentuan kebijakan politik Kota

Ambon, masyarakat Buton ini nyaris tidak masuk dalam perhitungan, dianggap jauh berada di bawah “anak negeri Maluku” atau etnis asli Maluku. Orang Buton dianggap berada di bawah (*inferior*) sering disebut sebagai “anak dagang” Rendahnya tingkat pendidikan orang Buton tersebut, juga sempitnya lapangan kerja, membuat anak-anak muda Buton sering dianggap menjadi pelaku kriminal di Kota Ambon. Bagi kalangan muda, ternyata Kota Ambon merupakan negeri “sebagai tempat kumpul *basudara, gandong*, dan rasa nasionalitas terhadap daerah “atau Kota Ambon yang terus tertanam dalam hati anak muda di Kota Ambon. Mereka masih mengacu kepada tanah Maluku dan Kota Ambon dimaknai adanya keterkaitan emosional pada daerah asalnya. Oleh sebab itu walaupun secara realitas nilai-nilai *pela gandong* sudah mulai pudar, namun ikatan emosional di kalangan generasi muda masih memiliki sikap kesetiakawanan sosial diantara kaum muda. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa wilayah diluar kepulauan Maluku mempunyai kebudayaan yang berbeda, dengan kehidupan di tanah kelahirannya (Hatib Abdul Kadir, 2009: 287).

Kondisi budaya pada dasarnya nenek moyang orang Maluku (anak negeri Maluku) memiliki budaya atau kearifan lokal yang mengatur fungsi dan berbagai sistem antara lain sebagai berikut. Menerapkan sistem pemerintahan dengan pembagian kekuasaan, sistem tersebut telah dilaksanakan oleh nenek moyang orang Maluku, sebelum adanya pengaruh sistem pemerintahan demokrasi. Adapun sistem pemerintahan tersebut meliputi fungsi legislatif (pembuat peraturan) di pegang oleh badan *Saniri* secara berjenjang mulai dari Saniri Besar pada pusat negara, *Saniri Ina Amia* merupakan badan legislatif di tingkat lebih rendah, fungsi seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Daerah pada tingkat provinsi atau Kabupaten dan Saniri Negeri di negeri masing-masing kewenangan lembaga legislatif tertinggi di pegang oleh *Misinipi* (seperti MPR di NKRI) Fungsi eksekutif di pegang oleh raja disebut *latu* Apabila ia adalah seorang laki-laki, sebutan di berikan kepadanya adalah *upu latu*. Jika seseorang perempuan diberikan di berikan gelar *Ina latu*. Fungsi yudikatif adalah fungsi peradilan di pegang oleh Hena.

Pada dasarnya nenek moyang bangsa Maluku, mengakui serta meyakini Tuhan yang disebut. *Upulanite* artinya “Tuhan penguasa langit” nama Tuhan yang disembah menurut keyakinan orang Maluku nama agama mereka, adalah Tuhan yang disembahnya. Cara mereka berdoa harus dilakukan di alam terbuka tanpa penghalang. Dalam kegiatan ibadah tersebut harus menggunakan pakaian hitam, sebagai bentuk kesadaran bahwa Tuhan yang disembah adalah suci. Mereka adalah orang yang berdosa, untuk itu perlu menghadap Tuhan dalam suasana berkabung. Pusat atau tempat penyembahan mereka disebut Kakehang. Masyarakat atau warga biasa tidak diperbolehkan berada di Kakehang, hanya tokoh masyarakat (pemimpin masyarakat) juga calon-calon pemimpin yang diperbolehkan berada di Kakehang Apabila ditinjau dari perbedaan agama, warga Kota Ambon tidak menjadikan para warga Kristen dan Islam berpisah, namun sebaliknya membangun dan menciptakan kebudayaan baru yang melewati batas agama guna mengatasi berbagai kebutuhan agama, kearifan lokal yang tetap lestari yaitu antara lain *pela gandong*, *duan tolat* dan sebagainya. Sistem persekutuan/kerukunan hidup orang basudara, merupakan Nilai-nilai tradisional dikalangan warga Maluku, adalah menerapkan kekeluargaan dalam bentuk persekutuan yang rukun sejak leluhur melalui *pela gandong* termasuk pula tentang mekanisme kerja dalam bentuk bagi hasil yang disebut maano (Semuel Waileruny, 2010: 118-122)

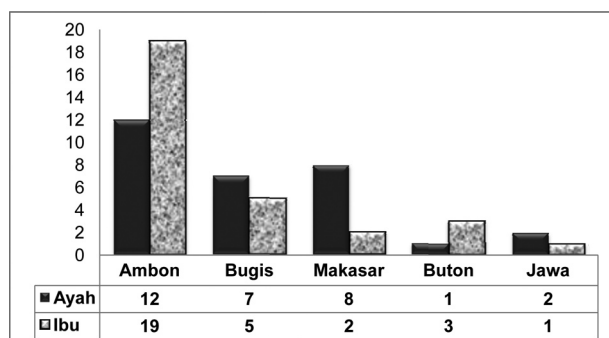
Apabila dikaji dari nilai-nilai adat yang dianut, maka warga Maluku Selatan khususnya di Kota Ambon, Seram dan pulau-pulau disekitarnya memiliki nilai-nilai kerukunan atau kesetiakawanan sosial yang disebut “*pela gandong*” merupakan sistem nilai sebagai peredam terjadinya konflik sosial didalam kehidupan masyarakat di Ambon. Sistem ini memungkinkan warga yang berbeda agama ataupun suku yang mengangkat sumpah melalui upacara khusus, berjanji untuk saling hidup rukun, Seperti layaknya saudara kandung. *Pela* berasal dari kata *Pila* yang berarti berbuatlah perilaku kebersamaan. Sistem sosial ini melahirkan *cross cutting affiliation* hubungan *pela* ini bukan saja terjadi antara negeri yang menganut agama yang sama, namun juga terjadi dengan negeri yang berlainan agama.

Hubungan *pela* ini terjadi karena ada beberapa faktor antara lain: 1) hubungan *pela* sebagai balas jasa antara negeri satu dengan lainnya, yang pernah membantu baik secara politik maupun sosial; 2) Hubungan *pela* yang disebabkan adanya hubungan persaudaraan; 3) Hubungan *pela* yang disebabkan terjadinya hal-hal yang luar biasa seperti halnya, perkawinan warga. (Nong D. Mahmada dkk, 2000: 21-22).

Deskripsi pendidikan responden penelitian, persentase tertinggi 22 orang (73,33 persen) dari 30 orang responden adalah berpendidikan SLTA, selanjutnya 5 orang responden (16,67 persen) adalah setingkat D3 (sarjana muda) 3 orang (10 persen) adalah setingkat sarjana. Apabila dikaji dari 30 responden sebagian besar berpendidikan SLTA. Hal ini wajar sebab memang para tokoh adat dan masyarakat yang dipilih menjadi responden, sehingga wajar jika sebagian besar memiliki pendidikan menengah ke atas. Apabila ditinjau dari jenis kelamin 13 orang (43,3 persen) perempuan, kemudian 17 orang (56,6 persen) adalah laki-laki. Dari data tersebut dapat diindikasikan bahwa homogenitas data cukup terjamin, karena jumlah perempuan dan laki-laki sebanding. Selanjutnya jika dari sisi agama maka 11 orang (36,67persen) beragama Islam, sedangkan 16 orang (53,33persen) beragama Kristen. Sedangkan 2 orang (6,67persen) beragama Katholik dan 1 orang (3,3persen) beragama Hindu. Dari sisi agama perkembangan penduduk Kota Ambon dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir dapat dikatakan mengalami perkembangan yang sangat berarti.

Akibat perkembangan ekonomi dan meningkatnya arus migrasi dari daerah disekitar Kota Ambon. Maka Kota Ambon dihuni oleh berbagai macam etnis dan agama. Apabila ditinjau secara etnis penduduk Kota Ambon sangat beragam. Selain penduduk asli Kota Ambon, ternyata warga Kota Ambon juga menerima banyak pendatang dari luar seperti halnya suku Buton, Bugis dan Makasar, maupun Jawa. Dari keberagaman etnis penduduk tersebut, juga mempengaruhi keberagaman agama yang dianut oleh penduduk Kota Ambon. Di samping beberapa etnis di atas Kota Ambon juga dihuni oleh warga keturunan Cina dan Arab. Perkembangan data penduduk menunjukkan ada beberapa

etnis migran ke Kota Ambon. Etnis responden terungkap pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2
Etnis dari Kedua Orang Tua (Ayah dan Ibu)
Responden

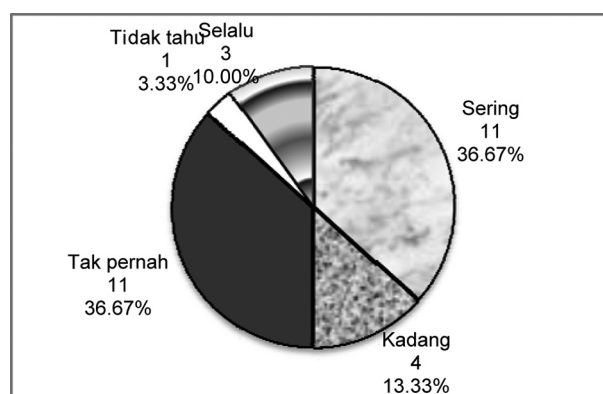
Sumber: Jawaban Responden (N=30)

Gambar 2 menunjukkan bahwa dari 30 responden orang tua mereka baik ayah maupun ibu merupakan bentuk dari keluarga yang multikultural. Perkembangan penduduk menurut etnis di Kota Ambon dengan datangnya berbagai migran, dengan sendirinya mempengaruhi keseimbangan jumlah penduduk asli Kota Ambon yang beragama Kristen dan masuknya migran dari Jawa sejak tahun 1971 yang sebagian besar beragama Islam, karena adanya proyek tahanan politik di Pulau Buru. Seiring dengan meningkatnya kaum migran maka komposisi penduduk dari segi agama juga menunjukkan adanya perubahan penting.

Jumlah penduduk muslim dan Kristen mengalami perubahan secara seimbang. Perkembangan penduduk menurut etnis maupun agama ini, tampak dari makin terimbangnya jumlah penduduk antara penganut Muslim maupun Kristen. Hal ini terjadi karena meningkatnya jumlah penduduk migran, yang sebagian besar adalah muslim, terutama dari etnis Buton, Bugis, Makasar dan Jawa. Semakin tingginya arus migrasi di Kota Ambon, berarti makin tingginya krisis hubungan antara pendatang dan penduduk asli. Kondisi tersebut diperparah dengan pengembangan struktur pemerintahan yang sentralistik dan otoritarian. Juga makin meningkatnya penyalahgunaan kekuasaan, dalam bentuk politisasi etnis maupun agama, sehingga merebak fundamentalisme agama dan etnisitas di berbagai daerah di Provinsi Maluku,

khususnya di Kota Ambon. Kecenderungan tersebut menyebabkan pendangkalan nilai kultur lokal serta agama, lebih lanjut makin hilangnya modal dan potensi sosial kultural di Kota Ambon. Pendangkalan nilai kulturil lokal dan etnisitas tersebut, Akhirnya makin berkembangnya fanatisme, eksklusifisme, fundamentalisme yang berlawanan dengan prinsip demokrasi dan perdamaian.

Ketergantungan ekonomi pada pemerintah pusat ataupun dari pihak luar tentu menumbuhkan masalah sosial maupun politik tersendiri. Kondisi tersebut menyebabkan penetrasi kapital dan campur tangan politik maupun kapital ekonomi dari pusat yang terlalu besar. Hal ini berakibat terjadinya marginalisasi sektor ekonomi pada aras lokal, serta makin terdesaknya kepemimpinan adat yang selama ini menjadi pengikat kesetiakawanan sosial yang sangat bergantung pada sumber daya lokal. Dari hasil penelitian terungkap data pada Gambar 3.



Gambar 3
Respons responden tentang frekuensi
permusyawaratan dan pemufakatan antara
tokoh masyarakat, pemerintah, dan warga
Kota Ambon (N=30)

Dari Gambar 3 tampak bahwa pertemuan dan musyawarah para tokoh masyarakat/pemerintah dengan warga masyarakat, dari 30 orang responden, terungkap 15 orang (50 persen) menyatakan “kadang-kadang” dan “tidak pernah”. Dari data tersebut berarti hanya 50 persen responden menyatakan mengikuti dan selalu melaksanakan musyawarah dengan pimpinan pemerintah atau tokoh masyarakat lokal. Kejadian yang sering memicu konflik karena kurangnya

permufakatan dan pelaksanaan musyawarah antara pimpinan adat, warga masyarakat lokal serta pemerintah. Dari data hasil penelitian juga terungkap rendahnya frekuensi pelaksanaan musyawarah atau permufakatan atas berbagai masalah sosial di Kota Ambon dari 30 orang responden setiap tahun 15 orang (50 persen) menyatakan tidak pernah dan kadang-kadang.

Data di atas mengindikasikan bahwa tingkat kerjasama diantara berbagai elemen di tingkat lokal masih rendah. Hal ini terjadi karena rendahnya kerjasama antar pemimpin adat lokal dengan birokrasi pemerintah, serta bisnis swasta Dimulai dari gerakan konflik perebutan sumber daya alam antara pemerintah serta masyarakat sipil dan tokoh adat dan masyarakat lokal. Resistensi masyarakat adat terhadap penetrasi bisnis dan birokrasi tersebut bukanlah hal yang baru, tetapi fenomena ketidakadilan sudah berlangsung lama. Rendahnya kerjasama antara berbagai pimpinan dan tokoh masyarakat di Kota Ambon, lebih banyak dikarenakan oleh mudahnya nilai warisan budaya bernama *pela gandong*. Merupakan nilai-nilai kultural lokal yang pada hakekatnya mengajarkan, bahwa masyarakat Kota Ambon yang terdiri dari umat Islam juga umat Kristen berasal dari satu kandung, sehingga setiap warga harus menjaga kerukunan, sikap saling tolong menolong dalam kehidupan masyarakat, sehingga konflik antar-warga harus dihindari.

Ikatan *pela gandong* merupakan jalinan kerukunan antara desa Muslim (salam) dengan desa Kristen (Sarani), sudah diketahui jika di Kota Ambon dan daerah Maluku pada umumnya terjadi segregasi sosial, dimana setiap desa hanya dihuni oleh pemeluk Kristen saja, ataupun pemeluk Islam. Dalam upacara adat ngayian atau basaro (merupakan kidung) dilantunkan *pela gandong*. Apabila diamati maka tampak jika warga Kota Ambon, merupakan mozaik keberagaman etnis dari agama. Selama ini mereka hidup rukun, tetapi seiring dengan pembangunan dan modernisasi, terjadi desakralisasi dan infiltrasi terhadap kebudayaan atau nilai-nilai *pela gandong*. Hal tersebut terjadi karena adanya pendekatan uniformitas atau penyeragaman, sehingga tiada ruang bagi budaya lokal yang seharusnya dikembangkan. Ketidakberdayaan *pela gandong* tersebut juga

dipengaruhi pula oleh kenyataan, dimana warga Kota Ambon dan Maluku, penduduk yang sangat majemuk, terdiri dari berbagai suku, yang mana mereka membawa nilai-nilai budaya sendiri, para migran sebagai pendatang tidak banyak mengenal tradisi *pela gandong* dengan upacara *panas pela*. Terungkap dari hasil observasi sebagian dari warga masyarakat, melakukan penetrasi terhadap salah satu kelompok. atas dasar kepentingan tertentu. Terbatasnya ruang partisipasi politik, juga makin sempitnya ruang gerak warga masyarakat di Kota Ambon. Akhirnya potensi sosial budaya masyarakat terpasung, dampak dari kondisi di atas, nilai agama, serta etnisitas mudah dimanipulasi demi tujuan politik penguasa. Situasi demikian lebih jauh memudahkan warga tersulut oleh isu-isu kekerasan dan konflik sosial.

Migrasi penduduk dari luar daerah yang terus mengalir ke Kota Ambon dalam beberapa puluh tahun terakhir. Ternyata menciptakan pelapisan sosial dalam kehidupan masyarakat, para migran tersebut terutama berasal dari pulau terdekat, seperti halnya Sulawesi Utara, dan Selatan, terutama suku Buton, Bugis, Makasar. Para migran dari Sulawesi Selatan umumnya bermukim di pesisir pantai, sedangkan di Kota Ambon mereka kebanyakan melakukan usaha dibidang perdagangan. Secara perlahan namun sistematis, berkembang pembagian kerja secara etnis dan agama di Kota Ambon. Secara pasti tumbuh menjadi lapisan baru yang menguasai sektor perdagangan, lazim disebut "anak dagang" berbeda dengan kebanyakan warga asli Ambon yang disebut "anak negeri" dan bekerja di sektor jasa dan birokrasi.

Walaupun sudah cukup lama warga dari berbagai etnis tersebut tinggal di Kota Ambon, namun proses adaptasi sosial budaya antara anak negeri dan anak dagang yang menumpang di atas, tanah anak negeri tersebut, ternyata menumbuhkan perasaan dan tujuan yang berbeda di mana orang menjadi anggota kelompok (*self group dan out group*) dapat hidup atas dasar *co existence*, *self group* dan *another group* yang merasakan dalam diri kelompok pendatang terdapat satu sifat kelemahan, terhadap kelompok warga asli yang sering disebut anak negeri sehingga ada kecenderungan "anak negeri" berusaha meningkatkan serta memaksimalkan

sifat-sifat yang dirasa lebih unggul guna memperkuat rasa supremasinya kepada kelompok “anak dagang” yang dianggap lebih lemah, dengan perilaku kekerasan atau cara yang tidak bermoral. Anak dagang secara sosial hanya memiliki kewajiban mematuhi adat setempat tanpa hak untuk memilikinya. Para “anak dagang” yang menggarap tanah baru secara sah memiliki tanah secara sosial, apabila mereka sudah diterima setelah melalui proses adat sebagai “anak negeri”. berdasarkan etnis maupun agama di Kota Ambon ini merupakan potensi konflik terpendam yang pada saatnya dapat berpotensi menjadi konflik terbuka, ketika tidak ada mekanisme pembagian kekuasaan yang jelas dan kehilangan kekuatan kontrol dari kecil secara tradisional warga Kota Ambon yang selama ini menganut nilai-nilai adat dan budaya. *Pela Gandong* adalah institusi sosial yang berfungsi untuk mengikat desa muslim (negeri salam) dan desa kristen (negeri sarani) dalam ikatan *Pela* dan *gandong*. Pada dasarnya kedua ikatan itu merupakan mekanisme hubungan sosial guna mencegah terjadinya konflik antar warga. *Pela* diartikan sebagai suatu ikatan hubungan antara dua ataupun lebih desa salam (Islam) dan sarani (Kristen) berdasarkan kontrak perjanjian untuk tidak berkonflik satu sama lain. Sedangkan *gandong* adalah ikatan sosial antar negeri atau desa berdasar hubungan darah atau keturunan. Arti dari *gandong* adalah berarti kandungan merupakan ikatan berhubungan antar saudara satu keturunan.

2. Solidaritas dan Kesepakatan Masyarakat Kota Ambon dalam Menaati Peraturan

Akibat terparah kekerasan dan konflik di Kota Ambon adalah semakin menurunnya wibawa adat serta pranata sosial bahkan tokoh masyarakat. Sebab makin meluasnya dua pijakan nilai-nilai sebagian tokoh adat masih percaya jika ikatan adat, mampu menautkan kelompok masyarakat di Kota Ambon, tetapi di sisi yang lain sudah tidak percaya lagi dengan pranata adat. Adanya anggapan bahwa *Pela Gandong* merupakan ungkapan para orang tua sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan kemajuan jaman. Hasil penelitian diharapkan diperolehnya informasi mengenai kadar kesetiakawanan sosial, yang berkaitan dengan solidaritas warga,

kesepakatan dalam mentaati peraturan yang telah disepakati bersama. Dari data hasil penelitian 63,33 persen para responden menyatakan bahwa 7 orang (23,33 persen) “tidak pernah” dan 12 orang (40 persen) menyatakan kadang-kadang mentaati peraturan yang sudah disepakati bersama antar warga, dari data di atas mengindikasikan bahwa tingkat solidaritas dan kesepakatan dalam mentaati peraturan rendah, hal ini karena ketidakpercayaan pada aparat keamanan serta munculnya saling curiga. Hal ini disebabkan karena penegak hukum dipandang sudah terseret masuk dalam situasi konflik yang ada. Aparat yang beragama Islam, membantu warga yang beragama Islam, sebaliknya aparat yang beragama Kristen dituding membela komunitas Kristen. Warga Kota Ambon mengalami keputusasaan (*desperation*) yang sangat menekan mental mereka. Keputusan tersebut disebabkan ketidakpercayaan mereka, pada upaya pelaksanaan dialog guna memecahkan masalah. Akhirnya mereka memilih kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Akar permasalahan di Kota Ambon adalah faktor ketidakadilan, baik di bidang ekonomi, politik maupun secara hukum, selain itu juga marginalisasi peran yang disebabkan oleh bergesernya komposisi penduduk Kristen dan Islam. Makin meningkatnya jumlah penduduk beragama Islam, ketidakseimbangan tersebut menumbuhkan kecurigaan diantara para warga di Kota Ambon. Dari data hasil penelitian terungkap 73,33 persen warga Kota Ambon menghendaki adanya kerjasama dari berbagai pihak untuk membangun kembali Provinsi Maluku, khususnya Kota Ambon. Berarti upaya hidup gotong royong saling menghormati, ternyata menjadi dambaan setiap insan di Kota Ambon. Nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang didambakan setiap warga Ambon sebagai *Pela Gandong* melemah karena adanya proses modernisasi, sehingga masyarakat yang semula *gemeinschaft* berubah menjadi *gesellschaft*. Terjadinya perubahan dari sifat yang akrab antara sesama warga masyarakat, karena kemajuan akibat modernisasi ikatan tersebut makin melemah, sehingga hubungan sosial dalam masyarakat semakin pudar, terutama di kalangan kaum muda Kota Ambon. Kenyataan menunjukkan bahwa walaupun pernah terjadi konflik, masih ada upaya warga Kota Ambon untuk mencari

berbagai solusi atas konflik dan akibat dari konflik. Hal ini tampak dari upaya-upaya untuk menghindari konflik. Dari hasil penelitian terungkap bahwa setiap peraturan yang sudah disepakati seharusnya diikuti dan warga yang melakukan pelanggaran atas peraturan tersebut perlu dikenai sanksi. Dari 30 orang responden, 20 orang (66,67 persen) menyatakan bahwa para warga “selalu menyepakati” peraturan yang sudah ditetapkan bersama, kemudian 7 orang (23,33 persen) menyatakan “sepakat” “pada peraturan yang sudah ditetapkan bersama. Dari data tersebut dapat diindikasikan bahwa kadar kesetiakawanan sosial warga Kota Ambon masih cukup tinggi, sehingga secara perlahan-lahan upaya rekonsiliasi dapat dikatakan cukup berhasil, hal ini disebabkan masih banyaknya komunitas Maluku khususnya warga Kota Ambon, yang memiliki keprihatinan moral dan terus menerus mencari solusi menciptakan perdamaian di bumi Ambon. Masih ada inisiatif dari masyarakat untuk melestarikan nilai-nilai kesetiakawanan sosial. Melalui berbagai kesepakatan pendapat dan norma yang sifatnya prural, ternyata mampu memperluas integrasi antar etnis yang sangat jamak di Kota Ambon.

Situasi Konflik terjadi karena pada dasarnya konflik merupakan hasil dari interaksi sosial menuju pembentukan sistem sosial. Hal ini terjadi karena proses sosial berakibat pada proses yang asosiatif (*process of association*) yang terbagi kedalam tiga bentuk akomodasi, asimilasi dan akulturasi. Hal ini tampak dari hasil penelitian terungkap 63,33 persen para responden, menyatakan “selalu melaksanakan kegiatan sosial bersama dalam rukun warga/rukun tetangga di Kota Ambon, kemudian 7 orang (23,33 persen) menyatakan “seringkali melaksanakan kegiatan sosial bersama” dari jawaban tersebut, mengindikasikan bahwa telah terjadi proses akomodasi, antara para pendatang dan orang Maluku, dalam upaya mencari keseimbangan untuk meredakan konflik.

Masuknya migran dari berbagai daerah terutama dari Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan juga menambah rumit kehidupan sosial di Kota Ambon. Peningkatan arus migrasi ke Kota Ambon ternyata mempermudah sikap saling curiga antar penduduk. Situasi tersebut berpengaruh pada pranata sosial budaya di

Kota Ambon. Komunikasi sosial serta nilai-nilai budaya yang selama ini hidup dan berkembang secara alami di Kota Ambon dihilangkan oleh sistem pemerintahan seperti halnya karisma *Bapak Raja*, *Kewang* serta *Marinjo* dan *Kepala Soa* maupun *Kapitan* yang semula merupakan bentuk-bentuk pranata sosial di daerah terasingkir oleh Kepala Desa, Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Babinsa. Sistem dan nilai yang berdasarkan kearifan lokal seperti halnya *pela* tidak dihidupkan lagi karena penyeragaman sistem sosial seperti desa-desa di Jawa. Berdampak pada pudarnya nilai kesetiakawanan sosial di Kota Ambon. Arus migrasi dari luar Kota Ambon, yang bukan orang Maluku, pada umumnya mereka bersikap serta bertingkah laku menurut budaya asli mereka. Budaya yang berbeda tersebut tidak mungkin diatur oleh pengaruh adat Ambon serta hukum adat orang Maluku. Datangnya pendatang yang masuk di Kota Ambon tentunya terjadi akulturasi budaya. Akulturasi pada dasarnya merupakan proses dialektika budaya yang berjalan secara linier dan dinamis, namun ditengah berbagai perubahan sosial budaya tersebut, mengalami distorsi termasuk budaya penduduk Kota Ambon dengan budaya *pela gandong*-nya, kondisi tersebut merupakan dampak dari politik nasional bersifat sentralistik sehingga budaya, dan nilai tradisi serta kearifan lokal yang dimiliki oleh warga Kota Ambon tidak dilestarikan. Selama 20 tahun terakhir sistem tradisional di Kota Ambon mengalami degradasi secara fungsional, karena proses modernisasi yang melanda bangsa Indonesia, menjadi salah satu penyebab terjadinya lengsernya orientasi kebersamaan dan kesetiakawanan sosial. Orientasi nilai budaya *pela gandong* yang merupakan sistem nilai-nilai bagi masyarakat yang berbeda agama, mengangkat sumpah melalui upacara khusus, berjanji menjunjung tinggi sikap kesetiakawanan sosial. Para pemimpin tradisional dalam hal ini tokoh-tokoh adat sudah tidak lagi bersikap aspiratif pada warganya. Hal ini tampak dari perilaku para kepala desa yang lebih sibuk mengurus proyek dari pada mengurus rakyat.

Keanekaragaman budaya Indonesia dilucuti diganti dengan pranata-pranata “modern” dan informasi. Dampak dari pelucutan kearifan lokal dan pranata sosial lokal tersebut, tampak dari

beberapa kekayaan budaya daerah seperti halnya *pela gandong*, pada suatu sisi memang sengaja diangkat ke permukaan, namun hanya sebagai simbol. Disisi lain pranata alat untuk mendukung sikap hidup kesetiakawanan sosial seperti halnya *pela gandong* yang merupakan sikap hidup warga Kota Ambon secara sistematis dibuat tidak berdaya.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Sebagai upaya untuk mendeskripsikan sejauh mana peran nilai tradisi budaya *pela gandong* yang bermakna menjunjung tinggi sikap kesetiakawanan sosial, mampu mencegah terjadinya konflik sosial agar terwujudnya perdamaian di Kota Ambon Berdasarkan hasil analisis data penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik sosial di Kota Ambon adalah dampak dari perkembangan migrasi penduduk dari sekitar daerah Ambon menyebabkan Kota Ambon dihuni oleh berbagai macam penduduk Meningkatnya jumlah migran muslim ini sedikit banyak menumbuhkan krisis persepsi, hubungan, kecurigaan dan ketegangan sosial antara kedua komunitas tersebut. Situasi tersebut juga dipicu oleh makin banyaknya pengangguran di Kota Ambon, konflik di Kota Ambon ini merupakan suatu proses dalam rentang waktu yang cukup panjang. Kedua Penyesuaian budaya dari pendatang sangat lamban, proses adaptasi sosial kultural “anak dagang” merupakan sebutan dari para migran, terhadap budaya setempat. Berdampak kurang cepatnya proses akulturasi budaya. Di sisi lain, makin surutnya kekuatan dan kewibawaan tokoh adat serta pranata sosial, di kalangan generasi muda maka nilai-nilai budaya *pela gandong* sebagai nilai-nilai tradisi kerukunan dan kesetiakawanan sosial, yang menjadi pegangan penduduk asli seiring dengan modernisasi makin pudar keberadaannya. Ketiga Ketergantungan ekonomi Kota Ambon pada pemerintah pusat maupun pihak dari luar, menumbuhkan masalah sosial maupun politik tersendiri. Terjadinya penetrasi kapital serta campur tangan politik, munculnya marginalisasi sektor ekonomi pada aras lokal, juga makin terdesaknya kepemimpinan adat yang selama

ini menjadi pengikat kesetiakawanan sosial. Kedudukan mereka sudah terdesak dengan adanya modernisasi, juga makin memudarnya nilai-nilai tradisi *pela gandong* terutama dikalangan generasi muda. Akhirnya peran sikap kesetiakawanan sosial di Kota Ambon, tergerus oleh arus informasi maupun modernisasi. Selain itu faktor lain yang menjadi penyebab rendahnya sikap kesetiakawanan sosial, adalah adanya perebutan sumber daya dan terjadinya erosi budaya, juga belum ditemukannya bentuk solidaritas pola hubungan baru di daerah perKotaan antara “*anak negeri*” dan “*anak dagang*”. Hal ini terjadi karena proses asosiatif, yaitu meliputi proses akomodasi, asimilasi, akulturasi dalam kehidupan masyarakat antara “*anak negeri*” dan “*anak dagang*” prosesnya sangat lamban. Proses asimilasi dan akulturasi bukanlah proses yang searah, namun proses dua arah (*two way process*). Hal ini terjadi karena kurangnya sikap penghargaan terhadap pendatang atau orang asing, termasuk kebudayaannya, selain itu kurangnya keterbukaan penduduk asli dan golongan yang berkuasa dalam kehidupan masyarakat. Keempat Akibat terparah kekerasan dan konflik di Kota Ambon, adalah semakin menurunnya wibawa adat serta pranata sosial bahkan tokoh masyarakat. Makin meluasnya dua pijakan nilai-nilai, sebagian tokoh adat masih percaya jika ikatan adat mampu menautkan kelompok masyarakat di Kota Ambon, tetapi di sisi yang lain warga Kota Ambon sudah tidak percaya lagi dengan pranata adat. Adanya anggapan bahwa *pela-gandong* merupakan ungkapan para orang tua, bagi generasi muda, sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan kemajuan jaman. Berdasarkan hasil observasi ternyata masih ada insiatif berbagai elemen masyarakat Kota Ambon, untuk tetap melestarikan nilai-nilai *pela gandong*, sebagai sikap dasar kesetiakawanan sosial, menuju proses integrasi sosial antar etnis, guna mendorong terbentuknya sistem sosial Keenam Warga berusaha memupuk perdamaian dan solidaritas, melakukan dialog secara horizontal antara tokoh muslim dan Kristen. Kemudian secara vertikal antara tokoh masyarakat dengan warganya, berusaha menangkal isu yang membangkitkan semangat konflik.

2. Saran

Upaya yang harus ditempuh guna merajut perdamaian abadi di Kota Ambon adalah sebagai berikut: Mempercepat pelaksanaan otonomi daerah. Juga berusaha memperkuat dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah, Disamping itu juga mengembangkan *social capital*. Cara yang ditempuh antara lain: Memperkuat pranata sosial, untuk itu perlu kiranya menghidupkan kembali lembaga adat, mengembangkan toleransi, sikap solidaritas antar umat beragama. Memberikan perlindungan dan penghormatan pada nilai-nilai kearifan lokal, juga budaya/ adat yang mendukung tercapainya demokratisasi. Upaya memperkuat kelompok masyarakat adat, perlu merekomendasikan pelestarian budaya dan tradisi lokal. Sebab, pada hakekatnya kebudayaan (nilai budaya) menjadi kekuatan penggerak bagi si empunya budaya untuk beraktivitas. Kebudayaan *top down* (dari atas ke bawah) dibangun oleh penguasa bukan untuk kepentingan masyarakat; Mengembangkan modal sosial berupaya memeliharanya serta mempertahankan, nilai kemasyarakatan atau modal sosial, merupakan perwujudan dari kapasitas sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memelihara integrasi sosial. Pemeliharaan serta penguatan *preserve social capital*, sebagai basis kekuatan yang memiliki legitimasi sosial untuk melindungi masyarakat. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah, selain itu juga mengembangkan *social capital*. Berusaha mempercepat pembangunan sumber daya alam dan manusia, juga reorientasi pembangunan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, menuju pengembangan sosial berdasarkan pemerataan. Oleh sebab itu, perlu kiranya pengembangan pembangunan kesejahteraan sosial secara integratif antar-instansional. Dalam pengertian modal sosial menekankan pentingnya transformasi dari hubungan sosial yang sesaat dan rapuh (*contingent relations*), seperti pertemanan atau bentuk interaksi kekeluargaan. Jumlah modal sosial yang dimiliki seseorang tergantung pada jaringan hubungan yang dapat dimobilisasikan secara efektif dan tergantung pada volume modal lainnya, ekonomi, kultural, serta simbolik yang dimiliki oleh agen lainnya yang menjadi jaringan. Modal sosial dapat berfungsi untuk

memelihara integrasi sosial dan mengatasi konflik di masyarakat, serta berperan penting guna pencegahan terjadinya disintegrasi sosial. Berusaha membangun integrasi dan kohesi sosial di masyarakat majemuk yang rentan konflik haruslah menyentuh perbaikan pada dua dimensi, baik secara struktural maupun kultural. Guna mereduksi konflik kultural diperlukan dialog interpersonal dan interkomunal, sehingga dapat mendobrak dominasi wacana etnis agama. Pola komunikasi yang kaku dan tertutup, menuju komunikasi dan hubungan sosial yang lebih fleksibel, sehingga bangunan persepsi, sikap pandangan yang menjebak ke dalam konflik, bisa didekonstruksi atau dibongkar dari akarnya. Upaya guna membangun hubungan adat yang lebih luas dengan nilai budaya yang tercakup di dalamnya, membutuhkan konstruksi hubungan berdasarkan nilai budaya perlu direvisi dan direfungsionalisasi. Misalnya, dalam bentuk *pela* maka *pela* antaranak negeri dapat dikembangkan menjadi hubungan *pela* antar pulau, *pela* yang satu dengan lainnya menjadi sandaran guna membangun *pela* antarpulau. Diharapkan nilai budaya tetap terjaga keberadaannya dan mampu menjangkau hubungan yang lebih terbuka. *Gandong* berarti satu kandungan, diharapkan pendatang dapat secara perlahan meninggalkan jati dirinya membaur menyatu dengan budaya dari adat anak negeri Maluku dalam lingkungan petuanan mereka tinggal. Dengan demikian pendatang bukan sekedar mencari keuntungan ekonomi dan politik di Kota Ambon, tetapi juga berasimilasi, akulturasi, menyatu dalam kebudayaan.

Melakukan reformasi birokrasi yang berdasarkan asas meritokrasi (ketrampilan/ kemampuan/prestasi) bersifat non-partisan. Berupaya meningkatkan kapasitas kelembagaan (*institutional capacity building*), berupaya selalu mencegah terjadinya konflik, melalui sosialisasi berbagai model penanganan konflik ke masyarakat secara luas juga pengintegrasian dalam kehidupan politik. Pengembangan model pencegahan konflik, dalam bentuk sistem peringatan dini (*early warning system*), dalam bentuk intensifikasi dialogis antarkomunitas guna memperkuat kerjasama pembangunan sosial dan kemanusiaan menunjang proses demokratisasi mendorong terbentuknya masyarakat

madani. Perlu kiranya upaya menuju perdamaian dan sosial memelihara suasana damai, pelaksanaan rehabilitasi sosial baik secara fisik maupun mental, menghilangkan berbagai *stereotypes* negatif atas bekas lawan. Penekanan dan pengembangan pendidikan perdamaian guna melestarikan suasana damai berbagai daerah yang terlibat konflik sosial. Melakukan interpretasi realitas yang obyektif dan modal sosial. Dalam interaksi sosial, sebelum seseorang bertindak sebagai tanggapan atas rangsangan (stimulus) yang diterimanya, akan berusaha mengembangkan stimulus melalui pemaknaan proses interpretatif yang sesuai dengan realitas obyektif. Mengembangkan dialog secara rutin antarwarga melalui kegiatan bersama antarwarga, baik secara horizontal antarwarga, maupun secara vertikal dialog antara pihak penguasa dengan warga masyarakat maupun tokoh adat/agama. Mengembangkan dialog-dialog secara luas dikalangan komunitas warga Kota Ambon di berbagai lapisan mulai dari bawah, menengah, sampai kalangan atas mengenai masalah yang menjadi sumber dampak dari konflik serta upaya penyelesaiannya. Pemberdayaan komunitas untuk meningkatkan kapasitas lokal (*empowerment for local capacity*) mengembangkan model pengembangan komunitas sebagai resolusi konflik agar terjalin komunikasi dan hubungan yang retak akibat konflik, dapat dipulihkan kembali. Merajut damai dengan pengembangan hubungan yang bersifat asosiatif, dalam bentuk kooperasi, akomodasi, asimilasi. Membentuk jaringan dalam konteks modal sosial, meliputi ikatan antara kelompok dengan orang yang berhubungan dan diikat oleh saling adanya kepercayaan dalam bentuk strategi atau norma. Adanya kerja sama bukan kerja bersama-sama tetapi lebih pada peningkatan kesetiakawanan sosial. Mengembangkan jaringan atau simpul yang kuat menjadikan ikatan kuat. Jaringan tersebut sangat kuat dan tidak dapat dipisahkan. Ikatan simpul dalam modal sosial adalah norma yang mengatur dan menjaga agar ikatan medianya dipelihara dan dipertahankan.

Strategi penanganan konflik dapat dilakukan melalui berbagai tahap sebagai berikut: Tahap pertama, guna menciptakan upaya perdamaian dan kesetiakawanan sosial, melalui pencegahan konflik (*conflict prevention*), menghentikan ke-

kerasan (*peace keeping*), kemudian membangun perdamaian. Pencegahan konflik dilakukan agar konflik tidak muncul kembali, berupaya menciptakan sistem peringatan dini (*early warning system*) mengklarifikasi rumor, prasangka antaretnis, serta upaya mengurangi kesenjangan dan dominasi, ketidakadilan antarkelompok yang merupakan sumber terjadinya konflik. Upaya penghentian konflik dilakukan dengan cara paksaan atau arbitrase, pada saat konflik terjadi memanfaatkan aspek komponen hukum, sanksi politik, ekonomi, dan sosial dan budaya, berbasis nilai kultural. Penumbuhan sikap kesetiakawanan sosial dan perdamaian dilakukan pada saat terjadi konflik dengan memfasilitasi berlangsungnya dialog, baik secara vertikal maupun horizontal. Membangun kerangka landasan kebersamaan, agar menemukan kesamaan, mengembangkan sikap saling menerima, berlandaskan sikap kesetiakawanan sosial, cara tersebut ditempuh agar terjadi transformasi konflik, rekonsiliasi tidak hanya menyelesaikan masalah konflik, tetapi lebih luas menjangkau upaya mengubah konflik menjadi suatu bentuk kerjasama menuju perdamaian Tahap kedua penanganan konflik, diperlukan perbaikan tataran struktural yang tepat, untuk pencegahan konflik. Disisi lain, juga perlu perbaikan dimensi kultural, seperti halnya membangun persepsi dan prasangka antarkelompok. Melalui tahap tersebut dapat diciptakan bentuk kerangka landasan guna tercapainya perdamaian, melalui kesepakatan yang lebih mendasar tentang issue, serta mengatasi masalah bersama baik secara personal maupun komunal.

Kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Ambon hendaknya bersifat adil dapat diakses oleh semua kelompok. Upaya melakukan monitoring hubungan antarkelompok di Kota Ambon sebagai sistem pengawasan dini, serta terbentuknya rasa percaya dalam pertukaran sosial. Kebijakan publik juga harus mampu mendorong terbangunnya ruang publik di Kota Ambon, dengan memfasilitasi terbentuknya lembaga yang bersifat lintas sektoral. Mengembangkan alokasi sumber daya diarahkan guna mendukung kelompok minoritas yang berdomisili di Kota Ambon, yang terpinggirkan dan berupaya mengendalikan mayoritas. Memfasilitasi dialog antarkomunitas agar fungsi

arbitrasi, menggunakan pendekatan hukum dan keamanan dapat terealisasi. Upaya mobilisasi bantuan kemanusiaan sebagai sarana diplomasi untuk mengadakan pendekatan pihak yang terlibat konflik di Kota Ambon. Pemulihan masyarakat (*community recovery*), terutama pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat, serta rehabilitasi sosial korban. Diharapkan melalui langkah-langkah tersebut di atas, akan terwujud perdamaian berkelanjutan di Kota Ambon.

Pustaka Acuan

- Ari Dwipayana, AAGN dkk, (2001), *Merajut Modal Sosial untuk Perdamaian dan Integrasi Sosial*, Yogyakarta: Fisipol Universitas Gadjah Mada.
- Erich Fromm, (2008), *The Anatomy of Human Destructiveness*, (diterjemahkan Imam Muttaqin), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dean G. Pruitt & Jeffrey Z. Rubin, (2004), *Asli Social Conflict, Escalation, Stalemate, and Settlement*, (Diterjemahkan, Helly Soetjipto & Sri Mulyantini Soetjipto), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Brower, M. A. W., (1989), *Kepribadian dan Perubahannya*, Jakarta: Gramedia.
- Gillin and Gillin, (1954), *Cultural Sociology A Revision of An Introduction to Sociology*, 3rd printing, New York: Macmillan.
- Galtung, Johan, (2003), *Studi Perdamaian; Perdamaian dan konflik Pembangunan, dan Peradaban*, Pustaka Eureka Surabaya
- Horton, P. B., Hunt, C. L., (1991), *Sociology*, Jilid I, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Hannah Arendt, (2003), *Teori Kekerasan*, Diterjemahkan dari *On violence*, penerjemah Ghafna Raiza W, Penyunting Tjahyanto Pudji. J. Lembaga Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Yogyakarta.
- Hatib Abdulkadir, (2009), *Bergaya di Kota Konflik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- James. M. Henslin, (2002), *Sosiologi dengan pendekatan Membumi, judul asli Essentials of Sociology: a Down – to Earth Approach*, 6 th Edition, alih bahasa Prof Kamanto Sunarto, SH,Phd. Editor Wibi Hardani, ST. MM, Penerbit Erlangga Jakarta.
- Yin, Robert. K, (2002), *Studi Kasus, Desain dan Metode*, Penerjemah M. Djauzi Mudzakir, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lambang Trijono, (2001), *Keluar Dari kemelut Maluku, Refleksi Pengalaman Praktis Bekerja untuk Perdamaian Maluku*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nong D. Mahmada dkk, (2000), *Luka Maluku: Militer Terlibat*, Institut Studi Arus Informasi (ISAI)
- Ogburn, (1964), *On The Culture an Social Change*, Ed. Duncan, Chicago University, Chicago.
- Semuel Wailerunny, (2010), *Membongkar Konspirasi Di Balik, Konflik Maluku*, Yayasan Pustaka Obor, Indonesia.
- _____ (2008) Info Societa, Edisi Khusus HKSN, Biro Humas Departemen Sosial R. I. , Jakarta.

Konflik Sosial sebagai Implikasi Kerenggangan Hubungan Sosial dalam Masyarakat

Social Conflict as Social Relation Gap Implication in Community

Soetji Andari

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), Jl Kesejahteraan Sosial No 1
Nitipuran Yogyakarta. E-mail: <soetjiandari@gmail.com>. HP. 085643916275.
Diterima 10 Oktober 2013, direvisi 12 Februari, disetujui 28 Februari 2014.

Abstract

Conflict is a situation of row or disharmony between the parties entering into a relationship or partnership. Various vulnerability and social conflict that occurred in Palu, Central Sulawesi, have a lot of social issues, such as Tiaka case, a conflict that happens between two groups of residents. Conflict in Palu district located at Tawanjuka District, which seen by many people as a conflict among intergroups in Nunu Village, West Palu Underdistrict, Palu Municipality, who had been in conflict with the residents in Tawanjuka Village, South Palu district. The conflict is triggered by several old cases, such as violence from other group and their close relative house had been outraged by other group. The problem is that the next generation revenge what other group did to them respectively and had never been overcome. To know the causal factors, the research is done through qualitative-descriptive approach, and data gathering through in-depth interview with informants committed in the conflict. Still, data gathering are enriched through observation and documentary analysis.

Keywords:

Conflict-Implications-Gap-Social Relationship

Abstrak

Konflik adalah situasi adanya pertentangan atau ketidakserasian antara pihak yang sedang membina hubungan atau kerjasama. Berbagai kerawanan dan konflik sosial yang terjadi di Kota Palu Sulawesi Tengah memiliki banyak persoalan sosial seperti kasus Tiaka, konflik antarwarga. Lokasi konflik yang terjadi di Palu terjadi di kecamatan Tawanjuka yang di sinyalir oleh banyak kalangan merupakan konflik bernuansa antarkelompok warga di Kelurahan Nunu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, selama ini terlibat konflik dengan warga di Kelurahan Tawanjuka, Kecamatan Palu Selatan. Pemicu konflik berasal dari berbagai kasus lama yang tidak pernah ada penyelesaiannya, seperti kerabat pernah mengalami kekerasan dari kelompok lain, dan pemuda ingin melakukan balas dendam kejadian lampau yang belum terselesaikan. Untuk mengetahui berbagai faktor penyebab dan cara penyelesaian konflik sosial yang terjadi di Kota Palu maka dilakukan penelitian melalui wawancara mendalam, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif-kualitatif, pengumpulan data utama melalui dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan terkait konflik sosial, pengayaan data melalui observasi dan penelusuran data dokumen.

Kata kunci:

Konflik–Implikasi–Kerenggangan–Hubungan Masyarakat

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan golongan, sangat rentan dengan perpecahan, sering kali terjadi berbagai gejala konflik di berbagai daerah. Konflik adalah situasi adanya pertentangan atau ketidakserasian antara pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan atau kerjasama. Karena manusia adalah makhluk yang selalu melakukan interaksi sosial, konflik sesungguhnya menjadi sebuah realitas yang

tidak bisa dihindarkan, terlebih bagi masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman. Berbagai peristiwa kerusuhan selalu diawali dengan pertikaian antardua kelompok yang berbeda agama sehingga belarut dan berujung dengan terjadinya kerusuhan.

Warga Kelurahan Nunu, Palu Barat, dan Kelurahan Tawanjuka, Palu Selatan, Sulawesi Tengah, perang batu dan saling panah di perbatasan wilayah, kedua kelurahan ini bersebelahan. Warga tidak mengetahui siapa yang

memulai, tetapi berdasarkan informasi yang dihimpun, diduga bentrokan ini dipicu oleh sejumlah orang bertopeng yang membakar rumah salah satu warga Kelurahan Tawanjuka. Warga dua kelurahan saling tuding dan bentrokan pun pecah akibat situasi yang memancing emosi kedua belah pihak, bahkan hanya dipicu oleh suara gas motor dan teriakan kata-kata kasar saja kedua belah pihak akan terpancing dan bentrok kembali, hal tersebut terjadi berulang kali karena warga yang bertikai mudah terprovokasi. Hal ini menambah peristiwa bentrok massa dengan nuansa ketegangan komunal di beberapa daerah, menyebabkan konflik horizontal, serupa yang terjadi di Tawanjuka cukup intensif di beberapa daerah di Palu.

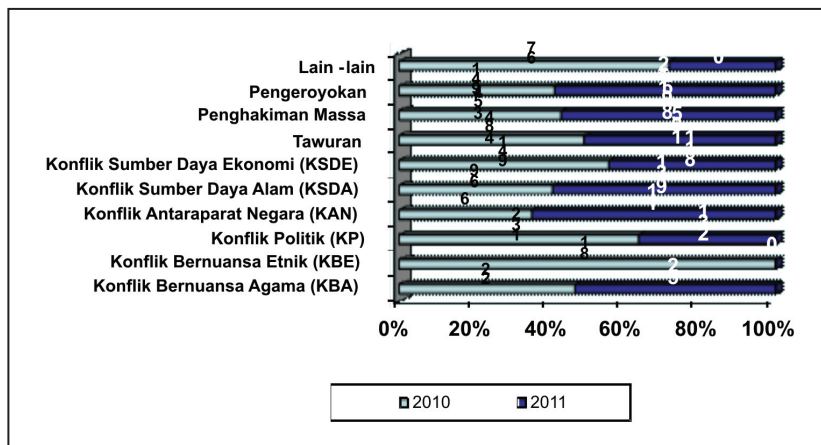
B. Kajian Teoritik

Konflik adalah ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan. Dalam pandangan ini, pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu. Konflik juga berimplikasi pada kepentingan politik elite nasional, elite lokal dan miiter militer juga diduga menyulut terjadinya konflik horizontal sehingga sulit mencari penyelesaian yang lebih tepat, bahkan terkesan pihak aparat keamanan lamban menangani konflik tersebut, sehingga konflik terjadi belarut-larut dan memakan korban jiwa dan harta. Pemerintah pusat sudah menerbitkan Undang-undang yang dapat mencegah dan menangani konflik yang terjadi

di berbagai daerah di Indonesia. Studi konflik menjadi perhatian serius dan berkembang di Indonesia melalui beberapa peristiwa konflik kekerasan baik dalam dimensi etnis, agama, separatisme pascakekuasaan orde baru. Konflik menjadi fenomena yang paling sering muncul karena konflik selalu menjadi bagian hidup manusia yang bersosial dan berpolitik serta menjadi pendorong dalam dinamika dan perubahan sosial-politik (Kornblum, dalam Susan, 2009). Berbagai isu konflik terjadi di beberapa daerah di Indonesia dapat terlihat pada Tabel 1.

Konflik seringkali berkaitan dengan berbagai tindakan kekerasan untuk mencapai keinginan untuk menguasai baik materi maupun kekuasaan. Pada teori konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf membahas tentang intensitas bagi individu atau kelompok yang terlibat konflik. Dalam hal ini, intensitas diartikan sebagai suatu pengeluaran energi dan tingkat keterlibatan dari pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik. Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi intensitas konflik, yaitu tingkat keserupaan konflik dan tingkat mobilitas. Teori Konflik Ralf Dahrendorf juga membicarakan tentang kekerasan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Konsep tentang kekerasan, yaitu menunjuk pada alat yang digunakan oleh pihak-pihak yang saling bertentangan untuk mengejar kepentingannya. Tingkat kekerasan mempunyai berbagai macam perwujudan. Teori konflik Ralf Dahrendorf menyatakan bahwa konsekuensi atau fungsi konflik dapat mengakibatkan pe-

Tabel 1.
Isu Konflik di Berbagai Daerah di Indonesia



Sumber: Republika, edisi, 14 September 2013.

rubahan sosial. Khusus yang berkaitan dengan struktur otoritas, ada tiga tipe perubahan struktur, yaitu perubahan keseluruhan personil dalam posisi dominasi; perubahan sebagian personil dalam posisi dominasi, dan digabungkannya kepentingan-kepentingan kelas subordinat dalam kebijaksanaan kelas yang mendominasi (Dahrendorf, 1986).

Dalam mengatasi konflik sosial yang terjadi, Pemerintah Pusat juga telah menerbitkan Undang-undang No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Semangat UU No 7 tahun 2012 lebih menekankan sisi pencegahan konflik daripada penanganan konflik. Isi dari undang-undang tersebut menyebutkan sejumlah poin yang perlu dilakukan dalam mencegah konflik, di antaranya memelihara kondisi damai di masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem peringatan dini. Selain itu, undang-undang tersebut menegaskan sejumlah hal yang berkaitan dengan pemeliharaan perdamaian di masyarakat. Misalnya, dengan mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati, mengakui, dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, mengembangkan persatuan atas dasar kebhinekaan, menghargai pendapat, dan kebebasan orang lain.

Wajah konflik di masyarakat tidak selalu dalam kondisi terintegrasi, harmonis, dan saling memenuhi, tetapi ada wajah lain yang memperlihatkan konflik dan perubahan. Konflik dalam pelembagaan melibatkan kelompok-kelompok terkoordinasi (*imperatively coordinated association*) (Mc Quarie, 1995: 66). Menurut Dahrendorf konflik terjadi ketika manusia sebagai makhluk sosial mempunyai andil dalam terjadinya disintegrasi dan perubahan sosial. Masyarakat selalu dalam keadaan konflik menuju proses perubahan. Masyarakat dalam berkelompok dan hubungan sosial didasarkan atas dasar dominasi yang menguasai orang atau kelompok yang tidak mendominasi. Fakta kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya, bahwa perbedaan distribusi otoritas selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis (George Ritzer, 2003:153).

Konflik pada dasarnya tidak dapat dihindari, ada tiga istilah yang berkaitan dengan konflik

yang dihadapi, yaitu penyelesaian konflik, lebih merujuk pada sebab terjadinya pembasmian konflik, yaitu merujuk pada akibat dari konflik yang termanifestasikan pada sebab-sebab konflik, dan pengaturan konflik, yaitu berupa bentuk pengendalian konflik atau pengelolaan konflik yang lebih diarahkan pada manifestasi konflik daripada sebab-sebabnya. Dengan asumsi bahwa konflik tidak bisa diselesaikan, maka konflik dapat diatur sedemikian rupa dalam manajemen konflik (Anas Urbaningrum, 1999: 17-18).

Luas konflik menunjuk pada jumlah perorangan atau kelompok yang terlibat dalam konflik, serta menunjuk pada skala konflik yang terjadi. Misalnya, konflik lokal, konflik nasional, konflik internasional dan konflik agama. Intensitas konflik adalah sempit luasnya komitmen sosial yang bisa terbangun akibat sebuah konflik. Konflik yang intensitasnya tinggi adalah konflik yang bisa membangun komitmen sosial yang luas, sehingga luas konflik pun berkembang. Ketampakan konflik, adalah tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat di luar pihak yang berkonflik serta peristiwa konflik yang terjadi. Sebuah konflik dikategorikan mempunyai ketampakan yang tinggi manakala peristiwa konflik disadari dan diketahui detail keberadaannya oleh masyarakat secara luas. Sebaliknya, konflik memiliki ketampakan rendah manakala konflik terselimuti oleh berbagai hal sehingga tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat luas terhadap konflik itu pun sangat terbatas (Roger W.Cobb and Charles D. Elder dalam Eep Saefulloh Fatah, 1994: 43-45).

C. Penggunaan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif (*qualitative research*). Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2007: 4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini dilakukan di Kota Palu terutama di daerah konflik yaitu di kecamatan Tavanjuka yang di sinyalir sebagai daerah rawan konflik bernuansa antarkelompok dengan warga di Kelurahan Nunu, Kecamatan Palu Barat. Permasalahan konflik sosial yang dilihat dari latar belakang pemicu konflik

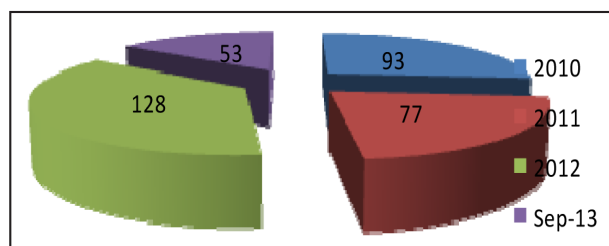
masyarakat yang terjadi antarwarga dianalisis secara holistik (utuh). Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Data yang diperlukan adalah untuk mengetahui berbagai faktor penyebab dan cara penyelesaian konflik sosial yang terjadi di Kota Palu, dikumpulkan melalui wawancara dengan berbagai tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua kelompok masyarakat yang berkonflik serta masyarakat yang mengetahui dan terlibat langsung dalam konflik yang terjadi. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai konflik antarwarga yang terjadi di Palu, pengumpulan data dilakukan melalui telaah kepustakaan (dokumentasi) dari berbagai surat kabar.

D. Hasil Penelitian: Konflik antara Masyarakat Tawanjuka dan Kecamatan Palu Barat

Berbagai konflik sosial yang terjadi di Indonesia berakibat bentrokan masa dengan nuansa ketegangan antar kelompok. Sepanjang tahun 2012 telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa paling sedikit 28 orang dengan korban luka serius lebih dari 200 orang. Selain itu masih ada kerugian material lainnya, seperti kerusakan harta benda atau kerugian non-material seperti kondisi psikis korban konflik sosial.

Tabel 2.

Konflik Sosial di Berbagai Daerah di Indonesia



Sumber: Puskomin Kementerian Dalam Negeri tahun 2013

Menurut Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin) Kemendagri, tahun 2010 terjadi 93 peristiwa konflik. Sementara pada tahun 2011 terjadi 77 peristiwa dan 2012 terjadi 128 peristiwa. Di tahun 2013 hingga awal September, Kemendagri mencatat telah 53 peristiwa konflik. Sejak tahun 2010 hingga September 2013, tercatat 351 peristiwa konflik. Baik konflik yang bernuansa Sara, bentrokan warga dengan

organisasi kemasyarakatan, aksi kekerasan unjukrasa menolak kenaikan bahan bakar minyak, bentrokan antarmassa pendukung calon kepala daerah, dan aksi massa terkait sengketa pertanahan.

Estimasi jumlah korban konflik sosial di berbagai daerah di Indonesia, konflik sosial dengan nuansa ketegangan komunal sepanjang 2012, dilihat dari wilayah kejadian Provinsi Sulawesi Tengah menjadi yang terbanyak (15 kejadian), diikuti oleh Papua (6 kejadian), Lampung dan Aceh (masing-masing 5 kejadian), dan Kalimantan Timur pada bentrok di Barong Tongkok, Kutai Barat. Dari 32 konflik dan kekerasan di atas, alat kekerasan yang kerap digunakan adalah alat tradisional seperti panah dan parang, alat lain adalah senjata yang cukup modern dan membahayakan seperti bom dan senjata api rakitan. Akibat dari tindakan-tindakan ini selalu identik dengan dua hal, kerugian harta benda akibat pembakaran dan perusakan, dan korban manusia dalam bentuk nyawa dan luka-luka (Berita Palu, 27 November 2012).

Konflik sosial di Sulawesi Tengah memiliki banyak persoalan, seperti kasus Tiaka, yang merupakan konflik antarwarga di Palu. Salah satu konflik di Palu terjadi di kecamatan Tawanjuka, yang di sinyalir banyak kalangan adalah konflik bernuansa antarkelompok dengan warga di Kelurahan Nunu, Kecamatan Palu Barat. Konflik antarwarga sebagai pemicu bentrokan dimulai dari perbincangan kasus lama, yang tiba-tiba memunculkan kembali emosi warga dan belum ada penyelesaiannya, seperti kerabatnya pernah mengalami kekerasan atau rumah keluarga dekat atau kerabat di rusak, dan pemuda ingin melakukan balas dendam kejadian lampau yang belum terselesaikan. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan tersebut di antaranya menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan. Ciri-ciri individual yang dibawa serta dalam interaksi sosial, menjadi salah satu pemicu konflik dan merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat, karena tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antaranggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya.

Beberapa sumber informasi (informan) di lapangan mengemukakan, awal mula terjadi konflik karena perseteruan kecil, semacam perkelahian antarkelompok pemuda karena kesalahpahaman sehingga menjadi pemicu kerusuhan. Berbagai konflik terjadi karena adanya perseteruan akibat dari perebutan tanah dan juga perbedaan keyakinan yang membuat konflik menjadi meluas. Konflik meluas akibat dari ketidakpuasan dan salah satu pihak mengalami kekalahan dalam berbagai pemilihan misalnya pemilihan kepala desa hingga pemilihan wali kota. Warga masyarakat yang tidak menerima hasil yang diinginkan biasanya menggalang kelompok untuk membuat kericuhan hingga perkelahian, baik antargolongan maupun antarwarga masyarakat, menyebabkan kerusuhan melibatkan banyak orang bahkan kelompok.

Pihak yang terlibat dalam konflik di Palu umumnya teridentifikasi sebagai anggota suatu komunitas berbasis teritorial, seperti kampung, dusun, atau kelurahan meski juga sebagian masalahnya juga tumpang tindih dengan identitas sosial, budaya (etnis maupun sub-etnis). Pemicu konflik lain yang muncul adalah kegagalan komunikasi akibat dari sengketa wilayah (adat) dan lahan, ketiadaan dan ketidakpuasan dalam penegakan hukum oleh negara terhadap peristiwa-peristiwa kriminal (cemburu, kalah bersaing, mabuk, kebut-kebutan, tawuran), beredarnya pesan-pesan provokatif, dan dendam konflik lama. Ada konflik yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah (pemilukada), konflik antarkampung, hingga tawuran pelajar atau mahasiswa. Cara penyelesaian tiap kasus ini berbeda satu dengan lainnya, sehingga diperlukan *law enforcement* (penegakan hukum) yang tegas agar orang tidak mudah melakukan kekerasan. Perbedaan inilah yang dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik sosial, sebab dalam menjalani sebuah pola interaksi sosial, tidak mungkin seseorang akan selalu sejalan dengan individu yang lain.

Menurut salah satu pemuda yang terlibat konflik, berbagai kelompok sebagai pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh sumber-sumber yang diinginkan, tetapi juga memojokkan, merugikan atau menghancurkan lawan mereka. Konflik selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan sal-

ing tergantung, dapat pula melahirkan konflik baru (Gibson, *et.al.* (1997: 37). Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak saling bekerjasama satu sama lain. Konflik dapat menjadi masalah yang serius dalam setiap organisasi, tanpa peduli apapun bentuk dan tingkat kompleksitas organisasi tersebut. Konflik tersebut mungkin tidak membawa “kematian” bagi organisasi, tetapi pasti dapat menurunkan kinerja organisasi bersangkutan jika konflik tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian. Oleh karena itu, keahlian untuk mengelola konflik sangat diperlukan bagi setiap pimpinan atau manajer organisasi. Konflik merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. Secara personal, konflik terjadi dalam rumah tangga. Dalam hubungan yang luas, konflik terjadi dalam hubungan sosial, ekonomi, dan politik, seperti tawuran pelajar, konflik industri dan agraria, konflik etnis dan sektarian, hingga konflik antarnegara.

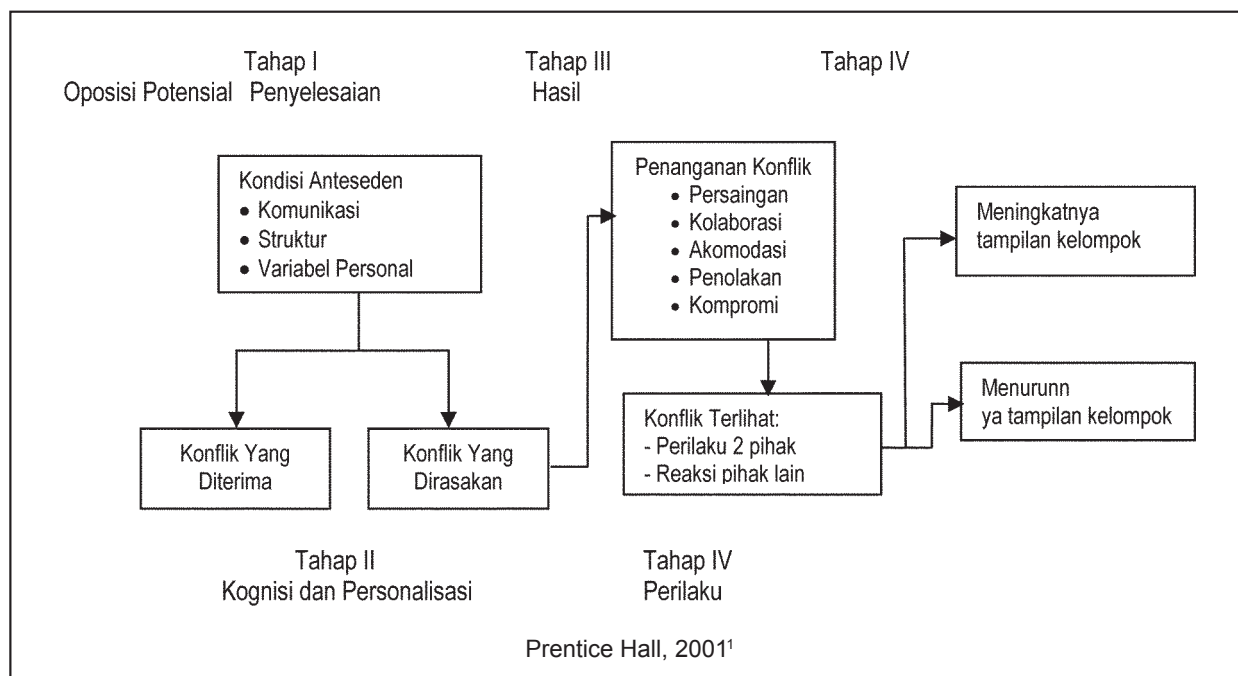
Konflik yang terjadi di Palu bersifat fungsional, yaitu konflik yang mendukung pencapaian tujuan kelompok, dan memperbaiki kinerja kelompok, sedangkan konflik disfungsional adalah konflik yang merintangai pencapaian tujuan kelompok sehingga merugikan kelompok. Menurut Coser, konflik dapat diartikan sebagai proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan *struktur sosial*. Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya. Seluruh fungsi positif konflik tersebut dapat dilihat dalam ilustrasi suatu kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Dalam ruang lingkup kecil, karena konflik kelompok-kelompok baru dapat lahir dan mengembangkan identitas strukturalnya (Lewis A. Coser: 1956).

Menurut beberapa responden berbagai konflik yang terjadi di Palu biasanya antaretnik akibat perbedaan identitas sosial, etnik dan budaya khasnya seringkali menimbulkan etnosentrisme yang kaku. Hal ini terjadi pada seseorang yang tidak mampu keluar dari perspektif yang dimiliki atau hanya bisa memahami sesuatu berdasarkan perspektif yang dimiliki dan tidak mampu

memahami perilaku orang lain berdasarkan latar belakang budaya. Menurut tokoh masyarakat setempat, konflik terjadi karena adanya bentrokan antarpemuda untuk memperebutkan hal yang sepele, seperti perempuan, saling mengejek, kemudian berlanjut dengan perkelahian antarkelompok yang kadang kala melibatkan anak di bawah umur. Hal tersebut memerlukan keterlibatan orang tua yang memegang peranan penting dalam bentrokan tersebut mengingat adanya indikasi keterlibatan anak di bawah umur dalam bentrokan itu.

Upaya mencegah terjadinya konflik, antara lain dengan saling menghormati antarmasyarakat sehingga memunculkan rasa menghormati orang lain, menjaga kerukunan antarwarga meskipun hal yang sulit dilakukan karena masyarakat terdiri dari ratusan suku yang memiliki ciri watak berbeda-beda. Apabila sudah terbentuk sikap saling menjaga dan mempertahankan kerukunan baik antarumat beragama, antaretnis, maupun antarsukubangsa yang kuat dari dalam diri masyarakat. Konflik antaretnik melewati beberapa tahap atau proses yang ditunjukkan pada bagan berikut..

Pada Tahap I konflik didorong oleh variabel anteseden atau variabel lain yang mendahului konflik: (1) komunikasi, misalnya memburuknya komunikasi antardua pihak yang terlibat konflik (tidak ada pertukaran informasi, salah paham, prasangka, dan lain-lain) (2) variabel struktur, misalnya berkaitan dengan pola-pola interaksi dalam sistem atau di luar sistem (3) variabel personal, yang berkaitan dengan beragam faktor individu dari pihak-pihak yang terlibat konflik. Pada Tahap II, dua pihak berhadapan dengan kognisi dan personalisasi. Artinya, dua pihak sudah memiliki pengetahuan tentang keadaan personal masing-masing yang terlibat konflik. Akibatnya, dua pihak akan menerima konflik sebagai konflik yang berterima dan konflik yang dirasakan. Konflik berterima adalah konflik nyata, riil, sedangkan konflik yang dirasakan hanya berkaitan dengan suasana batin dari dua pihak akibat tidak adanya komunikasi. Tahap III, mulai tampak “pemilahan” sikap antara dua pihak (sikap mengutamakan diri sendiri atau mengutamakan orang lain), yang dirasakan atau dinyatakan dalam bentuk saling menolak untuk menyelesaikan konflik, membiarkan keadaan



¹⁾ Alo liliweri, 2005, Prasangka dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Multikultur, Yogyakarta, LkiS, hal 274

untuk bersaing, melakukan kolaborasi, akomodasi, atau berkompromi. Tahap IV dan tahap V perilaku yang ditunjukkan dapat meningkatkan tampilan kelompok dan juga menurunkan tampilan kelompok tergantung dari upaya yang dilakukan oleh ikatan kelompok tersebut.

Secara struktural, konflik yang terjadi di Palu terutama di kecamatan Tawanjuka menurut beberapa tokoh masyarakat, dapat mengubah keseimbangan kekuasaan antara kelompok dominan dan kelompok minoritas, sehingga masyarakat sekitar dalam setiap gerak kehidupan dihindangi rasa curiga. Hal ini menimbulkan implikasi pada terjadinya ketidakcocokan antarnilai atau tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Kondisi tersebut dapat mengganggu bahkan menghambat tercapainya kestabilan emosi sehingga mempengaruhi pada efisiensi dan produktivitas kerja.

Alo Liliweri (2005: 264-265) menuliskan beberapa jenis atau tipe konflik, di antaranya konflik sederhana, konflik personal versus diri sendiri, terjadi karena apa yang dipikirkan/diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan, bersumber dari perbedaan karakteristik personal dan perbedaan keyakinan kelompok/masyarakat atau perbedaan hukum. Selain itu konflik berdasarkan jenis peristiwa dan proses karena kesalahpahaman yang didorong oleh faktor emosi. Konflik *zero-sum (game)*, konflik yang hasilnya kemenangan di satu pihak dan kekalahan di pihak lain. Konflik yang merusak, mulai dari proses sampai hasilnya merusak relasi sosial. Bentuk atau tipe-tipe konflik meliputi:

1. *Kompetisi*, Yaitu hubungan dan interaksi sosial yang mewujudkan persaingan antara seseorang atau sekelompok orang, atau sekelompok orang lain, dengan tujuan mengalahkannya.
2. *Sengketa*, Yaitu hubungan dan interaksi sosial yang terwujud karena adanya seseorang atau sekelompok orang memperebutkan sumber daya yang terbatas dan berharga dari orang sekelompok orang lain.
3. *Balas dendam*, Bila suatu sengketa berlarut-larut dan dalam perkembangan persengketaan tadi jatuh korban, maka sengketa dapat berubah menjadi balas dendam.

4. *Perang*, Suatu interaksi atau hubungan sekelompok orang dengan sekelompok orang lain, dengan tujuan untuk saling memusnahkan dan menghancurkan. Perang biasanya terjadi karena adanya perbedaan mendasar dalam sistem ideologi dari masing-masing kelompok yang berperang.

Konflik yang terjadi di Palu dapat dilihat dari sisi komunikasi serta akibat hubungan sosial yang kurang harmonis dan didukung dengan latar belakang konflik sebelumnya dan juga motif dendam. Konflik juga meningkatkan perhatian masyarakat terhadap hal yang dipersengketakan dalam konflik, seperti perebutan baik batas desa maupun perebutan lahan kekuasaan yang berimplikasi langsung pada meningkatnya media massa untuk memberitakannya, memungkinkan masyarakat memperoleh informasi baru, dan mengubah pola komunikasi. Dari sisi komunikasi, konflik meningkatkan perhatian masyarakat terhadap hal yang dipersengketakan, meningkatkan media massa untuk memberitakannya, memungkinkan masyarakat memperoleh informasi baru, dan mengubah pola komunikasi berkenaan dengan hal tersebut. Secara struktural, konflik dapat mengubah keseimbangan kekuasaan antara kelompok dominan dan kelompok minoritas. Konflik meningkatkan solidaritas, terutama memantapkan solidaritas di antara kelompok minoritas.

Konflik sosial di Palu umumnya berlatar belakang isu Sara, sengketa lahan, tapal batas daerah, dan perbedaan nilai dan ideologi karena setiap individu dalam masyarakat memiliki perspektif yang berbeda tentang hidup, perbedaan perspektif tersebut disebabkan perbedaan latar belakang dan karakter. Konflik sosial mengakibatkan terhentinya kerja sama yang sebelumnya terjalin di antara pihak yang terlibat konflik. Lebih buruk lagi, konflik yang disertai dengan kekerasan sering kali mengakibatkan hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia. Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya ada dua macam konflik, yaitu konflik fungsional dan konflik destruktif. Konflik fungsional adalah konflik yang berdampak positif bagi perkembangan masyarakat. Konflik ini biasanya terjadi tanpa diwarnai kekerasan. Konflik destruktif adalah konflik yang merusak kehidupan sosial, umum-

nya disertai dengan kekerasan sehingga sering disebut sebagai kekerasan sosial.

Konflik sosial yang terjadi di Palu membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat sekitar akibat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial, ekonomi, serta dinamika kehidupan politik yang tidak terkendali. Gesekan sosial tersebut dapat menjadi konflik antarwarga, baik bersifat sporadis maupun potensial dalam satu titik yang dapat berujung pada tawuran antarwarga (desa). Transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang terbuka akibat semakin cepatnya dinamika sosial, juga menyebabkan perubahan sosial yang memunculkan kerawanan konflik baik vertikal maupun horisontal. Akibat dari konflik sosial yang terjadi mengakibatkan hilangnya rasa aman, menciptakan rasa takut, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologi sehingga menghambat terwujudnya kedamaian di setiap daerah. Berbagai sisi konflik yang terjadi dimulai dari konflik kecil atau perorangan, konflik antarkeluarga, sampai dengan konflik antarkampung/desa dan bahkan sampai konflik komunal yang melibatkan beberapa kelompok besar, baik dalam ikatan wilayah ataupun ikatan primordial.

Berbagai konflik yang terjadi di Palu tidak berbeda jauh dengan konflik yang terjadi di Indonesia, akibat dari konflik massal yang terjadi seperti perkelahian antarwarga tidak terjadi begitu saja, tetapi diawali dengan adanya benih-benih yang mengendap di dalam individu, yang kemudian dapat berkembang memanas menjadi ketegangan dan akhirnya memuncak menjadi konflik fisik akibat adanya faktor pemicu konflik. Bentrokan warga Nunu dan Tavanjuka, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dipicu akibat tewasnya seorang warga Tavanjuka saat terjadi tawuran antarkampung, se usai pemakaman dilanjutkan dengan saling serang, kedua warga kembali bentrok. Oleh karena itu, dalam rangka penanggulangan konflik, yang perlu diwaspadai bukan hanya faktor-faktor yang dapat memicu konflik, melainkan juga faktor-faktor yang dapat menjadi sumber timbulnya konflik.

Isu konflik yang terjadi di Palu salah satu akar permasalahannya adalah faktor deprivasi antarkelompok masyarakat dan faktor dominasi sosial, politik, dan agama. Faktor pemicu konflik

antaretnik mungkin dimunculkan secara sengaja oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Penguasaan sumber daya tertentu yang diinginkan oleh beberapa pihak mungkin menjadi salah satu sebab yang membuat pihak-pihak yang terlibat menggunakan konflik antaretnik sebagai jalan untuk memenangkan persaingan. Hal ini bisa dilihat dari siapa yang mendapatkan keuntungan dari adanya konflik.

Salah satu analisis yang didasarkan pada berbagai perspektif terjadinya konflik di Palu menunjukkan adanya pihak-pihak tertentu yang sengaja mengorganisir terjadinya kekerasan. Analisis terhadap berbagai konflik disinyalir akibat terjadi perebutan sumber daya ekonomi yang semakin terbatas. Saat sumber daya ekonomi melimpah dan mudah didapatkan, konflik dapat dihindarkan. Akan tetapi begitu sumberdaya ekonomi semakin terbatas dan semakin banyak orang memperebutkannya, terjadi kompetisi perebutan sumberdaya. Sebagai konsekuensi logis dari adanya kompetisi perebutan sumber daya adalah terciptanya prasangka antaretnik. Prasangka antaretnik terutama pada kelompok dominasi akan berkembang terhadap etnik lain yang tersubordinasi menjadi justifikasi kekerasan terhadap etnik tersebut.

Berbagai upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Palu sudah sering kali dilakukan oleh berbagai unsur, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat melalui jalur adat. Semua alternatif tersebut dilakukan agar dapat menumbuhkan relasi adat yang dihormati oleh seluruh masyarakat yang berkonflik. Jalur adat yang dilakukan oleh masyarakat dengan melakukan deklarasi kearifan lokal, merupakan kesepakatan warga dalam rangka mengurangi terjadinya bentrokan, konflik dan tercipta kedamaian. Selain penyelesaian konflik lewat jalur adat, dibangun pula alternatif yang bisa menumbuhkan relasi sebagaimana relasi adat. Deklarasi ini dihadiri tokoh adat dan agama, tokoh pemuda, pejabat Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, serta perwakilan masyarakat.

Beberapa penyelesaian konflik telah dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan menciptakan sejumlah lapangan pekerjaan. Namun usaha ini tak kunjung menampakkan hasil nyata. Oleh sebab itu, deklarasi kearifan lokal

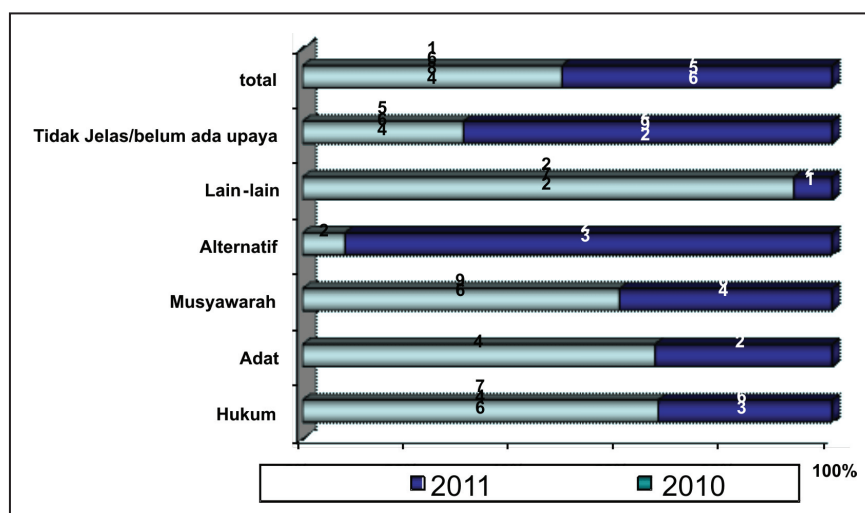
yang lebih menekankan pada penyelesaian adat dan diharapkan dapat menyadarkan kembali warga agar mengedepankan semangat persaudaraan dan kekeluargaan perlu dilakukan. Penyelesaian konflik telah dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan menciptakan sejumlah lapangan pekerjaan. Kementerian Sosial melalui Bantuan Kerasian Sosial berupaya untuk mengurangi konflik yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan fisik dan nonfisik yang direncanakan, dikerjakan, dimanfaatkan, dan dipelihara oleh masyarakat setempat secara bersama-sama. Oleh sebab itu, deklarasi kearifan lokal yang lebih menekankan penyelesaian adat diharapkan dapat menyadarkan kembali warga agar mengedepankan semangat persaudaraan dan kekeluargaan.

Upaya penyelesaian konflik sosial pada tabel 3 di berbagai daerah di Indonesia pada tahun 2010 dan 2011 dapat dilihat bahwa penyelesaian melalui jalur hukum terdapat 746 kasus, sedangkan pada tahun 2011 363 kasus. Kasus konflik sosial yang terjadi 70 persen diselesaikan melalui jalur hukum, sedangkan tahun 2011 penyelesaian melalui jalur hukum 30 persen. Demikian pula penyelesaian masalah melalui jalur adat dan musyawarah. Hal tersebut terjadi karena konflik sosial yang terjadi pada tahun 2010 banyak yang berkaitan dengan kasus sengketa tanah yang memerlukan penegasan

pada jalur hukum, jalur adat dan musyawarah. Salah satu fungsi hukum adalah alat penyelesaian sengketa atau konflik, di samping fungsi lain sebagai alat pengendalian sosial dan alat rekayasa sosial. Pembicaraan tentang hukum dimulai jika terjadi suatu konflik antara dua pihak yang kemudian diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga. Dalam hal ini munculnya hukum berkaitan dengan suatu bentuk penyelesaian konflik yang bersifat netral dan tidak memihak. Data tersebut menjelaskan upaya penyelesaian masalah melalui berbagai jalur lebih banyak dilakukan pada tahun 2010 dibandingkan pada tahun 2011, kecuali penyelesaian masalah konflik sosial melalui jalur alternatif.

Penyelesaian konflik dengan kekerasan terjadi secara sporadis di beberapa daerah di Palu, menurut ketua dewan adat bahwa penyelesaian konflik sosial tersebut perlu hukum dan sanksi adat yang bertujuan untuk menjunjung kearifan lokal di daerah rawan konflik. Selain itu, ikrar bersama juga bertujuan untuk menegakkan budi pekerti dan menghindari tindakan tidak terpuji. Menurut Durkheim masyarakat menerapkan hukum yang bersifat menekan (*repressive*), dan menerapkan sanksi tersebut tidak atas pertimbangan rasional mengenai jumlah kerugian obyektif yang menimpa masyarakat, tetapi atas dasar kemarahan kolektif yang muncul karena tindakan yang menyimpang dari pelaku. Be-

Tabel 3.
Upaya Penyelesaian Konflik Sosial Berbagai Daerah



Sumber: Republika edisi Sabtu, 14 September 2013, 20:17 WIB

berapa sanksi yang disebutkan dalam deklarasi adat, antara lain ditenggelmakan di laut, diusir dari kampung, dikucilkan dari masyarakat, dan mengganti atau membayar denda berupa hewan serta perlengkapan adat.

Beberapa sanksi yang dilakukan apabila ada warga yang melanggar aturan adalah sanksi adat yang sudah disepakati. Masyarakat ingin memberi pelajaran kepada pelaku dan juga peringatan anggota masyarakat yang lain agar tidak melakukan pelanggaran yang sama. Menurut beberapa tokoh masyarakat pemberian sanksi adat kepada pelaku bentrok dinilai lebih efektif dibandingkan sanksi hukum positif. Tokoh masyarakat dari berbagai pihak mengajak warganya untuk kembali membangun kerukunan yang dilandasi ketulusan dan jiwa yang bersih, serta menghilangkan dendam di dalam hati.

Deklarasi Kearifan Lokal yang diikrarkan tokoh adat itu dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Untuk mempertahankan kearifan lokal melalui harmonisasi sosial adalah dikondisikan terpeliharanya perdamaian di masyarakat, sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara normal. Nilai-nilai harmonisasi sosial adalah keadilan, kesetaraan, kasih sayang, kepercayaan, penghormatan, dan toleransi. Nilai tersebut diwujudkan dalam interaksi di masyarakat sehingga terbangun kohesivitas sosial di antara orang-orang di dalamnya. Dalam mengatasi konflik sosial salah satu caranya adalah dengan memfasilitasi kebutuhan warga untuk mewujudkan kehidupan yang serasi di tengah-tengah masyarakat.

Upaya penyelesaian konflik antarwarga di dua kelurahan bertetangga di Palu dilakukan melalui pendekatan agama, selain itu keterlibatan orang tua juga memegang peranan penting dalam bentrokan tersebut mengingat adanya indikasi keterlibatan anak di bawah umur. Berbagai upaya pencegahan konflik berupaya menciptakan kembali tenggang rasa di antara warga, menghidupkan rasa saling percaya, serta menumbuhkan kepekaan sosial agar terjalin harmonisasi antarwarga. Keserasian sosial harus terbangun kembali, karena ini salah satu cara mengintegrasikan warga. Dengan sejumlah aturan formal, sanksi dan hukum adat yang telah ditetapkan, termasuk program pemberdayaan

sosial yang digulirkan pemerintah, diharapkan konflik sosial di Palu dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga harmonisasi sosial yang diharapkan semua pihak dapat tercipta.

Penyelesaian konflik sosial juga dapat dilakukan melalui pembinaan masyarakat agar terjadi pembauran dari dua komunitas yang bertikai, kesadaran hukum masyarakat dan meningkatkan kembali sistem keamanan lingkungan sebagai daya tangkal masyarakat guna mencegah dan menanggulangi konflik yang akan terjadi. Namun upaya pencegahan terjadinya konflik sosial melalui kemauan warga masyarakat untuk menghilangkan rasa curiga dan kecemasan yang berlebihan dalam kehidupan bermasyarakat, menumbuhkan rasa kepercayaan antarkelompok dan antarwarga untuk dapat hidup damai, juga perlu dilakukan. Menumbuhkan rasa percaya antarwarga dapat meningkatkan ketahanan masyarakat agar tidak mudah termakan isu, provokasi yang dapat menimbulkan bentrok massa. Menanamkan kepedulian masyarakat akan kebutuhan keamanan dan ketertiban di lingkungannya dengan melaporkan setiap kejadian yang berdampak kerusuhan antarwarga juga merupakan hal lain yang perlu dilakukan. Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga kedamaian, mengundang tokoh masyarakat maupun tokoh agama yang bertikai agar menciptakan suasana damai di masyarakatnya, juga merupakan hal lain yang tidak kalah penting dilakukan.

E. Penutup

Konflik sosial yang terjadi di Palu akibat keberagaman masalah sehingga menimbulkan krisis yang berkepanjangan menyebabkan: mudahnya terbakar tingkat emosi warga karena rendahnya daya beli masyarakat akibat naiknya harga barang kebutuhan pokok, masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan; Adanya pihak-pihak tertentu yang sengaja mengorganisir terjadinya kekerasan akibat terjadi perebutan sumber daya ekonomi yang semakin terbatas menyebabkan terjadinya konflik; Sebagian besar timbul perilaku anarkisme, terorisme, sekularisme, primordialisme, separatisme, yang dilakukan oleh beberapa pihak mengakibatkan pertentangan yang terjadi antarwarga yang

berbeda keyakinan. Keresahan yang terjadi di masyarakat mengganggu ketenangan sehingga menjadi gelisah dan takut untuk beraktifitas; Pertentangan dan konflik antarelite dan golongan politik, terutama pasca pilkada menghambat jalannya roda pemerintah dan pelaksanaan pembangunan; Terjadi perubahan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat, perubahan pranata dan lembaga sosial, perubahan pandangan hidup, perubahan sistem dan struktur pemerintahan, yang mengakibatkan timbul kebingungan di masyarakat; Berbagai konflik yang terjadi akan memecah-belah organisasi dan menghambat terciptanya kinerja yang optimal. Konflik memberikan indikasi tentang adanya ketidakberesan dalam organisasi, dan adanya prinsip-prinsip atau aturan-aturan yang tidak dilaksanakan dengan baik. Beberapa penyelesaian konflik telah dilakukan dengan berbagai cara antara lain, rekonsiliasi dan berdialog dengan semua pihak yang bersengketa termasuk dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan dinas instansi terkait. Menciptakan sejumlah lapangan pekerjaan. Mendeklarasikan kearifan lokal yang lebih menekankan penyelesaian adat diharapkan dapat menyadarkan kembali warga agar mengedepankan semangat persaudaraan dan kekeluargaan. Pemberian sanksi adat kepada pelaku bentrok dinilai lebih efektif ketimbang sanksi hukum positif. Menciptakan kembali tenggang rasa diantara warga, menghidupkan rasa saling percaya, serta menumbuhkan kepekaan sosial agar terjalin harmonisasi antarwarga. Mengundang tokoh masyarakat maupun tokoh agama yang bertikai agar menciptakan suasana damai di masyarakatnya.

Pustaka Acuan

- Abdullah, Irwan, (2010), *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anas Urbaningrum, (?) *Ranjau-ranjau Reformasi, Potret Konflik Politik Pasca Kejatuhan Soeharto*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Coser A Lewis, (1956), *The Functions of Social Conflict*, New York: The Free Press.
- Dahrendorf, Ralph, (1986). *Konflik dan konflik dalam Masyarakat Industri*, Jakarta: Rajawali Pers.
- George Ritzer, (2003), *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali Press.
- Gibson, James L. et al., (1977), *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*. Alih bahasa oleh Adriani. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Ismail, Nawawi, 2011, *Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal : Dialog Agama dan Perdamaian*. Bandung: Lubuk Agung.
- Jhonson, Doyle Paul, (1986), *Sociological Theory: Classical Founders and Contemporary Perspective*, Robert MZ Lawang (pentj.), jilid I, Jakarta: Gramedia.
- Liliweri, Alo, (2005). *Prasangka dan Konflik*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara
- Mappangara, Suriadi, (2010), *Respons Militer terhadap Konflik Sosial di Poso*. Palu Sulawesi Tengah: Yayasan Bina Warga (YBW).
- Poloma, M, Margaret (2010), *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susan, Novri, (2010), *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wirawan, I.B. (2012). *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial & Perilaku Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Eep Saefulloh Fatah, (1994), *Menejemen Konflik dan Demokrasi*, Jakarta: Prisma No. Tahun XXIII, Agustus 1994.
- Elkana Lengkong, (2013), *Adakah Provokator di balik Bentrok Warga di Kota Palu dan Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah?* Jakarta: Harian Republika, edisi 23 June 2013.

Efektivitas Dimensi Individu, Kelembagaan, dan Lingkungan dalam Pemberdayaan Masyarakat Petambak melalui Implementasi Inovasi Teknologi

The Effectivity of Individual, Institutional, and Environmental Demensions on Community through Implementation of Technological Inovation

Mira

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Jalan KS. Tubun Petamburan VI, Jakarta 10260. Email: miraclenia@yahoo.com, Telp. 081298678065. Diterima 8 Oktober, direvisi 4 Nopember 2013, disetujui 18 Januari 2014.

Abstract

The purpose of this study is to analys the factors that influence effectiveness of community empowerment program. The study was conducted in 2012-2013, in three villages of Brebes Regency (Randusanga, Grinting, and Kaliwlingi). The study uses principal component analysis. Screen plot analysis indicates tenth elements used are the most decisive factor in the effectiveness of community empowerment. It is indicated on the graph that decreases sharply on the element 1 to element 2, and very sharply decreases on element 2 to element 3, and slightly sloping from the element 3 to element 10. The ten elements when sorted by priority are the ability of individual farmers, economic conditions, ponds physical condition, Klinik Mina Bisnis institutional leadership, technology used in farming, the role of farmers, relationships with target groups, systems and institutional structures, motivation, social and cultural. Communalities value analysis indicates all factors to assess the effectiveness of community empowerment has a strong relationship with the model is formed, because the value of all the communalities elements is above 50persen. The greatest communalities value is the ability of individual farmers (0.868), indicating 86.8 persen variance of the ability of individual variables can be explained by factors formed. Individual ability of marine and coastal community in Brebes Regency in accepting innovation from the Ministry of Marine and Fisheries is very high, this indicates target group easily adopt any technological innovation introduced by The Ministry of Marine and Fisheries. The smallest communalities value is sociocultural (0.622), it means social and cultural element is less supportive for community empowerment. Farmers in the study area are individualistic, every problem is solved individually.

Keywords:

Effectiveness, individual, environement, farmers

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis. Penelitian ini dilakukan di tiga desa (Kabupaten Brebes), yaitu Randusanga, Kaliwlingi, dan Grinting, pada tahun 2012 sampai tahun 2013. Data dikumpulkan secara *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah komponen utama (merupakan salah satu teknik statiska untuk aplikasi dalam ilmu sosial). Hasil analisis gambar screen plot mengindikasikan kesepuluh unsur yang dimasukkan memang paling menentukan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pemberdayaan masyarakat petambak. Hal itu ditunjukkan dengan adanya grafik yang menurun agak tajam dari unsur 1 ke unsur 2, dan grafik yang menurun sangat tajam dari unsur 2 ke unsur 3, dan agak landai dari unsur 3 ke unsur 10. Kesepuluh unsur tersebut jika diurut berdasarkan kepentingannya adalah kemampuan individu petambak, kondisi ekonomi, kondisi fisik tambak, kepemimpinan kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis, teknologi yang digunakan dalam budidaya, peran serta petambak, hubungan petambak dengan kelembagaan klinik Iptek Mina Bisnis, dan sistem dan struktur kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis, motivasi kerja, dan unsur sosial budaya masyarakat petambak. Hasil analisis nilai *communalities* mengindikasikan semua faktor yang dimasukkan untuk menilai efektifitas pemberdayaan masyarakat memiliki hubungan yang kuat dengan model yang terbentuk, karena nilai *communalities* semua unsur di atas 50 persen. Nilai *communalities* unsur yang terbesar adalah unsur kemampuan individu petambak (0,868), hal ini mengindikasikan 86,8 persen varians dari variabel kemampuan individu petambak dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Kemampuan individu dari masyarakat kelautan dan perikanan di Brebes dalam menerima inovasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan cukup besar, terbukti kelompok sasaran dengan mudah mengadopsi setiap inovasi teknologi kelautan dan perikanan yang diintroduksikan. Nilai *communalities* unsur yang terkecil adalah unsur sosial budaya (0,622), hal ini mengindikasikan unsur sosial dan budaya kurang mendukung dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat Brebes sudah bersifat individualis, setiap permasalahan diatasi secara sendiri, apalagi mengingat peran kelompok yang hanya sebagai wahana pencairan bantuan.

Kata Kunci:

efektifitas, individu, lingkungan, petambak

A. Pendahuluan

Salah satu potensi dari Kabupaten Brebes adalah tambak yang terdiri dari ikan bandeng, rumput laut dan udang. Total luas tambak di Brebes adalah 12.748 Hektar yang dikelola oleh 4.027 Rumah Tangga Perikanan (RTP) dengan total produksi pada tahun 2010 adalah 32.654,8 Kg. Sedangkan potensi tambak di salah satu lokasi penelitian (di desa Grinting) adalah 699,32 hektar yang dikelola oleh 148 RTP dengan total produksi pada tahun 2010 adalah 148 kg. Terdapat kecenderungan penurunan produksi yang disebabkan penurunan daya dukung lingkungan (jika dilihat dari kondisi tanah berupa ada unsurnya lumpur). Penurunan produksi ini mengakibatkan motivasi petambak dalam mengelola usahanya semakin berkurang yang pada akhirnya banyak tambak yang terbengkalai. Petambak banyak mengalihkan usahanya ke usaha pertanian (padi atau bawang) atau bahkan ada yang memilih menjadi pengemis karena kegagalan usaha tambak. Desa Grinting merupakan salah satu desa yang terkenal di Brebes dengan sebutan desa pengemis, karena banyak penduduk yang menjadi pengemis di Jakarta, sebagian adalah petambak yang gagal dalam usahanya.

Guna mengurangi jumlah petambak yang beralih menjadi pengemis, Kementerian Kelautan Perikanan membuat program pemberdayaan masyarakat melalui sebuah Kelembagaan yang dibentuk oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan (Klinik Iptek Mina Bisnis). Kelembagaan tersebut dibentuk pada tahun 2011, salah satu tujuannya adalah pemberdayaan masyarakat pesisir dan laut dan implementasi inovasi pengetahuan dan teknologi yang diintroduksi Badan Penelitian KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Pemberdayaan masyarakat melalui Kelembagaan Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis tersebut terutama untuk meningkatkan produksi tambak yang dikelola masyarakat sehingga motivasi masyarakat mengelola usahanya semakin meningkat pula.

Program pemberdayaan adalah suatu proses untuk berdaya dalam hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menguasai sesuatu. Dalam proses pemberdayaan tersebut

merupakan suatu langkah awal bagi masyarakat yang belum berdaya atau kurang berdaya menjadi masyarakat yang berdaya karena memiliki pengetahuan dan kekuatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pemberdayaan masyarakat tersebut bisa melalui peningkatan pengetahuan dan teknologi yang mereka gunakan dalam proses usaha. Campbell, C, and Jovchelovitch, S, 2000, menambahkan bahwa konsep pemberdayaan masyarakat merupakan suatu langkah penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Menurut Yulianti, Y, 2012, mengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakan orang untuk dapat mandiri baik dalam pengertian ekonomi, sosial maupun politik. Hal ini berarti salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan dalam masyarakat adalah dengan memberdayakan masyarakat tersebut. Kemiskinan pada masyarakat merupakan hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan dari ketidakberdayaan (*powerlessness*), kerapuhan (*vulnerability*), dan keterasingan (*isolation*). Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses pemberdayaan masyarakat melalui implementasi teknologi kelautan dan perikanan, merupakan pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini.

B. Kajian Teori

Penelitian sebelumnya yang membahas efektivitas dalam pemberdayaan masyarakat adalah yang dilakukan Pratama, C, pada tahun 2012. Penelitian ini melihat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pemberdayaan perempuan di Desa Joho, Gresik. Penelitian ini lebih fokus untuk meningkatkan posisi bargaining perempuan melalui pengorganisasian, yang dianggap sebagai langkah yang paling konkrit untuk dapat memberdayakan perempuan itu secara lebih baik.

Yusuf, A, 2012, menambahkan untuk mencapai kondisi masyarakat yang berdaya, proses awal yang harus dilaksanakan adalah pelatihan untuk mengembangkan kapasitas masyarakat, karena dari kondisi awal yang belum berdaya, masyarakat harus disadarkan terlebih dahulu tentang seluruh potensi dan kemampuan yang mereka miliki untuk kemudian diberikan pe-

mahaman bahwa untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik hanya mereka sendiri yang bisa meng-usahakannya karena merekalah yang mengetahui kebutuhan dan peluang–peluang yang ada. Faktor kepemimpinan dalam pemberdayaan masyarakat juga memiliki peran, sebagaimana hal yang dikemukakan oleh Itzhaky, H, and York, A, 2000.

Banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas program dalam pemberdayaan masyarakat salah satunya menurut Harahap, E, 2012, adalah tindakan perilaku dari pimpinan kelembagaan yang memperdayakan masyarakat tersebut. Karakter pemimpin yang tidak mementingkan diri sendiri tetapi bekerja untuk kepentingan sesama, semata-mata sebagai wujud dari tanggungjawabnya sebagai manusia akan mempercepat proses perubahan di masyarakat. Tujuan dari kelembagaan mina dan bisnis yang dibentuk untuk memperdayakan masyarakat pesisir di Brebes melalui percepatan implementasi inovasi pengetahuan dan teknologi dari Badan Penelitian dan Pengembangan KKP (Balitbang Kementerian Kelautan dan Perikanan).

Lazimnya program pemberdayaan masyarakat yang merupakan proses perjuangan kaum *powerless* untuk memperoleh *surplus value* sebagai hak normatifnya. Kelembagaan mina bisnis juga memperjuangkan *surplus value* tersebut yang dilakukan melalui distribusi penguasaan faktor-faktor produksi. Speer, P, 2000, mengungkapkan bahwa pemberdayaan pada suatu masyarakat sebagai salah satu jalan untuk mengubah kondisi sosial suatu masyarakat. Bahkan pencegahan masalah penyakit seperti HIV, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu sarana seperti hal yang dikemukakan oleh Beeker, C, Grey, C, and Raj, A, 1998.

Pada penelitian ini lebih melihat pada efektivitas kelembagaan untuk memperdayakan masyarakat pesisir yang dibentuk oleh Balai Besar Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Sosek) dalam implementasi inovasi pengetahuan dan teknologi yang diintroduksi oleh KKP sebagai salah satu sarana untuk memperdayakan masyarakat pesisir, selain itu juga dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi inovasi pengetahuan dan teknologi tersebut di masyarakat kelautan dan perikanan di Brebes. Dalam penelitian ini faktor-

faktor tersebut menggunakan faktor-faktor yang diadopsi oleh Stockbridge et al (2003), faktor tersebut terdiri dari 3 dimensi (individu, kelembagaan/organisasi, dan lingkungan). Masing-masing dimensi memiliki beberapa unsurnya, misalnya dimensi individu yang terdiri dari unsur kemampuan individu, motivasi, dan peran serta. Dimensi kelembagaan/organisasi terdiri dari unsur kepemimpinan, hubungan kelompok, dan sistem kelembagaan. Dimensi lingkungan meliputi unsur ekonomi, kondisi fisik, teknologi, dan kondisi sosial budaya.

Hampir sama dengan Stockbridge et al (2003), Burmeister, L et al (2001), mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan implementasi teknologi pada suatu masyarakat sebagai sarana pemberdayaan adalah struktur kelembagaan yang melakukan pemberdayaan, faktor ekonomi, dan sikap dari individu yang diperdayakan. Sebenarnya antara faktor yang diadopsi oleh Stockbridge et al (2003), Burmeister, L et al (2001), adalah hampir sama, bedanya adalah Stockbridge et al (2003) memasukan unsur ekonomi pada dimensi lingkungan, sedangkan Burmeister, L et al (2001) menganggap unsur ekonomi pada sebuah komponen yang lebih besar yaitu menjadi dimensi ekonomi. Unsur-unsur yang diadopsi oleh Stockbridge et al (2003) telah diterapkan di Indonesia, misalnya pada penelitian yang dilakukan Nuryanti, S, dan Swastika, D, 2011, dimana penelitian ini melihat peran kelembagaan (kelompok tani) dalam implementasi teknologi pertanian.

C. Penggunaan Metode Penelitian

Data diolah dengan menggunakan analisis komponen, dimana 3 dimensi (individu, kelembagaan/organisasi, dan lingkungan) yang dipecah menjadi 10 unsur (kemampuan individu, motivasi, dan peran serta, kepemimpinan, hubungan kelompok, dan sistem kelembagaan, ekonomi, kondisi fisik, teknologi, dan kondisi sosial budaya ekonomi, kondisi fisik, teknologi, dan kondisi sosial budaya). Metode ini merupakan susunan kombinasi linear dari variabel yang ada dalam sejumlah faktor. Dalam hal ini unsur ke satu merupakan faktor terbaik ke satu dalam menjelaskan variansi data asal. Unsur kedua merupakan faktor terbaik kedua dalam

menerangkan variansi data asal, dan seterusnya. Variansi dari setiap variabel ditunjukkan oleh nilai *eigen value*-nya.

Menurut Costello, A and Osborne, J, 2005, analisis komponen merupakan salah satu teknik statistika untuk aplikasi dalam ilmu sosial. Analisis ini digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam menilai unsur pembangunan untuk menilai sebuah program dan untuk mendeterminasikan variabel-variabel yang penting dalam sebuah program atau kebijakan. Salah satu keunggulan dari analisis ini adalah dalam analisis variabel bisa secara otomatis berkurang jika hubungan secara statistik tidak atau kurang berkorelasi, namun secara statistik informasi yang ada tidak berkurang dan tetap terjaga.

Analisis ini adalah sebuah permodelan untuk data-data yang bersifat deskriptif dimana sebuah model yang faktor analisisnya dipersempit. Sebuah model yang faktor analisisnya dipersempit diaplikasikan oleh Caudil, S, Zanella, F, and Mixon, F, 2000, dimana model ini merupakan sebuah penerapan model untuk implementasi pada sebuah program ekonomi pembangunan. Tujuan pada analisis komponen adalah pengelompokan variabel/unsur menjadi komponen yang dibentuk oleh variabel awal yang memiliki korelasi tinggi. Pendekatan ini tidak membedakan variansi data, bisa dianalisis pada data yang umum maupun pada data yang unik. Ada pun rumus sederhana yang digunakan pada analisis adalah seperti yang di bawah ini:

$$PC_m = W_{m1}X_1 + W_{m2}X_2 + \dots + W_{mp}X_p$$

W_{mp} = koefisien skor

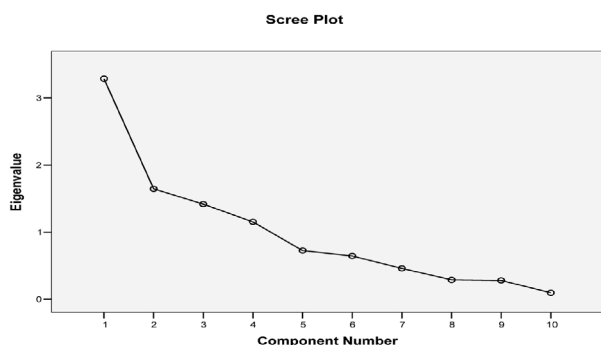
p = jumlah variabel

Penelitian ini dilakukan di Brebes, Jawa Tengah meliputi tiga desa yaitu Grinting, Randu Sanga, dan Kaliwlingi, sebagai salah satu sentra tambak di Pantai Utara Jawa. Penelitian *action research* ini sudah dimulai dari tahun 2012, dan tetap dilanjutkan pada tahun 2013. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan petambak yang ada di tiga desa, yaitu Randu Sanga, Kaliwlingi, dan Grinting. Responden diambil secara *purposive sampling*, responden diambil dari petambak

yang pada tahun 2012 dan 2013 termasuk menjadi kelompok sasaran dari lembaga Klinik Iptek Mina Bisnis. *Purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan struktur penelitian, dimana pengambilan sampel dengan mengambil sample orang-orang yang dipilih oleh penulis menurut ciri-ciri spesifik dan karakteristik tertentu (Djarwanto, 2003). Untuk memperdalam materi wawancara, juga dilakukan wawancara secara mendalam dengan stakeholder yang pernah melakukan pembinaan masyarakat di tiga desa, seperti Kepala Bidang dan Kepala Seksi di Dinas Kelautan dan Perikanan Brebes, Kepala Desa, dan Tokoh Masyarakat, serta pengurus dari Klinik Iptek Mina Bisnis yang melakukan pembinaan terhadap petambak di tiga desa tersebut.

D. Hasil Penelitian: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Petambak

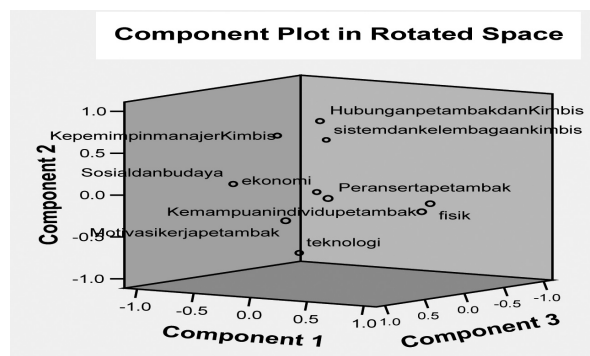
Dalam analisis efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis dalam pengembangan pengetahuan dan teknologi perikanan terbagi menjadi 10 unsur. Unsur-unsur inilah yang dianggap oleh masyarakat petambak di Brebes yang mempengaruhi efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui kelembagaan Iptek Mina Bisnis dalam implementasi teknologi. Setiap unsur saling mempengaruhi dan tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Kesepuluh unsur itu antara lain dilihat dalam 3 dimensi. Dimensi pertama yaitu dimensi individu petambak, yang terdiri dari tiga unsur, yaitu kemampuan individu petambak, motivasi kerja petambak, dan peran serta petambak dan kelompok petambak. Dimensi kedua yaitu dimensi kelembagaan/organisasi yang memperdayakan masyarakat dalam hal ini adalah klinik Iptek Mina Bisnis, yang terdiri tiga unsur, yaitu kepemimpinan manajer klinik Iptek Mina Bisnis, hubungan kelompok petambak dengan klinik Iptek Mina Bisnis, dan sistem dan struktur dalam kelembagaan klinik Iptek Mina Bisnis. Dimensi ketiga, yaitu dimensi lingkungan petambak, yang terdiri dari empat unsur, yaitu ekonomi, kondisi fisik tambak, teknologi yang digunakan dalam tambak, dan kondisi sosial dan budaya.



Gambar 1.

Screen Plot dari Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat Petambak melalui Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis dalam Implementasi Teknologi

Dari gambar 1 di atas menunjukkan bahwa kesepuluh unsur memang paling menentukan dalam efektifitas kelembagaan Iptek Mina Bisnis dalam pemberdayaan masyarakat petambak dan implementasi teknologi perikanan. Hal itu ditunjukkan dengan adanya grafik yang menurun agak tajam dari unsur 1 ke unsur 2, dan dan grafik yang menurun sangat tajam dari unsur 2 ke unsur 3, dan agak landai dari unsur 3 ke unsur 10. Kesepuluh unsur tersebut jika diurut berdasarkan kepentingannya adalah kemampuan individu petambak, kondisi ekonomi, kondisi fisik tambak, kepemimpinan Klinik Iptek Mina Bisnis, teknologi yang digunakan dalam budidaya, peran serta petambak, hubungan petambak dengan kelembagaan klinik Iptek Mina Bisnis, sistem kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis, motivasi kerja, dan unsur sosial budaya masyarakat petambak. Dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa indikator kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis sangat sedikit perannya dalam implementasi teknologi dan pemberdayaan masyarakat petambak. Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis pada tahun 2012 baru hanya berlaku sebagai distributor produk-produk usaha kecil dan pendamping UKM pengolahan ikan, belum menyentuh pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat kelautan dan perikanan dan pemberdayaan petambak.



Gambar 2.

Component Plot dari Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat Petambak melalui Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis dalam Implementasi Teknologi

Unsur-unsur yang harus dipertimbangkan dalam implementasi teknologi dan pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari 10 unsur secara umum dapat terbagi menjadi 3 dimensi utama:

1. Dimensi pertama yang terdiri dari unsur kemampuan individu petambak, motivasi kerja petambak, kondisi fisik perairan tambak, dan peran serta petambak. Guna melihat indikator penentu keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat petambak unsur-unsur yang termasuk pada dimensi pertama harus sangat diperhatikan, karena termasuk pada dimensi pertama.
2. Dimensi kedua yang terdiri dari unsur ekonomi dan teknologi. Guna melihat indikator penentu keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat petambak melalui unsur-unsur yang termasuk pada dimensi kedua akan menjadi prioritas setelah variabel pada dimensi pertama difokuskan, karena termasuk pada dimensi kedua.
3. Dimensi ketiga hanya terdiri variabel yang termasuk pada dimensi kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis (yang terdiri dari unsur kepemimpinan manajer klinik Iptek Mina Bisnis, hubungan kelompok petambak dengan klinik Iptek Mina Bisnis, dan sistem dan struktur dalam kelembagaan klinik Iptek Mina Bisnis) dan unsur sosial budaya. Indikator yang termasuk pada dimensi ketiga yang artinya peran dari kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis masih sangat kecil

dalam pemberdayaan masyarakat melalui implementasi inovasi teknologi perikanan. Hal inilah yang menyebabkan unsur peran manajer klinik Iptek Mina Bisnis, hubungan petambak dan kelembagaan klinik Iptek Mina Bisnis, sistem kelembagaan klinik Iptek Mina Bisnis, dan kondisi sosial budaya menjadi variabel penunjang dalam implementasi inovasi teknologi dan pemberdayaan masyarakat petambak. Peran manajer kelembagaan Iptek Mina Bisnis, hubungan petambak dan kelembagaan Klinik, dan sistem kelembagaan Klinik dalam penerapan inovasi teknologi adalah sangat lemah, karena kelembagaan Iptek Mina Bisnis pada tahun 2012 hanya berfokus pada peningkatan penjualan usaha kecil dan menengah pengolahan perikanan di Brebes.

Sepuluh unsur tersebut jika dilihat dari nilai *communalities*-nya yang semuanya diatas 50 persen, maka semua unsur yang dimasukan untuk menilai efektifitas pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Klinik Iptek Mina Bisnis melalui implementasi inovasi teknologi adalah memiliki hubungan yang kuat dengan faktor yang terbentuk. Nilai *communalities* unsur yang terbesar adalah unsur kemampuan individu petambak (0,868), hal ini mengindikasikan 86,8 persen varians dari variabel kemampuan individu petambak dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Kemampuan individu dari masyarakat kelautan dan perikanan di Brebes dalam menerima inovasi dari Kementrian Kelautan dan perikanan cukup besar, terutama dalam proses adopsi. Misalnya dalam proses introduksi Probiotik yang dilakukan oleh Pusat Litbang Perikanan Budidaya, narasumber (peneliti) probiotik dari Maros tidak kesulitan dalam melakukan introduksi probiotik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pengelola ilmu pengetahuan dan teknologi dari Pusat Litbang Perikanan Budidaya pada Akhir Mei 2013 melalui telepon terungkap bahwa dalam introduksi probiotik di Brebes tidak sulit dilakukan karena pembudidaya di sana mudah diberi pemahaman dan pengetahuan baru.

Nilai *communalities* unsur yang terkecil adalah unsur sosial budaya (0,622), hal ini mengindikasikan hanya 62,2 persen varians dari variabel sosial budaya dapat dijelaskan

oleh faktor yang terbentuk. Unsur sosial dan budaya kurang mendukung dalam pemberdayaan masyarakat untuk implementasi inovasi perikanan. Dalam hal ini masyarakat sudah bersifat individualis, dimana setiap permasalahan diatasi secara sendiri, apalagi mengingat peran kelompok yang hanya sebagai wahana pencairan bantuan. Unsur yang lainnya yang sangat berperan dalam implementasi inovasi perikanan dan pemberdayaan masyarakat petambak jika dilihat dari nilai *communalities* adalah unsur ekonomi (84,6 persen) dan kondisi fisik tambak (82,0 persen). Semakin kecil nilai *communalities* sebuah unsur, maka semakin lemah hubungannya dengan faktor yang terbentuk (efektivitas kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis dalam implementasi inovasi teknologi dan pemberdayaan masyarakat petambak).

Tabel 1.

Nilai Communalities dari Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis dalam Implementasi Teknologi

Unsur/faktor	Initial	Extraction
Kemampuan individu petambak	1.000	.868
Motivasi kerja petambak	1.000	.684
Peran serta petambak	1.000	.713
Kepemimpin manajer Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis	1.000	.794
Hubungan petambak dan Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis	1.000	.713
Sistem dan kelembagaan Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis	1.000	.708
Ekonomi	1.000	.846
Fisik	1.000	.820
Teknologi	1.000	.733
Sosial dan budaya	1.000	.622

E. Peran Dimensi Kemampuan Individu Petambak dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Implementasi Inovasi Teknologi Kelautan dan Perikanan

Indikator keefektifan pemberdayaan masyarakat melalui implementasi penerapan

ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat kelautan dan perikanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa dilihat dari 3 dimensi, yaitu individu, organisasi (kelembagaan) Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis, dan lingkungan. Dimensi pertama (individu) terbagi atas 3 unsur yaitu kemampuan individu masyarakat kelautan dan perikanan, motivasi kerja individu masyarakat kelautan dan perikanan, dan peran serta dari individu masyarakat kelautan dan perikanan. Pada dasarnya kemampuan individu petambak dalam memahami teknologi yang diintroduksi sangat cepat, namun perlu digaribawahi adalah selama teknologi tersebut tidak terlalu membebani dalam biaya operasional, tidak rumit dalam proses implementasi, dan memiliki dampak terhadap peningkatan produksi dalam pemanfaatan introduksi teknologi tersebut, seperti yang tertera dalam kutipan di bawah ini :

“Pembudidaya yang ada di Brebes adalah pintar-pintar, mereka mudah diberi pemahaman dan pengetahuan baru. Jadi dalam hal introduksi teknologi/pengetahuan tidak terlalu sulit, karena mereka sendiri mudah memahami apa yang diintroduksi. Sebagai contoh, dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat kelautan berupa Probiotik oleh Pusat Perikanan Budidaya, tidak mengalami kesulitan di lapang dalam mengintroduksi teknik budidaya udang ini. Bahkan salah satu dari pembudidaya di Brebes mampu mengintroduksi teknologi ini ke pembudidaya udang lain, yang menyebabkan banyak pembudidaya udang lain atau kelompok pembudidaya yang mempelajari teknik budidaya udang dengan menggunakan probiotik ke pembudidaya udang di Brebes”, ujar petugas penyebar ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat kelautan dari Pusat Perikanan Budidaya Kementrian Kelautan dan Perikanan.

Kemampuan individu yang menjadi kendala dalam pemberdayaan masyarakat melalui implementasi inovasi teknologi kelautan dan perikanan adalah modal. Salah satu yang menjadi perhatian dalam introduksi teknologi adalah kalau bisa teknologi yang diintroduksi jangan membutuhkan biaya operasional yang besar. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pembudidaya di Desa Grinting, salah satu hal yang menjadi pertimbangan petambak dalam adopsi teknologi adalah biaya operasional dalam penerapan teknologi tersebut dalam proses budidaya. Batas toleransi dari peningkatan modal akibat adanya introduksi teknologi dalam proses budidaya adalah Rp 5 Juta. Selain itu yang menjadi pertimbangan dalam introduksi teknologi adalah dampak introduksi teknologi terhadap peningkatan produksi harus seimbang dengan biaya yang dikeluarkan, dan introduksi teknologi dalam proses budidaya jangan terlalu rumit dilakukan.

Jika dilihat dari unsur kedua dari indikator individu, yaitu motivasi kerja dari pembudidaya adalah pada umumnya memiliki motivasi kerja yang kuat untuk meningkatkan produksi tambak dan ikut dalam program pemberdayaan. Motivasi kerja yang tinggi terlihat di wilayah di Desa Kaliwlingi dan desa Randu Sanga. Di desa Kaliwlingi contohnya motivasi kerja petambak dalam penerapan inovasi teknologi dan keikutsertaan dalam program pemberdayaan terlihat dari sikap mereka mencoba berbagai komoditas dan teknik budidaya tambak, misalnya dulu budidaya udang dan bandeng, namun karena tambak mereka banyak yang rusak karena abrasi, mereka sekarang mulai membudidayakan kerang di bekas tambak yang rusak tersebut. Motivasi kerja dalam program peningkatan produksi perikanan (tambak) adalah diperkuat karena faktor ekstern, yaitu kerusakan lingkungan karena abrasi. Motivasi kerja petambak

Tabel 2.

Unsur Individu Petambak dalam Pemberdayaan Masyarakat dalam Implementasi Inovasi Teknologi

Unsur Individu Petambak	Tingkatan Unsur Individu di Desa Grinting	Tingkatan Unsur Individu di Desa Randusanga	Tingkatan Unsur Individu di Desa Kaliwlingi
Kemampuan Individu	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Motivasi Kerja	Rendah	Tinggi	Tinggi
Peran Serta	Sedang	Tinggi	Tinggi

dalam mencoba berbagai teknik budidaya yang diintroduksi dan tidak diintroduksi atau mencoba berbagai komoditas yang sesuai dengan kondisi tambak mereka rusak merupakan salah satu strategi adaptasi mereka terhadap kerusakan lingkungan.

Di desa Randu Sanga, motivasi kerja petambak dalam program pemberdayaan masyarakat melalui penerapan inovasi teknologi juga cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya peminat dari berbagai institusi menjadikan desa ini sebagai penerapan inovasi teknologi dan percontohan program pemberdayaan. Di Randu Sanga ada implementasi inovasi teknologi berupa penerapan Probiotik dan pengolahan agar-agar kertas. Antusiasme masyarakat perikanan terhadap introduksi teknologi dan program pemberdayaan yang dilakukan sangat tinggi. Akibatnya banyak industri kecil pengolahan agar-agar rumput laut yang berkembang seperti dodol dan sirup rumput laut, sebagai multiplier effect dari introduksi mesin pengolah agar-agar kertas dari Balai Besar Pengolahan dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan.

Berbeda dengan dua desa yang disebutkan di atas, di Desa Grinting, berdasarkan penuturan dari pengurus Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis motivasi kerja masyarakat pada umumnya rendah. Hal inilah yang menyebabkan banyak institusi yang jarang menjadikan desa ini dalam program pemberdayaan melalui implementasi inovasi teknologi. Bahkan Dinas Kelautan dan Perikanan pernah memberikan

bantuan bibit rumput laut tapi tidak mereka tanam, dengan alasan pihak pemberian bantuan tidak memberikan bantuan biaya penanaman. Pada tahun 2011, Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis menjadikan desa ini sebagai desa sasaran dengan harapan menjadikan desa ini dari desa pengemis menjadi desa pengemas. Hal itu dilakukan dengan memperdayakan ibu-ibu petambak atau nelayan menjadi pengolah produk, diharapkan dengan hal ini industri kecil akan berkembang di daerah ini. Selain itu perimbangannya memilih para istri pembudidaya atau nelayan, karena mereka lebih memiliki pikiran yang lebih «*open minded*» terhadap usaha pemberdayaan masyarakat.

F. Peran Dimensi Kelembagaan Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Implementasi Inovasi Teknologi Kelautan dan Perikanan

Indikator kedua yaitu kelembagaan (organisasi), Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis dalam program pemberdayaan masyarakat melalui implementasi inovasi kelautan dan perikanan, yang meliputi unsur kepemimpinan manajer Klinik Iptek Mina Bisnis, hubungan kelompok petambak/nelayan dengan Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis, dan sistem dan struktur dalam kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis. Unsur pertama, yaitu kepemimpinan dalam Klinik Iptek Mina Bisnis, terlihat adanya dominasi dalam pengambilan keputusan. Hal

Tabel 3.
Unsur Kelembagaan Iptek Mina Bisnis dalam Pemberdayaan Masyarakat dalam Implementasi Inovasi Teknologi

Unsur	Tingkatan Unsur Kelembagaan Iptek Mina Bisnis Pada Kelompok Sasaran Pembudidaya (Kaliwlingi dan Randu Sanga)	Tingkatan Unsur Kelembagaan Iptek Mina Bisnis Pada Kelompok Sasaran Pengolah (Randu Sanga dan Grinting)
Peran pimpinan Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis	Rendah	Sedang
Hubungan pengurus Klinik Iptek Mina Bisnis dengan Kelompok petambak dengan kelompok sasaran	Rendah	Sedang
Sistem dan struktur kelembagaan Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis	Rendah	Sedang

Sumber: Data diolah, 2013

ini bisa dilihat dalam rapat pertama pada tahun 2013, terlihat sekali pemimpin Klinik Iptek Mina Bisnis dan LO (liason *officer*, perwakilan dari pihak dinas) mendominasi rapat. Setelah itu diberikan tahu kepada pengurus Klinik Iptek Mina Bisnis lainnya, bahwa mereka memiliki hak suara untuk menyatakan pendapat. Pada rapat kedua, dominasi tersebut sudah berkurang, tapi pengurus Klinik Iptek Mina Bisnis menyatakan pendapat yang merupakan pendapat dari pimpinan Klinik Iptek Mina Bisnis. Hal ini bisa dilihat dari ungkapan tiga pengurus Klinik Iptek Mina Bisnis mengenai rencana kegiatan pada tahun 2013, yaitu "Seperti usulan (pimpinan Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis) maka tahun 2013 sebaiknya kegiatan yang dilakukan adalah kunjungan ke Indramayu, Garut, dan Sidoarjo". Pada rapat kedua, semua pengurus mengemukakan pendapat tapi mengatas namakan usulan dari pimpinan Klinik Iptek Mina Bisnis.

Dalam mengelola program pemberdayaan masyarakat melalui implementasi inovasi teknologi peran pimpinan Klinik Iptek Mina Bisnis belum optimal, dia mengandalkan 3 anggota yang lainnya yang sangat mengetahui kondisi lapang. Di desa Grinting pembudidaya dan nelayan kurang mengenal pimpinan Klinik Iptek Mina Bisnis, tapi lebih mengenal Suratman (salah satu pengurus Klinik Iptek Mina Bisnis yang merupakan salah satu penyuluh). Hal ini terjadi karena Suratman sudah sering melakukan kegiatan penyuluhan dan program pemberdayaan di desa ini. Di desa Randusanga, juga pembudidaya tambak kurang mengenal pimpinan Klinik Iptek Mina Bisnis, yang mereka kenal dan dekat adalah Asisten Manajer Klinik di bidang penguatan kelembagaan dan bimbingan anggota (Asep Permana). Asep Permana sudah sering melakukan proyek mengenai pemberdayaan masyarakat di desa ini. Di desa Kaliwlingi, petambak dan pengolah ikan juga kurang mengenal pimpinan Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis, mereka lebih mengenal Asisten Manajer Klinik di bidang pengembangan usaha (Mashadi). Mereka cukup dekat dengan Asisten manajer klinik ini karena tinggal di wilayah desa ini.

Dapat diambil kesimpulan, bahwa peran pimpinan Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis

dalam pemberdayaan melalui implementasi inovasi teknologi belum optimal (rendah). Hal ini bisa dilihat masyarakat perikanan dan kelautan di tiga lokasi penelitian, kurang mengenal pimpinan Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis. Pimpinan Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis memiliki dominasi dalam intern organisasi, tapi kurang dikenal di petambak, dan nelayan. Hal ini terjadi karena pengurus Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis dilakukan secara *top down*, dimana Dinas Kelautan Perikanan mengusulkan karena pimpinan Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis merupakan aktivis LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Pimpinan Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis dikenal hanya terbatas pada kelompok pengolah ikan, hal ini karena sebelumnya pimpinan Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis pernah terlibat dalam pembinaan usaha kecil menengah.

Pada unsur kedua dari indikator kelembagaan Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis yaitu hubungan antara kelompok petambak dengan Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis terlihat hubungan yang cukup lemah. Hal ini disebabkan pada tahun 2012, Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis Brebes lebih berorientasi pada pemberdayaan usaha kecil menengah termasuk usaha kecil pengolahan ikan. Meski pun pada tahun 2012 Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis sudah melakukan pelatihan untuk petambak misalnya pelatihan teknik polikultur, rehabilitasi mangrove, dan pelatihan budidaya udang yang baik. Berdasarkan wawancara dengan petambak di Kaliwlingi, dimana dalam hal ini petambak dipilih berdasarkan saran dari pengurus Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis, dari petambak yang dipilih itu kurang mengenal Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis, tidak mengetahui keberadaan sekretariat Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis, dan kurang mengenal keseluruhan pengurus Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis.

Tahapan pengenalan pengurus Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis hanya terbatas pada mengenal Suratman (salah satu pengurus Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis) sebagai penyuluh di desa mereka, bukan pada peran Suratman pada tugas Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis. Kelembagaan Klinik Iptek Mina

Bisnis lebih dikenal pada tingkat pengolah ikan, tapi tahap pengenalan masih dangkal, dimana hanya tahu Kata “Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis”, tapi kurang tahu mengenai fungsi dan peran Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis. Jika dilihat dari pemahaman pengurus Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis, mereka sudah mengenal Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis secara mendalam, bahkan mereka memiliki slogan untuk menghapuskan fungsi Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis. Jadi tahap pengenalan Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis baru sebatas pada pengurus Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis, bukan pada kelompok sasaran.

Jika dilihat dari sisi sistem dan struktur kelembagaan Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis adalah cukup kuat. Pengurus Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis adalah orang-orang yang terbiasa berorganisasi dan terbiasa mengawal proyek pemerintahan (LSM) maka mereka terbiasa dengan organisasi. Apalagi mengingat penunjukan pengurus Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis secara *top down*, dimana satu sama lain tidak ada jiwa kompetitor. Hal inilah yang menyebabkan organisasi Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis yang terbentuk solid. Sebagai contoh, pimpinan Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis menunjuk orang-orang yang terbiasa bekerja sama dengan dia, sehingga satu sama lain mengenal karakter masing-masing.

Kelemahan dari sistem dan kelembagaan Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis di Brebes adalah dominasi dari pimpinan Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis. Pada awal pembentukannya, sistem dan kelembagaan Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis ini didukung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, meski pun kurang dikenal oleh kelompok sasaran. Setelah satu tahun berjalan, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan ada yang pro dan kontra, karena mengingat kinerja yang ditunjukkan oleh Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis Brebes, dimana diantara mereka hanya menganggap Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis belum optimal dalam perannya. Jadi, dapat ditarik kesimpulan sistem dan struktur kelembagaan Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis Brebes yang solid belum mampu berperan cukup besar dalam pemberdayaan masyarakat melalui implementasi inovasi teknologi.

Efektifitas pengurus Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis dalam pemberdayaan masyarakat melalui implementasi inovasi teknologi belum begitu signifikan. Hal ini disebabkan pada tahun 2012, pengurus Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis Brebes terfokus pada membina usaha kecil, termasuk usaha kecil di bidang pengolahan perikanan. Peran pengurus Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis terutama dalam hal pemasaran, dimana salah satu pengurus Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis berlaku sebagai distributor dari produk-produk pengolahan perikanan. Pengurus Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis Brebes tersebut mengambil keuntungan atau margin sebesar Rp 1000- Rp 2.000 per bungkus produk. Pengurus Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis Brebes belum masuk pada peran penyebarluasan inovasi teknologi.

Pada awal mula pendirian Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis Brebes, pihak Dinas Kelautan Perikanan sangat menerima pengurus dengan tangan terbuka. Bahkan pengurus Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis Brebes dibentuk secara *top down* dengan orang-orang pilihan dari pihak Dinas Kelautan Perikanan. Pada tahun 2013, pihak dinas menyatakan dukungannya dalam bentuk support dana untuk peningkatan kapasitas kelembagaan Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis dalam anggaran Rp 30 juta. Permasalahan kemudian timbul setelah satu tahun berjalan, pengurus Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis Brebes dianggap belum optimal merealisasikan programnya. Berdasarkan verifikasi di lapang, adalah pengurus Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis Brebes melakukan pembinaan terhadap kelompok sasaran pengolah adalah sebelum Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis Brebes di bentuk. Misalnya, salah satu kelompok sasaran penerima bantuan PUMP P2HP, sudah dibina sejak tahun 2010 saat salah satu pengurus Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis bekerjasama dengan Program bantuan dari Australia. Salah satu kekuatan dari pengurus Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis Brebes adalah 2 diantara anggotanya sudah banyak terlibat pada proyek-proyek pemerintah atau asing, sehingga sudah cukup dikenal masyarakat. Salah satu kelemahan adalah sejak pengurus Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis

Brebes dibentuk belum banyak pembinaan ke kelompok sasaran, sehingga pihak dinas menganggap pengurus Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis belum optimal melakukan program pemberdayaan masyarakat. Pendekatan pengurus Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis hanya terbatas pada distributor produk dari kelompok sasaran penerima PUMP P2HP.

G. Peran Dimensi Lingkungan dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Implementasi Inovasi Teknologi Kelautan dan Perikanan

Pada indikator lingkungan meliputi unsur ekonomi, kondisi fisik tambak, teknologi yang digunakan, dan kondisi sosial dan budaya pada umumnya sangat berperan terhadap efektifitas program pemberdayaan masyarakat melalui implementasi inovasi teknologi. Unsur pertama, kondisi perairan tambak di Randu Sanga sangat mendukung untuk program pemberdayaan melalui penerapan inovasi teknologi kelautan, misalnya implementasi inovasi teknologi probiotik. Berbeda dengan di Kaliwlingi dan Grinting, kondisi perairan dan fisik tanah mereka tidak sebagus tambak yang ada di Randu Sanga. Di Kaliwlingi, tambak mereka rusak karena proses abrasi pantai, sedangkan di Grinting tambak mereka agak berlumpur tidak seperti yang ada di Randu Sanga.

Secara teknologi, petambak di Grinting dan Kaliwlingi menggunakan teknologi yang tradisional sehingga program pemberdayaan untuk implementasi inovasi teknologi di dua lokasi ini sangat tepat, sedangkan petambak yang di Randu Sanga sudah ada yang menggunakan teknologi semi tradisional. Berdasarkan hasil wawancara dengan petambak, menurut mereka salah satu hal yang penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kondisi fisik

tambak dan teknologi yang digunakan. Namun pada umumnya, teknologi yang digunakan sangat tergantung dari tingkat ekonomi petambak dalam hal ini modal yang dimiliki. Secara ekonomi, petambak di Randu Sanga lebih sejahtera ketimbang petambak di Kaliwlingi dan Grinting. Hal ini bisa dilihat dari kondisi rumah mereka, dan tingkat pendapatan mereka. Pada unsur sosial budaya, kurang efektif mendukung program pemberdayaan karena sifat masyarakat yang bersifat individualis, sehingga banyak diantara mereka membuat kelompok petambak hanya sebagai sarana pencairan bantuan.

H. Penutup

1. Kesimpulan

Hasil analisis komponen mengindikasikan dimensi yang paling berpengaruh terhadap efektifitas program pemberdayaan melalui implementasi teknologi di Brebes, prioritas pertama adalah dimensi individu petambak, prioritas kedua adalah dimensi lingkungan, dan prioritas ketiga adalah dimensi kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis. Dimensi kelembagaan Iptek Mina Bisnis belum optimal dalam program pemberdayaan masyarakat, meskipun sistem dan struktur kelembagaan yang terbentuk sudah kuat dan solid, terutama unsur kepemimpinan kelembagaan. Kepemimpin kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis memiliki dominasi dalam intern organisasi, tapi kurang dikenal di petambak, dan nelayan. Hal ini terjadi karena pemilihan pengurus Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis dilakukan secara *top down*. Selain itu, dalam mengelola program pemberdayaan masyarakat melalui implementasi inovasi teknologi, pimpinan kelembagaan mengandalkan 3 anggota yang lainnya yang sangat mengetahui kondisi lapang. Nilai *communalities* unsur yang terbesar adalah unsur kemampuan individu petambak (0,868).

Tabel 4.
Unsur Lingkungan dalam Pemberdayaan Masyarakat dalam Implementasi Inovasi Teknologi

Unsur Lingkungan	Tingkatan Unsur Lingkungan di Grinting	Tingkatan Unsur Lingkungan di Randusanga	Tingkatan Unsur Lingkungan di Kaliwlingi
Ekonomi	Rendah	Tinggi	Sedang
Kondisi Fisik Tambak	Agak Sesuai	Sesuai	Agak Sesuai
Teknologi yang digunakan	Tradisional	Semi tradisional	tradisional
Sosial Budaya	Individualis	Individualis	Individualis

Sebaliknya nilai communalities unsur yang terkecil adalah unsur sosial budaya (0,622). Unsur yang lainnya yang sangat berperan dalam implementasi inovasi perikanan dan pemberdayaan masyarakat petambak jika dilihat dari nilai communalities adalah unsur ekonomi (84,6 persen) dan kondisi fisik tambak (82,0 persen). Semakin kecil nilai communalities sebuah unsur, maka semakin lemah hubungannya dengan faktor yang terbentuk (efektifitas kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis dalam implementasi inovasi teknologi dan pemberdayaan masyarakat petambak).

2. Saran

Supaya efektifitas program pemberdayaan masyarakat semakin optimal, diharapkan kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis terutama pimpinan kelembagaan mendekati kelompok sasaran, memperluas jaringan kerja dan berkoordinasi dengan instansi lain seperti Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Sosial, dan Dinas Perindustrian, dan SKPD lainnya (Satuan Kerja Pemerintah Daerah).

Pustaka Acuan

- Beeker, C, Grey, C, and Raj, A, (1998). *Community Empowerment Paradigm Drift and the Primary Prevention of HIV/AIDS*. Social Science & Medicine. Volume 46, Issue 7. Pages 831–842.
- Burmeister, L, Ranis, G, and Wang, M. (2001). *Group Behavior and Development: A Comparison of Farmers' Organizations in South Korea and Taiwan*. The Social Science Research Network electronic library at: <http://papers.ssrn.com/paper. No.828>. Paper Discussion. England.
- Campbell, C, and Jovchelovitch, S. (2000). *Health, community and development: towards a Social Psychology of Participation*. Journal of Community & Applied Social Psychology. Volume 10, Issue 4. Pages 255–270.
- Costello, A and Osborne, J. (2005). *Best Practices in Exploratory Factor Analysis: Four Recommendations for Getting the Most from Your Analysis*. Practical Assessment Research & Evaluation Journal. Vol 10, No 7. North Carolina State University.
- Caudil, S, Zanella, F, and Mixon, F. (2000). *Is Economic Freedom One Dimensional? A Factor Analysis of Some Common Measures Of Economic Freedom*. Journal Of Economic Development. Volume 25, Number 1. Missipi.
- Djarwanto. (2003). *Statistik Non Parametrik*. Yogyakarta: BPFE.
- Harahap, E. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi Untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional Yang Tangguh dan Mandiri*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 3, Nomor 2, Mei 2012. Fakultas Ekonomi. Padang: Universitas Taman Siswa.
- Itzhaky, H, and York, A. (2000). *Sociopolitical control and empowerment: An extended replication*. Journal of Community & Applied Social Psychology. Volume 28, Issue 4. Pages 407–415.
- Nuryanti, S, dan Swastika, D. (2011). *Peran Kelompok Tani dalam Penerapan Teknologi Pertanian*. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Vol. 29, No. 2. P.115-128. Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian.
- Pratama, C. (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pemberdayaan Perempuan Desa Joho di Lereng Gunung Wilis*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Volume 1, No.1. 2013. Malang: Universitas Airlangga.
- Stockbridge, M, Dorward, A, Kydd, J, Morisson, J, and Poole, N. (2003). *Farmer Organisation For Market Acces: An International Review*. P.8. The Cropp Post Harvest Research Programme of the Natural Resources Research Programme. The UK Departement of International Developpement. England.
- Speer, P. (2000). *Intrapersonal and Interactional Empowerment: Implications for Theory*. Journal of Community Psychology. Volume 28, Issue 1, pages 51–61.

Yulianti, Y. (2012). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Solok. Program Pasca Sarjana. Padang: Universitas Andalas.

Yusuf, A. (2012). Evaluasi Pelatihan melalui Mobile Training Unit Berbasis Masyarakat terhadap Minat Tumbuhnya Masyarakat dalam Menciptakan Lapangan Kerja di Jawa Barat. <http://jurnal.upi.edu>. Jakarta.

**Konstruksi Maskulinitas Global pada Majalah Pria di Indonesia
dalam Persepsi Pria Metroseksual
(Studi Kasus di Kota Medan)**

***Global Masculinity Construction on Men's Magazine In Indonesia
in the Perception of Metrosexual Men
(A Case Study in the City of Medan)***

Harmona Daulay

Departemen Sosiologi, Fisip, Universitas Sumatera Utara, Medan. Sedang menempuh pendidikan Doktor Program Sosiologi UGM. Telpn 08126048802.

Email: harmonadaulay@yahoo.com. Diterima 13 Januari, direvisi 15 Februari, disetujui 27 Februari 2014.

Abstract

This research sees problems of global masculinity construction that appears in men's magazine in Indonesia. Be conscious or not globalization era gives a strong effect upon Indonesian social order. This research started from researcher's concern toward masculinity studies from masculine perspective itself in Indonesia which haven't been critical detailed. The models of masculinity from masculine construction haven't been found conceptually in Indonesia. The image that appears in mass media such as printed and electronic media are still about the image of men, which attach to the values of masculinity in western world. This research is conducted on 10 metrosexual men (informants) in the city of Medan, it uses interview technique and case study analyzes. The result of research shows the fact that metrosexual men in Medan come from upper middle class and have a lot money, so that it could support their needs of lifestyle. Metrosexual men often follow the latest fashion through global men's magazine in Indonesia or from the western world. The result of research expresses the talks on global masculinity construction, which appear in men's magazine show a very strong influence from western values. For example, from the fashion used by men to the lifestyle in western world. Most of the informants admitted the influence of global masculinity happens to Indonesian people especially to the informants in Medan. Even they don't mind with masculinity construction in many facets such as in fashion, the informants admitted that they liked suits, which are formal attire in the western world. Most of the informants don't agree to Asian style phenomenon masculinity, which appears from Korean Boy Band, according to them, Korean Boy Bands are very feminine and reduce the concept of existing Indonesia local masculinity.

Keywords:

Global Masculinity-Metrosexual-Men's Magazine

Abstrak

Penelitian ini melihat permasalahan konstruksi maskulinitas global yang muncul di majalah pria di Indonesia. Disadari atau tidak, era globalisasi memberi pengaruh yang kuat pada tatanan sosial masyarakat Indonesia. Penelitian ini dimulai dari keprihatinan peneliti terhadap belum kritisnya kajian maskulinitas dari perspektif maskulin itu sendiri dan belum ditemukannya model maskulinitas rinci dari konstruksi maskulinitas secara konseptual di Indonesia. Gambaran yang muncul di media massa, seperti media cetak dan elektronik masih seputar gambaran pria yang lekat dengan nilai maskulinitas dari barat. Penelitian ini dilakukan terhadap 10 informan pria metroseksual di Kota Medan, menggunakan teknik wawancara dan analisis studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fakta pria metroseksual di Kota Medan, berasal dari kalangan menengah ke atas dan memiliki banyak uang, sehingga dapat menunjang kebutuhan akan gaya hidup yang mereka jalani. Pria metroseksual sering mengikuti fashion yang sedang berkembang secara global di Indonesia maupun dari Barat melalui majalah pria dewasa. Pembicaraan konstruksi maskulinitas global yang muncul di majalah pria memperlihatkan pengaruh nilai barat sangat kental. Misalnya, fashion yang digunakan oleh pria sampai pada gaya hidup yang berlaku di barat. Sebagian besar informan mengakui pengaruh maskulinitas global terjadi pada masyarakat Indonesia khususnya informan yang berada di Kota Medan. Mereka pun tidak keberatan dengan konstruksi maskulinitas pada banyak sisi, seperti contoh dalam fashion. Informan mengaku menyukai pakaian jas yang menjadi pakaian formal di barat. Sebagian besar informan tidak menyetujui maskulinitas fenomenal ala Asia yang muncul pada Boy Band ala Korea, menurut mereka maskulinitas tersebut sangat feminim dan mengurangi konsep nilai maskulin lokal Indonesia yang selama ini sudah ada.

Kata Kunci:

Maskulinitas Global, Metroseksual dan Majalah Pria

A. Pendahuluan

Fenomena majalah gaya hidup pria di Indonesia yang muncul pada era tahun 2000, memberi warna tersendiri bagi perkembangan kajian konteks konstruksi maskulinitas di Indonesia. Kita melihat dan mengetahui bersama bahwa yang mendominasi wacana media cetak dan elektronik di Indonesia adalah kaum wanita. Majalah dengan segmen pria pada era tahun 1980 sampai dengan 1990 adalah majalah yang berkaitan dengan hobi pria, seperti otomotif yang sangat kental dengan dunia maskulin, atau majalah bisnis yang identik dengan dunia pria, dan majalah politik yang juga identik dengan politik maskulin di Indonesia. Di era tahun 2000 yang menarik adalah dengan munculnya pilihan bagi pria untuk mempunyai majalah sendiri, temanya juga sangat memihak kepada dunia pria. Sebenarnya tema pria bukan hal baru yang menarik untuk dibaca, tetapi dinamika yang mengusung tema pada gaya hidup pria ini yang menarik untuk dibaca. Gaya hidup pria juga sejalan dengan peningkatan ekonomi di negara Indonesia. yang harus disadari bahwa peningkatan ekonomi mengubah juga pada gaya hidup masyarakatnya. *Trend* gaya hidup muncul pada majalah gaya hidup pria, terutama dalam berpenampilan. Pria Indonesia selama ini terkonstruksi identik dengan maskulinitas pria, dengan gambaran tipe idola dari aktor Amerika, seperti tokoh berotot Rambo, Arnold Swazneger. Tokoh pria dengan maskulinitas berotot dan akrab dengan dunia “keras” juga akrab di Indonesia dengan tokoh idola lokal di era tahun 1980, dengan aktor Advent Bangun, Willy Dozan, tahun 1990 bergeser ke tokoh idola, Ade Ray.

Ada fenomena yang berubah dengan munculnya majalah pria yang bertema gaya hidup, terutama gaya hidup kaum menengah ke atas. Dinamika itu terlihat dalam menampilkan pria kelas atas bukan dengan representasi pria maskulinitas *macho*, melainkan pria yang peduli dengan penampilan terutama fashion dan perawatan tubuh mereka. selama ini representasi orang yang peduli dengan fashion banyak digambarkan dalam majalah wanita dan merupakan representasi femininitas. Tony Schiarto dan Susan Yell, dalam diskusi mereka mengenai majalah gaya hidup laki-laki di Aus-

tralia, menegaskan, bahwa majalah merupakan suatu poin sentral bagi wacana ilmiah identitas laki-laki. Jackson *et al* mengemukakan, bahwa dalam majalah laki-laki, laki-laki dan wanita (direpresentasikan sebagai) kutub-kutub yang berlawanan dalam hal keinginan dan identitas seksual (2001: 84), dan menyatakan bahwa model majalah ‘kelaki-lakian baru’ maskulinitas bertindak sebagai alat untuk menguatkan batas antara laki-laki dan perempuan. Namun dalam perkembangan majalah pria, batas maskulinitas dan femininitas itu kabur. Laki-laki terutama tipe pria metroseksual yang melakukan aktivitas sosial seperti hobi, perawatan diri dan menikmati waktu luang sama dengan kaum wanita. Aktivitas pria pergi ke salon untuk merawat rambut, membersihkan kuku (*manicure* dan *pedicure*), *clubbing* untuk ngobrol dengan teman pria dan perempuan bukanlah pemandangan aneh di kota-kota besar yang dilakukan oleh kaum pria terutama pria metroseksual.

Berkaitan dengan hal tersebut, eksistensi majalah pria dengan mengedepankan gaya hidup tentu saja menjadi kajian yang menarik. Selama ini majalah wanita dianggap sangat bias gender, mementingkan kebutuhan hiburan pria dengan melakukan gambar dan mode wanita pada penekanan pada sisi seksualitas wanita tersebut. Pada era tahun 2000 kita melihat eksistensi nilai maskulinitas mulai terekspos dengan gambaran masuk pada sisi feminim yang selama ini menjadi wilayah wanita. Masyarakat yang sudah sangat inheren dengan dikotomi nilai feminim dan maskulin tentu memberi respons yang bisa saja menganggap hal ini bersifat kontroversial. Sosialisasi maskulinitas yang tampil pada diri pria metroseksual yang berarah pada nilai pergeseran maskulin baru, bukan hanya di media cetak seperti majalah pria ini, melainkan juga dapat kita lihat di media televisi, banyak iklan mulai menekankan bahwa pria bisa masuk ke dunia feminim. Sebagai contoh, pada iklan pria di televisi (seorang ayah mencuci pakaian), kontes bapak teladan (*super dad*) dari produsen sabun, kontes memasak bagi pria dari salah satu merek penyedap rasa, tentu saja secara perlahan mewarnai konsep maskulin di media massa. Media cetak seperti majalah lebih terbuka lagi dengan pembongkaran eksistensi konsep maskulin dengan label seperti

menunjukkan judul untuk pria (*for Man* atau *for Him*) di dalam majalah tersebut. Apalagi majalah pria itu tercetak dalam *hard copy*, sehingga dapat di baca kapan saja walaupun tanggalnya sudah lewat namun pengaruh dari konstruksi maskulinitas yang ditampilkan tentu saja bisa melekat lebih inheren dalam mempengaruhi pembacanya. Eksistensi majalah pria bergenre gaya hidup mengindikasikan pasarnya sebagian besar adalah pria metroseksual. Majalah tersebut sebagai suatu pedoman dalam memberikan wawasan gaya hidup, yang berbeda dengan konstruksi gaya hidup pria Indonesia sebelum era tahun 2000. Fenomena pria metroseksual di Indonesia, terutama kota-kota besar, memang makin menarik. Apakah majalah pria ini mempengaruhi pada konstruksi maskulinitas barat karena hampir sebagian besar majalah pria tersebut adalah berjenis waralaba. Asumsi yang terlihat bahwa konstruksi maskulinitas dalam ekspresi diri pria metroseksual hanya untuk kepentingan pasar dan mendobrak nilai dikotomi gender yang ada.

Bertitik tolak dari era kebebasan berekspresi dalam identitas maskulinitas dan era kebebasan media dan era pencitraan, yang telah dikemukakan di depan maka konteks permasalahan yang ingin dilihat dalam penelitian ini adalah, bahwa sebagian besar artikel dan iklan yang dimuat di dalam majalah pria yang berorientasi pada gaya hidup adalah lebih cenderung merepresentasikan gaya hidup pria metroseksual dan mengarahkan pria kelas menengah atas kepada ide maskulinitas baru dari sistem patriarki yang selama ini sangat kental dengan maskulinitas dengan nilai *machoisme*. Hal ini merepresentasikan pria metroseksual dan pria kelas atas masuk pada nilai androgini dan mengaburkan identitas maskulinitas dan feminitas yang tergambar di majalah pria di Indonesia. Hal yang menarik ketika konstruksi maskulinitas yang bergeser tersebut diterima dan menjadi suatu pegangan gaya hidup terutama pada pria dengan gaya metroseksual. Penerimaan pria metroseksual terhadap gaya hidup yang berbeda dengan sistem patriarki di Indonesia selama ini merupakan suatu pergeseran yang menarik untuk dibahas. Hal yang dapat dilihat nantinya adalah pengaruh nilai dari barat serta bagaimana nilai tersebut berpengaruh pada gaya hidup mereka

mengekspresikan maskulinitas modern yang berbeda dengan maskulinitas Indonesia selama ini. Gaya hidup metroseksual relatif sangat konsumtif karena mereka melakukan berbagai aktivitas perawatan tubuh, aktivitas hobi dan aktivitas sosial yang cukup menggunakan dana yang tidak sedikit. Berdasarkan argumentasi di depan perumusan masalah yang akan dieksplorasi dari penelitian ini adalah bagaimanakah persepsi pria metroseksual terhadap konstruksi maskulinitas yang terbangun di majalah pria? dan bagaimanakah konstruksi maskulinitas berpengaruh pada pola gaya hidup dan pola konsumsi dan pria metroseksual?

B. Kajian Teori

Pria metroseksual bukanlah suatu konsep tunggal dari pembicaraan maskulinitas. Mengacu pada konsep teoritis mengenai pria metroseksual dari Simpson (dalam Kunto) yang menegaskan ada lima pondasi dari ciri pria metroseksual:

1. Pria metroseksual adalah pria berpenampilan cantik yang narsis, mencintai dirinya sendiri dan gaya hidup perkotaan.
2. Pria metroseksual harus memiliki uang, digunakan dalam belanja untuk penampilan.
3. Pria metroseksual hidup di perkotaan yang akses dari berbagai fasilitas yang menunjang penampilan.
4. Pria metroseksual adalah bentuk identitas seksual yang meliputi semua aspek seksualitas, termasuk orientasi, preferensi dan kenikmatan seksual yang kesemuanya terpusat dan didapat di tubuhnya sendiri.
5. Pria metroseksual bisa berprofesi sebagai apapun dengan akses yang mencukupi untuk mempercantik dirinya dan mengonsumsi produk mahal.

Pria metroseksual adalah sebuah konsep yang terkait dengan jenis maskulinitas apa yang sedang muncul dari berbagai bahasan maskulinitas yang ada selama ini. Maskulinitas cukup mempunyai penekanan pada eranya masing-masing, seperti pembagian maskulinitas berdasarkan era tahun 1980, 1990 dan 2000. Era maskulinitas yang digunakan di dalam konteks penelitian ini adalah era tahun 2000. Untuk melakukan kajian pada konstruksi maskulinitas, digunakan konsep menurut Jewitt, C dalam

(Kurnia 2004), yang melihat ada beberapa tipe kontinum maskulinitas:

1. Tipe *Gladiator Retroman* yaitu pria yang secara seksual aktif dan memegang kontrol.
2. Tipe *Protector* yaitu pria pelindung dan penjaga.
3. Tipe *Clown of Boffont* yaitu pria yang mengutamakan persamaan dalam menjalin hubungan dan menghormati wanita serta bersifat *gentleman*.
4. Tipe *Gay Man* yaitu pria yang mempunyai orientasi seksual homoseksual.
5. Tipe *Wimp* yaitu pria yang lemah dan pasif.

Selama ini media melakukan representasi pria dengan tipe Gladiator Retroman, di akhir tahun 1990 representasi mulai bergeser ke tipe *Clown of Boffont* seperti iklan di majalah dan televisi, contohnya dahulu iklan sangat maskulin seperti iklan rokok Marlboro dicitrakan laki-laki *cowboy*, iklan rokok Gudang Garam dengan laki-laki penakluk gunung. Pergeseran terjadi ketika di televisi dan majalah mulai muncul iklan maskulin yang memasuki dunia feminim, seperti iklan mencuci dan menjaga anak pada pria.-

Penelitian ini juga menggunakan konsep maskulinitas dari Beynon (Argyo 2010), yaitu terminologi *new man as nurturer* dan *new man as narcissist*. *New man as nurturer* merupakan gelombang awal reaksi laki-laki terhadap feminisme. Anggapan kedua bahwa *new man as narcissist*, berkaitan dengan komersialisme terhadap maskulinitas dan konsumerisme semenjak akhir Perang Dunia II. *New man as narcissist* adalah anak-anak dari generasi zaman *hippies* (tahun 1960) yang tertarik pada pakaian dan musik pop. Banyak produk komersial untuk laki-laki yang bermunculan, bahkan laki-laki sebagai objek seksual menjadi bisnis yang amat luar biasa. Apabila mengadopsi konsep Robert Brannon, dapat disimpulkan bahwa sifat maskulinitas dalam konsep *No Sissy Stuff* seorang laki-laki sejati harus menghindari perilaku atau karakteristik yang berasosiasi dengan perempuan. Konsep *Be a Big Wheel* juga menyatakan bahwa maskulinitas dapat diukur dari kesuksesan, kekuasaan, dan pengaguman dari orang lain. Hal ini dianggap sebagai suatu fakta kondisi yang masih menjadi dan merupakan ekspresi

dari pria metroseksual yang juga menjadi isu di Kota Medan

Dalam konteks analisis media, Piliang (1999) melihat media sebagai perjuangan tanda seperti majalah pria juga berusaha melakukan perjuangan tanda konstuksi *trend* hidup baru dengan memunculkan pria metroseksual. Berkaitan juga dengan perjuangan tanda pergeseran konsep maskulinitas yang terbangun di era sebelumnya. Jika yang terbangun adalah konstruksi maskulinitas yang sangat membedakan antara maskulin dan feminim, tetapi dalam perkembangannya dunia maskulinitas mulai bergeser ke maskulinitas. Hal ini tidak terlepas dari kepentingan kapitalisme, ketika kaum wanita dan majalah wanita telah mengalami kejenuhan, diperlukan suatu strategi baru dalam rangka mengakumulasi modal untuk menularkan nilai konsumtif pada dunia pria, apalagi kebanyakan pria sebagai pencari nafkah utama. Secara logika, hal ini sejalan karena pengambilan keputusan ada di tangan pria. Ada siklus yang berjalan seperti *trend* fashion menunjukkan status sosial, status sosial menunjukkan pola konsumsi disesuaikan dengan citra yang juga dikonstruksikan. Penjelasan di atas mengisyaratkan hegemoni media dengan serta merta dapat melakukan konstruksi citra dan *trend* yang akan berefek kepada tafsiran maskulinitas baru melalui ikon metroseksual, yang kelihatan sebagai ujung tombak bagi *trend setter* pria, sama seperti ikon Barbie menghantui obsesi kecantikan wanita di era tahun 1990.

Media massa merupakan sarana penting dari kapitalisme abad XX, untuk memelihara hegemoni ideologis, juga menyediakan kerangka berfikir bagi berkembangnya budaya massa. Melalui kelompok dominan, terus-menerus berusaha mempertahankan, melembagakan, melestarikan kekuasaan demi menggerogoti, melemahkan, dan meniadakan potensi tanding dari pihak yang dikuasai. Dari pendapat ini lahir suatu hegemoni oleh media yang bisa menentukan agenda *setting* dalam masyarakat yang menentukan *setting* kultural yang ingin direpresentasikan. Lebih lanjut Kellner (2010: 77-82) menjelaskan, budaya media adalah sebuah persaingan representasi yang mereproduksi dan membantu menyusun pandangan orang

terhadap dunia, gagasan identitas dan gender pribadi, pertunjukan gaya dan gaya hidup, serta pemikiran dan tindakan sosio-politik.

Pria metroseksual diasumsikan merupakan bagian dari sub sistem kapitalisme media, yang memerlukan ikon untuk membentuk sebuah citra. Mungkin kita masih ingat dengan ikon barbie di tahun 1990 yang menjadi ikon bagi konsep cantik anak perempuan dan perempuan dewasa. Pria metroseksual bisa saja menjadi ikon sama dengan *barbie* dalam konteks melakukan rekonstruksi maskulinitas baru yang bergeser dari konsep maskulinitas di era tahun 1980-1990 terutama di Indonesia, yang di arahkan kepada maskulinitas global dengan kiblat maskulinitas barat.

C. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*). Informan dipilih berdasarkan kriteria yang dianggap memenuhi permasalahan penelitian. Penjaringan Informan yang di wawancarai melalui teknik *snowball*. Untuk metode pengambilan teknik seperti ini khusus digunakan untuk data yang bersifat komunitas dari subjektif informan. Hal ini sesuai dengan subjek penelitian saat pria metroseksual sebagai suatu komunitas pria mempunyai gaya hidup tertentu. Metode *snowball* dilakukan dalam pencarian informan secara berantai (*multilevel*). Proses *snow ball* ini mendapatkan Informan terpilih sebanyak 10 orang. Disamping itu Metode pengumpulan data juga dilakukan dengan cara *focus group discussion (FGD)* yang dilakukan dengan semua informan. *FGD dilakukan* untuk mengumpulkan semua informan dan kembali menajamkan pertanyaan wawancara pribadi yang masih belum lengkap serta menggali kembali persoalan konstruksi maskulinitas dengan lebih rinci dan mendalam lagi. Kelebihan metode *FGD* dapat dipergunakan untuk menggali kebiasaan, keyakinan dan penilaian dari sebuah kelompok. *FGD* juga mempunyai kelemahan, misalnya hasil kesimpulan diskusi terkadang dipengaruhi oleh pandangan dan persepsi moderator. Dalam kon-

teks ini diperlukan sekali peran moderator yang baik terhadap permasalahan penelitian.

Kriteria informan adalah pria yang berusia 23-40 tahun, bekerja di sektor perbankan, bisnis, pemasaran dan *event organizer*, berpenghasilan tetap di atas Rp 5.000.000,- per bulan, pernah membaca ataupun berlangganan majalah pria seperti FHM, Esquire, Kosmopolitan Men, *Men's Health dan Fitness for Men*. Pria yang mempunyai kebiasaan melakukan perawatan tubuhnya, relatif suka belanja dan berkumpul dengan teman-temannya (*hang out*), serta benar-benar menikmati fasilitas kehidupan perkotaan secara maksimal.

Analisis penelitian dilakukan dengan teknik data yang terkumpul dari wawancara dilakukan tabulasi. Data dari proses *FGD* dilakukan rekapitulasi, kemudian dipilah dan dilakukan reduksi data, lalu dilakukan analisis. Analisis data dilakukan dengan teknik deskripsi kualitatif. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang sangat menekankan kepada kuantitas sampel dan populasi penelitian, penelitian ini lebih menekankan kedalaman dan pemahaman atas masalah yang diteliti, memahami secara intensif dan terperinci terhadap objek yang diteliti dalam fenomena dan lingkup tertentu yang sempit, terutama dalam aspek persepsi terhadap konstruksi maskulinitas yang dialami sebagai gaya hidup oleh pria metroseksual.

D. Hasil Penelitian: Pria Metroseksual dan Kota Medan

1. Gambaran Umum

Informan yang diteliti terdiri atas, enam orang belum menikah dan empat orang informan sudah menikah. Informan mempunyai profesi yang beragam, seperti pegawai bank, pengusaha swasta, *professional* seperti dokter, *event organizer*. Mereka umumnya mempunyai penghasilan tetap di atas Rp 5.000.000. Dari pengamatan dan wawancara mendalam, mereka merupakan sosok pria yang percaya diri dan menyenangkan diri mereka (cenderung narsis), sangat peduli pada penampilan diri terutama dalam fashion. Umumnya informan tidak keberatan dikatakan sebagai pria metroseksual. Mereka memang mempunyai kehidupan yang cukup akrab dengan akses kehidupan

perkotaan, seperti sering mengisi waktu luang “nongkrong” di mal dan plaza di Kota Medan, seperti di Sun Plaza, Cambridge Mal dan Her-mel Plaza. Mereka juga kerap rutin mendatangi pusat kebugaran, seperti tempat *fitness* yang ada di hotel berbintang di Kota Medan.

Pengakuan dari informan mereka merasa aktivitas berdandan, merawat tubuh adalah bagian dari merawat diri dan kegiatan tersebut bukan hanya untuk domain wanita. Kebutuhan merawat kulit misalnya, dilakukan dengan alasan cuaca ekstrim global yang terjadi di dunia, sehingga kulit memerlukan perawatan khusus. Alasan tersebut sebagai alasan penting untuk peduli merawat tubuh. Konsep muka bersih, cerah dan putih juga menjadi penting. Gangguan tumbuhnya jerawat di wajah juga menjadi hal yang menakutkan bagi pria metroseksual karena sebagai hal yang mengurangi kesempurnaan tampilan wajah.

Pengakuan lain yang menjadi alasan mereka tampil trendi adalah karena pekerjaan. Jenis pekerjaan mereka yang selalu bertemu orang lain, menuntut penampilan yang prima menyebabkan mereka sangat mengutamakan penampilan. Dalam menggunakan aksesoris pun mereka cenderung mengenakan dalam konteks pelengkap penampilan. Seperti pengakuan seorang informan yang sudah menikah yang mengaku mempunyai jam tangan koleksi yang lebih banyak dari istrinya. Salah seorang informan dari sepuluh informan juga merupakan model pria. Ia adalah ikon dari sebuah salon pria kenamaan di Kota Medan, sehingga dalam periode satu bulan sekali harus mengganti model rambutnya untuk kepentingan ikon salon tersebut dan sebagai *trend setter*.

Pria metroseksual yang diteliti memang masih berorientasi pada penekanan kebutuhan penampilan yang berbeda. Secara umum mereka sangat mengedepankan penampilan berbusana, menggunakan aksesoris dan penataan rambut. Ada juga yang menambah dengan penampilan penting dalam konteks fisik, seperti pentingnya mempunyai tampilan perut langsing *sixpack*. Untuk hal ini tidak semua informan setuju, karena menurut mereka walaupun tidak harus sampai *sixpack* yang penting tubuh harus proporsional dan tidak gemuk. Seperti ungkapan salah satu informan berikut.

“Pria berdandan dan merawat tubuh sah-sah saja selama dilakukan dengan tidak berlebihan. Pria juga perlu berdandan untuk menjaga penampilan agar tetap dinamis. Merawat tubuh juga perlu agar tubuh tetap terjaga kebugarannya. Bagi Saya pria berdandan dan merawat tubuh bukanlah hal yang tabu selama masih dalam batas kewajaran.” (Informan YR). “Penampilan itu harus dijaga. Bahkan ketika memiliki badan gemukpun, gemuk-nya harus proporsional, tidak terlalu berlebihan atau jangan sampai gemuk yang tidak sehat dan tidak sedap dilihat mata.” (informan FD)

2. Persepsi Informan tentang Maskulinitas Global dari Barat

Persepsi informan terhadap maskulinitas dari barat juga menjadi penekanan dalam penelitian ini. Jika dilihat sifat-sifat periklanan dan kebiasaan yang muncul di majalah pria yang diteliti dan merupakan majalah waralaba dari Amerika dan Inggris, maka analisis tampilnya maskulinitas barat sangat relevan. Dalam kerangka latar pikir dari maskulinitas barat, akan terlihat hal tersebut dipengaruhi oleh pemikiran Yunani dan Romawi. Seperti akar keperkasaan dalam konteks periklanan modern yang muncul di majalah pria waralaba, apabila ditelusuri memperlihatkan lanjutan dari tradisi Yunani dan Romawi dalam balutan kapitalistik barat modern. Maskulinitas kapitalistik mengandung unsur berbagai terminologi tentang pria dalam berbagai aspek yang bisa dijual. Iklan maskulinitas kapitalistik modern, juga terlihat berbagai artikel yang ada, seperti artikel yang menggambarkan mitos dewa yunani yang menggambarkan pria ideal itu tampan, gagah, berotot besar, pandai, perkasa.

Dalam melihat konstruksi maskulinitas barat yang muncul di majalah pria waralaba, beberapa informan melengkapi hasil wawancara dengan mengatakan:

“Berbeda dengan negara kita, penampilan maskulinitas di Barat sebenarnya sudah sejak lama dibangun. Maskulinitas di Barat dinilai tidak hanya dari penampilan, tapi juga dari sikap dan perbuatan. Seperti membukakan pintu mobil untuk pasangan-

nya, negara kita mungkin mengadopsi ini dari mereka. Banyak *manner* (tata cara pergaulan) yang mereka jadikan sebagai bentuk dari kemaskulinan. Mulai dari cara bicara, cara memperlakukan wanita, cara menyapa, atau cara menjawab telepon misalnya. Ketika laki-laki di Barat menjawab telepon dengan suara berat, maka orang-orang biasanya akan menilai kalau laki-laki ini sangat maskulin.” (Informan FD)

“Saya melihat bahwa sebenarnya dunia barat sudah lebih awal melakukan perubahan dan konstruksi bahwa maskulin adalah *macho*. Sudah tidak demikian lagi. Segala macam bentuk *fashion* otomatis berkembang dari dunia Barat. Pergeserannya sama saja seperti di Indonesia, namun mereka yang lebih dulu.” (Informan HF)

“Maskulinitas dari Barat menurut saya justru lebih jujur dan berkualitas daripada konsep maskulinitas di Indonesia. Mereka lebih berani mengungkapkan jati diri mereka. Bahkan sikap mengkritik *fashion* di daerah Barat juga menjadi salah satu tindakan maskulinitas yang harus ditiru. Tidak segan memberikan kritik. Artinya tidak banci.” (Informan MS)

“Konsep maskulinitas di Barat lebih fleksibel bahwa maskulinitas itu tidak saja dinilai dari fisik tetapi dari banyak aspek yang terkandung di dalam maskulinitas itu sendiri. Hal ini wajar saja karena orang-orang di Barat itu lebih terbuka terhadap pergeseran-pergeseran atau pun perubahan-perubahan yang memang dirasa sesuai dengan perkembangan zaman.” (Informan DR)

“Sepengetahuan Saya maskulinitas dari Barat cukup mempengaruhi perubahan konstruksi maskulinitas yang ada di dunia. Hal ini bisa dilihat dari *trend fashion* buat para pria yang selalu update tiap bulannya. Dari sini kita bisa lihat bahwa di barat pun penampilan diri bagi seorang pria sangat diperhatikan. Cara berpakaian seorang pria yang *fashionable* pun sangat mempengaruhi

maskulinitas yang ada pada diri pria tersebut.” (Informan TP)

“Menurut saya maskulinitas dari Barat itu sudah lebih dulu mengalami perubahan. Karena saya pernah membaca artikel bahwa kalau dahulu laki-laki di Barat itu paling anti untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan, misalnya saja dahulu laki-laki di Barat tidak mau mengurus dan merawat anak karena itu adalah urusan perempuan namun sekarang laki-laki di barat itu sangat memperhatikan perawatan anak. Perubahan ini terjadi saya pikir karena masyarakat di Barat itu cukup mudah menerima perubahan yang ada di masyarakat mereka.” (Informan YR)

“Menurut saya maskulinitas Barat sama saja dengan maskulinitas di Indonesia, tetapi Barat lebih identik dengan *gay*.” (Informan JY)

“Setuju, saya lebih memilih maskulinitas ala Barat dengan Jas dan setelan yang formal meski baginya kemaskulinitasan juga dapat terpancar walau pun hanya dengan jaket maupun jeans saja tanpa embel-embel jas sebagai pelengkap.” (Informan IH)

“Menurut saya maskulinitas Asia sama Eropa berbeda. Kalau kita melihat *boyband* Korea dipakein sesuatu keliatannya agak kewanita-an, tapi liat *boyband* yang Eropa dipakein baju yang sama pasti lebih maskulin. Dan aku lebih suka maskulinitas dari Barat (Jas).” (Informan MD)

“Maskulinitas barat menurut saya bagus *sih*, lebih *simple* dan lebih *elegant*.” (Informan DS)

Jawaban informan tentang maskulinitas dari barat memperlihatkan konstruksi maskulinitas barat memang memberikan tempat yang cukup penting dalam menjadikannya sebagai acuan untuk membahas persoalan maskulinitas. Jawaban informan menunjukkan sekali bahwa sebagai pria metroseksual mereka benar-benar konsen pada *fashion* yang mendapat pengaruh dari Barat. Ketika beberapa konsep maskulinitas

barat yang digunakan dalam referensi teoritis ditanyakan kepada informan, terungkap jawaban yang bervariasi pada konsep maskulinitas barat yang digunakan di kerangka teori. Pada konteks konsep *Gladiator Retroman*, yaitu pria aktif dan memegang kontrol, serta pada konstruksi ini, maskulinitas pria cenderung lebih aktif dari wanita juga terkait dengan unsur kejantanan pria. Pada konsep ini hasil penelitian menunjukkan informan sebagian besar menyatakan setuju pada konsep pria sebagai *Gladiator Retroman* seperti jawaban dari:

“Saya setuju, baik itu di keluarga maupun lingkungan manapun. Menonjolnya pria maskulin ini karena memiliki sikap yang berwibawa dan inilah yang melengkapi *leadership*-nya sehingga cenderung laki-laki maskulin cenderung lebih menonjol ketimbang yang tidak punya jiwa *leadership*.” (Informan HF)

“Pria harus aktif terutama dalam mencari uang dan menjadi pemegang kendali dalam rumah tangga.” (Informan DR)

Jawaban informan terhadap konsep *gladiator retroman* menunjukkan sebagian besar menyetujui pada peran aktif dan pemegang kontrol di tangan pria. Hal ini memperlihatkan bahwa nilai patriarki yang ada melihat pria sebagai pemimpin masih sangat kental. Jargon bahwa pria sebagai pemimpin keluarga melatarbelakangi pendapat ini. Konsep pemimpin sebagai pemegang kontrol melekat, pada sisi lain wanita adalah sebagai pendamping. Perpaduan konteks pencari nafkah, kepemimpinan dan keidealan pria harus aktif, menyebabkan konsep *gladiator retroman* sebagai pandangan pria metroseksual.

Pada konteks konsep pria sebagai *protector* yaitu pria pelindung dan penjaga, 90 persen informan setuju mereka adalah sebagai pelindung. Jawaban setuju diberikan oleh informan yang belum dan sudah menikah. Seperti kutipan berikut.

“Pria maskulin sudah memiliki jiwa bertanggung jawab pada dirinya sendiri, sehingga otomatis dia akan lebih bertanggung jawab pada istrinya atau keluarganya dan kepada segala hal dimana dia diberi tanggung jawab.” (informan HF)

“Saya setuju, karena adalah keharusan seorang laki-laki maskulin untuk menjaga baik pasangannya, adik perempuan, bahkan orang tuanya. Karena ini juga mereka menjadi maskulin.” (Informan MS)

Jawaban informan pada konteks bahwa pria sebagai pelindung merupakan jawaban dominan dari pria metroseksual yang diteliti. Hal ini tidak lepas juga dari konsep maskulinitas Indonesia, bahwa fungsi perlindungan sejak lama telah menginternalisasi dalam sosialisasi peran gender pada pria, yang tentu saja berefek pada persepsi yang mereka bangun dan jalankan dalam relasi sosial sehari-hari. Konsep pria sebagai pelindung bersanding dengan konsep wanita sebagai perawat. Pria dengan status kepala keluarga bertanggung jawab menjadi pelindung.

Pada konteks konsep *Clown of Boffont*, yaitu konsep pria mengutamakan persamaan dalam menjalin hubungan dan menghormati wanita, serta bersifat *gentleman*. Konsep ini merupakan isu gender dalam melakukan relasi dengan wanita, isu yang dibicarakan dalam konteks sosial budaya di Indonesia. Kesetaraan gender juga menjadi suatu Instruksi Presiden No 9 tahun 2000, apabila dikaitkan dengan konsep *clown of boffont* tentu saja akan menggambarkan konstruksi kesetaraan gender seperti model yang dipersepsikan oleh pria metroseksual yang diteliti. Jawaban informan diungkapkan sebagai berikut.

“Karena untuk saat ini laki-laki itu harus sadar gender dan tidak boleh bersifat egois. Sadar gender juga merupakan salah satu bentuk *gentlemen* seorang laki-laki.” (Informan YR)

“Saya setuju, karena menghargai perbedaan itu sangat baik. Karena pria maskulin dikagumi karena mereka mau memberikan kebebasan kepada orang lain sehingga orang lain bisa merasa nyaman.” (informan MS)

Pada konteks relasi gender semua informan menyatakan sangat setuju untuk menghargai wanita dan bersikap *gentleman* dalam melakukan relasi sosial. Hal ini memperlihatkan bahwa

isu kesetaraan gender sebagai suatu isu yang perlahan bisa diterima dalam melihat relasi pria dan wanita. Fakta ini bisa memberikan asumsi bahwa isu kesetaraan gender terutama di dalam dunia kerja menjadi penting dalam konteks nilai maskulin seorang pria.

Pada konteks konsep bahwa pria tidak boleh tipe *Wimp*, yaitu pria yang lemah dan pasif. Konstruksi pria lemah bukanlah pendapat arus utama dalam konstruksi maskulinitas di Indonesia juga di kota Medan. Konsep bahwa pria adalah tipe aktif dan kuat merupakan konstruksi maskulinitas yang mapan dalam masyarakat selama ini. Informan memberi jawaban seragam bahwa pria tidak boleh lemah dan pasif terkait dengan kepemimpinan pria baik dalam rumah tangga maupun masyarakat. Seperti jawaban informan berikut.

“Saya setuju, karena seorang pria yang lemah dan pasif tidak akan mampu menjadi pemimpin dalam hal apapun terutama menjadi pemimpin bagi keluarganya nanti.” (Informan TP)

“Setuju, karena dia akan menjadi pemimpin keluarga, dia yang menjadi pelindung keluarga. Jadi dia harus kreatif, tidak boleh pasif atau lemah. Tapi kalau perempuan yang bergaji tinggi saya enggak masalah, kalau ada laki-laki yang takut karena secara ekonomi perempuan yang lebih banyak uang itu laki-laki yang berpikiran sempit. Itu kan masalah rezeki kan, udah di atur sama yang di atas. Aku punya rezeki segini, kamu sekian udah kita terima, yang penting kita kerja keras aja udah. Hasilnya belakangan aja menurut aku sih begitu.” (Informan DR).

Fenomena pria lemah dalam konteks sosial bukanlah suatu hal yang jamak bisa terjadi. Pria yang mendapat tempat adalah pria yang kuat. Pria metroseksual yang diteliti memang mempunyai penampilan konteks lebih ke feminim, namun kelemahan itu tidak boleh dari sudut sikap dan tanggung jawab sosial.

Konteks maskulinitas berkaitan dengan persepsi pria metroseksual pada relasi seksual homoseksual. Semua informan menyatakan tidak setuju dengan homoseksual. Seperti diketahui istilah metroseksual juga mengarah

pada adopsi dari kaum homoseksual dalam melakukan berbagai gaya hidup memasuki feminitas. Akan tetapi pada konteks ini homoseksual dianggap sebagai suatu penyimpangan sosial yang melanggar norma dari kebiasaan relasi seksual heteroseksual yang dominan di Indonesia, tidak terkecuali di kota Medan.

Pada pembahasan maskulinitas konteks citra kekerasan seperti yang terjadi pada citra *Holigans*, yaitu pertengkaran dalam pertandingan sepakbola antarsuporter, serta kejadian kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, keseluruhan informan menyatakan tidak setuju. Hal ini barangkali terkait dengan hukum yang berjalan akibat kekerasan ataupun telah tegaknya hukum terhadap KDRT, sehingga konstruksi maskulin yang erat dengan kekerasan terhapus dalam konteks penelitian ini. Jawaban dari informan terlihat pada pernyataan di bawah ini.

“Laki-laki yang *macho* dalam arti fisik bukan berarti dengan gampang melakukan kekerasan kepada orang lain apalagi sampai melakukan KDRT.” (Informan DR)

“Tidak setuju, karena aku enggak suka bola dan enggak suka kekerasan. Hehee, enggak lah itu bukan maskulin.” (Informan MD)

Satu hal lagi yang sangat penting dalam melihat konstruksi maskulinitas dalam kerangka pria metroseksual adalah konsep *New man as narcissist*. Pada konteks ini, pria menunjukkan maskulinitasnya dengan gaya hidup *yuppies* yang flamboyan dan perlente. Konsep ini mencatat bahwa pria semakin suka memanjakan dirinya dengan produk komersial, seperti properti, mobil, pakaian atau artefak personal yang membuatnya tampak sukses. *New man as narcissist* merupakan konsep yang sangat melekat dengan keseharian pria metroseksual. Hampir keseluruhan informan menyatakan setuju bahwa bergaya hidup *yuppies* sebagai konsekuensi dari kehidupan di perkotaan. Dukungan sikap itu terlihat pada jawaban informan di bawah ini:

“Karena pria maskulin kebanyakan lebih memiliki keinginan untuk menunjukkan sisi luarnya. Apa yang dilihat orang dari penampilan itu yang penting baginya, padahal belum tentu sesuai dengan dunia dalam dirinya. Seperti pria maskulin yang selalu rapih dan

wangi, belum tentu kamarnya rapih, karena pria maskulin lebih mementingkan penampilan luarnya. Kalau mau diselami ke dalam, bisa jadi bertolak belakang dengan aslinya. Kalau merawat properti dan mobilnya karena dia ingin orang-orang melihat bahwa dia rapi. Mulai dari menambah aksesoris mobil karena dia ingin selalu tampil lebih baik di hadapan orang, maka dia akan memenuhi ini. Pria maskulin kan senang bersosialisasi, jadi dia akan cenderung lebih mensosialisasikan kesempurnaannya. Penampilannya harus *perfect* di hadapan banyak orang. Inilah kelemahan laki-laki maskulin yang saya lihat. Ketika dia akan bersosialisasi dengan banyak orang atau komunitas, maka pria maskulin akan menampilkan penampilan terbaiknya dan sesempurna mungkin di hadapan banyak orang.” (Informan HF)

“Setuju, karena itu merupakan caranya menikmati kesuksesan yang telah diraihinya dengan kerja keras.” (Informan DR)

Konsep terakhir dari pembahasan konstruksi maskulinitas adalah *No Sissy Stuff*, seorang laki-laki sejati harus menghindari perilaku atau karakteristik yang berasosiasi dengan wanita. Konsep tersebut merupakan pertanyaan yang diajukan kepada informan. Terkait pada konsep relasi gender informan setuju untuk sadar gender. Berkaitan dengan karakteristik ini, diasumsikan mereka tidak peduli pada karakteristik femininitas sepanjang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Hal yang informan ungkapkan adalah mereka tidak merasa harus menghindari perilaku wanita, karena mereka juga memerlukan nilai feminim seperti ekspresi menangis, yang menurut informan juga merupakan ekspresi pria. Secara umum sebagian besar informan tidak setuju bahwa karakteristik asosiasi wanita (femininitas) juga bisa dilakukan oleh pria. Mereka menganggap perilaku menangis juga milik pria untuk mengekspresikan perasaannya. Informan mengakui banyak hal dari asosiasi peran dan tugas sebagai wanita bisa dilakukan oleh pria. Beberapa informan berpandangan aktivitas memasak sebagai suatu hal yang harus bisa dilakukan dan tidak identik dengan wanita. Beberapa informan berpandangan kebiasaan

mereka yang juga suka dandan berlama-lama sebagai suatu hal yang lekat dengan kebiasaan stereotipe wanita, tetapi dianggap bukan suatu hal yang melanggar norma. Ada suatu benang merah yang terlihat ketika sekat peran sosial dibatasi, tetapi perubahan kehidupan sosial tidak bisa sekaku hal tersebut, sehingga yang terjadi adalah pandangan dan praktek sosial baru yang berbeda. Seperti kalau membandingkan dengan peran perempuan sebagai individu yang harus bisa memasak, tetapi faktanya di media televisi banyak juru masak handal adalah pria. Hal ini mungkin menjadi bukti asosiasi tersebut bukanlah sebagai suatu norma kaku, konstruksi sosial bisa berubah dalam banyak konteks, termasuk juga konteks peran pria dan wanita.

3. Pengaruh Gaya Hidup Pria Metroseksual pada Pola Konsumerisme.

Membahas tentang pria metroseksual tidak terlepas dari pencetus jargon metroseksual, yaitu Mark Simpson di tahun 2000. Meskipun pria metroseksual secara hakiki bersinggungan dengan model tampilan baru dari maskulinitas pria tetapi bentukan konsep pria metroseksual tidak terlepas dari analisis pasar mereka, sebagai pembeli utama (alpha konsumen). Keterkaitan keberadaan pria metroseksual dalam lingkaran konstruksi maskulinitas baru, gaya hidup, *fashion* dan konsumerisme memang sebagai suatu pandangan yang terpadu.

Merujuk Chaney (Chaney, 2011), bahwa gaya hidup masyarakat modern termasuk pria metroseksual tidak terlepas dari budaya tontonan (*a culture of spectacle*). Hal ini terlihat bahwa orang cenderung ingin menonton dan pada sisi lain sekaligus ingin ditonton. Konteks ini menjadi gaya modus bagi keberadaan masyarakat modern. Jargon “kamu bergaya maka kamu ada” menjadi tarikan masyarakat untuk melakukan aksi dan kepedulian pada konteks *fashion*. Ketakutan akan “kalau kamu tidak bergaya, bersiaplah untuk dianggap tidak ada atau dilecehkan” menjadi ancaman ampuh untuk melakukan tindakan *fashion* sebagai kebutuhan utama. Hal ini menyebabkan pria-pria metroseksual menjadi pesolek karena masyarakat secara luas juga menjadi masyarakat pesolek. Gaya *dandy* inilah yang menjadi suatu ideologi kuat bagi pria metroseksual dengan alasan

utama penampilan sebagai syarat mutlak dalam pekerjaan dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Majalah pria waralaba yang memberi wacana dalam artikel dan ulasanya memang secara langsung berpengaruh pada inspirasi pria metroseksual yang diteliti. Hal ini diperkuat dalam penelitian pada konteks pertanyaan apakah artikel dan *fashion* berpengaruh pada gaya hidup mereka, keseluruhan informan pria metroseksual menyatakan setuju seperti yang terlihat di bawah ini.

“Apa yang kita baca secara tidak langsung mempengaruhi alam bawah sadar kita. Ada pepatah yang mengatakan bahwa manusia itu dilihat dari apa yang dia baca. Begitu juga dengan artikel-artikel tentang gaya hidup yang saya baca cukup mempengaruhi gaya hidup saya tetapi selama masih sesuai dengan kepribadian dan kenyamanan saya.” (Informan DR)

Artikel-artikel tentang gaya hidup yang ada di media cetak tentunya mempengaruhi gaya hidup banyak orang termasuk laki-laki dan juga saya sendiri. Misalnya saja seperti berbagai artikel gaya hidup yang ada di beberapa majalah pria cukup mempengaruhi para pria untuk berpenampilan atau pun berperilaku seperti yang ada pada artikel itu. Hal ini pastinya dengan alasan modernisasi para pria terutama para pria yang bekerja dalam lingkungan yang cukup memperhatikan *style* dan bagi saya hal tersebut wajar-wajar saja karena majalah-majalah pria tersebut cukup membantu para pria dalam menentukan gaya hidupnya. Bisa dijadikan referensi pastinya.” (Informan TP)

Salah satu poin penting dalam pria *dandy* adalah adanya dukungan finansial untuk melakukan konsumsi. Apabila kita mengaitkan masalah penampilan *dandy* pria metroseksual dengan pola konsumsinya dengan merujuk pada teori budaya konsumen dari Featherstone (Chaney, 2011), konsumsi dibagi dalam tiga tipe:

1. Konsumerisme dianggap sebagai cara atau tahapan tertentu perkembangan kapitalisme
2. Konsumsi juga merupakan masalah sosiologis ketika orang-orang mendefinisikan penggunaan barang konsumsi sebagai suatu simbol status sosial.

3. konsumsi terkait juga dengan praktik-praktik konsumsi dalam kerangka estetika konsumsi.

Apabila dicoba menghubungkan masalah konsumsi yang dilakukan oleh pria metroseksual dalam kerangka konsumerisme, anggapan bahwa pria metroseksual seksual sebagai alpha konsumen bukanlah hal yang tidak mendasar. Pria metroseksual dalam konteks penelitian ini juga melakukan berbagai kegiatan konsumsi dalam kerangka melakukan suatu tindakan sosial status sebagai pria modern. Mitos dan kebiasaan yang menghubungkan bahwa “*shopping*” (belanja) adalah hobi kaum wanita memang bergeser. Walaupun dalam konteks penelitian ini, pria metroseksual di Kota Medan tidak merasa sebagai pribadi yang *shopping acholic*, tetapi kegiatan mereka dalam berbelanja baik di Medan maupun ketika mereka keluar kota dan keluar negeri menunjukkan, mereka sudah melampaui batas-batas normatif bahwa pria juga sebagai pangsa pasar bagi *fashion*.

Melihat konsumsi yang dilakukan oleh pria metroseksual di Kota Medan, layak dihubungkan dengan pernyataan bahwa kekuatan citra yang hadir dalam masyarakat konsumtif adalah hasil dari yang disebut Kundera produsen ‘ideologi’ dan sekaligus pendefinisi kenyataan (Idi Subandi, 1995). Pihak-pihak yang terlibat menurut Kundera disebutkan di antaranya biro iklan, manajer kampanye, perancang mode, perekayasa peralatan gimnastik, penata rambut, bintang *showbiz*. Mereka merupakan agen-agen penjual citra yang mendikte idealitas kecantikan/ ketampanan dan nilai keindahan tubuh lewat televisi, film, iklan dan juga dalam dunia olahraga (Idi Subandi, 1995).

Gaya hidup pria metroseksualitas di Kota Medan yang tampil di tengah masyarakat dengan citra sosok *narcissistic* dengan penampilan *dandy* (Chaney, 2011), cenderung konsumtif, memanfaatkan *leisure time*-nya di klub kebugaran, spa, salon khusus pria dengan penata rambut khusus, belanja di butik pria, makan dan minum di restoran mewah, dan belanja *fashion* di toko ternama merupakan hasil dari keahlian produsen ‘ideologi’ dalam konsteks ideologi citra maskulinitas baru tersebut, terutama dalam memotivasi kebutuhan dan mengonstruksi maskulinitas yang penuh dengan estetisikasi

penampilan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi yang tampak adalah pendobrakan unsur maskulinitas yang mapan dalam sistem patriarki Indonesia yang selama ini telah terjadi dan membentuk suatu budaya atau konstruksi baru tentang konsep maskulinitas itu sendiri, yang sangat mengindikasikan pada maskulinitas global.

Layanan dukungan maskulinitas global dengan konstruksi pria metroseksual yang hobi berdandan (*grooming*) terpadu dengan bentuk penawaran seperti iklan produk kecantikan yang melakukan penawaran keahlian dalam perawatan rambut, wajah, laser, totok, *waxing*, *blue peel*, *teta peel* yang dulunya hanya ditawarkan kepada kaum wanita tetapi sekarang juga ditawarkan pada pria metroseksual, sehingga dalam konteks penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pria metroseksual yang terimbas konstruksi maskulinitas global tersebut setia mengunjungi mal, tempat perawatan wajah dan tubuh. Hal ini seperti terlihat di Sun Plaza Medan, yang ada produk khusus untuk pria dalam mengatasi kebotakan. Zaman dahulu rambut adalah mahkota wanita yang takut rambutnya rontok dan tipis. Namun dewasa ini wacana kebotakan juga dikonstruksi menjadi hal yang menakutkan pria.

Persoalan pemujaan tubuh, secara spesifik tubuh pria, menjadi sorotan penting dalam majalah pria waralaba. Harus disadari bahwa gelombang globalisasi media di Indonesia dengan marak masuknya majalah waralaba pria tidak hanya membawa serta nilai budaya baru, tetapi juga bisa saja merombak nilai yang sudah mapan. Tubuh pria adalah salah satu proyek besar untuk dilakukan eksploitasi fisik, sosial, dan dimasukkan ke dalam jejaring norma dan relasi sosial yang memengaruhi cara pandang atas identitas maskulin. Di satu sisi tubuh pria menjadi wahana ekspresi diri yang dibentuk oleh konsep *female gaze*, tetapi di sisi lain hanya kendaraan yang digerakkan oleh budaya konsumerisme.

Pria metroseksual di Kota Medan bisa saja menunjukkan representasi dari citra imajinasi atas tubuh ideal pria dalam konteks maskulinitas global yang dibentuk dalam kerangka lingkaran industri majalah pria yang berorientasi sangat ekonomis dan kental ide kapitalistik. Tubuh dalam masyarakat komoditas telah terlepas

dari makna aslinya, yaitu bergeser dari makna konstruksi maskulinitas lokal itu sendiri. Tubuh maskulin yang tampil di majalah pria waralaba dewasa ini terkait dengan sistem kapitalisme yang secara tersembunyi menciptakan simbol-simbol budaya baru. Pada tataran ini, tubuh semakin dinikmati sebagai wahana kesenangan, untuk dinikmati, untuk bermain, sekaligus untuk ditonton dan dibeli. Tubuh yang maskulin dengan otot dan citra *macho*, jantan, dan nilai yang dilekatkan padanya direduksi sampai hanya sekadar citra visual. Makin mampu tubuh memperlihatkan citra ideal kemudaan, kebugaran, vitalitas, dan keindahan, makin tinggi nilainya, semua diwadahi dalam majalah pria gaya hidup yang diteliti.

Citra metroseksual yang lekat dengan gaya hidup atas tubuh dan penampilan pria metroseksual memperlihatkan pada fungsi bujukan komersial, tidak pada diskusi dan analisis yang tajam dan dalam tentang maskulinitas sendiri. Apabila disepakati, dengan budaya tontonan dewasa ini kepuasan akan tontonan pun bersifat dangkal dan semu karena hanya didasari keterpesonaan yang singkat atas tampilan visual yang memikat. Tubuh dalam masyarakat komoditas telah terlepas dari makna aslinya. Tubuh maskulin terkait dengan sistem kapitalisme yang secara tersembunyi menciptakan simbol-simbol budaya baru. Pada tataran ini, tubuh semakin dinikmati sebagai wahana kesenangan, untuk dinikmati, untuk bermain, sekaligus untuk ditonton dan dibeli. Tubuh yang maskulin dengan otot dan citra *macho*, jantan, dan nilai yang dilekatkan padanya direduksi sampai hanya sekadar citra visual. Makin mampu tubuh memperlihatkan citra ideal kemudaan, kebugaran, vitalitas, dan keindahan, makin tinggi nilainya.

(S. Kunto, 2006) merujuk pada pernyataan metroseksual juga merupakan produk kapitalisme untuk menggantikan tipe pria konvensional yang hanya menyetorkan uang belanja kepada istri. Pernyataan Mark Simpson memiliki rasionalitas bahwa metroseksual sengaja diciptakan oleh kapitalisme melalui *glossy magazines* dengan mengambil kultur *gay* sebagai sumber untuk menggantikan pria konvensional, tidak hanya peran pria konvensional yang dianggap gagal dalam kapitalisme lanjut, tetapi juga menggantikan objek cinta pria-pria kuno ke arah

dirinya sendiri. Perilaku konsumtif sebagai suatu konsekuensi dari pilihan untuk melakukan gaya hidup *fashion* kelihatan cukup mempengaruhi pria metroseksual di Kota Medan dalam konteks penelitian ini. Pertanyaan apakah ada korelasi kuat bahwa iklan dan artikel pada majalah pria waralaba tersebut akan membuat informan terpengaruh menjadi lebih konsumtif. Jawaban yang diberikan beragam dari ada yang setuju secara langsung seperti ungkapan informan di bawah ini:

“Iya iklan dan gambar misalnya motif-motif baru dalam pakaian bisa membuat saya lebih mendapatkan banyak referensi. Cara padu-padan khususnya yang menjadi nilai acuan saya.” (Informan MS)

“Biasanya berpengaruh namun tidak terlalu memegang peran yang kuat. Jika produk tersebut berkualitas, maka keinginan untuk mencoba pasti selalu ada. Namun saya lebih percaya apa yang dikatakan oleh teman dan kerabat dekat karena mereka sudah memiliki pengalaman dengan produk tersebut.” (Informan HF)

Pada jawaban informan yang mengatakan bahwa iklan dan artikel *fashion* tidak berpengaruh terlihat pada jawaban di bawah ini:

“Bagi saya pribadi, iklan-iklan yang ada di majalah pria tidak serta merta membuat saya menjadi seorang yang konsumtif. Saya bisa memilah-milah mana yang memang saya butuhkan sebagai seorang pekerja swasta. Misalnya saja pakaian-pakaian yang menunjang penampilan saya dan menambah rasa percaya diri saya, produk-produk perawatan tubuh yang memang benar-benar saya butuhkan ataupun *gadget* yang memang membantu saya dalam pekerjaan saya. Yang pastinya semua iklan yang memang memiliki nilai dan fungsi dalam pengembangan karir Saya.” (Informan TP)

Pernyataan informan yang melihat iklan dan artikel tidak mempengaruhi gaya hidup konsumtif ini sebagai suatu analisa yang parsial. Apabila hal ini dikaitkan dengan gaya hidup *fashion* dan beberapa gaya hidup seperti senang *nongkrong* dengan teman di kafe, mengagendakan liburan dan kerap kali melakukan kegiatan di mal, sulit kiranya dikategorikan tidak melakukan perilaku konsumtif pada kadarnya. Mereka melakukan

kegiatan tersebut bukan lagi melaksanakan kebutuhan primer tetapi sudah kebutuhan tersier dalam kerangka gaya hidup kelas menengah atas perkotaan, khususnya di Kota Medan.

4. Pria Metroseksual di Kota Medan dalam Balutan Konstruksi Maskulinitas Global dan Pusaran Gaya Hidup Konsumerisme

Pria metroseksual menjadi suatu gaya hidup sebagian kecil dari banyak anak muda di Kota Medan merupakan suatu fakta sosial yang memang terjadi dewasa ini. Penampilan pria metroseksual yang rapih, *trendi*, percaya diri dan berkelas kerap dijumpai di mal dan *plaza* di Kota Medan. Lengkapnya berbagai fasilitas untuk *fashion*, olahraga dan hiburan di Kota Medan menyebabkan pria metroseksual dapat menikmati dan semakin akrab dengan kehidupan yang mudah untuk melakukan aktivitas sosial dalam rangka menunjang gaya hidup perkotaan. Kegiatan membeli kebutuhan seperti pakaian, sepatu, tas, tali pinggang, dilakukan oleh pria metroseksual Kota Medan di Sun Plaza, Cambridge Mall, Medan Fair Plaza, dan Thamrin Plaza. Untuk kegiatan *hang out* (kumpul bareng) bersama teman, mencari berbagai kuliner, dapat dilakukan di Hermes Plaza yang dapat disambung dengan menonton di Studio XXI yang ada di Hermes Plaza. Sebagai sarana *one stop* kebutuhan, pria metroseksual Kota Medan juga dapat melanjutkan kegiatan olahraga fitness dan berenang di Hermes Plaza. Untuk melakukan penataan rambut dan melakukan perawatan tubuh di Kota Medan, tersedia berbagai salon modern pria seperti Next yang membuka cabang di beberapa daerah, ada juga ada salon Maxx, kemudian beberapa salon dan spa juga ada dalam rangka melakukan perawatan tubuh. Dalam kerangka melakukan pencarian barang-barang elektronik dan perangkat multimedia sebagai suatu gaya hidup pria modern, juga dapat dilakukan di Millenium Plaza dan Medan Fair Plaza. Fasilitas dan situasi sosial di Kota Medan memenuhi dan mendukung kebutuhan ekspresi pria metroseksual. Kota Medan merupakan kota ketiga terbesar di Indonesia yang bisa memberi berbagai fasilitas gaya hidup perkotaan. Eksistensi pria metroseksual di Kota Medan sebagai suatu fakta sosial yang identik dengan gaya pria

macho bertubuh tegap, berotot, tampil garang, rambut gondrong, baju hitam, menggunakan jeans, dan kacamata hitam (yang selama ini meramalkan mal dan *plaza*) secara cepat mulai tergantikan dengan pria bertubuh proporsional, rapih, *dandy*, wangi, berani berpakaian warna-warna lembut wanita, seperti merah jambu, hijau bahkan ungu.

Dalam melakukan gaya hidup metropolis, pria metroseksual Kota Medan yang diteliti terdukung fasilitas kegiatan sosial dan ekonomi. Persoalan eksistensi pria metroseksual Kota Medan pada pembahasan konstruksi maskulinitas global yang mereka anut dan dijadikan sebagai nilai sosial juga merupakan suatu pembahasan sosiologis tersendiri. Hasil penelitian mengungkap bahwa pria metroseksual Kota Medan bisa mengekspresikan kehidupan sosial mereka dan mengekspresikan pilihan maskulinitas global karena pengaruh dari maskulinitas barat. Mereka mengakui bahwa peran majalah pria waralaba secara langsung dan tidak langsung memberi pengaruh pada persepsi mereka. Data menunjukkan beberapa informan (pria metroseksual) yang diteliti mengakui bahwa konstruksi maskulinitas dari barat mempunyai prestise nilai sosial yang lebih baik dari maskulinitas lokal Indonesia, terutama untuk Kota Medan yang dianggap sangat patriarki. Konstruksi maskulinitas dari barat menjadi suatu *trend setter* dan konsep nilai yang cukup dibanggakan.

Membahas secara struktur sosial berkaitan dengan nilai dan norma maskulinitas dalam konteks yang ditampilkan media dan gaya hidup yang dilakukan oleh pria metroseksual menunjukkan, bahwa pada konteks *fashion* dan gaya hidup ada perubahan sosial yang cukup berarti. Namun pada konteks perubahan sosial dari ideologi patriarki dan ketetapan maskulinitas dari sisi terdahulu, tidak mengalami perubahan. Pria metroseksual benar-benar pria yang terpengaruh pada budaya *fashion* dari pengaruh global. Pembicaraan pada konteks maskulinitas dalam konteks psikologis masih tetap mencerminkan pada sistem patriarki. Pada tataran analisis merujuk pada Simpson terhadap pria metroseksual, beliau lebih menyoroti masalah penampilan tubuh sebagai teknik kapitalisme untuk mendisiplinkan pria agar konsumtif,

memang tidak terbantahkan dalam konteks penelitian ini.

Perubahan yang memperlihatkan pada pergeseran maskulinitas terlihat pada sisi sosiologis. *Point* nilai sosial seperti pria harus *macho* dan berotot tidak menjadi suatu kebanggaan sosial lagi, karena konsep *macho* itu dikaitkan dengan perilaku sosial lain, seperti bertanggung jawab. Nilai sosial yang melihat tabu pria untuk berdandan dalam konteks ini mengalami pergeseran yang kuat, karena umumnya informan tidak menganggap hal tersebut sebagai hal tabu. Dikotomi peran maskulin dan feminim dalam kehidupan sosiologis juga mengalami perubahan ketika informan berpersepsi bahwa pria juga harus mempunyai sisi feminim untuk melakukan peran sosial dalam rangka keseimbangan peran sosial seperti di rumah tangga atau pekerjaan. Perubahan yang terlihat bahwa peran tradisional yang biasanya menempatkan ibu menjadi sentral utama dalam pendidikan anak, dalam konteks penelitian ini, informan menganggap hal tersebut menjadi peran pria sebagai ayah.

Pada konsep maskulinitas dari barat seperti pria sebagai pemimpin, *Gladiator Retromen*, dan *Protector*, informan mempunyai persepsi yang memberi persetujuan bahwa nilai sosial yang selama ini terkonstruksi dalam masyarakat memang sebagai suatu yang diterima (*taken for granted*), walaupun mereka secara penampilan sudah mengadopsi tampilan metroseksual, tetapi pada konteks konstruksi maskulinitas di atas masih menunjukkan pada konstruksi maskulinitas barat dan tradisional yang ada di Indonesia dalam balutan sistem patriarki.

Nilai dan norma sosial konstruksi maskulinitas dalam berelasi dan berinteraksi sosial memang mengalami perubahan. Namun keyakinan masyarakat timur seperti persetujuan terhadap konsep *gay* (homoseksual) pada pria yang memilih pilihan relasi seksual, dalam konteks penelitian ini masih sebagai suatu hal yang tabu, informan semuanya tidak menyetujui hubungan homoseksual. Hal ini memperlihatkan masih kentatnya nilai heteroseksual dalam masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan persepsi informan terhadap peran majalah dalam memotivasi gaya hidup dan konsumerisme, informan mengakui bahwa mereka masih bisa memilih dan menen-

tukan pengambilan keputusan rasional untuk tidak konsumtif. Di sisi lain yang bertentangan, mereka melakukan gaya hidup yang tidak bisa dihindari dari konteks konsumtif karena dukungan terhadap gaya hidup tersebut memerlukan dana yang tidak sedikit.

D. Penutup

Konstruksi maskulinitas yang terbangun dan tampil di majalah pria waralaba di Indonesia masih penuh pada dominasi maskulinitas dari barat. Konstruksi maskulinitas yang terbangun secara umum sangat mengarah pada gaya hidup pria dan konstruksi modern dari pencitraan pria metroseksual. Eksistensi pria metroseksual bukanlah suatu perilaku sosial yang mandiri. Berbagai fasilitas perkotaan memberikan fasilitas dalam konsumsi dan melakukan gaya hidup yang mengukuhkan kehidupan pria metroseksual. Persepsi pria metroseksual Kota Medan terhadap maskulinitas global yang muncul di majalah pria waralaba masih sangat memberikan pengaruh dan nilai sosial mengenai maskulinitas. Persepsi informan sangat dominan melihat bahwa maskulinitas dari barat masih menjadi suatu acuan karena lebih banyak konsep yang mengarah kepada *gentleman*, lebih kompleks dalam mengelola relasi gender dan lebih menjadi *trend setter* dalam menampilkan relasi sosial. Dalam konteks ini kontribusi majalah pria waralaba masih sangat signifikan dalam memberi wacana maskulinitas global dan menuntun pada maskulinitas yang aktual dalam konteks baik wacana global maupun lokal.

Dari temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa sebenarnya maskulinitas global yang muncul dalam konstruksi pria metroseksual, memang merupakan suatu konsep *new man*, pria dalam konteks penampilan fisik yang baru. Konteks penampilan ini tidak serta merta merombak struktur sosial dari nilai dan norma maskulinitas sistem patriarki yang selama ini ada, terbukti pria metroseksual Kota Medan mengakui, bahwa maskulinitas tidak semata penampilan saja tetapi banyak aspek lain. Intinya, walaupun secara sosiologis terjadi perubahan dalam atribut sosial dan penampilan baru pria metroseksual yang banyak terwarnai nilai femininitas, tetapi dari sisi psikologis dengan nilai maskulin yang ada, seperti bertanggung

jawab, melindungi, memimpin, tidaklah serta merta berkurang makna dan menjadi mutlak harus dimiliki seorang pria. Aspek sosiologis seperti pria sebagai kepala keluarga, pencari nafkah utama, tetap menjadi penting dalam konstruksi wacana maskulinitas tradisional. Intinya, perubahan tersebut bukan sebagai suatu perubahan sosial yang menyeluruh, tetapi suatu adaptasi pada kebutuhan dunia kerja dan *trend* pasar terhadap keharusan pria berpenampilan, juga faktor pasar yang mempunyai kepentingan terhadap dukungan wacana menjadi pria ideal yang memang cukup kuat dalam rangka mendukung geliat konsumerisme dalam percepatan mesin ekonomi.

Pustaka Acuan

- Adi Wibowo, S. Kunto. (2006). *Metroseksual: Sebuah Situs Resistensi*. Dalam Alfathri Adlin (Ed.), *Resistensi Gaya Hidup: Teori dan Realitas*. Jogjakarta: Jalasutra.
- Barnard, Malcolm. (1996). *Fashion as Communication*. New York: Routledge.
- Beynon, Jhon. (2002). *Masculinities and Culture*. USA: Philadelphia: Open University.
- Bordieu, Pierre. (2010). *Dominasi Maskulin*. Jogjakarta: Jalasutra,
- Buchbinder, David. (2013). *Studying Men and Masculinities*. New York :Routledge.
- Clark, Marshall. (2010). *Maskulinitas Culture, Gender and Politic in Indonesia*. Victoria Australia: Monash University Press.
- Connel, R.W. (1995). *Masculinities*. Berkeley. Los Angeles: University California Press.
- (2000). *The Men and The Boys*. Sydney-Australia: Allen & Unwin.
- Denzim, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln (peny). (2009). *Handbooks of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Evi, Nur Rahmawati. (2003). *Konstruksi Maskulinitas dalam Majalah Olahraga*. Tesis (S-2) Jurusan Komunikasi, Universitas Gadjah Mada Jogjakarta. tidak Diterbitkan.
- Gardiner, Judith Kegan (ed). (2001), *Masculinity Studies and Feminist Theory*. New York: Columbia University Press.

- Hasyim, Nur. (2009). *Gerakan Laki-laki Pro Perempuan: Transformasi Dua Sisi*. Jurnal Perempuan No. 64. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. (2008). *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: UMM Press.
- Ibrahim, Idi Subandi. (2011) dalam buku *lifestyle sebuah pengantar komprehensif*. David Chaney. Jogjakarta: Jalasutra.
- Jefferson, Tony. (2002). *Subordinating Hegemonic*, Journal of Theoretical Criminology vol. 6:.. London: Sage Publication.
- Kahn, Jack.S. (2009). *An Introduction to Masculinities*. UK : Blackwell publishing
- Kartajaya, Hermawan dkk. (2004). *Metroseksual in Venus*. Jakarta: Mark Plus & Co.
- Kimmel, S. Michael, Jeff Hern, R.W. Connell. (2005), *Handbook Of Studies On Men & Masculinities*. California: Sage Publication.
- Kinnon, Hec Kenneth. (2003). *Representing Men*. New York: Oxford University Press.
- Kurnia, Novi. (2004). *Representasi Maskulintas dalam Iklan*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 8 (1). Jogjakarta: Universitas Gadjah Mada,
- Kurniawan, Aditya Putra.(2009), *Dinamika Maskulinitas Laki-laki*. dalam Jurnal Perempuan No. 64. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Lenggogeni, Sari. (2009). *The Beauty of Metroseksual*. Padang: Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi-Universitas Andalas
- Moss, Donald. (2012.). *Thirteen Ways Of Looking at A Man*. New York: Routledge.
- Neeser, W. Tood, (2010). *Masculinities In The Theory an Introduction*. UK: Blackwell Publishing.
- Nurani, Wa Ode. (2006). *Konstruksi Feminitas dan Maskulinitas dalam Media Massa*. Tesis (S-2). Jogjakarta: Jurusan Sosiologi-Universitas Gadjah Mada: tidak Diterbitkan
- Reeser, Todd.W. (2010). *Masculinities in Theory*. UK: Blackwell Publishing.
- Ribut, Nobertus Santoso. (2008). *Analisis Wacana Metroseksual Pada Majalah FHM Indonesia*. Tesis (S-2). Jogjakarta: Jurusan Sosiologi-Universitas Gadjah Mada: tidak Diterbitkan
- Sarwoko, Mohammad Anggit. (2008). *Representasi Gaya Hidup Pria Metroseksual dalam Majalah Pria Esquire (Analisis Semiotik Rubrik 25 Pria Gaya pilihan Esquire Edisi Sept 2008)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang: tidak diterbitkan
- Subiantoro, Eko Bambang. (2009). “ *Laki-laki Baru Mendobrak Tabu*” Jurnal Perempuan No. 64. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan,
- Suprpto, Deddy. (2010). *Representasi Maskulinitas Hegemonik dalam Rokok Gudang Garam*. Tesis (S-2) Jurusan KBM-Universitas Gadjah Mada.Jogjakarta: Tidak Diterbitkan
- Yin, Robert. K. (2003). *Case Studi Research; Design and Methods*. Third Edition. United Kingdom: Sage Publication
- Sumber Internet**
- Alexander, Susan M. “*Stylish Hard Bodies: Branded Masculinity in Men’s Health Magazine*” di Sociological Perspective, Winter 2003;46,4; ProQuest Sociology. Diakses dari Proquest.umi.com.Alexander. 15 Desember 2010.
- Argio Demartoto. *Konsep Maskulinitas dari Jaman ke Jaman dan Citranya dalam Media*, dari Argyo Staff.uns. ac. id. Diakses 15 Desember 2010
- Stuart Hall. *Representasi dan Media* oleh Stuart Hall by Yolagani, Google. Di akses 12 Agustus 2010.
- Schroeder Jonathan E. dan Detlev Zwick” *Mirrors of Masculinity: Representation and Identity in Advertising Images*”. Diakses dari www.yorku.ca. 14 Desember 2010
- <http://www.scribd.com/doc/51358175/Ruang-Jean-Baudrillard>. Diakses 8 Oktober 2011

Kemiskinan dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Poverty and Children who Need Special Protection

Anwar Sitepu

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika No. 200, Cawang III, Jakarta Timur, Telp. (021) 8017146, Fax. (021) 8017126
Email: <sitepu.anwar@yahoo.co.id>. Diterima 15 Nopember 2013, direvisi 12 Februari, disetujui 25 Februari 2014.

Abstract

This paper is written to analyze whether poverty is contributing to the problem of children who need special protection and how the poverty makes children suffer until the extent to require special protection. The analyzed data are cases of 25 children who have received special protection from five Children Protection House (RPSA) in Indonesia. These cases are the result of research that is conducted by Central of Research and Development of Social Welfare, Puslitbang Kesos, in 2011 to evaluate the Children's Social Protection Program through the Children Protection House (RSPA). An analysis of the poverty factor in the case of children who need special protection is very important, considering that in previous research the poverty factor have not been explored yet. While in every case of the research on those children, it indicates that poverty is the root of the problem faced by almost all children. From the case of 25 children turn out that 24 children (96%) are coming from poor family. Poverty makes children suffer-need special protection-through two patterns. First, poverty undermines the family unity, to transfer children's nurture from biological family to other party. Second, poverty makes families fail to meet the needs of children. First or second pattern leads to suffer children. Children become victims, neglected or being neglected, exploited sexually and or economically, physical violence and emotional pressure until they leave for and live in the street.

Keywords:

Children-Poverty-Special Protection

Abstrak

Tulisan ini disusun untuk menganalisis apakah kemiskinan turut berperan dalam masalah anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bagaimana kemiskinan membuat anak menderita hingga memerlukan perlindungan khusus. Data yang dianalisis adalah kasus sebanyak 25 anak yang sudah memperoleh perlindungan khusus dari lima rumah perlindungan sosial anak (RPSA) di Indonesia. Kasus-kasus tersebut merupakan hasil penelitian Puslitbang Kesos yang dilakukan tahun 2011, dalam rangka evaluasi program perlindungan sosial anak melalui rumah perlindungan sosial anak. Analisis faktor kemiskinan pada kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus sangat penting dilakukan mengingat bahwa dalam penelitian tersebut faktor kemiskinan belum didalami, sementara apabila masing-masing kasus ditelaah tampak indikasi bahwa kemiskinan merupakan akar dari masalah yang menimpa anak. Hasil analisis menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan akar masalah yang dihadapi oleh hampir semua anak, dari kasus 25 anak ternyata 24 anak (96 persen) merupakan anak miskin. Kemiskinan membuat anak menderita-sehingga memerlukan perlindungan khusus-melalui dua pola. Pertama, kemiskinan merusak keutuhan keluarga, hingga pengasuhan anak harus beralih dari keluarga kandung ke pihak lain. Kedua, kemiskinan membuat keluarga gagal memenuhi kebutuhan anak. Baik pola pertama maupun kedua berujung pada penderitaan anak. Anak menjadi korban, terlantar atau diterlantarkan, dieksploitasi secara seksual atau secara ekonomi, kekerasan fisik/tekan emosional hingga pergi dan hidup di jalanan.

Kata kunci:

Anak-kemiskinan-Perlindungan Khusus

A. Pendahuluan

Selain sebagai pribadi yang memiliki harkat dan martabat yang sama seperti orang dewasa, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara anak memiliki kedudukan strategis. Anak adalah generasi baru yang akan meneruskan eksistensi masyarakat/bangsa/Negara. Bagi bangsa Indonesia, bahkan anak

dilihat sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi, anak memiliki masalahnya sendiri, sesuai kondisinya, anak amat tergantung pada orang lain di sekitarnya sehingga pemenuhan hak-haknya tergantung pada orang lain. Bahkan dalam bahasa yang lebih vulgar dapat dikatakan nasib anak tergantung pada orang lain di sekitarnya. Persoalannya, orang

di sekitar anak tidak selalu peduli pada hak-hak anak bahkan ada kalanya melakukan eksploitasi, penganiayaan hingga pembunuhan. Dalam situasi sulit seperti dalam kemiskinan, anak kerap menjadi pihak pertama menjadi korban, menderita bahkan meninggal.

Kesadaran atas hak-hak anak pada satu sisi dan kerentanan hidup anak pada sisi lain belakangan telah semakin berkembang baik di tingkat nasional maupun global. Pada tataran global, bangsa-bangsa telah sepakat menetapkan sejumlah konvensi internasional yang seluruhnya merupakan advokasi atas hak-hak anak. Beberapa diantaranya adalah: Konvensi Hak-hak Anak (KHA); Konvensi mengenai Persetujuan Perkawinan, Usia Minimum Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan; Konvensi melawan Diskriminasi dalam Pendidikan; dan Konvensi mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Sedangkan rencana aksi dalam dekade terakhir adalah yang dipopuler dengan tujuan menciptakan dunia yang layak bagi anak, *a world fit for children*. Bangsa Indonesia memiliki semangat yang selaras sehingga seluruh konvensi internasional tersebut sudah diratifikasi. Perlu dicatat bahwa sebagai Negara yang telah meratifikasi KHA Indonesia menerima kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*), menghormati (*to respect*) dan melindungi (*to protect*) hak-hak anak.

Komitmen bangsa Indonesia untuk memberi perhatian khusus bagi kepentingan anak tampak dimulai pada akhir tahun 1970-an dengan disahkannya UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Sejak akhir dekade 1990-an hingga sekarang intensitas perhatian bangsa Indonesia atas hak-hak anak terus semakin berkembang seperti dibuktikan dengan semakin banyaknya undang-undang terkait anak yang disahkan. Sejak tahun 1995 hingga 2012 sekurangnya telah ditetapkan sebanyak 11 undang-undang terkait anak. Tahun 1995 ditetapkan UU No 12 tahun 1995 tentang Pelayanatan Anak. Dua tahun kemudian ditetapkan UU No 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Tahun 2002 disahkan UU No 23 tahun 2002, khusus tentang Perlindungan Anak. Kemudian, secara berturut-turut telah ditetapkan: Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam

Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pemidanaan terhadap pornografi anak, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Terakhir telah disahkan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan undang-undang sebelumnya UU No 3 tahun 1997.

Pada sisi kelembagaan negara Indonesia sudah memiliki Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Nasional (Komnas) Anak di samping sejumlah lembaga di lingkungan eksekutif. Di lingkungan eksekutif terdapat sejumlah besar lembaga yang terkait anak, mulai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Keseriusan bangsa Indonesia memperjuangkan dan membela hak-hak anak juga dibuktikan dengan semakin intensnya program yang ditujukan untuk anak. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ke-2 tahun 2010-2014, perlindungan anak mendapat tempat khusus. Perlindungan Anak diletakkan sebagai salah satu dari 4 kebijakan lintas bidang, tiga lainnya adalah Penanggulangan Kemiskinan, Perubahan Iklim Global dan Pembangunan Kelautan Berdimensi Kepulauan (Buku II Bab I RPJMN 2010-2014). Pada priode ini juga wilayah kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan diperluas mencakup perlindungan anak hingga menjadi KPP dan PA.

Pada saat bersamaan dilaksanakan program perlindungan sosial yang meliputi: bea siswa untuk anak miskin (BSM), jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), bantuan operasional sekolah (BOS), dan program keluarga harapan (PKH), beras bersubsidi (Raskin), jaminan persalinan (Jampersal) dan sejumlah besar program spesifik bidang kesejahteraan, kesehatan

dan pendidikan. Seluruh program tersebut merupakan bagian (*cluster* I) dari program penanggulangan kemiskinan nasional. Khusus dalam bidang kesejahteraan sosial diselenggarakan program kesejahteraan sosial anal (PKSA).

Sebagai tindak lanjut dari UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, khususnya bagian 5 yang mengatur tentang perlindungan khusus telah diterbitkan dua Surat Keputusan Bersama (SKB). Pertama, SKB Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kepala Kepolisian RI. SKB tersebut mengatur pembagian tugas antar pihak terkait dalam penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak, dimana Kemsos diberi mandat menyelenggarakan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA). Sampai tahun 2010 telah berdiri sebanyak 15 RPSA yang tersebar di 13 provinsi dan bertambah menjadi 27 buah RPSA tahun 2013 ini. Kedua, SKB Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kepolisian Negara, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung khusus tentang perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Berbagai skema perlindungan sosial yang telah dilaksanakan dipercaya membawa manfaat bagi anak, namun demikian permasalahan anak di Indonesia belumlah selesai, masih ditemukan begitu banyak anak menjadi korban, misalnya, angka kematian bayi relatif masih tinggi 23 per 1000 kelahiran hidup tahun 2012 (SDKI 2012 dalam Berita Satu.Com, diakses 30 April 2013). Angka kematian tersebut sesungguhnya merupakan hasil pencapaian tersendiri karena turun signifikan dibanding lima tahun sebelumnya yaitu 34 per 1000 kelahiran (SDKI dalam Lampiran Perpres RI No 5 Tahun 2010 tentang RPJMN tahun 2010-2014 buku II bab II: halaman 58). Berdasarkan data, pada tahun 2008 jumlah balita telantar 299.127 balita, dan anak telantar 2.250.152 anak, anak jalanan 109.454 anak. Fakta tersebut mengandung makna bahwa kebijakan yang ada belum cukup mengakomodasi seluruh isu anak. Media massa cetak maupun elektronik hampir tiap hari memberitakan kasus kekerasan terhadap anak. Pada bulan Februari 2013 yang lalu, mencuat sejumlah kasus dimana anak menjadi korban,

misalnya: kasus 4 orang anak di Batam yang meninggal dalam mobil, kematian X di Jakarta Timur yang menderita sakit kelamin akut setelah dicabuli berkepanjangan oleh ayahnya sendiri; penganiayaan X di Tangerang oleh ibu tirinya hingga akhirnya meninggal. Pemerkosaan dua anak di Bandung oleh ayah kandungnya sendiri. Mencermati kasus-kasus yang muncul timbul kesan bahwa anak yang menjadi korban cenderung selalu berasal dari keluarga miskin, sehingga mengundang pertanyaan apakah ada keterkaitan antara kemiskinan dengan perlakuan salah terhadap anak.

Pada tahun 2011 penulis bersama tim melakukan penelitian evaluasi atas program perlindungan sosial anak melalui rumah perlindungan sosial anak (RPSA). Penelitian tersebut bertujuan untuk melihat kondisi anak pasca pelayanan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian dilakukan dengan studi kasus atas sebanyak 25 orang anak yang pernah dilayani atau diberi perlindungan oleh RPSA (Nurdin Widodo, 2011). Ke-25 kasus tersebut berasal dari lima RPSA berbeda, masing-masing sebanyak lima orang, dari RPSA Bambu Apus di Jakarta; RPSA Satria Batur Raden di Purwokerto, Jawa Tengah; RPSA Bima Sakti di Batu, Jawa Timur; RPSA Turikale di Makassar, Sulawesi Selatan dan; RPSA Muhammadiyah di Bandung. Kasus dipilih secara acak dan proporsional dengan mempertimbangkan jenis permasalahan anak pada masing-masing panti. Data dan informasi masing-masing kasus dikumpulkan dari: dokumen RPSA (*file*), pekerja sosial dan manajemen panti, keluarga dan atau pengasuh anak dan anak yang bersangkutan sendiri. Secara ringkas hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kondisi anak pasca pelayanan semakin baik, baik secara fisik maupun mental. RPSA berhasil memberi perlindungan bagi anak yang sedang bermasalah sehingga terhindar dari resiko lebih buruk.

Tulisan ini bermaksud melihat sisi lain yang menarik dari ke-25 kasus tersebut, yaitu keterkaitan masalah anak yang memerlukan perlindungan khusus dengan kemiskinan. Pertanyaannya adalah apakah variabel kemiskinan turut berperan dalam masalah anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bagaimana kemiskinan membuat anak menderita hingga perlu

memerlukan perlindungan khusus di RPSA? Keterkaitan kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus dengan kemiskinan dipandang sangat penting dipahami dan diangkat untuk menjadi kesadaran bersama, untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di masa depan, khususnya yang berkaitan dengan anak.

Dalam tulisan ini yang dimaksud anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan seperti ditetapkan dalam UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan khusus diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Kemudian, seseorang atau rumahtangga dikatakan miskin adalah bila kehidupannya dalam kondisi serba kekurangan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (Pedoman Pendataan Rumah Tangga Miskin, 2005). Secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi saat seorang atau sekelompok orang tak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Kecuk Suharyanto, 2010).

B. Hasil Penelitian: Anak di Lima RPSA dan Kemiskinan

1. Profil Anak

Keduapuluh-lima orang anak yang terpilih menjadi subjek dalam penelitian ini terdiri dari 19 anak perempuan dan 6 anak laki-laki. Usia mereka terbentang mulai dari 1,3 tahun sampai

16 tahun, paling banyak berusia antara 11 sampai 15 tahun meliputi sebanyak 14 orang (56 persen), kemudian 6 sampai 10 tahun sebanyak 6 orang (24 persen). Diantara mereka terdapat 4 orang anak dengan kecacatan, lainnya 21 orang anak normal. Hampir separuh dari mereka, yaitu sebanyak 11 orang (44 persen) memiliki banyak saudara yakni 4 sampai 9 orang, lainnya anak tunggal sebanyak 2 orang; dan bersaudara sebanyak 2 sampai 3 orang sebanyak 12 orang (48 persen). Anak perempuan meliputi 76 persen dan laki-laki 24 persen bukan berarti atau tidak dapat diklaim bahwa anak perempuan lebih banyak memerlukan perlindungan khusus. Sebagian PSBR membatasi pelayanan bagi anak laki-laki maksimal berusia 12 tahun.

Tabel 1.
Konfigurasi Anak Menurut Jenis Klamir dan RPSA

RPSA	Jenis Klamir		Total
	L	P	
Bambu Apus	1	4	5
Satria	1	4	5
Bima Sakti	0	5	5
Turikale	2	3	5
Muhammadiyah	2	3	5
Jumlah	6	19	25

2. Pengasuhan Anak

Data pada Tabel 2 di bawah menunjukkan bahwa dari 25 orang anak ternyata hanya sebanyak 8 orang (32 persen) yang diasuh oleh kedua orangtua kandung dimana ayah dan ibu kandung masih ada atau lengkap. Sedangkan sebagian terbesar lainnya sebanyak 17 orang anak (68 persen) diasuh oleh ayah kandung dengan ibu tiri atau ibu kandung dengan ayah tiri atau diasuh oleh orang lain, misalnya kakak atau tante dengan suaminya, nenek seorang atau bersama kakek. Data tersebut mengandung makna bahwa sebagian terbesar anak yang memerlukan perlindungan khusus berasal dari keluarga bermasalah dalam arti ayah kandung dan ibu kandung tidak dapat menjalankan peran secara komplementer sebagai orangtua bagi anak mereka, termasuk dalam hal ini adalah anak terpaksa lahir di luar nikah.

Tabel 2.
Konfigurasi Anak menurut Pengasuh

No	Pengasuh Anak	Total
1	Ayah kandung dan ibu kandung	8
2	Ayah kandung dan ibu tiri	3
3	Ibu kandung dan ayah tiri	4
4	Panti sosial atau penampungan	2
5	Nenek seorang atau bersama kakek	6
6	Kakak atau tante dan suaminya	2
Jumlah		25

Orangtua (ayah dan ibu) kandung tidak dapat menjalankan tugas pengasuhan secara komplementer bagi anaknya terjadi karena sebab berbeda, yaitu: kematian salah seorang (terjadi pada 2 kasus); perceraian (4 kasus); perpisahan (8 kasus) dan anak di luar nikah (3 kasus). Perpisahan yang dimaksud meliputi banyak bentuk, mulai dari orangtua yang berpisah sehingga anak harus ikut salah seorang diantaranya atau bahkan harus diasuh orang lain, atau anak ditinggal salah satu atau kedua orangtua sekaligus misalnya untuk bekerja menjadi TKI atau pembantu rumah tangga di tempat berbeda. Bentuk lain perpisahan adalah penitipan anak kepada pihak lain (kerabat atau panti).

Intinya situasi keluarga memaksa tugas pengasuhan anak dialihkan atau beralih dari orangtua (ayah dan ibu) kandung kepada pihak lain: ayah kandung bersama ibu tiri; atau ibu kandung dengan ayah tiri; atau orang lain (panti sosial, nenek – kakek; kakak dan suaminya; atau tante dan suaminya). Data tersebut penting karena tampaknya pengasuhan oleh orang lain tersebut memiliki kaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi anak hingga memerlukan perlindungan khusus di RPSA.

Misalnya: Kasus 12, AJ, perempuan, 14 tahun, kelas 2 SMP, Malang. Anak ke 4 dari lima bersaudara. Kedua orang tuanya bekerja sebagai TKI di Arab Saudi. Awalnya klien dalam pengasuhan *bulik*-nya, namun setelah kakaknya menikah pengasuhan beralih ke kakaknya. Dalam keluarga kakaknya itulah kemudian AJ menjadi korban. Dia dipaksa berhubungan seks (diperkosa) berkepanjangan sejak kelas 6 SD

hingga terbongkar ketika dia duduk di kelas 2 SMP. Ironisnya, kakak kandungnya tidak mau percaya meskipun suaminya sendiri sudah mengaku.

Kasus 25, IN, perempuan, 15 tahun, Bandung. Ayah dan ibunya bercerai. Kemudian ibunya menikah lagi dengan laki-laki lain. IN yang perawakannya tampak tinggi besar, wajahnya juga cantik. kemudian menjadi korban pemerkosaan oleh ayah tirinya. IN sejak usia 9 th sering disuruh ayah tirinya memijat bagian tubuhnya yg tidak pantas. Pelecehan sempat terhenti selama IN tinggal di Pesantren. Pelecehan kembali dan semakin “serius” setelah IN kembali ke rumah dalam rangka libur kenaikan ke kelas 3 SMP. Setelah itu, IN tidak diizinkan kembali ke Pesantren, sekolahnya dipindah ke Bandung. Pelecehan berulang terus hingga dia tidak tahan, kemudian mengadu ke guru. IN juga seringkali dipaksa nonton video porno dan meniru adegan tsb. Akhirnya Guru tersebut melaporkan ke ibu IN, namun ironis ibu tidak mau lapor polisi dengan alasan tidak mau suaminya masuk penjara.

Penting ditegaskan bahwa 8 orang anak lainnya yang diasuh oleh orangtua kandungnya bukan berarti tugas pengasuhan anak dapat mereka lakukan dengan benar, dalam arti mampu memenuhi hak-hak anak, termasuk memberi perlindungan. Misalnya: Kasus 02 atas nama R, perempuan, 15 tahun, rungu wicara, tinggal bersama ayah dan ibu kandungnya di Jakarta. R menjadi klien RPSA dalam kondisi hamil. R menjadi korban pelecehan seksual/diperkosa oleh kuli bangunan yang bekerja di tetangganya. Keluarganya hidup sangat sederhana, menempati sebuah rumah yang status tanahnya milik Dinas Pengairan setempat. Ayahnya bekerja sebagai supir di sebuah perusahaan penyalur TKI, sedangkan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Untuk menambah penghasilan, kemudian ibu R berinisiatif berjualan minuman (kopi/teh) bagi buruh/kuli bangunan yang bekerja dekat rumahnya. R bertugas mengantar minuman tersebut. Penampilan R yang tampak sehat dan tinggi melebihi usianya, berwajah manis, berkulit bersih rupanya menggoda kuli bangunan dan kemudian merayunya, sampai akhirnya dicabuli dan hamil. Kasus ini terungkap setelah para tetangga melihat perubahan fisik

R, kemudian mendesak orang tuanya untuk melakukan pemeriksaan. Hasilnya positif R telah hamil. Atas bantuan seorang tetangga yang juga pegawai Kementerian Sosial, R dibawa ke RPSA Bambu Apus.

Kasus lain 03 D, perempuan, 10 tahun, kelas III SD. Jakarta. Kabur dari rumah. Anak ke-6 dari 9 bersaudara. D hidup di lingkungan keluarga yang sangat sederhana, ibunya tidak bekerja dan ayahnya seorang satpam. Kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan mengakibatkan semua kebutuhan sekolah anak kurang terpenuhi. Ayah klien cukup sibuk untuk mencari nafkah, sehingga perhatian pada anak menjadi berkurang. Pengasuhan anak-anaknya lebih banyak diserahkan kepada isterinya. Diakui oleh kedua orang tua D, bahwa ibu sering *minder* sehingga tidak pernah mau datang apabila sekolah memanggilnya. Perilaku D kabur-kaburan dimulai saat ia tidak mempunyai buku LKS dan pakaian pramuka, yang harus dibeli. Pakaian seragam yang sudah tidak layak masih dipakainya ke sekolah, sehingga menjadi ejekan teman-temannya. Dia menjadi tertutup dan pendiam setelah sering diejek oleh temannya, tidak mau terus terang dan bercerita tentang masalah di sekolah. Sampai suatu hari dia membawa *cutter* yang akan digunakan untuk bunuh diri dengan cara menyilet tangannya, namun diketahui oleh ibunya sehingga gagal. Sampai suatu saat dia meminta izin untuk pergi bermain, dan tanpa rasa curiga ibunya mengizinkan. Namun tidak pulang dan tidak ditemukan sampai suatu saat orang tua memperoleh informasi dari petugas RPSA, bahwa anaknya berada di RPSA. Sebelum menjadi klien RPSA, D menggelandang di jalanan sampai terjaring oleh Satpol PP, selanjutnya melalui TRC dirujuk ke RPSA.

Korban eksploitasi seksual ternyata tidak hanya anak dari keluarga berantakan, dari 10 perempuan korban eksploitasi seksual ternyata terdapat 3 orang dari keluarga yang utuh, tujuh lainnya dari keluarga berantakan. Pelaku eksploitasi seksual terhadap anak terdiri dari ayah tiri, ayah kandung, kakak ipar, pengasuh di panti. Temuan ini sejalan dengan pengetahuan yang sudah beredar selama ini, bahwa pelaku kekerasan terhadap anak kebanyakan orang-orang terdekat dengan anak.

3. Akses atas Pelayanan RPSA

Dilihat dari proses anak yang memerlukan perlindungan khusus mengakses pelayanan RPSA, tampak bahwa kebanyakan melalui rujukan, yaitu sebanyak 15 orang (60 persen), sebagian terbesar (11 orang) merupakan rujukan dari kepolisian, lainnya rujukan dari Satpol PP, Kementerian Luar Negeri, Dinas Sosial dan Tim Reaksi Cepat (TRC), masing-masing 1 orang. Sebanyak 5 orang merupakan hasil penjangkauan petugas RPSA dan 5 orang lainnya diantar oleh keluarga/pengasuhnya sendiri.

Tabel 3.
Konfigurasi Anak
menurut Proses Masuk RPSA

No	Proses Masuk RPSA	Banyaknya	Persen
1	Dirujuk polisi	11	44
2	Dirujuk Satpol PP, Kemlu, Dinso, TRC	4	16
3	Diantar keluarga	5	20
4	Dijangkau RPSA	5	20
Jumlah		25	100

Data ini menunjukkan bahwa kepolisian merupakan rujukan utama masyarakat ketika muncul permasalahan anak. Ketika terjadi masalah anak di masyarakat maka kepolisian merupakan lembaga yang paling banyak berperan, baik dijadikan rujukan oleh masyarakat maupun proaktif melakukan jangkauan. Hal tersebut kiranya dapat dimaklumi selain karena lembaga kepolisian yang memiliki jaringan luas juga karena bagi masyarakat, kepolisianlah yang berwenang menyelesaikan persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh mereka. Mencermati kedua puluh lima kasus tampak bahwa informasi memiliki peran sangat penting. Anak yang masuk dan memperoleh perlindungan di RPSA adalah anak yang memiliki akses melalui orang di sekitarnya yang mengetahui eksistensi RPSA. Misalnya, kasus 02 R di Bogor yang hamil setelah diperkosa buruh bangunan dapat mengakses RPSA setelah mendapat informasi dari tetangganya yang bekerja di Kemensos; Kasus 10 Ki di Banyumas, korban pemerkosaan, masuk RPSA setelah disarankan oleh tetangga yang bekerja di Polresta setempat; Kasus 17, FR dan adiknya

ZR di Makassar, anak nakal, masuk RPSA setelah nenek yang mengasuhnya dua kali melapor ke polisi, akhirnya masuk RPSA melalui Dinas Sosial setempat setelah disarankan polisi.

4. *Presenting Problem* dan Kategori

Presenting problem (masalah yang mengantarkan) anak masuk atau memperoleh pelayanan di RPSA bervariasi, yaitu kekerasan seksual (pencabulan, pelecehan seksual dan atau hingga pemaksaan hubungan seksual atau pemerkosaan meliputi 11 anak (44 persen), termasuk di dalamnya 2 orang dalam kondisi hamil; berada di jalanan/lari dari rumah sebanyak 6 orang anak (24 persen) kemudian dituduh mencuri 2 anak (8 persen), korban penelantaran 3 anak (12 persen). Lainnya merupakan korban penjualan (*trafficking*) 2 orang anak dan eksploitasi ekonomi 1 orang anak. Jika dilihat menurut jenis kelamin maka lebih dari setengah anak perempuan yaitu 10 dari 19 orang adalah korban eksploitasi seksual. Anak laki-laki hanya 1 dari 6 orang merupakan korban eksploitasi seksual.

Jika ditinjau dengan UU No.22/2003 tentang perlindungan anak tampak bahwa kategori masalah yang digunakan oleh RPSA tidak sinkron. Dalam UU perlindungan anak tidak ada kategori anak mencuri, anak berada di jalan atau lari dari rumah, lihat bagian I di atas. Apabila mengacu kepada kategori yang ditetapkan dalam UU maka dari 25 orang anak yang menjadi subjek dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual; anak yang diperdagangkan; anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Menurut kategori ini maka komposisi kedua puluh lima orang anak yang menjadi subjek penelitian ini adalah sebagai berikut: (lihat Tabel 4)

Kategori pertama meliputi anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan anak korban

pelecehan seksual, termasuk diperkosa dan hamil sebanyak 12 orang (48 persen). Anak yang diperdagangkan sebanyak 2 orang (8 persen), meliputi anak yang diserahkan orangtua kepada "panti sosial" 1 orang dan anak yang diserahkan orangtua kepada agen pengiriman tenaga kerja ke luar negeri (TKI) 1 orang; 3) anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebanyak 11 orang (44 persen), meliputi anak yang dituduh mencuri 2 orang, anak yang berada atau hidup di jalanan 6 orang dan anak terlantar 3 orang.

Satu persoalan lain adalah permasalahan yang menimpa anak cenderung berlangsung relatif lama, berkepanjangan dan berulang. Masalah terbongkar dan anak diselamatkan setelah peristiwanya berlangsung lama atau bahkan berulang, anak telah menjadi korban dan menderita berkepanjangan. Dari 25 kasus sebanyak 12 kasus (48 persen) merupakan masalah yang berlangsung lama dan berulang atau berkepanjangan. Masalah terbongkar setelah anak tidak tahan lagi. Misalnya kasus-kasus perkosaan, seperti dialami Aj (Kasus 12), asal Malang, 14 tahun, mengalami perlakuan tidak senonoh hingga pemerkosaan sejak kelas 6 SD oleh kakak iparnya. Perbuatan tersebut berhenti setelah terbongkar ketika korban sudah berusia 14 tahun, duduk di kelas 2 SMP. Kasus 23, IN, 15 tahun di Bandung, yang menjadi pelampiasan ayah tirinya sejak berusia 9 tahun, sempat berhenti selama IN tinggal di Pesantren, dan berulang kembali dan semakin "serius" setelah IN kembali ke rumah dalam rangka libur kenaikan ke kelas 3 SMP. Demikian juga kasus bukan perkosaan, seperti: Kasus 1, N, perempuan, 11 tahun, Jakarta. Dia sudah lebih dari sepuluh kali pergi meninggalkan rumah tanpa izin orang tua (kabur). Selama ini, N tinggal bersama ibu tiri, karena Ibu kandungnya pergi menjadi TKW, sejak dia berusia 7 bulan dan sampai saat ini

Tabel 4.
Konfigurasi Anak menurut Kategori Masalah

No	Kategori	banyaknya	persen
1	anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual	12	48
2	anak yang diperdagangkan	2	8
3	anak korban perlakuan salah dan penelantaran.	11	44
	Jumlah	25	100

tidak diketahui keberadaannya. N akhirnya ditangani/menjadi klien RPSA setelah terjaring operasi Satpol PP dan sempat menjadi berita di media masa. Kasus 3, D, perempuan, 10 tahun, Jakarta, yang kabur dari rumah setelah lama menderita, minder dan tertekan diejek teman sekolah karena tidak memiliki buku LKS dan berpakaian lusuh. Fakta ini mengandung makna bahwa anak sudah terlanjur lama menanggung derita dan menjadi korban, baru kemudian masalahnya terbongkar dan mendapat penanganan. Kondisi demikian tentu memiliki eksese jauh lebih buruk jika sekiranya penanganan dilakukan lebih awal.

5. Anak Miskin

Menelaah kasus masing-masing anak eks RPSA lebih dalam, diketahui bahwa ternyata hampir semua anak berasal dari keluarga miskin, kecuali seorang anak, yaitu anak laki-laki yang menjadi korban pelecehan seksual oleh gurunya. Dalam narasi kasus, kemiskinan mereka tercermin jelas antara lain dari pekerjaan orangtua, kondisi rumah tempat tinggal, masalah yang mereka hadapi yang mengantarkan mereka masuk RPSA. Pekerjaan ibu mereka semua adalah di sector informal, yaitu: TKW (4 orang), tani / buruh tani (4 orang), pembantu rumah tangga / buruh cuci (4 orang), pelayan restoran (2 orang), jualan makanan (1 orang), pekerja seks komersial (1 orang), tidak bekerja 4 orang dan lainnya tidak ada informasi (5 orang).

Tabel 5.
Pekerjaan Ayah

No	Pekerjaan Ayah	Total
1	Buruh serabutan	4
	Supir/satpam/kebersihan	5
2	Tani	2
3	Bangunan; tukang beca	3
4	TKI	2
5	Guru	1
6	Tidak bekerja	1
7	Tidak ada informasi	7
Jumlah		25

Demikian juga ayah mereka, semua bekerja di sektor informal, yaitu: buruh serabutan

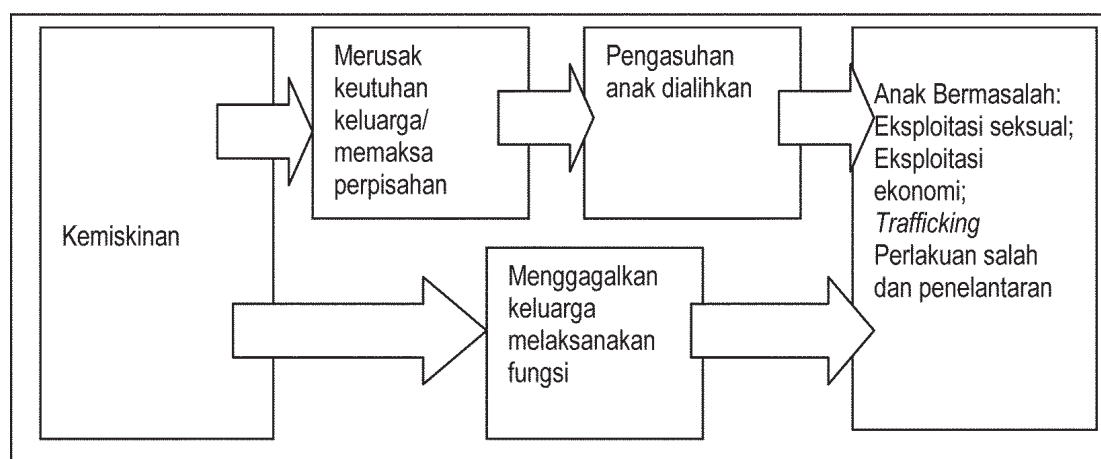
(4 orang), supir/satpam/kebersihan (5 orang), bertani (2 orang), buruh bangunan/ tukang beca (3 orang), tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (2 orang), guru (1 orang), tidak bekerja (1 orang), lainnya tidak ada informasi 7 orang, termasuk di dalamnya anak yang lahir dari perkawinan yang tidak jelas atau anak di luar nikah sebanyak dua orang.

Rumah yang ditempati semua keluarga sangat sederhana dengan status kontrak 4 orang, milik sendiri 5 orang (hanya 1 orang yang cukup layak), numpang atau ikut keluarga nenek/kakek 3 orang. Sebanyak 13 orang lainnya tidak ada informasi terkait rumah. Mengacu kepada data di atas sudah menjadi jelas ternyata sebanyak 24 (96 persen) dari 25 orang, adalah anak dari keluarga miskin atau anak miskin. Pertanyaan berikut yang menarik adalah apakah ada keterkaitan masalah yang dialami anak dengan kemiskinan? Jika iya, bagaimana kemiskinan “menerpa” dan “melemparkan” anak hingga menjadi korban dan perlu memperoleh perlindungan khusus di RPSA?

6. Dua Pola Kemiskinan Mendera Anak

Mencermati data dan informasi pada narasi 24 atau 25 kasus tampak bahwa jelas masalah anak yang memerlukan perlindungan khusus terkait erat dengan kemiskinan. Dapat dinyatakan bahwa kemiskinan merupakan faktor utama yang menyebabkan anak bermasalah hingga memerlukan perlindungan khusus. Kemiskinan mendera anak melalui dua pola utama. (Lihat skema 1)

Pola pertama, kemiskinan merusak keutuhan keluarga. Oleh karena kemiskinan, anggota keluarga terpaksa berpisah, bercerai, atau anak lahir di luar nikah. Berpisah misalnya anak diserahkan kepada orang lain atau ibu harus pergi menjadi TKI. Konsekuensinya anak harus berada dibawah pengasuhan orang lain seluruhnya atau sebagian. Peralihan pengasuhan tersebut secara langsung atau tidak langsung menimbulkan derita atau masalah bagi anak hingga berujung pada pelayanan perlindungan khusus. Pola kedua, kemiskinan menggagalkan keluarga melaksanakan fungsi pemenuhan kebutuhan dasar anggotanya, termasuk kebutuhan dasar dan aspirasi anak. Pada pola ini faktor



Skema 1.

Kemiskinan Mendera Anak Hingga Memerlukan Perlindungan Khusus

kemiskinan belum sampai merusak keutuhan keluarga, pasangan suami isteri masih hidup bersama di bawah satu atap, menjalankan tugas sebagai orangtua bagi anak. Namun demikian kemiskinan langsung “menohok” anak dengan cara atau dalam wujud kebutuhan dan atau aspirasi anak tidak terpenuhi hingga eksploitasi ekonomi dan tekanan mental hingga memerlukan perlindungan khusus.

Seperti sudah disebutkan di atas, dari 25 orang anak sebanyak 24 orang merupakan anak (dari keluarga) miskin. Dari 24 orang anak miskin tersebut, sebanyak 17 orang merasakan kemiskinan melalui bentuk atau pola pertama. Kemiskinan memisahkan dirinya dari kedua orangtua kandung. Kemudian sebanyak 7 orang merasakan kemiskinan dalam bentuk atau pola kedua. Kemiskinan dirasakan dalam wujud “kelaparan” hingga eksploitasi ekonomi dan tekanan mental, meskipun hidup masih bersama kedua orangtua kandung.

Perpisahan (kerusakan) keluarga seperti yang dimaksud dalam pola pertama berwujud dalam lima bentuk perpisahan. Pertama, pasangan suami dan isteri atau orangtua kandung bercerai. Pola seperti ini terjadi pada 7 kasus. Misalnya: Kasus 14. L, anak perempuan, 9 tahun, kelas 4 SD, mengalami pelecehan seksual, pencabulan dan pemerkosaan oleh ayah tirinya. L anak dari ibu X dari perkawinan sebelumnya. Setelah bercerai dengan suami terdahulu ibu X kawin lagi dengan laki-laki lain yang kemudian melakukan eksploitasi seksual terhadap

anaknya L. Kasus 16. Z, laki-laki, 10 tahun, kelas 3 SD di Makasar, mengalami keterlantaran setelah ayah dan ibunya bercerai. Z yang ketika itu masih berusia sekitar 3 tahun, dibawa oleh neneknya, karena kedua orangtunya tidak mengurusnya, bahkan tidak pernah bertemu sampai sekarang. Karena kondisi ekonomi neneknya yang miskin, Z dititipkan kepada X, saudara neneknya. Namun, selang beberapa hari, Z dibawa oleh anak perempuan dari X, dan diasuh di rumahnya. Akan tetapi selama ikut tantenya, dia mengalami kekerasan hingga kemudian tidak tahan hingga memutuskan lari dari rumah dan berada di jalanan. Kasus 19. I, 15 tahun, di Bandung, korban pelecehan seksual oleh ayah tirinya. Sejak usia 9 tahun sering disuruh ayah tirinya memijat bagian tubuhnya yg tidak pantas. Pelecehan sempat terhenti setelah I tamat SD dan tinggal di pesantren. Pelecehan kembali dan semakin serius setelah I pulang ke rumah dalam rangka libur kenaikan ke kelas 3. Setelah itu, I tidak diizinkan kembali ke pesantren, sekolahnya dipindah ke Bandung di mana ibu dan ayah tirinya tinggal. Pelecehan berulang terus hingga dia tidak tahan, kemudian mengadu ke guru. I juga seringkali dipaksa nonton video porno dan meniru adegan tsb.

Kedua, salah satu dari pasangan suami atau isteri atau orangtua kandung meninggal (1 kasus), yaitu: Kasus 06. S, perempuan, 16 tahun, SMP tidak lulus, korban pemerkosaan oleh saudara sepupu. S adalah anak kedua dari lima bersaudara anak dari K, 42 tahun. K me-

nikah dua kali, pertama dengan X, ibu kandung S, namun pernikahan tersebut tidak bertahan karena X meninggal ketika melahirkan anak ketiga. Pada waktu itu usia S baru mau empat tahun. Sejak ibunya meninggal, S diasuh oleh (tinggal bersama) neneknya. Di rumah nenek tersebutlah S kemudian diperkosa oleh sepupunya ketika dia menjelang UAS SMP. S sempat pergi menjadi PRT kemudian dipulangkan majikan karena hamil.

Ketiga, salah satu dari pasangan suami atau isteri atau keduanya harus pergi bekerja di tempat lain yang berjauhan dalam waktu relative lama, seperti menjadi TKI di luar negeri, menjadi pembantu rumah tangga di kota lain. Bentuk seperti ini terjadi pada 5 kasus, antara lain: Kasus 01. N, perempuan, 11 tahun, sering kabur dari rumah, anak terlantar. N menjadi klien RPSA atas rujukan dari KPAI setelah terjaring operasi Satpol PP dan sempat menjadi berita di media masa. N tinggal bersama ayah kandung dan ibu tiri. Ibu kandungnya pergi menjadi TKW, sejak N berusia 7 bulan dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Kemudian ayah N menikah lagi dan telah memiliki 2 anak. Ayah N bekerja tidak tetap, sedangkan ibu tiri N memiliki pekerjaan sebagai *helper* di sebuah rumah sakit swasta di Jakarta. Kasus 07. Bel, Banyumas, perempuan, 15 tahun, Islam, SD, anak terlantar. Bel dan dua adiknya diberitakan terlantar setelah kematian bapaknya di penjara. Bapaknya masuk penjara atas tuduhan mencuri. Ibu Bel sampai saat itu tidak diketahui keberadaannya, yang pasti sekitar setahun lalu dia pergi menjadi TKI melalui sebuah PJTKI di Jakarta. Kasus 12. AJ, asal Malang, saat di RPSA berusia 14 tahun, kelas 2 SMP, korban pemerkosaan. Klien merupakan anak ke 4 dari 5 bersaudara. Kedua orang tuanya pergi bekerja sebagai TKW di Arab Saudi. Awalnya AJ dalam pengasuhan buliknya, adik kandung ibunya, namun setelah kakaknya menikah pengasuhan beralih ke kakaknya. Namun suami kakaknya itulah yang kemudian melakukan pemerkosaan sejak dirinya kelas 6 SD sampai terungkap ketika kelas 2 SMP. Kasus 18. RK, 13 tahun dan dua adiknya RN (10 tahun) dan RM (7 tahun), kasus anak terlantar. Mereka mengalami keterlantaran karena ibunya dihukum di Malaysia. Sekitar tahun 2000, keluarga mereka berangkat

ke Malaysia untuk bekerja sebagai TKI ilegal. Saat itu RK baru berumur sekitar 3 tahun adiknya belum lahir. Tahun 2009, ibunya membunuh suaminya, ayah RK, dengan memberikan racun di kopinya, dan akhirnya ibunya diproses hukum dan dipenjara. Akibatnya, RK dan ketiga anaknya terlantar, kemudian masuk RPSA setelah dirujuk Kemlu RI.

Keempat, Anak diserahkan kepada pihak lain, misalnya kepada nenek, tante, kakak, panti. Contohnya: Kasus 25. JU, di Bandung, perempuan, anak ke 6 dari 7 bersaudara. JU masih memiliki ayah dan ibu kandung, namun kemudian dia harus berpisah, dia ditiptkan pada keluarga kerabat di Bandung untuk disekolahkan. Akan tetapi sejak kelas 1 SMP oleh kerabat dimasukkan di panti sosial. Di panti tersebut JU dan sejumlah anak lain secara terpisah mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah seorang pengurus. Kelima, Anak lahir di luar nikah, terjadi pada: Kasus 04. S, perempuan, usia 1 tahun 3 bulan, korban *trafficking*. S, lahir dari seorang ibu yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial (PSK) jalanan. Ayah kandung S tidak jelas, menurut keterangan ibunya, telah meninggal sebelum S lahir. Dilatar belakangi kebutuhan, maka ibu kembali ke jalanan sambil membawa-bawa S sampai berumur 2 bulan. S kemudian diserahkan ke sebuah "panti asuhan" di Bogor. S menjadi klien RPSA setelah panti dimaksud di 'grebeg' polisi karena telah lama dicurigai melakukan praktek *trafficking*. Pada saat itu ditemukan beberapa bayi termasuk S yang kemudian dirujuk ke Dinsos Kota Bogor, dan dilanjutkan ke RPSA Bambu Apus.

Sementara itu, pada pola kedua, anak merasakan kemiskinan dalam bentuk kebutuhan dan atau aspirasi tidak terpenuhi, tekanan mental, eksploitasi ekonomi antara lain diperlihatkan dalam kasus di bawah ini: Kasus 03. D, perempuan, 10 tahun, kelas III SD, anak ke 6 dari 9 bersaudara, kabur dari rumah. D hidup di lingkungan keluarga yang sangat sederhana, ibunya seorang ibu rumah tangga dan ayahnya seorang Satpam di sebuah sekolah di Jakarta. Kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan mengakibatkan semua kebutuhan sekolah anak kurang terpenuhi dengan segera. Ayah klien cukup sibuk untuk mencari nafkah. Hari Senin

sampai Sabtu bekerja sebagai Satpam, dan hari Minggu dimanfaatkan untuk mencari tambahan penghasilan sebagai tukang ojek, sehingga perhatian pada anak menjadi berkurang. Semua pengasuhan dan bimbingan bagi anak-anaknya lebih banyak diserahkan kepada isterinya. Diakui oleh kedua orang tua D, bahwa ibu sering minder sehingga tidak pernah mau datang apabila pihak sekolah memanggilnya baik dalam pengambilan raport maupun dalam penyelesaian kasus yang dialami anak-anaknya di sekolah. Perilaku D kabur-kaburan dimulai saat ia tidak mempunyai buku lembar kerja siswa (LKS) dan pakaian Pramuka, yang harus dibeli. Pakaian seragam yang sudah tidak layak masih dipakainya ke sekolah, sehingga D kerap menjadi bahan ejekan teman-teman sekolahnya. Sikap D menjadi tertutup dan pendiam setelah dia sering diejek oleh temannya, D tidak mau terus terang dan bercerita pada orang tuanya tentang masalah di sekolah. Sampai suatu hari D membawa cutter yang akan digunakan untuk bunuh diri dengan cara menyilet tangannya, namun sempat diketahui oleh ibunya sehingga D gagal melakukan usaha bunuh diri. Sampai suatu saat D meminta izin pada ibunya untuk pergi bermain dengan teman-temannya, dan tanpa rasa curiga ibunya mengizinkan. Namun sampai malam tiba anak belum juga pulang yang membuat kedua orang tuanya gelisah, dan berupaya mencari D kerumah teman-temannya. Sampai suatu saat orang tua memperoleh informasi dari petugas RPSA, bahwa anaknya berada di RPSA. Sebelum menjadi klien RPSA, D menggelandang di jalanan sampai akhirnya terjaring operasi penertiban anjal dan gepeng oleh Satpol PP, selanjutnya TRC merujuk D ke RPSA.

Selanjutnya Kasus 21. I, perempuan berusia 15 tahun, yang berasal dari sebuah desa terpencil di Jawa Barat, kabur dari rumah, hidup di jalanan di Kota Bandung. Menurut penelusuran RPSA diketahui I sudah tiga kali pergi meninggalkan rumah tanpa seijin orangtuanya. Pertama terjadi sekitar pertengahan tahun 2010, kedua akhir tahun 2010 dan ketiga pada bulan Juni 2011. Menurut penjelasan I pertama kali pergi karena ingin memiliki handphone. Pak O dan Ibu D (orangtua I) cerita bahwa sekitar 6 bulan yang lalu, I minta sebuah handphone. Karena waktu itu belum punya uang, permint-

aan tersebut belum dipenuhi. Kelihatannya I sangat mendambakan hp. Hingga suatu hari I pergi ke kampung lain, mendatangi 4 orang pemuda yang menawarkan sebuah hp dengan harga 150.000. Ketika itu, kebetulan orang tua I baru punya uang sebesar Rp.150.000. dan diberikan kepada I maksudnya untuk disimpan. *Itu juga ada yang baru membayar utang.* Tanpa sepengetahuan kedua orang tua, I pergi menemui pemuda yang menawarkan hp dimaksud. Ternyata oleh ke-empat pemuda tersebut I diajak pergi ke Pangalengan, sekitar sekitar 1,5 jam perjalanan dengan sepeda motor, dengan alasan hp yang dimaksud perlu diperbaiki. Sejak itu I tidak pulang, sampai akhirnya diantar oleh staf sebuah yayasan kepada N kakak dari I yang tinggal di Bandung. Ketika diantar, uang sudah habis dan hp yang didambakan tidak ada. Kurang lebih enam bulan setelah itu pergi untuk kedua kalinya, terungkap bahwa ketika itu I diperkosa bergantian oleh sejumlah orang setelah terlebih dahulu disuruh makan obat "X" sebanyak 30 butir. Pada pelarian ketiga tampak perangai I sudah berubah, agresif, berani menyentuh secara seksual laki-laki termasuk petugas.

Baik pola pertama maupun pola kedua ujungnya adalah penderitaan bagi anak. Gejalanya yang dapat diamati adalah dalam wujudnya, seperti disinggung di atas, mencuri, diperkosa/hamil, berada di jalanan/lari dari rumah, *trafficking*, terlantar, disuruh ngamen. Jika ditelaah permasalahan yang dihadapi anak dapat diklasifikasikan menjadi, eksploitasi ekonomi (disuruh ngamen); eksploitasi seksual (pemeriksaan), penelantaran (berada di jalanan, lari dari rumah, ditinggal, tidak diurus) dan diperdagangkan.

Keduapuluh lima kasus pada penelitian ini memperlihatkan dengan jelas bahwa kemiskinan menempatkan anak baik laki-laki maupun perempuan pada situasi amat rawan atau rentan. Ancaman pertama yang dihadapi anak miskin adalah kehilangan lingkungan yang kondusif yaitu berada dibawah pengasuhan orangtua, ayah kandung atau ibu kandung atau keduanya sekaligus. Setelah kehilangan salah satu atau kedua orangtua kandungnya, anak akan jatuh di bawah pengasuhan orang lain. Berada di bawah pengasuhan orang lain bagi anak berarti masuk ke situasi yang lebih rawan atau lebih rentan lagi

(dapat disebut stadium kedua), sewaktu-waktu dapat diterlantarkan, menderita kekerasan, eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual dan tekanan mental.

Kasus-kasus di atas memperlihatkan anak perempuan menanggung resiko lebih tinggi, dari 19 orang anak perempuan yang pernah dilayani di 5 PSBR ternyata 10 orang atau lebih dari separuh merupakan korban eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual dilakukan oleh orang yang ada disekitar korban, mulai dari ayah tiri (2 orang), kakak ipar (1 orang), saudara sepupu (1 orang), tetangga (3 orang), pengasuh di panti sosial (1 orang) dan teman (1 orang), guru (1 orang). Mencermati lebih dalam, diketahui bahwa pelaku eksploitasi seksual adalah orang yang memiliki kuasa atas korban, seperti ayah tiri, kakak ipar, pengasuh, saudara sepupu dan guru.

Realita bahwa kemiskinan merupakan faktor pemicu utama hingga anak memerlukan perlindungan khusus memiliki implikasi luas. Permasalahannya adalah jumlah penduduk miskin Indonesia masih begitu banyak, tahun 2012 bulan September meliputi sebanyak 27,84 juta atau 11,6 persen dari 237 juta penduduk. Mereka tersebar di perkotaan maupun di pedesaan. Jika proporsi anak berusia kurang dari 18 tahun meliputi sebanyak 30 persen maka jumlah anak miskin meliputi sekitar 9 juta jiwa, yaitu 30 persen dari total penduduk miskin. Mengacu kepada kasus-kasus pada penelitian ini, maka mereka semua (sebanyak 9 juta anak miskin tersebut) merupakan anak rentan bahkan sangat rentan. Hak-hak mereka sebagai anak tidak terpenuhi hingga proses tumbuh kembang mereka terganggu, tidak optimal. Lebih jauh dari itu bahkan sebagian dari mereka diyakini saat ini berada dalam situasi darurat (dapat disebut stadium ketiga) dalam arti sudah dan sedang berada dalam tekanan, sudah dan sedang menjadi korban perlakuan salah dan penelantaran, sudah dan sedang menjadi korban kekerasan fisik dan atau mental, diperdagangkan, dieksploitasi secara ekonomi dan atau bahkan secara seksual dalam waktu berkepanjangan. Sekali lagi penting ditegaskan biasanya sudah berlangsung berkepanjangan. Kondisi demikian sangat memperihatinkan bahkan mengerikan. Hak-hak mereka terampas. Sampai sejauh

ini belum diketahui berapa rasio anak miskin memerlukan perlindungan khusus, namun mencermati kasus-kasus yang sempat mencuat di media massa diyakini jumlahnya relatif sangat banyak. Kasus-kasus yang diberitakan oleh media massa hanya merupakan titik kecil puncak gunung es, biasanya terungkap setelah berlangsung lama.

Sebagai gambaran umum dapat dikemukakan Data Susenas 2006 seperti dikutip dalam buku II RPJM Bab I tentang Kebijakan Pengarusutamaan dan Lintas Sektor (halaman 43) yang menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan terhadap anak adalah sebesar 7,6 persen, atau terdapat sekitar 4 juta anak yang mengalami kekerasan setiap tahun. Itu berarti bahwa setiap hari sebanyak 10.958 orang anak mengalami kekerasan atau 456 orang setiap jam. Mengingat bahwa usia anak adalah usia pertumbuhan yang akan berpengaruh hingga seumur hidupnya, maka harus dipahami bahwa situasi anak miskin dalam keadaan darurat. Negara perlu melakukan upaya penyelamatan sistematis dan luas. Tanpa penyelamatan sistematis, dalam bahasa ekonomi, potensi sejumlah besar SDM akan terbuang percuma dan menjadi beban sosial masyarakat saat ini dan di masa depan. Dalam bahasa politik, sejumlah besar warga terabaikan hak-haknya.

Temuan penelitian ini juga sekaligus mengandung makna justifikasi atas program perlindungan sosial yang diselenggarakan pemerintah sebagai bagian dari program penanggulangan kemiskinan, seperti diuraikan di atas. Dapat diyakini program perlindungan sosial tersebut dapat meringankan beban keluarga miskin, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan dasar anak.

C. Penutup

Belajar dari 25 kasus anak yang telah memperoleh pelayanan di lima PSBR tahun 2011, tampak bahwa masalah anak yang memerlukan perlindungan khusus memiliki kaitan erat dengan kemiskinan. Penelitian ini memperlihatkan dengan jelas bahwa hampir semua anak yang memperoleh perlindungan khusus di lima RPSA tersebut berasal dari keluarga miskin. Mereka memerlukan perlindungan khusus setelah menjadi korban. Kemiskinan membuat

anak menderita, menjadi korban, hak-haknya tidak terpenuhi, melalui dua pola. *Pertama*, kemiskinan membuat keluarga mengalami kehancuran, anggota keluarga terpaksa berpisah, dalam arti salah satu atau sebagian dari mereka harus pergi, hidup, bekerja dan tinggal di tempat lain atau suami dan isteri bercerai atau salah seorang meninggal. Konsekuensinya anak berada di bawah pengasuhan orang lain. Berada di bawah pengasuhan orang lain merupakan ancaman lebih serius bagi anak terlebih anak perempuan. *Kedua*, kemiskinan membuat keluarga gagal memenuhi kebutuhan dasar dan atau aspirasi anak. Akibatnya anak menderita dan menjadi korban, seperti *bullying*, tekanan emosional hingga pemerkosaan. Keluarga masih utuh, anak masih memiliki ayah kandung dan ibu kandung namun tidak mampu memenuhi kebutuhan anak. Anak miskin baik laki-laki maupun perempuan sangat rentan menjadi korban. Anak perempuan miskin yang berada dibawah pengasuhan orang lain, termasuk ayah tiri, kakak ipar maupun pengurus panti sosial cenderung lebih rentan. Mereka lebih rentan mengalami eksploitasi seksual oleh orang-orang yang ada disekitarnya.

Oleh sebab itu, penanggulangan kemiskinan menjadi demikian penting bagi keselamatan anak, terpenuhinya hak-hak anak. Penanggulangan kemiskinan juga berarti mencegah anak menjadi korban, sehingga berfungsi sebagai perlindungan sosial. Penanggulangan kemiskinan sebaiknya diarahkan untuk memperkuat lembaga keluarga atau meningkatkan kemampuan keluarga menjalankan fungsi sosialnya, memenuhi kebutuhan dasar anggotanya, termasuk kebutuhan anak. Perlu dihindari solusi mengatasi kemiskinan dengan mengorbankan keutuhan atau kebersamaan keluarga, seperti menjadi pekerja migrant (TKI) dan atau pembantu rumah tangga (PRT) di kota. Atau jika menjadi TKI tidak terhindarkan, kebijakan penempatan TKI perlu diperketat, misalnya dilarang bagi perempuan yang memiliki anak usia, 0 sampai 9 tahun. Wajib kembali setelah bekerja selama kurun waktu tertentu, dua tahun. PJTKI wajib menjamin kebebasan TKW berkomunikasi dengan keluarga setiap saat. Melaporkan keberadaan TKI. Negara wajib mencari TKI jika keluarga tidak mengetahui keberadaannya atau

kehilangan kontak selama 6 bulan berturut-turut. Semua pihak di masyarakat perlu peka terhadap kepentingan anak. Sekolah, misalnya, perlu peka terhadap anak dari *bullying*, terutama anak dari keluarga miskin.

Kasus-kasus yang ditangani RPSA dapat diyakini hanya merupakan “puncak gunung es” atau *system* dari fenomena yang sesungguhnya jauh lebih besar, kiranya sangat baik apabila di setiap wilayah kecamatan di seluruh Indonesia dibentuk suatu tim permanen yang fokus khusus mengurus kesejahteraan anak. Tim tersebut bertanggung jawab mengurus kesejahteraan semua anak di wilayah kecamatan, termasuk melakukan pencegahan terjadinya korban. Oleh sebab itu tim tersebut dapat diletakkan di bawah atau sebagai bagian dari sebuah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten/Kota bidang kesejahteraan sosial di setiap kecamatan. Mereka harus memiliki data lengkap semua anak di wilayah kerjanya, dalam berbagai kategori. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) yang selama ini sudah menjadi pendamping Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) diyakini akan lebih efektif jika bergabung dalam lembaga tersebut.

Pustaka Acuan

- Diane E Papalia, et al, (2011) *Human Development, Psikologi Perkembangan* (terjemahan); Jakarta: Prenada Media Group,
- Frank G. Globe, (1987), *Mazhab Ketiga—Psikologi Humanistik Abraham Maslow*, Yogyakarta: Kanisius
- Gerald P Mallon and Peg McCartt Hess. (2005), *Child Wefare for The Twenty- first century: a handbook of Practices, Policies. And Programs*. New York: Columbia Univerity Press
- Hurlock, Elizabeth B, (1993), *Psikologi Perkembangan—Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta: Erlangga
- John W Santrock, (2003), *Adolescence; Perkembangan Remaja*, edisi keenam, (terjemahan) Jakarta: Erlangga.
- Kartini, kartono, (2008), *Patologi Sosial 2, “Keknakalan Remaja”*, Jakarta: Raja Grafindo.

Nasir, Moh, (1999): *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan ke-4.

Kecuk Suharyanto, (2010) *Jumlah Si Miskin*, Jakarta: SKH Kompas, Jumat 21 Jan 2010.

_____(2005) *Pedoman Pendataan Rumah Tangga Miskin*, Jakarta: Badan Pusat Statistik,.

Nurdin Widodo, (2011). *Evaluasi Program Perlindungan Anak Melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak*, Jakarta: P3KS Press.

Suharto, Edi, (1997), *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, Bandung: LSP Press.

Pengaruh Dukungan Sosial terhadap Kondisi Kecemasan dalam Menghadapi Pensiun (*Post Power Syndrom*)

The Enfluence of Social Support on Anxiety Condition Of Having Retirement (Post Power Syndrome)

Ikawati dan Tri Gutomo

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial Yogyakarta.
Jln Kesejahteraan Sosial No 1, Sonosewu, Yogyakarta. Email : ikawati.susatyo@yahoo.com.
Diterima 1 Agustus 2013, direvisi 12 Februari, disetujui 24 Februari 2014.

Abstract

This research is done to know the influence of social support on anxiety condition having retirement (Post Power Syndrome). This research is a correlational study. The research location is choosen purposively as the area with highest aged prevalention (BPS, 2010). Based on that consideration, Yogyakarta Special Teritory, is choosen as research location. Research subjects are also choosen purposifely, with category that research subject are already retired from work, more than 60 years of age, men or women, still have living partner and family, and highschool educated, with retirement grant two to three million a month. Based on the consideration to the research subject, choosen 30 respondents. The objects of this research are social support and the anxiety of having retirement (Post Power Syndrome). Data gathered through guided interview and observation techniques, and analysed with regression technique. The result shows that there is enfluence of social support on anxiety condition, having retirement. The enfluence can be seen from the degree of effective contribution towards anxiety condition having retirement (Post Power Syndrome), as 72 per cent high. That means there are other variables or factors enfluence the anxiety condition, as big as 28 per cent. Other enfluencial factors can be seen from the degree of related contribution of each variable, they are an emotional support (8,881 per cent), information suppror (17,297 per cent), instrumental support (8,358 per cent), and evaluation support (73, 297 per cent). Refer to the result, it is recommended to The Ministry of Social Affairs, especially the Diractory of Aged Service, that for the sake of enhancing aged social welfare, especially for those having retired or is retired, it needs programs that can commit and empower aged through their thought, idea, and advice to prevent aged from being anxieted of having retired (Post Pwer Syndrome), or through creating new cariers to develop beneficial desire and hobby.

Keywords:

Social Support-Retired-Post Power Syndrome

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dukungan sosial terhadap kondisi kecemasan dalam menghadapi pensiun (*Post Power syndrom*). Tipe penelitian bersifat korelasional studies. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive dengan alasan merupakan daerah yang jumlah lansia cukup banyak (BPS, 2010). Atas dasar tersebut ditentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Subyek penelitian juga ditentukan secara purposif, dengan pertimbangan subyek sudah pensiun, usia lebih dari 60 th, laki-laki atau perempuan, masih mempunyai pasangan hidup dan keluarga dan mempunyai pendidikan lebih dari SMA dan mempunyai tunjangan pensiun dua juta sampai dengan tiga juta rupiah perbulan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipilih 30 responden. Obyek penelitian ini adalah dukungan sosial dan kecemasan menghadapi pensiun (*Post Power Syndrom*). Teknik pengumpulan data dipergunakan pedoman wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan teknik regresi. Hasil penelitian menunjukkan, ada pengaruh dukungan sosial terhadap kondisi kecemasan, dalam menghadapi pensiun (*Post Power Syndrom*). Pengaruh tersebut dapat dilihat dalam besarnya sumbangan efektif yaitu variabel dukungan sosial terhadap variabel kondisi kecemasan dalam menghadapi pensiun (*Post Power Syndrom*) yaitu sebesar 72 persen, artinya masih ada variabel lain atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi ada sebesar 28 persen. Pengaruh lainnya dapat dilihat dari besarnya sumbangan relaif untuk masing-masing variabel yaitu variabel dukungan emosi (8,881 persen), variabel dukungan informasi (17,464 persen), variabel dukungan instrumental (8,358 persen) dan variabel dukungan penilaian (73,297 persen). Berdasarkan hasil temuan tersebut, direkomendasikan kepada Kementrian Sosial RI melalui Direktorat Pelayanan Lanjut Usia, dalam rangka kebijakan meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia terutama bagi orang yang akan atau sedang menghadapi pensiun, perlu program-program agar para lanjut usia dilibatkan atau diberdayakan melalui ide, pemikiran, nasehatnya dan program yang dapat mencegah terjadinya kecemasan dalam menghadapi pensiun (*Post Power Syndrom*) melalui pembinaan karir baru melalui pengembangan minat dan hobi yang bermanfaat.

Kata kunci:

Dukungan Sosial-Pensiun-Post Power Syndrome

A. Pendahuluan

Mengalami masa pensiun merupakan faktor yang tidak dapat dihindari oleh karyawan, karena dengan pensiun mau tidak mau orang tersebut harus meninggalkan atau berhenti dari instansi atau kantor tempat ia bekerja. Pada masa pensiun ini karyawan bebas dari kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab dalam hubungannya dengan pekerjaan dan kesibukan-kesibukan yang melelahkan. Meskipun demikian, mereka masih dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang akan dihadapinya, setelah pensiun berbeda dengan waktu masih bekerja. Seseorang yang memasuki masa pensiun identik dengan usia lanjut. Hurlock (1994) menempatkan masa pensiun pada periode usia lanjut di dalam perkembangan hidup seseorang.

Menurut Havighurst, bahwa salah satu tugas perkembangan di masa usia lanjut adalah penyesuaian terhadap berkurangnya penghasilan (Irene Trisna Ayu, 2009). Penyesuaian ini adalah mudah dijalankan, bagi sebagian orang pensiun dianggap sebagai titik puncak dari tahun-tahun harapan dan perencanaan kerja, artinya pensiun bukan merupakan akhir dari karier melainkan perubahan karier ke arah tantangan kerja baru yang lebih sesuai dengan selera pribadi. Sedangkan bagi sebagian besar orang, pensiun merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki, dimana mereka belum siap seperti pada penelitian Setiabudi (dalam Rasimin, 1989), bahwa pada umumnya para pensiunan di Indonesia belum siap untuk memasuki masa pensiun, hanya 20 persen dari mereka yang benar-benar menginginkan pensiun dan 80 persen lainnya masih ingin bekerja. Orang yang tidak mempersiapkan dirinya secara ekonomik maupun psikologik dalam menghadapi pensiun, sering menganggap pensiun sebagai pengalaman yang traumatis.

Fenomena lain yang kita lihat adalah kebanyakan dari para lanjut usia terbenam dalam kesibukan kerja pada masa mudanya, sehingga mereka tidak mencoba mengembangkan minat pada hal lain. Akibatnya ketika harus meninggalkan pekerjaan karena berbagai sebab, tidak tahu apa yang harus dilakukan sebagai pengganti kesibukan. Keadaan ini diperburuk dengan masih berkembangnya stereotip masyarakat yang menganggap bahwa para lanjut usia se-

baiknya tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Semua kebutuhan mereka sehari-hari telah tersedia, sehingga membuat para lanjut usia menjadi betul-betul tidak dapat melakukan apapun karena tidak terlatih. Pada era industrialisasi sekarang ini keluarga para lanjut usia kewalahan dituntut untuk berpacu dengan waktu selain mencari nafkah mereka masih harus disibukkan dengan kegiatan melayani orangtua mereka yang telah berusia lanjut. Ketidaksiapan para lanjut usia untuk mengelola diri mereka sendiri serta perlakuan keluarga dan masyarakat yang menganggap bahwa mereka sudah tidak layak dan tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri inilah yang juga menyebabkan para lanjut usia tidak lagi melakukan aktivitas pada masa usia lanjut mereka.

Para lansia yang mengalami berbagai kece- masan berpengaruh terhadap kemunduran fisik, kecemasan karena akan ditinggalkan oleh anak-anak yang sudah besar serta kecemasan menghadapi kematian juga merupakan salah satu sebab ketidakaktifan para lanjut usia. Orang lanjut usia yang tingkat keceemasannya tinggi hingga termanifestasi dalam simtom-simtom fisik dan psikis yang berat, seperti tekanan darah tinggi, putus asa dan depresi tentu saja tidak dapat diharapkan untuk melakukan aktivitas secara efektif. Mereka hanya berdiam diri saja dan mengurung diri di kamar atau sebaliknya mereka selalu menuntut perlakuan istimewa dari keluarga atau masyarakat dan mudah sekali menjadi marah jika perasaan mereka tersinggung sedikit saja. Menurut Rini (2001), pensiun seringkali dianggap sebagai kenyataan yang tidak menyenangkan, sehingga menjelang pensiun tiba, sebagian orang sudah merasa cemas karena tidak tahu kehidupan macam apa yang akan dihadapinya kelak. Di era modern seperti sekarang ini, pekerjaan merupakan salah satu faktor terpenting yang bisa mendatangkan kepuasan. Hal ini dilandasi pemikiran karena uang dan jabatan dapat memperkuat harga diri. Oleh karenanya, sering terjadi orang yang pensiun bukannya bisa menikmati masa tua dengan hidup santai, namun sebaliknya ada yang malah mengalami problem serius, baik kejiwaan maupun fisik. Adapun hal-hal yang mempengaruhi timbulnya kecemasan dalam menghadapi masa pensiun ini, antara lain adalah hilangnya fasilitas-fasilitas

yang diperoleh sewaktu masih bekerja, seperti menurunnya penghasilan, hilangnya status jabatan beserta status sosial yang menyertainya, masih mempunyai tanggungan keluarga, dan datangnya masa tua atau perubahan-perubahan fisik di usia tua (Hadi, 2009).

Pada saat orang memasuki usia pensiun, ia juga akan memasuki kehidupan baru setelah pensiun, yaitu memasuki usia tua. Oleh karena itu, masa pensiun tidak dapat dilepaskan dari masa tua atau usia lanjut. Dikatakan oleh Havighurst (1953), pada saat orang mencapai usia lanjut, di samping mereka harus melakukan penyesuaian terhadap masa pensiun dan penghasilan menurun, mereka juga harus belajar menyesuaikan diri dalam menghadapi tugas-tugas baru yang lain, seperti penyesuaian terhadap kekuatan fisik dan kesehatan yang menurun, penyesuaian terhadap kematian pasangan, hubungan dengan teman-teman sebaya, melakukan kewajiban sosial dan kewajiban sebagai warga negara, dan menemukan tempat tinggal yang memuaskan. Pada usia lanjut juga terjadi kemunduran berbagai sistem dalam tubuhnya, antara lain: sistem pancaindera, pembuluh darah, pernapasan, urogenitalis, pencernaan, pertahanan tubuh, dan sistem syarafnya (Moeryono, 1977).

Seseorang yang akan pensiun tidak selalu menerima kenyataan bahwa dirinya akan berhenti dari pekerjaannya. Ada beberapa kasus seseorang mengalami kecemasan ketika akan pensiun. Kecemasan tersebut terlihat dari perilakunya yang tidak seperti biasa, seperti semangat kerja menurun, mudah marah, tegang, kadang secara fisik terjadi penurunan seperti mudah lelah dan mudah lupa. Pensiun berarti kehilangan peran, status sosial dan kekuasaan, akibatnya banyak orang yang menganggap pensiun sebagai peristiwa yang mendatangkan stres dan merupakan peristiwa yang menakutkan (Zarit dalam Purnamasari, 1998), sehingga kadang-kadang orang mengalami kecemasan ketika akan pensiun. Orang yang akan pensiun perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat pensiun. Penyesuaian yang baik dalam menghadapi masa pensiun tidak lepas dari dukungan sosial terutama dari orang-orang yang penting bagi individu yang bersangkutan.

Keluarga ikut berperan dalam penyesuaian tersebut seperti dikatakan oleh Brill dan Hayes (Fajar Astuti Wulandari, 2001), bahwa individu yang akan pensiun dan keluarganya harus mengantisipasi perubahan-perubahan yang akan muncul dalam hidupnya.

Lansia yang akan pensiun dukungan sosial dapat menjadi aspek penting untuk mengadakan perubahan-perubahan yang diperlukan untuk menghadapi peran yang baru. Dukungan yang diberikan kepada seseorang yang akan pensiun dapat menumbuhkan semangat dan keyakinan pada kemampuannya sendiri sehingga tidak cemas menghadapi situasi atau peristiwa yang akan dialami dimasa yang akan datang. Seseorang yang tidak cemas segera mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan akan pensiun, terlibat dalam kegiatan yang disukai, dan tetap bersemangat dalam bekerja. Lingkungan yang kurang memberi dukungan kepada orang yang akan pensiun menyebabkan munculnya kecemasan. Pada masa pensiun permasalahan yang terjadi dalam keluarga menjadi lebih mempengaruhi lansia jika dibandingkan saat sebelum mereka pensiun. Hal tersebut karena keluarga memiliki pengaruh yang besar bagi para lansia yang pensiun. Peran keluarga tersebut terutama sebagai sumber dukungan sosial terbesar bagi lansia. Menurut Schaie dan Sherry (dalam Irene Trisno Ayu, 2009) pada usia tua, lansia yang pensiun akan membutuhkan dukungan yang lebih besar dari keluarga dan anak-anak mereka. Besarnya dukungan sosial yang dibutuhkan para lansia yang pensiun dimasa tuanya juga memperlihatkan tingginya kebutuhan mereka akan *sense of belonging*. Kebutuhan itu menurut Glasser merupakan kebutuhan psikologis untuk dicintai dan mencintai, termasuk kebutuhan menjalin hubungan, menjalin relasi sosial, memberi dan menerima kasih sayang (Nice, 2008).

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang akan dikemukakan adalah apakah ada pengaruh dukungan sosial terhadap kondisi kecemasan dalam menghadapi pensiun (*post power syndrome*)? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dukungan sosial terhadap kondisi kecemasan dalam menghadapi pensiun. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah diketahuinya pengaruh dukungan sosial terhadap kondisi kecemasan dalam menghadapi

pensiun (*post power syndrome*). Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada Kementerian Sosial RI, melalui Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dalam mencegah terjadinya permasalahan lanjut usia khususnya dalam mempersiapkan lanjut usia menghadapi pensiun.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Lokasi Penelitian: Penentuan lokasi penelitian ditentukan secara purposive dengan pertimbangan atau alasan merupakan daerah yang jumlah lansia cukup banyak. Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS, 2011) pada tahun 2020 jumlah lansia di Indonesia akan mencapai 18.822.879 jiwa atau 11,34 persen dari jumlah penduduk dan secara demografis ada 6 provinsi yang telah memasuki kategori memiliki penduduk berstruktur tua dengan proporsi lansianya mencapai 7 persen ke atas. Ke enam tersebut adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut, maka ditentukan lokasi penelitiannya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tipe Penelitian: merupakan penelitian korelasional (*correlational studies*) untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh hubungan antara dua variabel (Suharsimi Arikunto, 2003). Penelitian ini ingin mengetahui ada tidaknya pengaruh hubungan antara variabel dukungan sosial dan variabel kondisi kecemasan menghadapi pensiun (*Post Power Syndrom*).

Sasaran Subjek: orang yang sudah pensiun di Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui teknik purposive dengan pertimbangan lanjut usia yang sudah pensiun sekurang-kurangnya usianya lebih dari 60 tahun, baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, masih mempunyai pasangan hidup, mempunyai keluarga (anak dan cucu), dan mempunyai tingkat pendidikan lebih dari SMA dan mempunyai tunjangan pensiun per bulan dua juta - tiga juta rupiah. Berdasarkan teknik tersebut ditentukan 30 responden. Objek penelitian adalah Pengaruh dukungan sosial terhadap kondisi kecemasan dalam menghadapi pensiun (*post power syndrome*).

Variabel dalam penelitian ini dioperasionalkan di lapangan sebagai berikut. (a) Variabel bebas (x) adalah dukungan sosial yang meliputi dukungan emosi (x1) yaitu di lapangan dilihat melalui bentuk perhatian, dorongan, kesediaan mendengarkan dan membantu memecahkan masalah lansia; dukungan informasi (x2), yaitu dukungan yang akan dilihat di lapangan dalam bentuk nasehat, saran, pengarahan, dan informasi kepada lansia; Dukungan instrumen (x3), yaitu dukungan yang akan dilihat di lapangan melalui bentuk peralatan, uang, transportasi, dan waktu yang dibutuhkan oleh lansia; Dukungan penilaian (x4), adalah dukungan yang akan dilihat di lapangan dalam bentuk penilaian yang bersifat positif terhadap lansia dalam rangka membantu lansia guna mengembangkan kepribadiannya. (b) variabel tergantung (y) yaitu kecemasan dalam menghadapi pensiun (*post power syndrome*). Dalam penelitian ini akan dilihat melalui tingkat kehilangan status sosial, menurunnya penghasilan, kehilangan karier, kehilangan berinteraksi dengan rekan kerja/teman dan kehilangan rasa percaya diri/tidak berguna.

Teknik Pengumpulan Data: (a) Pedoman wawancara, teknik ini dipergunakan agar mendapat masukan yang lebih banyak dan berkembang agar tercapai tujuan penelitian. (b) Observasi, teknik ini dipergunakan untuk melengkapi, membuktikan data-data yang belum diungkap dan belum terungkap dalam wawancara. **Teknik Analisis Data Penelitian:** Dipergunakan deskriptif kualitatif-kuantitatif interpretatif, yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian, berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian dimaknai dan disimpulkan untuk dipakai sebagai bahan penyusunan saran dan tindakan (Hadari Nawawi dan Mimi Martini, 1996). Sedangkan secara kuantitatif untuk menguji hipotesis yang ada yaitu untuk mengetahui pengaruh dukungan sosial terhadap kondisi kecemasan dalam menghadapi pensiun (*post power syndrome*) usia dipergunakan teknik regresi dan untuk memudahkan perhitungan dipergunakan komputerisasi SPS Sutrisno Hadi (2004).

C. Kajian Teori

1. Dukungan Sosial

Dukungan sosial dapat menjadi aspek yang penting untuk mengadakan perubahan-perubahan yang diperlukan untuk menghadapi peran yang baru, seperti seseorang memasuki usia lanjut, selain itu bagi seseorang yang habis bekerja, kemudian mengalami pensiun juga diperlukan dukungan sosial untuk menghadapi peran baru tersebut. Dukungan sosial secara teoritik merupakan unsur yang penting dan mendukung bagi lansia terhadap kebahagiaan lansia. Setiap individu membutuhkan adanya kasih sayang dari orang yang berada di sekitarnya, tidak terkecuali dengan lansia yang menginginkan adanya perhatian dari orang-orang yang berada di sekitarnya, baik keluarganya maupun masyarakat. Hal ini dilakukan agar mereka tidak mengalami kegoncangan jiwa, seperti perasaan tidak dihargai dan kesepian (Fahmy dalam Yenti, dkk: 2006).

Murell, dkk (Evilinda, 1995), mengemukakan bahwa dukungan sosial merupakan sumber penting bagi pensiunan untuk melindungi diri dari situasi stress. Hal ini terjadi karena dukungan sosial dipandang berperan dalam memodifikasi efek stress dari peristiwa kehidupan yang menekan. Dukungan sosial berperan sebagai penyangga (*buffer*) terhadap stress. Masa pensiun dianggap sebagai suatu stressor kehidupan, karena pensiun merupakan salah satu peristiwa kehidupan yang menekan, yang menurut survey dari Holmes (Birren dan Sloane, 1980), masa pensiun menduduki peringkat ke sepuluh sebagai peristiwa kehidupan yang menimbulkan stress. Ketika individu memasuki masa pensiun maka dukungan sosial, khususnya dari keluarga yang memberikan dukungan emosional dan penerimaan, akan membantu dalam penyesuaian diri terhadap masa pensiun (Heyman dan Jeffers dalam Birren dan Sloane, 1980). Dari dukungan tersebut individu yang pensiun bisa mendapatkan perasaan masih berguna, berharga, dan merasa bahagia (Birren dan Sloane, 1980).

Dukungan sosial berarti informasi atau tindakan (nyata atau berupa potensi) yang membuat individu berkeyakinan bahwa mereka disayangi, diperhatikan, akan mendapat bantuan dari orang lain bila mereka membutuhkannya. Du-

kungan sosial diartikan sebagai sumber *coping* untuk menghadapi situasi yang dinilai *stressful* (Major, dkk: 1997), dan membuat orang yang stres mampu mengubah situasi, mengubah arti situasi atau mengubah reaksi emosinya terhadap situasi yang ada. Hobfoll (Vita, E.Y: 2004) mendefinisikan dukungan sosial sebagai interaksi atau hubungan sosial yang memberikan individu-individunya bantuan nyata atau yang membentuk keyakinan individu dalam suatu sistem sosial bahwa dirinya dicintai, disayangi dan ada kelekatan terhadap kelompok sosial atau pasangannya. Definisi ini menunjukkan ada dua aspek utama dalam dukungan sosial, yaitu: *received support* (dukungan yang diterima) dan *perceived support* (dukungan yang dirasakan). *Received support* artinya perilaku membantu yang muncul secara alamiah yang diberikan, sedangkan *perceived support* diartikan sebagai keyakinan bahwa perilaku membantu akan tersedia ketika diperlukan. Secara singkat dapat dikatakan *received support* adalah perilaku membantu yang benar-benar terjadi dan *perceived support* adalah perilaku membantu yang mungkin akan terjadi (Barrera dalam Vita, E.Y: 2004).

Setelah seseorang memasuki masa pensiun, maka dukungan sosial dari orang lain menjadi sangat berharga dan akan menambah ketenteraman hidupnya. Namun demikian, adanya dukungan sosial tersebut tidaklah berarti bahwa setelah memasuki masa pensiun seseorang tidak melakukan kegiatan, justru untuk menjaga kesehatan baik fisik maupun kejiwaan seseorang yang telah mengalami pensiun justru tetap harus melakukan aktivitas-aktivitas yang berguna bagi kehidupannya. Para pensiunan tidak boleh onggang-onggang, enak-enak, dan semua dilayani oleh orang lain. Hal itu justru akan mendatangkan berbagai penyakit dan penderitaan, sehingga dapat menyebabkan putus asa dan cepat meninggal dunia. Dalam rangka membantu agar pensiunan tetap dapat beraktivitas maka dibutuhkan dukungan sosial.

Dapat disimpulkan tentang dukungan sosial pada masa pensiun adalah suatu perasaan berarti dan dibutuhkan meskipun sudah tidak bekerja lagi. Dukungan dari keluarga memang sangat dibutuhkan untuk membantu akan pensiun tetap memiliki perasaan berguna bagi keluarga

sehingga tidak terlalu cemas menghadapi pensiun. Dukungan dari teman-teman juga penting untuk membantu penyesuaian diri bagi orang-orang yang akan mengalami pensiun. Teman-teman yang tetap memberi kesempatan untuk ambil bagian dalam aktivitas yang disenangi juga akan sangat membantu untuk mengantisipasi perasaan bosan dan sepi dimasa pensiun. Dukungan sosial dari teman-teman dan keluarga akan menumbuhkan perasaan aman dan keyakinan akan tersedianya bantuan sehingga siap mengadakan penyesuaian diri dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi pada masa pensiun.

Cohen dan Wills menemukan bukti bahwa dukungan sosial yang diberikan oleh orang-orang yang dekat dalam kehidupan individu, pada saat menghadapi situasi yang menekan sangat berpengaruh pada meningkatnya fungsi adaptif individu yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis individu (Sofia Retnowati, 2004). Caplan dan Cobb (Sofia Retnowati, 2004) dalam penelitiannya menemukan bahwa dukungan sosial yang berupa dukungan emosional, fisik, penyuluhan dapat melindungi individu dari pengaruh peristiwa kehidupan yang menekan, sehingga munculnya patologis dapat dihindari. Dukungan sosial merupakan kekuatan-kekuatan atau sumber daya dalam lingkungan sosial yang memberikan fasilitas bagi meningkatnya daya tahan hidup manusia. Hasil penelitian Schulz dan Decker (dalam Herristanti, 1996) menunjukkan bahwa individu yang mempunyai dukungan sosial yang tinggi maka individu dapat mengontrol penyesuaian diri sehingga mempunyai tingkat kesehatan mental yang tinggi.

Menurut definisi dukungan sosial yang dikemukakan oleh House (dalam Herristanti, 1996) mempunyai empat macam komponen, yaitu dukungan emosi, penilaian, dukungan instrumental, dan dukungan informasi. Dukungan Emosi, berisi pengungkapan rasa cinta, perhatian, simpati, keakraban, dan kebersamaan. Dukungan emosi dapat ditunjukkan dengan mendengarkan secara hati-hati apa yang dikatakan individu dan mencoba untuk mengerti apa yang dirasakannya pertama dan paling penting adalah memberi dukungan kepada individu dan menciptakan lingkungan yang aman untuknya.

Aman di sini dalam arti individu bebas mengekspresikan perasaannya. Hal tersebut umum dilakukan dalam proses konseling dan terapi. Empati dapat pula menjadi dukungan emosi, selama berfungsi mendukung individu dan pengalamannya, perilakunya, dan perasaannya, simpati dan empati menjadi syarat utama bagi penolong dalam usahanya membantu meningkatkan kesehatan mental orang yang ditolong.

Dukungan Penilaian: diberikan dalam bentuk umpan balik sehingga individu merasa dirinya berharga. Caranya dengan memberi penilaian yang mendukung seseorang baik dalam bekerja maupun berperanan sosial yang meliputi umpan balik, perbandingan sosial, dan afirmasi atau penguatan. Penilaian ini lebih penting untuk memelihara kesehatan daripada dukungan yang bersifat lebih praktis. Dukungan Instrumental, meliputi tindakan nyata, pemberian jasa atau barang-barang nyata kepada seseorang agar ia dapat memenuhi tanggung jawab sehari-harinya (House dalam Thoits: 1986). Dukungan ini dapat mengurangi stres dengan langsung memecahkan masalah atau menambah waktu untuk santai dan rekreasi. Contoh dukungan instrumental adalah meminjamkan uang atau menyorongkan bantal ketika orang lain sakit. Dukungan ini akan lebih efektif jika dipadukan dengan pemahaman empatik atau dukungan penghargaan.

Dukungan Informasi, berupa komunikasi tentang pendapat atau fakta yang relevan seperti nasehat, umpan balik pribadi, petunjuk, atau informasi yang memudahkan seseorang menjalani kehidupannya. Pemberian informasi dapat dilakukan oleh orang-orang dekat sehingga dapat membantu memecahkan masalah melalui pengubahan situasi dan perasaan yang berhubungan dengannya, atau dengan mengusulkan alternatif baru informasi adalah jenis bantuan yang bernilai, masalah utama untuk penolong adalah mengetahui kapan memberikan informasi atau nasehat dan kapan tidak memberikan. Jadi pemberian waktu yang tepat akan membuat dukungan ini berfungsi lebih efektif. Dukungan informasi ini akan lebih efektif apabila dipadukan dengan dukungan emosi. Melalui dukungan sosial dari *house*, maka penelitian yang dilaksanakan ini mengacu pada hal tersebut yaitu ada empat komponen

dukungan sosial yaitu dukungan informasi, dukungan emosi, dukungan instrumental, dan dukungan penilaian. Penelitian ini akan melihat pengaruh dukungan sosial terhadap kondisi kecemasan dalam menghadapi pensiun (*post power syndrome*).

2. Kecemasan Lanjut Usia Menghadapi Pensiun

Pada individu yang sebentar lagi memasuki masa pensiun, mereka pun dituntut untuk mengadakan penyesuaian-penyesuaian karena kondisi yang akan dihadapinya setelah pensiun berbeda dengan sewaktu masih bekerja. Penyesuaian ini tidaklah mudah dijalankan. Bagi sebagian orang, pensiun mungkin dianggap sebagai suatu titik puncak dari tahun-tahun harapan dan perencanaan kerja. Tetapi bagi sebagian besar orang, pensiun merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki, dimana mereka tidak mempersiapkan untuk itu. Seperti dikatakan Parker (Karsono, 1989), bagi orang yang terlibat secara emosional dengan pekerjaannya, mempunyai ikatan dengan prestasi, identitas dan kontak sosial dengan pekerjaan, pensiun dirasakan sebagai suatu perceraian dari pasangan yang dicintainya. Keadaan tersebut akan dirasakan sebagai ancaman terhadap hari depannya, dan selanjutnya mereka tenggelam dalam kecemasan-kecemasan. Adapun hal-hal yang mempengaruhi timbulnya kecemasan dalam menghadapi masa pensiun ini, antara lain adalah: 1) akan hilangnya fasilitas-fasilitas yang diperoleh sewaktu masih bekerja, seperti: menurunnya penghasilan, hilangnya tunjangan-tunjangan, kesempatan-kesempatan dan lain-lain, 2) akan hilangnya status jabatan beserta status sosial yang menyertainya, 3) masih mempunyai tanggungan keluarga, 4) datangnya masa tua atau perubahan-perubahan fisik di usia tua (Hadi, 2009).

Kecemasan dalam diri seseorang dapat membentuk reaksi-reaksi, baik psikologik maupun fisiologik dimana hal itu dapat mempengaruhi tingkahlakunya. Pada orang yang menghadapi pensiun, reaksi kecemasannya beraneka ragam bentuknya, yang bila diamati lebih lanjut berlawanan dengan terbentuknya semangat kerja yang baik. Seperti misalnya: rasa mudah lelah, merasa tidak aman, kekurangan motivasi

kerja, rasa kurang percaya diri (Mappiare, 2009) akan berpengaruh terhadap semangat kerjanya, karena semangat kerja yang tinggi membutuhkan perasaan tenteram, penuh kegairahan dan keinginan mempertinggi hasil kerja. Di sisi lain, orang yang mengalami kecemasan akan menunjukkan perilaku menghindari kontak sosial, rasa jemu terhadap kegiatan yang biasa dilakukan, suka berkeluh kesah, sukar menerima ide-ide baru dan merasa dan merasa tersaing oleh para tenaga muda.

Lowenthal (dalam Fajar Astuti Wulandari: 2001) berpendapat bahwa individu yang selalu terobsesi oleh pekerjaan yang memandang pekerjaan sebagai segala-galanya akan mendapati pensiun sebagai sesuatu yang traumatik. Persiapan diri untuk menghadapi pensiun merupakan hal yang sangat penting sebagai tindakan preventif dan efektif untuk menghadapi kenyataan datangnya masa pensiun dengan segala akibatnya. Orang yang sudah melakukan persiapan akan menunjukkan perilaku yang normal sehingga kecil sekali kemungkinannya mengalami *Post Power Syndrom* atau sindrom kehilangan kekuasaan yang mengakibatkan gejala-gejala ketidaknormalan perilaku dalam bentuk ketidaktenteraman, ketakutan serta kekhawatiran mengenai nasib mereka setelah penyelesaian masa kerja dan dipensiun dari pekerjaannya. Sebaliknya bagi orang yang belum mempersiapkan dirinya untuk menerima datangnya masa pensiun baik secara fisik, ekonomi maupun psikologis, ada kecenderungan mengalami *Post Power Syndrom* besar sekali.

Seseorang agar dapat mengantisipasi atau mengurangi kecemasan, dalam menghadapi pensiun dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap hal-hal yang akan dihadapinya, salah satunya adalah melakukan persiapan diri secara ekonomi, fisik, dan psikologis. Orang yang telah melakukan persiapan diri sejak dini sebelum menghadapi pensiun akan dapat mengantisipasi atau mengatasi masalah hidupnya, dalam hal ini masalah-masalah hidup sesudah pensiun dan dalam menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang akan terjadi. Greene (dalam Elizabeth Yuli Astuti: 1992) mengemukakan bahwa karyawan yang telah mempunyai persiapan sebelum pensiun, penyesuaian dirinya lebih baik daripada

yang tidak melakukan persiapan.

Seseorang memasuki pensiun atau memasuki usia lanjut ada beberapa persiapan diri baik secara fisik maupun psikik yang perlu dilakukan agar dapat mencegah ketegangan dan kecemasan yang muncul yaitu antara lain: Mawas diri, menilai dan menaksir mengenai kekuatan, kecakapan, kejelekan serta cacat dirinya, karena hal ini akan berguna bagi dirinya sendiri agar dapat menunjukkan dirinya tepat dirinya harus berada. Dengan demikian, akan terjadi keseimbangan dalam berbagai bentuk dan dalam berbagai situasi yang dihadapinya. Persiapan materiil/finansial, adanya ketakutan dan kekhawatiran disebabkan ketidakyakinan akan hari esok. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan pendapatan yang drastis, yang belum dipersiapkan alternatif penggantinya. Kesiapan mental, terutama bagi pejabat yang akan memasuki pensiun, karena semasa dinas banyak orang yang membutuhkan serta menghormatinya, tetapi apabila mereka sudah pensiun kondisi tersebut hilang semua. Tidak jarang dari mereka yang kemudian terkejut dan *shock*, untuk itu perlu bagi mereka baik jauh hari sebelum pensiun maupun menjelang pensiun dapat mencoba mengatur dan mengubah sikap dan pola berpikir pada situasi, sikap dan cara hidup orang pensiun.

Penyaluran dan pengembangan hobi yang menghasilkan: Hobi adalah aktivitas yang disenangi yang selalu dilakukan seseorang setiap ada waktu senggang, seperti menanam anggrek, membuat bonsai, bertanam buah-buahan, melukis, membuat kerajinan tangan, dan sebagainya. Suatu hobi biasanya menghabiskan uang yang tidak sedikit, tetapi bagaimana dengan hobi tersebut dapat menghasilkan uang, sehingga akan mempunyai manfaat ganda pertama menambah kesenangan hati pada para pensiun/ lanjut usia sehingga dapat terhibur dari kesepian sehingga menimbulkan kegembiraan yang sehat. Kedua dengan hobi yang menghasilkan uang ini akan banyak membantu dalam segi materiil dan ini merupakan tambahan pendapatan yang tidak sedikit bahkan dapat menjadi pendapatan utama.

Pembinaan karier baru, di dalam psikologi perkembangan setiap manusia mengalami perkembangan dan kemasakan fisik lebih dulu

dari kemasakan psikiknya. Konsekuensinya mengalami kemunduran fisik lebih cepat dari psikisnya, sehingga bila pada usia pensiun bisanya kondisi psikisnya masih baik dan dapat dipakai untuk bekerja lagi, misalnya sebagai dosen, konsultan, tugas-tugas administrasi dan manajemen dan sangat disayangkan bila tidak dimanfaatkan. Berpikir positif, Berpikir positif di sini adalah berpikir ke arah hal-hal yang bersifat baik, sehat yang membantu ke arah kebahagiaan hidup. Dengan berpikir secara positif ini dengan sendirinya akan mengurangi berbagai macam tekanan perasaan.

D. Hasil Penelitian: Pengaruh Dukungan Sosial terhadap Kondisi Kecemasan dalam Menghadapi Pensiun (*Post Power Syndrome*)

Kesejahteraan sosial terutama bagi lanjut usia adalah tanggung jawab kita semua, baik secara individu maupun organisasi atau kelembagaan, salah satunya dukungan sosial bagi lanjut usia. Dukungan sosial berperan dalam membantu meredakan stress (Johnson dalam Herristanti, 1996), karena cara yang paling efektif dalam meredakan stress melalui perhatian dan simpatik. Pendapat tersebut didukung oleh House bahwa dalam memberikan dukungan sosial bagi seseorang yang mendapat dukungan sosial akan lebih mempunyai konsep diri yang positif, tingkat kecemasan menjadi rendah, dan adanya kepercayaan diri dalam mengendalikan lingkungan (Sarason, 1983).

Pemberian dukungan sosial pada seseorang menurut Bowlby dapat meningkatkan daya tahan individu dalam situasi menekan dan dapat meningkatkan kemampuan individu dalam mengatasi frustrasi sehingga kemungkinan munculnya gangguan psikopatologi dapat dikurangi (Sofia Retnowati, 2004). Dalam bab ini akan dilihat pengaruh dukungan sosial pensiunan lanjut usia terhadap kondisi kecemasan dalam menghadapi pensiun (*post power syndrome*).

Penelitian ini akan melihat pengaruh dukungan sosial pensiunan lanjut usia terhadap kondisi kecemasan dalam menghadapi pensiun (*post power syndrome*). Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dukungan sosial pensiunan lanjut usia terhadap kondisi kecemasan dalam menghadapi pensiun (*post power syndrome*),

maka dilakukan penghitungan statistik analisis regresi dan untuk mempermudah perhitungannya dipergunakan komputerisasi dengan program statistik (SPS) Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningasih UGM Yogyakarta dengan hasil sebagai berikut yang dapat dilihat dalam Tabel 1.

Pada rangkuman analisa regresi menunjukkan bahwa $F=16,072$ dengan $p=0,000$, mempunyai arti $p<0,01$ yaitu sangat signifikan. Kesimpulannya ada hubungan secara regresi antara variabel (x) yaitu dukungan sosial dan variabel tergantung (y) yaitu kondisi kecemasan dalam menghadapi pensiun (*post power syndrome*). Analisis tersebut juga dapat diartikan bahwa ada pengaruh dukungan sosial (x) terhadap kondisi kecemasan dalam menghadapi pensiun (*post power syndrome*) atau variabel y. Seberapa besar pengaruh sumbangan antara variabel x (dukungan sosial) terhadap variabel y (kondisi

kecemasan dalam menghadapi pensiun (*post power syndrome*) dapat dilihat dalam tabel 2 yaitu besarnya sumbangan relatif dan efektif.

Pada tabel di atas dapat dimaknai besarnya sumbangan efektif dan sumbangan relatif. Untuk lebih jelasnya maka besarnya sumbangan efektif dan sumbangan relatif pada penelitian ini sebagai berikut

1. Sumbangan efektif

Dalam penelitian ini yang dimaksud sumbangan efektif adalah variabel dukungan sosial (X) menyumbangkan variabel kondisi kecemasan lanjut usia dalam menghadapi pensiun atau *post power syndrome* (y) sebesar 72 persen. Artinya bahwa masih ada sebesar 28 persen disebabkan oleh faktor-faktor lain, artinya bahwa kondisi kecemasan lanjut usia dalam menghadapi pensiun/ *post power syndrome* dipengaruhi juga oleh variabel-variabel lain

Tabel 1.
Rangkuman Analisis Regresi

Sumber variasi	JK	db	RK	F	R ²	p
Regresi penuh	4.428.885	4	1.107.221	16.072	0.720	0.000
Variabel X4	3.246.243	1	3.246.243	47.120	0.528	0.000
Variabel X2	773.464	1	773.464	11.227	0.126	0.003
Variabel X3	370.146	1	370.146	5.373	0.060	0.027
Variabel X1	39.032	1	39.032	0.567	0.006	0.535
Residu Penuh	1.722.311	25	68.892	-	-	-
Total	6.151.196	29	-	-	-	-

Tabel 2.
Perbandingan Bobot Prediktor (X terhadap Y) dalam Sumbangan Efektif dan Relatif

Variabel	Korelasi Lugas		Korelasi Parsial		Sumbangan Determinasi (SD)	
	r xy	P	rpar-xy	P	SD Relatif persen	SD Efektif persen
X						
1	0.683	0.000	0.149	0.232	0.891	0.635
2	0.680	0.000	0.438	0.000	17.464	12.574
3	0.583	0.001	-0.310	0.001	8.358	6.017
4	0.726	0.000	0.544	0.000	73.297	52.774
Total	-	-	-	-	100.00	72.000

Keterangan:

Variabel X1 : dukungan emosi

Variabel X2 : dukungan informasi

Variabel X3 : dukungan instrumental

Variabel X4 : dukungan penilaian

Variabel y : kondisi kecemasan (*post power syndrome*) menghadapi pensiun.

selain dukungan sosial.

Adapun variabel lain tersebut menurut Greene adalah persiapan diri untuk menghadapi pensiun merupakan hal yang sangat penting sebagai tindakan preventif dan efektif mengalami *post power syndrome* (dalam Elizabeth Yuli Astuti, 1992). Selain variabel di atas menurut Djamiludin Ancok (1992) bahwa alternatif untuk mencegah terjadinya *post power syndrome* antara lain sikap optimis, persiapan diri menghadapi pensiun, menerima diri telah menjadi tua, meningkatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mawas diri terhadap berbagai masalah psikologis yang dihadapinya.

Sedangkan pada penelitian ini, aspek kondisi kecemasan dalam menghadapi pensiun (*post power syndrome*) akan diungkap dalam aspek kehilangan status sosial seperti: perasaan dihormati/dihargai oleh keluarga. Data tersebut di lapangan dari 30 responden menunjukkan data tentang perasaan responden dihormati/dihargai oleh keluarga setelah pensiun. Dari 30 responden yang mengatakan selalu merasakan hal tersebut ada sebanyak 11 orang (36,67 persen), dan responden yang mengatakan kadang-kadang merasakan hal tersebut di atas ada sebanyak 10 orang (33,33 persen), sedangkan yang mengatakan tidak pernah merasakan hal tersebut di atas ada sebanyak 9 orang (30,00 persen).

Melihat data yang ditemukan di lapangan tersebut, maka dapat dimaknai bahwa perasaan responden terjadi bila responden dapat menyesuaikan terhadap peran barunya (Greene dalam Elizabeth Yuli Astuti, 1992). Demikian juga responden yang tidak dapat menyesuaikan terhadap peran barunya (memasuki pensiun), maka responden akan merasa cemas, bingung, tegang, berdebar-debar dan perasaan-perasaan lain yang tidak menentu (Bucklew dalam Karsono, 1989). Dalam penelitian ini tampak pada responden yang mengatakan kadang-kadang sampai dengan tidak pernah dihormati/dihargai oleh keluarganya setelah pensiun.

Kehilangan status sosial juga dapat dilihat dalam perasaan dihormati/dihargai oleh rekan kerja setelah pensiun. Dari 30 responden yang mengatakan selalu merasakan hal tersebut di atas ada sebanyak 17 orang (56,66 persen), dan yang mengatakan kadang-kadang mera-

sakan hal tersebut ada sebanyak 8 orang (26,67 persen), sedangkan yang tidak pernah merasakan hal tersebut ada sebanyak 5 orang (16,67 persen).

Kondisi tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Greene (dalam Elizabeth Yuli Astuti, 1992) beliau menemukan bahwa karyawan yang telah mempunyai persiapan sebelum pensiun, penyesuaianannya lebih baik daripada yang tidak melakukan persiapan. Sedangkan responden yang mengatakan kadang-kadang merasakan dihormati/dihargai oleh rekan/teman kerja setelah pensiun sebanyak 26,67 persen, bila dikaitkan dengan temuan dari Greene di atas, maka dapat dimaknai bahwa responden yang mengatakan ini belum sepenuhnya mempersiapkan dalam menghadapi pensiun.

Responden yang mengatakan tidak pernah merasakan dihormati/dihargai rekan/teman kerja setelah pensiun, dapat dimaknai bahwa pensiun bagi sebagian besar orang merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki, dimana mereka tidak siap untuk itu. Seperti yang dikatakan Parker (Karsono, 1989), bagi orang yang terlibat secara emosional dengan pekerjaannya, prestasi dan identitas maka pensiun merupakan suatu perceraian dari pasangan yang dicintai. Keadaan tersebut akan dirasakan sebagai ancaman terhadap hari depannya dan selanjutnya tenggelam dalam kecemasan-kecemasan. Pada data di atas kondisi ini tampak pada responden yang merasa tidak pernah dihormati/dihargai rekan/teman kerjanya setelah pensiun.

Kecemasan dalam menghadapi pensiun atau *post power syndrome* juga diungkap melalui aspek menurunnya/kehilangan penghasilan seperti kondisi ekonomi keluarga menurun drastis, kebutuhan hidup tidak tercukupi, banyak pertimbangan dalam membeli sesuatu, dan mencukupi kebutuhan untuk anak setelah pensiun. Aspek tersebut dapat dilihat melalui data tentang kondisi ekonomi keluarga yang menurun secara drastis. Dari 30 responden yang mengatakan menurun tetapi tidak berpengaruh kondisi ekonomi keluarga ada sebanyak 11 orang (36,67 persen), dan responden yang mengatakan kadang-kadang menurun dan mempengaruhi kondisi ekonomi keluarga ada sebanyak 6 orang (20,00 persen), sedangkan

yang mengatakan menurun dan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi keluarga ada sebanyak 13 orang (43,33 persen).

Melihat data yang ditemukan di lapangan tersebut, dapat dimaknai bahwa ternyata sebagian besar responden (63,33 persen) mengatakan kadang-kadang sampai dengan selalu kondisi ekonominya menurun drastis sehingga mempengaruhi keluarganya. Kondisi tersebut menurut Havighurst (Irene Trisna Ayu, 2009) bahwa salah satu tugas perkembangan di masa usia lanjut adalah penyesuaian terhadap berkurangnya penghasilan. Penyesuaian ini memang tidaklah mudah dijalankan bagi sebagian orang pensiun, karena pensiun merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki, belum siap secara ekonomi maupun psikologik dalam menghadapi pensiun, sering juga menganggap pensiun sebagai pengalaman yang tidak menyenangkan. Sedangkan sebagian responden (36,67 persen) mengetahui terjadinya penurunan ekonomi, tetapi tidak mempengaruhi kondisi ekonomi keluarga. Data di atas dapat diartikan bahwa responden telah siap dalam menghadapi pensiun, sehingga telah mempersiapkan rencana dalam mengantisipasi seperti menurunnya kondisi ekonomi melalui usaha-usaha sampingan misalnya.

Aspek kehilangan karier dapat diungkap melalui perasaan tegang/ cemas bila akan melakukan sesuatu, khawatir/ketakutan terjadi kegagalan bila melakukan sesuatu pekerjaan, perasaan malu bila berpapasan dengan tetangga/rekan kerja setelah pensiun, perasaan mudah bingung bila ditanya tetangga tidak bekerja, dan merasakan tidak pernah nyenyak dalam tidur setelah pensiun.

Data yang ditemukan di lapangan tentang perasaan malu pada responden bila berpapasan/berurusan dengan tetangga/rekan kerja setelah pensiun, dari 30 responden yang mengatakan selalu ada perasaan malu ada sebanyak 10 orang (33,33 persen), dan yang mengatakan kadang-kadang ada perasaan malu ada sebanyak 12 orang (40,00 persen), sedangkan yang mengatakan tidak ada perasaan malu ada sebanyak 8 orang (26,67 persen).

Data yang ditemukan tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang dalam memasuki/menghadapi masa pensiun atau masa

lanjut usia sudah dipersiapkan lebih dulu dalam menghadapinya, maka responden akan dapat melakukan tugas-tugas/peran barunya dengan baik (Havighurst, 1953). Sedangkan responden yang tidak mempersiapkannya maka responden tidak dapat melakukan tugas-tugas/ peran barunya dengan baik dan akhirnya tidak bahagia. Menurut Setyonegoro (1977) kondisi ini dapat terjadi mengingat keadaan pensiun akan menimbulkan perasaan kehilangan kedudukan dan penghasilan, kekurangan/menurunnya rasa hormat terhadap dirinya, kehilangan tempat dan kenikmatan sosial.

Sedangkan menurut Morgan, dkk (Mohammad A.A: 2001) menjelaskan pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang akan menentukan status sosial dari keluarga dan tempat tinggal. Meskipun demikian, tidak selamanya orang dapat bekerja secara terus menerus sepanjang hidupnya. Seseorang yang sudah mencapai masa pensiun maka seseorang tidak bekerja lagi. Kondisi ini bila tidak ada kesiapan-kesiapan maka seseorang akan malu terhadap kondisinya yang tidak seperti ketika sudah bekerja.

Aspek lain yang digali yaitu kehilangan berinteraksi dengan teman kerja/rekan setelah pensiun seperti perasaan takut bila teman/rekan kerja tidak mau berhubungan lagi, Aspek tersebut dapat dilihat dalam data tentang perasaan takut bila teman/rekan kerja tidak mau berhubungan lagi setelah pensiun. Aspek. Dari 30 responden menunjukkan bahwa yang mengatakan selalu ada perasaan takut ada sebanyak 4 orang (13,33 persen), sedangkan yang mengatakan kadang-kadang ada perasaan takut ada sebanyak 7 orang (23,33 persen), dan responden yang mengatakan tidak ada perasaan takut ada sebanyak 19 orang (63,34 persen).

Melihat data di atas dapat diartikan bahwa dalam penelitian Setiabudi (Rasimin, 1989) ketidaksiapan seseorang menghadapi pensiun di Indonesia lebih banyak (80,00 persen) daripada seseorang yang siap menghadapi pensiun (20,00 persen). Kondisi ini berdampak bahwa seseorang yang membangun harga dirinya melalui kekuasaan dan status sosial selama masa kerjanya akan menghadapi krisis identitas yang cukup berat menjelang masa pensiun. Fasilitas dan penghormatan yang mereka per-

oleh tidak akan mereka dapatkan lagi, hal ini menjadikan adanya perasaan takut bila teman/rekan kerja tidak lagi berhubungan dengannya. Apabila hal ini dibiarkan maka akan terjadi *post power syndrome*.

Kehilangan percaya diri dan perasaan tidak berguna bagi keluarganya setelah pensiun. Data yang ditemukan di lapangan tentang perasaan responden tidak berguna setelah pensiun bagi keluarganya dapat dilihat dari 30 responden yang mengatakan sering ada perasaan tersebut di atas ada sebanyak 5 orang (16,67 persen), dan yang mengatakan kadang-kadang ada perasaan tersebut ada sebanyak 4 orang (13,33 persen), sedangkan yang mengatakan tidak pernah ada perasaan tersebut ada sebanyak 21 orang (70,00 persen).

Data yang ditemukan tersebut dapat disimpulkan bahwa responden yang terobsesi oleh pekerjaan yang memandang pekerjaan sebagai segala-galanya akan menghadapi masa pensiun sebagai suatu yang traumatik (Lowenthal dalam Fajar Astuti Wulandari, 2001). Persiapan diri untuk menghadapi pensiun merupakan hal yang sangat penting sebagai tindakan preventif dan efektif untuk menghadapi kenyataan datangnya masa pensiun dengan segala akibatnya. Apabila seseorang telah melakukan persiapan-persiapan akan menunjukkan perilaku normal sehingga kemungkinannya kecil akan mengalami *post power syndrome* atau sindrom kehilangan kekuasaan. Responden merasa tidak berguna bagi keluarganya, khawatir, tidak tenteram dan ketakutan dalam menghadapi masa depan/masa pensiun.

2. Sumbangan Relatif

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sumbangan relatif adalah sumbangan variabel bebas (variabel dukungan sosial) yang terdiri dari variabel x1 (dukungan emosi), variabel x2 (dukungan informasi), variabel x3 (dukungan instrumental), dan variabel x4 (dukungan penilaian) terhadap variabel tergantung atau y (kondisi kecemasan lanjut usia (*post power syndrome*) menghadapi pensiun).

Besar sumbangan relatif dapat dilihat dalam tabel 2 di atas, dalam tabel di atas menunjukkan bahwa sumbangan relatif variabel x1 (dukungan emosi) terhadap variabel y (variabel kecemasan

lanjut usia menghadapi pensiun/ *post power syndrome*) sebesar 8,881 persen. Sumbangan tersebut di lapangan dapat dilihat melalui kepemilikan pasangan hidup dan keluarga yang setiap saat mau mendengarkan keluhannya. Di lapangan data tersebut dapat diungkap dalam kepemilikan pasangan hidup yang setiap saat mau mendengar keluhan. Dari 30 responden yang mengatakan selalu mendengarkan ada sebanyak 11 orang (36,67 persen) dan responden yang mengatakan kadang-kadang mendengarkan keluhan ada sebanyak 10 orang (33,33 persen). Sedangkan yang mengatakan tidak pernah mendengarkan keluhan ada sebanyak 9 orang (30,00 persen).

Melihat data yang ditemukan di lapangan tersebut, maka dapat dimaknai bahwa responden yang merasa pasangannya kadang-kadang sampai dengan tidak pernah mendengarkan keluhannya. Kondisi tersebut dapat terjadi apabila responden tidak dapat menyesuaikan diri dalam memasuki masa pensiun. Menurut Havighurst (1953) seseorang yang memasuki masa pensiun harus bisa belajar menyesuaikan diri dalam menghadapi tugas-tugas baru seperti penyesuaian terhadap kekuatan fisik dan kesehatan yang menurun, penyesuaian terhadap kematian pasangan, penyesuaian terhadap hubungan dengan teman-teman sebaya, penyesuaian terhadap kewajiban sosial/warga negara dan penyesuaian terhadap tempat tinggal yang memuaskan.

Teori di atas bila dikaitkan dengan data yang ditemukan di lapangan sangat signifikan, bahwa responden yang tidak dapat menyesuaikan diri dalam menghadapi tugas-tugas baru seperti memasuki masa lanjut usia dan masa pensiun maka responden akan mengalami kecemasan-kecemasan/tekanan/perasaan yang tidak menyenangkan.

Aspek lain yaitu kepemilikan keluarga yang memperhatikan, walaupun sudah tidak bekerja lagi dari 30 responden menunjukkan bahwa yang mengatakan selalu memiliki ada sebanyak 9 orang (30,00 persen), sedangkan responden yang mengatakan kadang-kadang memperhatikan ada sebanyak 11 orang (36,67 persen), dan responden yang mengatakan tidak pernah memperhatikan ada sebanyak 10 orang (33,33 persen).

Melihat data di atas dapat diartikan bahwa ada sebanyak 70,00 persen responden merasa keluarga kadang-kadang sampai dengan tidak memperhatikan setiap saat, kondisi ini dapat dimengerti mengingat seorang yang memasuki pensiun perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat pensiun. Penyesuaian yang baik dalam menghadapi masa pensiun tidak lepas dari dukungan sosial terutama dari orang-orang yang penting seperti keluarga. Menurut Brill dan Hayes bahwa individu yang akan pensiun dan keluarganya harus mengantisipasi perubahan-perubahan yang akan muncul dalam hidupnya (Fajar Astuti Wulandari, 2001). Apabila dukungan dari keluarga seperti dalam data di atas yaitu kurangnya perhatian kepada responden dapat mempengaruhi semangat hidup bagi responden yang akhirnya menyebabkan munculnya kecemasan.

Sumbangan relatif variabel x2 (dukungan informasi terhadap variabel y (kondisi kecemasan lanjut usia menghadapi pensiun/ *post power syndrome*) sebesar 17,464 persen. Sumbangan tersebut dapat dilihat di lapangan melalui pemberian solusi dari keluarga maupun rekan/teman kerja, pemberian penghargaan dari keluarga dan rekan/teman kerja, pemberian saran/nasehat dari pasangan hidup, keluarga dan rekan/teman kerja. Adapun dari data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Data yang ditemukan di lapangan tentang pemberian solusi dari rekan kerja bila ada masalah/keluhan/kesulitan walaupun sudah pensiun dari 30 responden yang mengatakan selalu memberi solusi ada sebanyak 20 orang (66,67 persen) dan yang mengatakan kadang-kadang memberi solusi ada sebanyak 6 orang (20,00 persen), sedangkan yang tidak pernah memberi solusi ada sebanyak 4 orang (13,33 persen).

Data yang ditemukan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada masa pensiun permasalahan yang terjadi dalam keluarga menjadi lebih mempengaruhi para lansia jika dibandingkan saat sebelum mereka pensiun. Hal tersebut karena keluarga memiliki pengaruh yang besar bagi para lansia yang pensiun. Menurut Schaie dan Sherry (dalam Irene Trisna Ayu, 2009) pada usia lansia/pensiun akan membutuhkan dukungan yang lebih besar dari keluarga dan anak-anak

mereka termasuk responden dalam melakukan tugas-tugas baru (menghadapi pensiun) seperti bentuk-bentuk solusi bagi responden agar dapat melakukan kegiatan sehari-hari.

Aspek pemberian solusi kepada responden bila ada masalah/keluhan/ kesulitan walaupun sudah pensiun dapat dilihat dari 30 responden menunjukkan bahwa yang mengatakan selalu memberikan solusi kepada responden ada sebanyak 18 orang (60,00 persen), sedangkan responden yang mengatakan kadang-kadang memberi solusi ada sebanyak 4 orang (13,33 persen), dan responden yang mengatakan tidak pernah memberi solusi ada sebanyak 8 orang (26,67 persen).

Melihat data di atas dapat diartikan bahwa ada sebanyak 26,67 persen mengatakan rekan kerjanya tidak pernah memberi solusi bila ada kesulitan setelah pensiun. Kondisi ini tentunya dapat menyebabkan timbulnya kecemasan-kecemasan bagi responden. Menurut Hadi (1985), kecemasan-kecemasan tersebut antara lain disebabkan bahwa pada masa pensiun seseorang akan menghadapi antara lain hilangnya fasilitas yang diperoleh pada masa kerja, hilangnya status jabatan, status sosial dan lain-lainnya. Data di atas sangat berkaitan dengan hilangnya fasilitas yang diperoleh pada masa kerja, status jabatan dan status sosial dengan responden merasa rekan kerja tidak pernah memberikan solusi bila ada kesulitan.

Untuk variabel x3 (dukungan instrumental) terhadap variabel y (kondisi kecemasan lanjut usia menghadapi pensiun/ *post power syndrome*) sebesar 8,358 persen. Sumbangan tersebut dapat ditunjukkan di lapangan sebagai berikut, ketercukupan kebutuhan dalam bentuk sandang dan makan dari keluarga, pemberian uang dari keluarga untuk kebutuhan sehari-hari, bantuan dalam bentuk apapun dari keluarga/rekan kerja/teman bila ada kesulitan dan pemberian bingkisan dari rekan/teman kerja walaupun sudah pensiun. Dari data di atas salah satunya dapat dijelaskan tentang kebutuhan responden (sandang dan pangan) dicukupi keluarganya. Dari 30 responden yang mengatakan selalu dicukupi keluarganya ada sebanyak 11 orang (36,67 persen), dan yang mengatakan kadang-kadang dicukupi keluarga ada sebanyak 10 orang (33,33 persen), sedangkan yang tidak

pernah dicukupi keluarganya ada sebanyak 9 orang (30,00 persen). Hal ini dapat dimaknai dukungan instrumental dalam hal ini dalam bentuk sandang, makan yang dicukupi oleh keluarganya akan sangat berpengaruh terhadap optimis dalam menghadapi/menjalani masa lanjut usia dengan bahagia sehingga responden dapat tercegah dari *post power syndrome* atau kecemasan (Djamaludin Ancok: 1992).

Pada variabel x4 (dukungan penilaian) terhadap variabel y (kondisi kecemasan lanjut usia menghadapi pensiun/ *post power syndrome*) sebesar 73,297 persen. Sumbangan tersebut di lapangan dapat ditunjukkan dalam nasehatnya masih dibutuhkan keluarga, rekan/teman kerja, perasaan tidak ada dukungan dari keluarga, keluarga sulit menerima keadaannya, dan keluarga memandangnya orang tidak berguna setelah pensiun. Salah satu data dari tersebut di atas dapat dijelaskan antara lain tentang: keluarga masih membutuhkan nasehatnya walaupun sudah pensiun dapat dilihat dari 30 responden menunjukkan bahwa yang mengatakan selalu membutuhkan ada sebanyak 25 orang (63,34 persen), sedangkan responden yang mengatakan kadang-kadang membutuhkan ada sebanyak 4 orang (13,33 persen), dan responden yang mengatakan tidak pernah membutuhkan ada sebanyak 1 orang (3,33 persen).

Melihat data di atas dapat diartikan bahwa dukungan penilaian bagi responden sangat penting terutama dalam bentuk pemberian nasehat terutama untuk keluarga dari responden, artinya bahwa keluarga masih sangat mengharapkan nasehat/saran dari responden walaupun responden pensiun. Penghargaan ini dalam diri responden akan berkembang menjadi timbulnya kepercayaan diri yang mantap, karena responden merasa dihormati, dihargai dan bermanfaat bagi keluarganya (Djamaludin Ancok, 1992).

Melihat sumbangan baik efektif maupun relatif di atas, maka dukungan sosial merupakan unsur yang penting dan mendukung bagi seseorang agar mengalami pensiun dengan tenang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial baik yang terdiri dari dukungan informasi, emosi, instrumental dan dukungan penilaian memiliki sumbangan yang cukup besar terhadap kondisi kecemasan pensiunan lanjut

usia dalam menghadapi pensiun (*post power syndrome*).

E. Penutup

Melihat analisis di atas bahwa dalam penelitian ini ditemukan bahwa ada pengaruh dukungan sosial pensiunan lanjut usia terhadap kondisi kecemasan. Dalam menghadapi pensiun (*post power syndrome*), direkomendasikan kepada Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia agar dalam menentukan kebijakan, maka diperlukan program-program kegiatan yang melibatkan lanjut usia, sehingga lanjut usia merasa dihargai, berguna, dihormati dan diperhatikan. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan mencegah terjadinya *post power syndrome* pada lanjut usia dalam menghadapi pensiun dan memberi kesempatan pada lanjut usia untuk berperan/berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan kemampuannya sehingga pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan lanjut usia.

Keluarga dan masyarakat hendaknya selalu memperhatikan, menghormati, menghargai dan melibatkan lanjut usia baik dalam hal pemikiran, nasehat, dan suritauladan, sehingga lanjut usia tetap merasa berguna walaupun sudah pensiun.

Bagi pensiunan lanjut usia, penyesuaian diri lanjut usia yang baik terhadap situasi yang baru, termasuk dalam menghadapi pensiun/memasuki usia lanjut tidak dapat lepas dari masalah persiapan. Oleh karena itu, persiapan-persiapan dini sebelum menghadapi pensiun merupakan tindakan yang preventif untuk mencegah ketegangan-ketegangan dan kecemasan-kecemasan. Kecemasan yang tinggi pada seseorang akan mempengaruhi perilaku, antara lain mudah lelah, rasa percaya diri yang kurang, mudah bosan, tidak aktif, motivai untuk bekerja menurun dan sebagainya. Kecemasan terjadi pada masa ini terutama disebabkan oleh perasaan cemas, yaitu kehilangan atau berkurangnya fasilitas-fasilitas yang diperoleh selama bekerja, ditambah lagi perasaan cemas karena hilangnya status-status yang dimiliki selama ini. Oleh karena itu, perlunya usaha preventif, untuk itu baik dengan persiapan fisik, persiapan ekonomi maupun persiapan psikologik.

Agar para lanjut usia dan purnawirawan (pensiunan) tetap memiliki masa tua yang sehat produktif, bahagia dan sejahtera serta berguna bagi keluarga dan masyarakat, maka ada beberapa saran yang perlu diperhatikan, antara lain: perlunya persiapan memasuki usia lanjut yaitu dengan mempersiapkan hari tua sedini mungkin akan lebih baik daripada tidak, yaitu dengan pembudayaan hidup sehat dengan membiasakan olahraga yang teratur, mengonsumsi makanan yang sehat. Adanya kesadaran menabung, asuransi kesehatan, asuransi hari tua, sehingga akan lebih terjamin hidupnya dan tidak merepotkan anggota keluarga dan masyarakat. Pembinaan karier baru melalui pengembangan hobi yang menghasilkan, agar dapat membantu penghasilan dan kebosanan hidup. Pembentukan kelompok usaha bersama (Kube) pada kelompok lanjut usia ini akan lebih baik, karena akan meningkatkan motivasi kerja, motivasi hidup, aktivitas sosial yang semuanya ini akan memberikan kegairahan, merasa ada gunanya, dan menunda ketuaan dan akhirnya post power syndrom dapat dicegah.

Pustaka Acuan

- Birren, J.E dan Sloone, R.B. (1980) *Handbook of Mental Health and Aging* New York: Prentice Hall Inc
- Biro Pusat Statistik. (2011) *Data Biro*. Jakarta
- Elizabeth Yuli Astuti. (1992) *Studi tentang Hubungan Persiapan Diri dengan Kecemasan Menghadapi Pensiun Pada Karyawan Non-Edukatif Gol. II di UGM*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM
- Evilinda, M. (1995) *Dukungan Sosial pada Masa Pensiun*. Jakarta: Fakultas Psikologi UI
- Fajar Astuti Wulandari. (2001) *Hubungan antara Dukungan Sosial dengan Kecemasan Menghadapi Pensiun pada Guru yang Memiliki Pekerjaan Sampingan*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM
- Fatimah Khusnayati. (2009) *Kaitan antara Kasih Sayang pada Lanjut Usia dengan Hubungan Interpersonal dan Dukungan Sosial*. Yogyakarta: Program Magister Psikologi Fakultas Psikologi UGM
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini. (1996) *Penerapan Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hadi, E. (2009) *Post Power Syndrome*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM
- Havighurst, R.J. (1953) *Human Development and Education*. New York, London Toronto: Longmans, Greenandco
- Harristanti. (1996) *Hubungan antara Dukungan Sosial dan Penerimaan Diri Penyandang Cacat Tubuh*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM
- Hurlock, E.B. (1994) *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Irene Trisno Ayu. (2009) *Hubungan antara Kepribadian Tangguh dan Kebahagiaan pada Lanjut Usia yang Pensiun*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM
- Djamaludin Ancok. (1992) *Usia Tua dan Permasalahannya*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM
- Karsono. (1989) *Hubungan antara Kecemasan dalam Menghadapi Masa Pensiun dengan Semangat Kerja Karyawan pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM
- Mappiare, A. (2009) *Psikologi Seorang Dewasa*. Surabaya: Usaha Nasional
- Mayor, B. Cooper, M.L; Zubek, J.M; Cozwlaireli, C and Kichards, C. (1997) *Mixed Messages: Implications of Social Conflict and Social Support Within Close Relationships for Adjustment to a Stressful Life Event*. Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 72, No. 6, p-1349-1363
- Moeryono, S. (1977) *Perubahan Anatomi Proses Menjadi Tua*. Semarang: Fakultas Kedokteran UNDIP dan RS. Dr. Karyadi
- Nice. (2008) *Penyesuaian Diri Lansia: Perkembangan Emosi* (artikel). Nttp: www.bruce-daven.com. Diakses 2 januari 2013
- Purnamasari, SE. (1998) *Hubungan antara Sindrom Pasca Kekuasaan pada Pensiunan*

- Karyawan Pertamina Golongan Pimpinan di Surabaya dengan Kepuasan Hidup*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM
- Radioputro. (1975) *Perubahan-perubahan Neuro Indoktrinal dan Psikis pada Masa Pensiun*. Majalah Berkala Kedokteran Gadjah Mada
- Rasimin. (1989) *Pensiun dan Karier*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM
- Rini, J.S. (2001) *Pensiun dan Pengaruhnya*. <http://www-epsikologi.com> . Diakses 2 Januari 2013
- Sarason, I.G. Levine; H.M. Bashom J.R.B dan Sarason, B.K. (1983) *Assessing Social Support the Social Support Questionnaire*. Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 44 P 127-139
- Setyonegoro, K. (1977) *Aspek Kesehatan Jiwa dari Geriatri*. Semarang: Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro
- Sofia Retnowati. (2004) *Model Integrasi Penyebab dan Penanganan Depresi pada Remaja*. Yogyakarta: UGM
- Suharsimi Arikunto. (2009) *Manajemen Penelitian*. Jakarta : rineka Cipta.
- Susamar. (1976) *Social Support as Coping Assistance*. Journal of Consulting and Clinical Psychology Vol. 4. 416-423
- Vita, E.Y. (2004) *Hubungan antara Dukungan Sosial dengan Kesepian pada Masa Pensiun*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM
- Yenti, M; Elfida, D dan Aryani, L. (2006) *Hubungan antara Pemenuhan Rasa Aman dan Kasih Sayang dengan Penyesuaian Diri pada Teman Sebaya di Sekolah*. Jurnal Psikologi, 2 (1), 19-26

Kualitas Sumber Daya Nelayan Tradisional di Desa Tunggulsari Kabupaten Rembang

Fishermen Human Quality in Tunggulsari Village Rembang Regency

Andayani Listyawati

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial R.I
Jln Kesejahteraan Sosial No 1, Nitipuran, Yogyakarta. E-mail: <andayani307@yahoo.com>
Diterima 27 September 2013, direvisi 15 Januari, disetujui 17 Februari 2014.

Abstract

Traditional fishermen are part of a society with low level of welfare. Generally, traditional fishermen exploit sea treasury with simple instruments, low capital and depending on season. The fishes they get are still oriented for daily consumption (subsistence), rather than to sell or reinvest for a bigger fishery business. The research on traditional fishermen in Tanjungsari Village is meant to describe human resources enhancement to access education and skill on oceanic and fishery resources. The approach used in this research is qualitative descriptive, data gathering are implemented through interview and documentary analysis technique, and data analysed through qualitative-descriptive technique. The result shows that human resources of traditional fishermen relatively are low. The indication can be seen from their education and skill related to fishery, that have an impact on the ability to solve their poverty and enhance their welfare. To increase their lives level, it is recommended that traditional fishermen should be given access to education, especially their skill to manage sea and fishery resources based on social value and culture of traditional fishermen community.

Keywords:

Human Resources Quality-Traditional Fishermen

Abstrak

Nelayan tradisional merupakan bagian dari anggota masyarakat yang mempunyai tingkat kesejahteraan paling rendah. Pada umumnya nelayan tradisional memanfaatkan sumber daya kelautan dengan peralatan tangkap sederhana, modal usaha kecil, dan sangat dipengaruhi musim. Hasil tangkapan ikan masih berorientasi pada pemenuhan konsumsi sehari-hari (*subsistence*) daripada dijual dan diinvestasikan untuk pengembangan usaha. Penelitian Kualitas Sumber Daya Nelayan Tradisional di Desa Tunggulsari, Kabupaten Rembang merupakan penelitian deskriptif dengan tujuan mendeskripsikan berbagai upaya peningkatan sumber daya nelayan tradisional melalui kesempatan mengakses pendidikan dan keterampilan mengelola sumber hayati kelautan dan perikanan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan telaah dokumen. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa sumber daya nelayan tradisional relatif rendah. Indikasi ini tampak pada rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang terkait dengan kenelayanan, sehingga berdampak pada kemampuan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kemiskinan. Dalam rangka memperbaiki taraf hidup, direkomendasikan program pemberdayaan berupa peningkatan kualitas sumber daya nelayan tradisional melalui upaya kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih layak, khususnya keterampilan mengelola sumber daya perikanan dan kelautan yang bertumpu pada keberadaan pranata sosial budaya masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional.

Kata Kunci:

Kualitas Sumber Daya–Nelayan Tradisional

A. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan wilayah laut sangat luas. Di dalam laut tersebut terkandung keanekaragaman potensi sumber daya kelautan sangat besar potensi terutama di bidang perikanan yang sangat melimpah. Secara teoritis, dengan kekayaan laut yang demikian besar nelayan mampu hidup

berkecukupan. Namun realitas menunjukkan, bahwa tidak semua nelayan dapat menikmati, hanya sekelompok kecil nelayan yang hidup berkecukupan. Selebihnya, sebagian besar menghadapi kesulitan memperoleh hasil laut secara optimal sehingga tetap hidup dalam kondisi miskin. Kelompok dimaksud adalah nelayan tradisional.

Sungguh ironis, dengan sumber daya hayati laut yang luar biasa, nasib nelayan masih mengalami kesulitan hidup. Dilihat secara normatif, nelayan seharusnya hidup sejahtera terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kenyataannya, sebagian besar masyarakat nelayan terutama yang berada di daerah pesisir tersebut masih merupakan kelompok masyarakat tertinggal dibandingkan dengan komunitas lain, hal ini dapat diasumsikan sebagai sumber daya manusia yang masih rendah dalam mengelola sumber daya hayati kelautan dan perikanan. Padahal untuk menyongsong masa depan kelestarian pengelolaan potensi kelautan membutuhkan kearifan dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk mengelola dan memanfaatkannya. Berkait dengan kemiskinan nelayan tersebut, secara konseptual disebabkan oleh berbagai faktor kompleks, diantara rendahnya jam kerja efektif sebagai akibat dari keterbatasan SDM, khususnya pengetahuan dan keterampilan ekonomi produktif. Faktor lain adalah berkaitan dengan fluktuasi musim ikan, keterbatasan modal, dan jaringan perdagangan ikan yang cenderung eksploitatif terhadap nelayan tradisional.

Beberapa kajian yang mengungkap tentang kemiskinan menyebutkan, bahwa diantara kelompok masyarakat miskin, kelompok masyarakat nelayan tradisional merupakan kelompok masyarakat paling miskin (*the poorest of the poor*) dan kelompok sosial terbesar dalam populasi masyarakat nelayan di Indonesia. Hal ini memperlihatkan, bahwa sebagian besar masyarakat nelayan di Indonesia merupakan nelayan miskin, kondisi ini hampir dapat dijumpai di setiap daerah pesisir pantai, seperti nelayan pantai utara Jawa yang berada pada tingkat kesejahteraan rendah. Kemiskinan di kampung nelayan khususnya pada nelayan tradisional dan buruh nelayan menjadi fenomena umum yang banyak terjadi (Arif Satria, 2008). Hal ini diperkuat dari data (BPS, 2008) bahwa sebagian besar (63,47 persen) penduduk miskin di Indonesia berada di daerah pesisir dan perdesaan.

Berkait dengan permasalahan tersebut, pada dasarnya konsep pengentasan kemiskinan nelayan tradisional tetap menarik untuk dikaji. Berbagai upaya untuk mengentaskan

kemiskinan pada dasarnya telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui berbagai program pemberdayaan yang pada dasarnya memberi penekanan pada partisipasi seluruh masyarakat. Hal ini memberi arti bahwa setiap program atau kegiatan pengentasan kemiskinan harus melibatkan seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin. Program harus bersifat partisipatif, dalam arti membuka kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat miskin untuk membantu dirinya sendiri keluar dari keadaan miskin yang dialami.

Kondisi kemiskinan yang mengakibatkan kehidupan nelayan tidak sejahtera kehidupannya seyogyanya segera ditanggulangi. Beberapa pendapat mengasumsikan, bahwa sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan adalah dengan mengelola dan meningkatkan sumber daya nelayan, melalui pendidikan. Pendidikan bagi nelayan seyogyanya diterapkan karena pada hakekatnya merupakan *human investmen* dan *social capital*, yang akan berdampak pada kecerdasan dan kesejahteraan nelayan. Pendidikan yang memadai menjadi modal untuk menciptakan berbagai peluang kerja, sehingga dapat menjadi sumber kehidupan dan peningkatan kesejahteraan. Pendidikan yang rendah diprediksi merupakan salah satu penyebab terjadinya kemiskinan baik ekonomi, sosial, maupun budaya. Berdasarkan pendataan dari berbagai sumber diketahui, bahwa sumber daya manusia nelayan paling tinggi sebatas tamat Sekolah Dasar (19,6 persen), dan tidak tamat Sekolah Dasar (79,5persen) akibatnya kemampuan untuk mengelola berbagai sumber daya alam laut dan pesisir sangat terbatas. Berkait dengan konteks tersebut, seyogyanya dilaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia nelayan seperti pendidikan dan keterampilan melalui program sekolah lapangan, dengan harapan nelayan akan lebih terbuka luas wawasan dan ilmu pengetahuannya dalam teknologi penangkapan ikan untuk mendukung pekerjaan sebagai nelayan. Mengingat sedemikian pentingnya pendidikan bagi nelayan tradisional, seyogyanya ada kajian yang membahas aspek pendidikan bagi nelayan, supaya nelayan mempunyai kemandirian, kompetensi, dan kapasitas memadai

dalam mengeksploitasi sumber hayati laut untuk mengatasi kesulitan hidup. Berdasarkan hal tersebut kajian ini dilaksanakan.

Merujuk pada kondisi di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana upaya meningkatkan kualitas sumber daya nelayan tradisional. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan upaya meningkatkan sumber daya nelayan tradisional. Manfaat hasil kajian ini, pertama sebagai salah satu masukan bagi Kementerian Sosial RI dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan upaya peningkatan sumber daya dan kesejahteraan sosial keluarga nelayan tradisional di pesisir. Kedua, menambah referensi tentang cara meningkatkan sumber daya manusia nelayan tradisional.

B. Kajian Teori

Kehidupan nelayan tradisional identik dengan kemiskinan, kekurangan, dan ketidakberdayaan. Kemiskinan yang dialami oleh nelayan tradisional atau buruh nelayan memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi, apabila ada kebutuhan mendadak yang cenderung membuat mereka menjadi *collapse*. Penyebabnya sangat kompleks, antara lain faktor alam dan musim yang kadang sulit ditebak (fluktuatif), ketinggalan teknologi, kekurangan modal, dan tingkat pendidikan.

Pada dasarnya kemiskinan nelayan dilatarbelakangi oleh dua faktor, pertama faktor internal berupa keterbatasan kualitas sumber daya manusia (SDM), keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan, hubungan kerja (pemilik perahu nelayan dengan buruh) dalam organisasi penangkapan yang dianggap kurang menguntungkan nelayan dan buruh, kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan, ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut, gaya hidup yang dipandang *boros* sehingga kurang berorientasi ke masa depan. Kedua, faktor eksternal berkaitan dengan kondisi di luar diri dan aktivitas kerja nelayan, meliputi: kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan partial, sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara, kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran dari wilayah darat, praktek

penangkapan dengan bahan kimia, perusakan terumbu karang dan konversi hutan bakau di kawasan pesisir, serta penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan (Kusnadi, 2008:19).

Realitas menunjukkan, bahwa nelayan merupakan kelompok sosial yang paling terpuruk kesejahteraan hidupnya dan merupakan bukti paling konkrit tentang kemiskinan di desa pesisir. Boedisantoso mengemukakan, bahwa sebagian besar nelayan tradisional belum mampu mencukupi kebutuhan pokok minimum secara layak baik kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik, maupun kebutuhan pendidikan (Tateki YT, 2011:8). Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang dan barang. Nilai kebutuhan minimum atau kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan, penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin (Ahmad Avenroza dkk, 2007: 9). Pada aspek ekonomi tampak pada pendapatan nelayan umumnya masih rendah, aspek sosial tampak bahwa nelayan memang tidak terwujud dalam bentuk keterasingan karena secara fisik mereka tidak lagi dapat dikatakan terisolir atau terasing. Keterbatasan politik lebih berwujud dalam bentuk ketidakmampuan dalam mengambil bagian pada kegiatan ekonomi pasar secara menguntungkan, yang ditunjukkan oleh lemahnya mereka mengembangkan organisasi keluar lingkungan kerabat mereka atau komunitas lokal. Keterbatasan dalam pendidikan berwujud pada relatif rendahnya sumber daya manusianya. Kenyataan ini mengakibatkan masyarakat nelayan mengalami nasib terpinggirkan (*marginalized*) dari proses kemajuan.

Terjadinya kemiskinan nelayan diklasifikasikan sebagai kemiskinan struktural dan absolut. Kemiskinan struktural disebabkan oleh struktur sosial yang ada pada mereka, sehingga tidak dapat memanfaatkan sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan ini digambarkan sebagai: rendahnya akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, lemahnya akses pelayanan dalam memperoleh permodalan sesuai kebutuhan, tidak mempunyai kekuatan dalam menentukan harga, terbatasnya penguasaan alat produksi, terbatasnya wilayah penangkapan karena alat

produksi terbatas. Kemiskinan absolut didefinisikan sebagai kemiskinan yang ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja (Ahmad Avenroza dkk, 2007:6).

Membahas lebih jauh tentang kemiskinan nelayan terlihat, bahwa sebagian masyarakat nelayan tradisional berada dalam kungkungan kemiskinan yang disebabkan oleh tidak adanya modal dan ketiadaan akses ke berbagai lembaga keuangan. Fenomena tersebut masih terus berlangsung hingga sekarang, dan dampak lebih lanjut yang dirasakan nelayan adalah semakin menurunnya tingkat pendapatan dan sulitnya memperoleh modal usaha. Terkait dengan kondisi tersebut Kementerian Sosial telah menggariskan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan, bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan materiil, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial.

Berbagai tekanan sosial ekonomi yang dialami nelayan tradisional menjadikan mereka semakin terpuruk. Keterpurukan mereka selain dipengaruhi oleh sejumlah kelemahan internal seperti keterbatasan pendidikan, keterampilan, dan kurangnya kesempatan mengakses teknologi perikanan, juga ada sejumlah faktor eksternal seperti posisi tawar nelayan yang lemah di hadapan tengkulak, dan jaringan perdagangan ikan yang eksploitatif terhadap nelayan tradisional. Untuk memutus mata rantai kelemahan tersebut diperlukan program pemberdayaan yang diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) secara memadai. Realita ini menunjukkan, bahwa meningkatkan sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu program pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan tradisional agar mampu memperbaiki dan meningkatkan taraf kesejahteraan (www.bunghatta.ac.id.)

Indonesia memiliki sumber alam laut sangat besar, tetapi potensi tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan secara

signifikan, nasib nelayan seakan diam di tempat. Pada kenyataannya permasalahan yang dihadapi pada kehidupan sebagian besar nelayan adalah ketidakberdayaan dan ketertinggalan dibanding dengan komunitas lain. Salah satu penyebab ketertinggalan mereka adalah tingkat pendidikan masih rendah. Dalam kondisi keterbatasan pendidikan dan keterampilan, memper-sulit mereka dalam mendayagunakan sumber daya wilayah pesisir dan laut secara maksimal. Adapun permasalahan selain rendahnya tingkat pendidikan, meliputi miskin pengetahuan dan teknologi untuk menunjang pekerjaannya, kurang tersedia wadah pekerjaan informal, kurangnya daya kreativitas, dan belum adanya perlindungan terhadap nelayan dari jeratan para tengkulak (Muhammad Badiran, 2009: 2).

Salah satu hak bagi manusia adalah memperoleh pendidikan, demikian juga seorang nelayan, berhak memperoleh pendidikan karena pendidikan pada hakekatnya sebagai *human investmen* dan *social capital* untuk kepentingan pembangunan daerah dan nasional. Pendidikan yang berkualitas dan terjangkau baik melalui jalur pendidikan sekolah (formal) maupun luar sekolah (non-formal) berdampak pada kualitas kecerdasan, kecakapan (*skill*), dan kesejahteraan nelayan. Hal ini dimungkinkan mengingat terjadinya kemiskinan pada nelayan tradisional bukan semata-mata berkait masalah ekonomi, tetapi juga sebagai akibat dari pendidikan yang rendah. Seperti yang dikutip dari Makalah: Sejarah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan FKIP Unpad menyebutkan bahwa bahwa kualitas Sumber daya manusia disektor perikanan dan kelautan dilihat dari tingkat pendidikan mayoritas tidak tamat Sekolah Dasar (79,5 persen), tamat Sekolah Dasar (19,6 persen), SMP (1,9 persen), dan SMA (1,4 persen). Melalui pendidikan akan mengangkat harkat dan martabat kehidupan masyarakat nelayan maupun masyarakat lainnya yang terkait dengan sumber daya kelautan dan pesisir. Usaha kearah ini harus bernuansa pada peningkatan kemakmuran nelayan, terutama nelayan kecil dan petani ikan. Salah satu upaya seyogyanya diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM dibidang perikanan dan kelautan baik melalui pendidikan formal dan non formal, seperti mengembangkan pendidikan tinggi perikanan yang setara dengan bangsa

lain, mengembangkan pendidikan kejuruan perikanan sesuai dengan kebutuhan pengembangan perikanan, mengembangkan pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan profesionalisme SDM perikanan, dan mengembangkan dan memberdayakan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan serta perikanan industri (Makalah: Sejarah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, FKIP Unpad, 2014).

C. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian deskriptif ini menguraikan tentang kondisi riil masyarakat nelayan tradisional di daerah pesisir, dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Lokasi penelitian di daerah pantai utara (Pantura) Jawa, khususnya di daerah berpenduduk mayoritas nelayan tradisional, yaitu di desa Tunggulsari, Kecamatan Kaliori, kabupaten Rembang.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara, menggunakan panduan wawancara (*interview guide*). Sumber data adalah 30 orang responden yang memberikan informasi secara langsung berkaitan dengan topik permasalahan, yaitu nelayan tradisional. Sumber data pendukung adalah aparat desa, tokoh masyarakat, dan data dokumen. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif yang menekankan pada persoalan kehidupan nelayan di lokasi penelitian dan upaya meningkatkan kualitas sumber daya nelayan tradisional agar mempunyai pengetahuan atau pendidikan lebih meningkat, dalam mengelola potensi dan sumber daya setempat secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan.

D. Hasil Penelitian: Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Nelayan Tradisional

Pada dasarnya wujud perilaku manusia merupakan hasil dari warisan sosial dan budaya. Pola perilaku memperlihatkan suatu tingkat keteraturan yang tinggi, karena orang akan cenderung meniru perilaku orang lain dan akan mengulang pola-pola perilakunya sendiri terus menerus. Pada satu sisi ada kecenderungan untuk menolak perubahan, baik karena kebiasaan yang menguntungkan maupun untuk mempertahankan kebiasaan yang sudah mapan. Di sisi lain, ada kecenderungan untuk menerima

perubahan karena berbagai kebiasaan lama yang dianggap tidak lagi menguntungkan. Kondisi ini menyiratkan bahwa kemampuan nelayan sangat terbatas dalam mengelola sumber daya alam pesisir. Atas dasar ini, maka seyogyanya mata rantai pendidikan yang rendah di kalangan nelayan tradisional tidak diwariskan dan dilanggengkan dari generasi ke generasi. Sebaliknya, diperlukan regenerasi nelayan yang memiliki kemandirian, kompetensi dan kapasitas yang memadai.

Dalam rangka mengantisipasi kondisi di atas, diperlukan adanya institusi yang berkompeten menyelenggarakan program peningkatan SDM nelayan, di antaranya melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi nelayan atau anak nelayan. Salah satu institusi pemerintah yang mempunyai perhatian serius dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDMKP), KKP menerapkan program pendidikan khusus nelayan, yaitu tingkat SLTA perikanan, Akademi Perikanan, hingga Sekolah Tinggi Perikanan dalam bentuk *closed loop and teaching factory*, maksudnya segmen pendidikan khusus ditujukan kepada anak nelayan dengan komposisi peruntukan 40 persen khusus anak nelayan pembudidaya, 40 persen untuk masyarakat umum, dan 20 persen mitra. Pendidikan yang disediakan berupa Sekolah Menengah Usaha Perikanan (SMUP) dan Sekolah Tinggi Perikanan (STP) yang bebas biaya dan disediakan asrama serta sekolah (tempat pendidikan) dengan pola bekerja sekaligus belajar (www.bunghatta.ac.id: nelayan cerdas-nelayan mandiri, 2013).

Khusus bagi anak nelayan yang waktunya lebih banyak tersita untuk melaut, KKP mengadakan suatu program berupa program sekolah lapangan. Waktu belajar disesuaikan dengan jadwal anak, sedangkan kurikulum disesuaikan dengan materi yang mudah dipahami anak. Model sekolah semacam ini bertujuan untuk menjaring agar anak putus sekolah SD mendapatkan ijazah setara SLTP. Pelaksanaan ini telah dimulai pada tahun 2012 dengan pendirian sekolah lapangan di empat lokasi, yaitu Kabupaten Parigi Moutong, Sulteng; Cilacap, Jateng; Belawan, Sumut; dan Kupang, NTT.

Pada tahun 2013 sekolah lapangan diperluas menjadi 10 lokasi meliputi Kep. Riau, Sibolga, Tegal, Pontianak, Bitung, Sulut, Ambon, Sorong, Lombok Timur, dan NTB (Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2013). Penunjukkan lokasi untuk sekolah lapangan di atas berdasar pertimbangan, bahwa di tempat tersebut merupakan daerah mayoritas nelayan tradisional bermukim.

Pada dasarnya setiap etnis masyarakat mempunyai tradisi tertentu yang tidak sama antar daerah, demikian juga nelayan tradisional yang bertempat tinggal di pesisir pantai utara, khususnya desa Tunggulsari, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang seluruhnya berasal dari etnis Jawa. Menurut Kusnadi, etnis seperti ini merupakan kelompok masyarakat yang terikat oleh kebudayaan Jawa yang secara umum bersifat *egaliter* (Tateki YT, 2010:29). Dalam kebudayaan Jawa aspek dominan yang terlihat seperti sikap toleransi, *tepa selira*, dan santun masih mewarnai kebudayaan pada nelayan setempat. Hal ini dapat diungkap berdasarkan pendataan bahwa hubungan kekeluargaan di antara masyarakat setempat cukup erat.

Penduduk desa Tunggulsari merupakan komunitas nelayan yang bersifat turun temurun mewarisi orang tua bahkan nenek moyang, sehingga jarang yang bekerja di luar kenelayanan. Nelayan tersebut termasuk nelayan tradisional, hanya memanfaatkan sumber daya perikanan dengan peralatan tangkap tradisional, seperti perahu kecil yang hanya memuat dua-tiga orang, jarak jelajah terbatas, alat tangkap sederhana, modal usaha yang kecil, dan organisasi penangkapan yang sederhana. Bekerja sebagai nelayan merupakan pilihan hidup, walaupun penghasilan yang diterima relatif terbatas. Hal ini berkait dengan rendahnya produksi yang disebabkan oleh permasalahan teknis, seperti keterbatasan jangkauan penangkapan, alat tangkap yang masih sederhana bahkan terlihat adanya ketidakadilan dalam pembagian hasil tangkapan antara pemilik modal dengan nelayan (patron–klien).

Potensi dan sumber daya alam berupa hasil laut khususnya perikanan setempat cukup besar, sekitar 17.000 orang (2,9 persen) dari sejumlah penduduk Rembang yang mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan. Namun

kondisi ini seakan bertolak belakang, di satu sisi ada potensi dan sumber daya alam yang cukup melimpah, di sisi lain sumber daya manusia kurang mendukung sehingga hasil yang diperoleh tidak bisa maksimal. Kehidupan nelayan menjadi kurang, bahkan tidak sejahtera, sementara indikator kesejahteraan harus terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial.

Seluruh penduduk desa Tunggulsari merupakan etnis Jawa, mempunyai hubungan persaudaraan sangat erat antar penduduk, sifat gotong royong, dan kesetiakawanan melekat dalam kehidupan masyarakat. Desa Tunggulsari mempunyai wilayah seluas 62.250 hektar dihuni penduduk cukup banyak. Berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah penduduk, laki-laki 444 jiwa dan perempuan 424 jiwa, mayoritas 398 jiwa (78,35 persen) sebagai nelayan yang merupakan pekerjaan pokok. Namun demikian ada penduduk yang bekerja di luar nelayan, seperti bengkel dan montir, berjumlah dua orang, 0,40 persen (Monografi Desa, 2010). Dari populasi penduduk tersebut, 30 orang di antaranya dipilih sebagai responden. Tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Tingkat Pendidikan Responden

N0	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persen
1	SD/ sederajat	15	50
2	SLTP/ sederajat	12	40
3	SLTA/ sederajat	3	10
Jumlah		30	100

Sumber: Jawaban Responden 2013 (N=30)

Hasil rekapitulasi di atas memperlihatkan, bahwa nelayan tradisional di Desa Tunggulsari mempunyai ciri yang sama, yaitu terbatas pendidikannya. Tingkat pendidikan 30 responden relatif rendah karena sebatas tamat tingkat SD dan SLTP, berjumlah 27 orang (90 persen) dan hanya tiga orang (10 persen) mampu menamatkan SLTA. Pendidikan yang rendah disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, sehingga tidak mampu membiayai atau melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Mereka lebih mengutamakan melaut, karena secara ekonomi lebih menguntungkan daripada bersekolah, melaut

merupakan pekerjaan turun temurun yang diwariskan dari pendahulunya. Dengan pendidikan rendah, mempersulit nelayan tradisional memilih atau memperoleh pekerjaan lain selain menjadi nelayan, karena pendidikan rendah membatasi seseorang untuk terserap dalam akses sumber ekonomi lain yang lebih baik, sehingga seseorang dengan tingkat pendidikan rendah cenderung mengalami kemiskinan dan ketertinggalan, tidak terkecuali nelayan. Kualitas SDM nelayan yang rendah tidak terlepas dari biaya pendidikan yang tinggi, faktor penghambat nelayan tradisional untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Akibat lebih lanjut mereka tidak mampu memberikan pendidikan formal yang cukup bagi anak, mereka terpaksa harus mempekerjakan anak seperti menjadi buruh nelayan, membantu melaut, mencari ikan tercecer yang bisa dijual, atau menjadi buruh di tempat pelelangan ikan (TPI).

Responden yang berpendidikan di atas SLTA tidak ada, berdasarkan runutan wawancara terungkap, bahwa apabila mereka melanjutkan pendidikan setelah SLTP harus keluar dari desa dan menempuh perjalanan cukup jauh, karena di sekitar tempat tinggal tidak ada sekolah SLTA. Untuk melanjutkan pendidikan diperlukan semangat tinggi untuk maju. Hal tersebut yang tidak dimiliki oleh setiap orang di Desa Tunjungsari, karena pada umumnya mereka berpendapat tidak perlu bersekolah tinggi karena pada akhirnya tetap menjadi nelayan. Mereka tidak pernah berpikir, bahwa menjadi nelayan yang terampil mengelola potensi dan sumber laut secara maksimal didasari oleh pendidikan dan pengetahuan yang cukup memadai untuk meningkatkan produktivitas. Secara logika produktivitas yang rendah akan menyebabkan rendahnya pendapatan. Hal ini menjadi faktor pendorong dengan mengharap agar anak-anaknya pada masa mendatang harus memperoleh pendidikan lebih memadai, minimal pada tingkatan sekolah menengah bahkan pendidikan tinggi. Asumsinya, dengan pendidikan yang memadai, kesempatan memperoleh pekerjaan akan lebih baik dan lebih terbuka.

Berkait dengan permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu bentuk program kegiatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diarahkan dapat mengelola sumber

daya alam setempat melalui pendidikan baik formal maupun non formal, seperti yang dilaksanakan di desa Tunggulsari. Adapun kegiatan yang pernah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu dengan melibatkan pihak pemerintah daerah setempat bekerja sama dengan institusi sosial dan Dinas Kelautan setempat. Adapun materi pelatihan berupa pemberian bimbingan keterampilan dalam rangka untuk meningkatkan produksi hasil perikanan dan kelautan serta pengolahannya agar dapat meningkatkan nilai jual. Kegiatan ini difasilitasi oleh Dinas Kelautan sebagai pemberi materi bidang ketrampilan, pengolahan dan pemasaran, sedangkan untuk bantuan peralatan dan pemberian motivasi diperoleh dari institusi sosial setempat melalui program Usaha Ekonomis Produktif (UEP). Selanjutnya, dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan dan teknologi, yaitu dengan dilaksanakannya pendampingan untuk belajar ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) agar tidak *gagap teknologi*. Hal ini bermitra dengan Dinas Pendidikan setempat. Sehingga kedepannya dapat melanjutkan pendidikan formalnya kejenjang yang lebih tinggi atau bisa melalui program *Kejar Paket*. Dalam serangkaian pelaksanaan program peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa ini dilaksanakan pada waktu setelah selesai aktivitas melaut sehingga tidak mengganggu pekerjaannya. Adapun pesertanya, yaitu penduduk yang masih berusia muda, mempunyai motivasi melanjutkan pendidikannya minimal sampai sekolah menengah atas (SLTA). Program yang telah berjalan ini, perlu mendapat apresiasi karena mempunyai motivasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya terutama dibidang perikanan dan kelautan. Kegiatan yang telah berjalan ini dipandang kurang maksimal disebabkan kurang adanya pendampingan dan bimbingan lanjut dari pihak berkompeten disebabkan berbagai kendala, diantaranya perencanaan program yang tidak berkelanjutan dan sinergis. Hal ini merupakan suatu bentuk kelemahan yang seyogyanya diperbaiki agar dalam perencanaan dan pelaksanaan program dapat berjalan secara tuntas.

Melengkapi kegiatan yang telah dilakukan tersebut, diarahkan untuk meningkatkan sumberdaya manusia khususnya dibidang

pendidikan formal. Hal ini seyogyanya dapat mengacu pada sistem sekolah lapangan yang telah dilaksanakan di daerah lain yang mempunyai potensi sumber laut cukup besar. Adapun pesertanya anak usia sekolah, dari usia tingkat SD, SLTP, dan SLTA hingga usia perguruan tinggi. Kegiatan ini diinisiasi oleh Dinas Kelautan dan Dinas Pendidikan. Pelaksanaan program ini cukup fleksibel karena disesuaikan agar tidak bersamaan dengan waktu kegiatan melaut, sehingga tidak mengganggu aktivitas melaut. Pada umumnya nelayan Tunggulsari melaut dilakukan pada pagi hingga siang hari antara jam 05.00 s.d. 13.00 WIB, sehingga pelaksanaan belajar dapat dilakukan setelah aktivitas melaut. Materi pelajaran sesuai dengan kurikulum pada pendidikan formal yang menunjang pada kegiatan kenelayanan, seperti pengolahan sumber daya setempat diwujudkan dalam keterampilan pembuatan garam, tambak bandeng, udang, dan pengelolaan usaha, serta manajemen pemasaran hasil. Melalui sekolah ini diharapkan anak menjadi tidak putus sekolah, mempunyai bekal pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skill*) dalam mengelola sumber daya alam. Dengan pernyataan lain pendidikan pada anak nelayan ini mampu meningkatkan kualitas SDM pada nelayan tradisional dimasa mendatang. Kegiatan ini merupakan upaya mengatasi lingkaran kemiskinan yang telah berlangsung lama dan cenderung sulit diputus.

Dalam pelaksanaan program tersebut perlu mendapat dukungan dari masyarakat setempat dan instansi pemerintah terkait, seperti yang telah dilaksanakan oleh Instansi Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Instansi Pendidikan diatas dengan membuka program studi ilmu perikanan dan kelautan. Gagasan ini dapat diterapkan di lokasi penelitian yang mempunyai permasalahan relatif sama. Realisasi program ini hendaknya memiliki relevansi dengan pendidikan dan *setting* pembelajaran yang disesuaikan dengan kehidupan nelayan dan ditujukan untuk mengembangkan keterampilan, dan keilmuan serta wawasan sehingga mereka mempunyai kemampuan mengelola sumber daya alam pesisir berupa keterampilan menggunakan teknologi tepat guna tanpa menghilangkan nilai positif yang berlaku dimasyarakat. Nantinya diharap-

kan menjadi generasi nelayan yang terhindar dari stigma marginalisasi nelayan miskin.

F. Penutup

Kemiskinan nelayan tradisional di Desa Tunggulsari, Kabupaten Rembang disebabkan kualitas sumber daya manusia berupa pendidikan relatif rendah, sehingga mereka kurang mampu mengelola sumber daya alam berupa hasil kelautan dan perikanan. Pada dasarnya sumber tersebut merupakan potensi yang apabila dikelola dan dikembangkan secara maksimal dapat memberikan penghidupan layak bagi keluarga nelayan tradisional.

Guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada nelayan tradisional, pemerintah perlu menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan dengan memberikan kesempatan mengikuti pendidikan sekolah (disebut sekolah lapangan), baik bagi nelayan berusia muda maupun pada anak nelayan. Diharapkan anak-anak nelayan yang sudah menginjak remaja telah selesai menempuh pendidikan dasar agar dapat meningkatkan harkat dan martabat kehidupan. Melalui pendidikan sekolah (lapangan), anak nelayan tradisional diharapkan memiliki pengetahuan, dan wawasan tentang teknologi tepat guna dalam mengelola potensi dan sumber kelautan serta perikanan secara maksimal. Hal lain yang tidak kalah penting adalah perlunya pelatihan keterampilan kenelayanan yang berkait dengan teknologi penangkapan ikan, pengelolaan pasca panen, dan jejaring serta manajemen usaha sehingga mereka mampu mengembangkan usaha secara maksimal. Pemberdayaan nelayan melalui pendidikan berbasis komunitas nelayan ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan berbagai pihak terkait, termasuk kalangan akademisi dan praktisi pendidikan untuk menjalin mitra, dan agar berperan secara aktif memecahkan berbagai persoalan kompleks yang dihadapi nelayan tradisional dengan tetap bertumpu pada pranata sosial budaya masyarakat nelayan.

Pustaka Acuan

Ahmad Avenroza dkk, (2007), *Analisis dan Perhitungan Tingkat kemiskinan Tahun 2007*, Jakarta:

- Aria Satria, *Negeri Bahari yang Melupakan Nelayan*, Senin, 9 Juni 2008, PRI/Kompas Images
- Kusnadi, (2008), *Akar Kemiskinan Nelayan*, Yogyakarta:LKiS
- Lexy Maleong,(2009), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosdakarya
- Muhammad Idrus,(2007), *Metode-Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta : UII Press
- Muhammad Badiran,(2009), *Kajian Model Pendidikan Dasar Untuk Anak Masyarakat Nelayan Di Sumatra Utara*, Kementerian Pendidikan Nasional
- Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, (2013), Jakarta
- Radi R dan Riant Nugroho,(2007), *Managemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta : Elex Medio Komputindo
- Suseno,(2007), *Menuju Perikanan Berkelanjutan*, Jakarta:Pustaka Cidesindo
- Sutomo, (2008), *Strategi-Strategi pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tukiran,dkk, (2007), *Sumber Daya Manusia Tantangan Masa Depan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Tateki Yoga T, dkk, (2010), *Persepsi Nelayan Tradisional dan keluarganya Tentang Upaya Penganekaragaman Mata Pencarian untuk Meningkatkan kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: Citra Media
- _____. (2013). [www.bunghatta.ac.id:nelayan cerdas-nelayan mandiri](http://www.bunghatta.ac.id:nelayan%20cerdas-nelayan%20mandiri), 13 Juli 2013
- _____. (2010) Profil Desa Tunggulsari, Kec. Kaliori, Kab.Rembang, 2010
- _____. (200) Undang-undang NO 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Kemensos.
- _____. (2014) Makalah: Sejarah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Bandung: FKIP Unpad.
- _____. (2008). Biro Pusat Statistik,(2008), *Nelayan dalam Angka*. BPS: Jakarta.